



KARATON
NGAYOGYAKARTA
HADININGRAT



TINGALAN
JUMENENGAN DALEM

PROCEEDING

International Symposium on Javanese Culture

Volume 7, 2026

Symposium Proceeding
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JAVANESE CULTURE 2024
ISSN : 3032-6192
Copyright 2025 by Kraton Yogyakarta

Proceeding International Symposium on Javanese Culture Volume 7, 2026

Hak Cipta ©2026 pada Penulis
Desain Sampul : Fani Atmanti
Layout Buku : Sumarti

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

Dicetak dan diperbanyak oleh CV. Andi Offset
Email: andioffsetorder@gmail.com
Jl. Beo 38-40 Yogyakarta 55281
Telp.: (0274) 561881 (Hunting),
Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281

 Cetakan Pertama: I-Yogyakarta, 2026
xvi + 228 hlm.; 21 x 29,7 cm

EDITOR & REVIEWER

- ✓ Prof. Dr. Drs. R.M. Pramutomo, M. Hum.,
<https://scholar.google.com/citations?user=ac6fVSsAAAAJ&hl=en>
<https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/scopusanalysis/6088822>
- ✓ Prof. Koji Miyazaki
<https://researchmap.jp/read0008093?lang=en>
- ✓ Dr. Verena Meyer
<https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/verena-meyer#tab-1>
<https://leidenuniv.academia.edu/VerenaMeyer>
- ✓ Dr. Hélène Njoto Feillard
<https://www.efeo.fr/chercheurs.php?code=1361&l=EN&ch=89>
<https://www.researchgate.net/profile/Helene-Njoto>
- ✓ Prof. Ir. Bakti Setiawan, MA., Ph.D.
<https://scholar.google.com/citations?user=A5a--wYAAAAJ&hl=id>
<https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6016763/?view=iprs>

PENULIS

Rizky Ramadhani Satrio Wibisono, S.Ark.
Saifuddin Alif Nurdianto, M.Pd.
Anastasia Melati Listyorini, S.Sn., M.Hum.
Muhammad Faiz, S.Ark., M.A.
Thibburruhany, M.Sos.
M. Yaser Arafat, M.A.
Rahmadi Fajar Himawan, S.Sos.
Nuzuli Ziadatun Ni'mah, S.T., M.A.
Asst. Prof. Ts. Dr. Irina Safitri Zen



DAFTAR ISI

Daftar Isi	v
Panitia Penyelenggara	vii
Sambutan Ketua Panitia	ix
Agenda	xi
Abstracts.....	xvi
Mini Profiles Editor	15
Prof. Dr. Drs. R.M. Pramutomo, M. Hum.,	15
Mini Profiles Reviewer	15
Prof. Koji Miyazaki	16
Dr. Verena Meyer	17
Dr. Hélène Njoto Feillard	18
Prof. Ir. Bakti (Bobi) Setiawan, MA., Ph.D.	19
Penulis	20
Rizky Ramadhani Satrio Wibisono, S.Ark.	20
Saifuddin Alif Nurdianto, M.Pd	20
Anastasia Melati Listyorini, S.Sn., M.Hum.	21
Muhammad Faiz, S.Ark., M.A.	22
Thibburruhany, M.Sos.	22
M. Yaser Arafat, MA.	23
Rahmadi Fajar Himawan, S.Sos.	24
Nuzuli Ziadatun Ni'mah, S.T., M.A.	25
Asst. Prof. Ts. Dr. Irina Safitri Zen	25
Fullpapers	
from the International Symposium on Javanese Culture Volume 7, 2026	27
Efektivitas Benteng Baluwarti dalam Peristiwa Geger Sepoy (1812):	
Sebuah Tinjauan Battlefield Archaeology	29
<i>Rizky Ramadhani Satrio Wibisono</i>	29
Kartografi Kristis Sumbu Filosofi Yogyakarta: Negosiasi Kosmologi Jawa	
dan Tata Ruang Kolonial Abad 19-21	
<i>Saifuddin Alif Nurdianto</i>	47
Dari Pendapa Sakral ke Panggung Budaya: Tari Istana dan Reartikulasi	
Ruang di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat	
<i>Anastasia Melati Listyorini</i>	64

Floating Pavilion in a Pleasure Garden: The Depiction of a Palace Garden in Panji Jayakusuma MSS JAV. 68 <i>Muhammad Faiz</i>	81
Aktivasi Arsip Visual dan Media Imersif Pelestarian Nilai Filosofis Tata Ruang Kasultanan Yogyakarta <i>Thibburruhany</i>	97
Arsitektur, Rupa, dan Ragam Hias Makam-makam Tua di Pasareyan Kagungan Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat <i>M. Yaser Arafat</i>	114
“Kini Dipagari”: Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Dalam Transisi Memori Kolektif <i>Rahmadi Fajar Himawan</i>	137
Walking Tours as Placemaking Strategy: Constructing Spatial Narratives in Jeron Beteng, Yogyakarta	161
<i>Rud Yoneko Tunggadewi, Armita Sharfina, Nuzuli Ziadatun Ni'mah</i>	161
Yogyakarta Axis Continuity: Temporal – Spatial Comparison With Beijing and Paris	181
<i>Irina Safitri Zen</i>	181

PANITIA PENYELENGGARA

Sri Sultan Hamengku Bawono Ka10

Gusti Kanjeng Ratu Hemas

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi

Pengarah

Pengarah

Pengarah

Gusti Kanjeng Ratu Hayu

Andri

Astridianti H. Utami

Wiwit Prasetyono

Radiaswari Subangun

Titan Kusuma Sakti

Rizal Wahyu Pradana

Fajar Wijanarko

Widyasari Listyowulan

Parama Andhis Wanodya

Arum Angesti Palupi

Desideria Cempaka Wijaya Murti

Lukman Awaludin

Bonaventura Yudy Pratama

Fani Atmanti

Erwita Danu Gondohutami

Media Setiaji

Vinia R. Prima

Agung Sugiyanto

Kurnia Kartikawati

Roni Guritno

Sapta Rahardjo

Bimo Unggul Yudo

Satya Bilal

Wulansari

Niken Terate Sekar

Budi Martono

Niken Anli

Bagas Amar Hakiki

Gigih Primanda

Rony Lantip

Muhammad Ramadhan

Samuel Satrio Widodo

Iqbal Yudha Anggara

Invani Lela Herliana

Ketua Panitia

Sekretaris

Bendahara

Koordinator Acara/ Event Manager

Koordinator Reviewer & Editor

Kordinator Pemateri (Call for Paper)

Tim Koordinasi Pemateri

Koordinator MC, Moderator, Seragam

Koordinator Marketing

Tim Marketing Luar Negeri

Marketing kampus umum

Koordinator Penerbitan

Koordinator Website & Registrasi

Koordinator IT

Visual Designer

Koordinator Undangan

Koordinator Media

Tim Undangan & Media

Tim Keuangan dan Logistik

Tim Keuangan dan Logistik

Among tamu

Among tamu

Among tamu

Among tamu

Koordinator Usher

Usher

Koordinator Registrasi

Registrasi

Registrasi

Registrasi

Koordinator Online Streaming

Online Operator

Online Operator

Online Operator

Koordinator Penerjemah Simultan



RM. Pranadhipta Krisswarama Aji
Valentina Endah Winarni Siwibudi
Inashifa Gardani Salsabila
Raras Puspa Nada
Muhammad Rizal
Emir Abe Putra Agastha
Bety Anggraini
Dimas Kristanto
Dimas Norohayu Dwiputro
Janoe Dhimaz Prabowo
Toni Nur Wicaksana
Heryanto Kurniawan
Haris
Wasiran

Koordinator Dokumentasi
Dokumentasi - Foto
Dokumentasi - Foto
Dokumentasi - Foto
Dokumentasi - Video
Dokumentasi - Video
Streaming
Streaming
Streaming
Streaming
Streaming
Streaming - technical team
Streaming - technical team

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JAVANESE CULTURE

Nama Lembaga : Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat

Alamat : Jl. Rotowijayan No.1, Panembahan, Kecamatan Kraton,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Email : symposium@kratonjogja.id

**SAMBUTAN KETUA PANITIA
SIMPOSIUM INTERNASIONAL BUDAYA JAWA
“Arsitektur, Tata Ruang, dan Wilayah Kesultanan Yogyakarta”
Yogyakarta, 11 April 2026**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Pamuji Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat,

- Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10, Prameswari Dalem Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan segenap Keluarga besar Keraton Yogyakarta;
- Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X serta GKBRAA Paku Alam;
- Para Anggota Keluarga Kerajaan Sahabat, para Duta Besar, Konsul, Diplomat, Rektor, Profesor, dan Cendekiawan sekalian;
- Bapak dan Ibu tamu undangan, pembicara, moderator, serta para peserta simposium yang berbahagia.

Tahun ini, Keraton Yogyakarta kembali menyelenggarakan Simposium Internasional Budaya Jawa yang ke-8 dengan mengangkat tema “*Architecture, Spatial Planning, and Territory at The Sultanate of Yogyakarta*”. Agenda ini sejatinya turut merayakan momentum ulang tahun penobatan atau *Tingalan Jumenengan Dalem* Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10 dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai *Prameswari Dalem* berdasarkan Tahun Masehi pada diperingati setiap 7 Maret.

Sejarah mencatat bahwa sejak tahun 1755, Sri Sultan Hamengku Buwono I telah meletakkan fondasi arsitektur dan tata ruang yang sangat visioner. Beliau bukan sekadar pemimpin, melainkan arsitek andal yang membangun Yogyakarta dengan corak konsentris atau mandala. Beliau menciptakan *tetenger* yang menegaskan harmonisasi antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Konsepsi *Hamemayu Hayuning Bawono* diejawantahkan secara fisik melalui Poros Filosofis—mulai dari Panggung Krapyak, Keraton, hingga Tugu Golong Gilig—yang mencerminkan siklus hidup manusia dalam filosofi *Sangkan Paraning Dumadi*. Namun, perjalanan tata ruang ini tidaklah statis. Keraton Yogyakarta menghadapi tantangan zaman, mulai dari negosiasi dengan tata ruang kolonial pada abad ke-19, peristiwa *Geger Sepehi*, hingga dinamika modern pasca-kemerdekaan RI. Melalui simposium ini, kami ingin menggali kembali bagaimana nilai-nilai Tata Rakiting Wewangunan dan batas-batas wilayah agar tetap relevan sebagai identitas kultural di tengah gerak cepat perkembangan kota.

Bapak, Ibu, dan para Peneliti yang saya muliakan,

Antusiasme terhadap simposium tahun ini sungguh luar biasa. Panitia mencatat sebanyak 132 paper yang masuk dari berbagai penjuru dunia. Setelah melalui proses kurasi yang ketat oleh para ahli—seperti Prof. Dr. Drs. R.M. Pramutomo, M. Hum., Prof. Koji Miyazaki, Dr. Verena

Mayer, Dr. Helene Njoto, dan Prof. Bakti Setiawan—telah terpilih sejumlah karya terbaik yang merepresentasikan keberagaman perspektif keilmuan.

Kajian-kajian yang akan dipaparkan mencakup spektrum yang luas, di antaranya:

- Sejarah dan Politik: Membedah Benteng Baluwarti sebagai simbol pertahanan hingga kartografi kritis sumbu filosofi.
- Seni dan Sastra: Menilik transformasi Pendapa dari ruang sakral menjadi panggung wisata, serta representasi taman keraton dalam naskah kuno.
- Arsitektur dan Arkeologi: Mengkaji ragam hias makam-makam tua hingga memori kolektif Alun-Alun Utara.
- Perencanaan Ruang dan Lanskap: Membandingkan poros-poros lain di Kota Besar di dunia, hingga strategi placemaking di kawasan *Jeron Beteng*.

Simposium ini kami rancang sebagai ruang silang pendapat dan wadah bagi para akademisi, baik senior maupun junior, untuk berbagi pemikiran. Kami membuka seluas-luasnya ragam peluang kajian, mulai dari penggunaan media imersif untuk pelestarian arsip visual hingga aktivasi satuan ruang strategis berdasarkan regulasi daerah terbaru.

Hadirin yang berbahagia,

Keberhasilan acara ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ka-10, atas restu dan arahan beliau sehingga kegiatan ini dapat terlaksana demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Para Pemakalah yang telah menyumbangkan buah pikirannya untuk memperkaya khazanah budaya Jawa.
3. Seluruh Panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan setiap detail acara.
4. Serta para Tamu Undangan yang telah hadir untuk ikut serta merawat nadi kebudayaan ini agar tetap lestari.

Harapan kami, simposium ini dapat membangkitkan semangat pembelajaran sejarah dan budaya bagi generasi masa depan. Semoga diskusi-diskusi yang lahir di sini mampu menjadi pijakan dalam pelestarian nilai filosofis tata ruang Kasultanan Yogyakarta.

Selamat ber-simposium, semoga hasil diskusi kita hari ini membawa manfaat bagi ilmu pengetahuan dan kelestarian budaya Jawa di masa depan.

Akhir kata, dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa, selamat ber-simposium. Semoga sumbangsih pemikiran kita menjadi bagian dari upaya *Hamemayu Hayuning Bawono*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 11 April 2025

Ketua Panitia

Gusti Kanjeng Ratu Hayu





AGENDA

International Symposium on Javanese Culture 2026 Architecture, Spatial Planning, and Territory of the Sultanate of Yogyakarta 11-12 April 2026

Day 1: Saturday, 11 April 2026

Time	Activity	Notes
08:00 – 09:00	Registration	
09:00 – 09:30	Opening Performance	
09:30 – 09:45	Opening HRH Princess Hayu	
09:45 – 09:50	Prayers by Kanca Kaji	
09:50 – 10:45	Coffee Break	
	Press Conference with Tingalan Jumenengan Dalem Chairpersons	10:20 – 10:45
10:45-13:00	Session I: History & Politics	
	Introduction of speakers by moderator Prof. Dr. Drs. RM. Pramutomo, M.Hum. (Professor of Ethnochoreology Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta/ Editor of the 8th International Symposium by Keraton Yogyakarta)	10:45 – 10:55
	Keynote by reviewer 1 Prof. Koji Miyazaki (Professor Emeritus of Foreign Studies at Tokyo University, Executive Director at National Institutes for the Humanities, Japan)	10:55 – 11:15
	Presenter 1.1 The Effectiveness of Baluwarti Fort in The Geger Sepoy (1812): A Battlefield Archaeology Review Rizky Ramadhani Satrio Wibisono, S.Ark. (Universitas Gadjah Mada)	11:15 – 11:35

	Presenter 1.2 Kartografi Kritis Sumbu Filosofi Yogyakarta: Negosiasi Kosmologi Jawa dan Tata Ruang Kolonial Abad 19–20 Saifuddin Alif Nurdianto, M.Pd. (SMAN 1 Sambit, Ponorogo)	11:35 – 11:55
	Presenter 1.3 Ratu Dhedhampar Laku: The Cosmology of Space in the Royal Relocation Procession of Yogyakarta Palace MB. Widyasastra Rajasa (Kawedanan Widyabudaya, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat)	11:55 – 12:15
	Q & A between moderator & speakers	12:15 – 12:30
	Q & A with audience	12:30 – 13:00
13:00 – 14:00	Lunch Break	
14:00 – 16:15	Session II: Arts, Literature, and Performing Arts	
	Introduction of speakers by moderator Prof. Dr. Setiadi. S. Sos. M. Si. (Dean of the Faculty of Cultural Science Universitas Gadjah Mada)	14:00 – 14:10
	Keynote by reviewer 2 Dr. Verena Meyer (Assistant Professor of Leiden Institute of Area Studies (LIAS) in the field of Islamic Studies in Southeast Asia, Leiden University, Netherlands)	14:10 – 14:30
	Presenter 2.1 From Sacred Pavilion to Cultural Stage: Court Dance and the Rearticulation of Royal Space at Keraton Yogyakarta Anastasia Melati Listyorini, S.Sn., M.Hum. (Taipei National University of the Arts, Taiwan)	14:30 – 14:50
	Presenter 2.2 Floating Pavilion in A Pleasure Garden: The Depiction of A Palace Garden in Panji Jayakusuma (MSS Jav. 68) Muhammad Faiz, S.Ark., M.A. (SOAS-Alphawood Alumnus)	14:50 – 15:10

	Presenter 2.3 Aktivasi Arsip dan Media Imersif Pelestarian Nilai Filosofis Tata Ruang Kasultanan Yogyakarta Thibburruhany, M.Sos. (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)	15:10 – 15:30
	Q & A between moderator & speakers	15:30 – 15:45
	Q & A with audience	15:45 – 16:15
16:15 – 17:00	Closing and continued by afternoon tea	

Day 2: Sunday, 12 April 2026

Waktu	Kegiatan	Catatan
07:30 – 08:30	Registration	
08:30 - 11:00	Session III: Architecture	
	Introduction of speakers by moderator Dr. Ing Wiyatiningsih, S.T, M.T (Rector of Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta)	08:30 – 08:40
	Keynote by reviewer 3 Dr. Hélène Njoto Feillard (Art & Architecture Historian, Associate Researcher at École Française d’Extrême-Orient (EFEO), France-Jakarta’s Office)	08:40 – 09:00
	Presenter 3.1 Arsitektur, Rupa, dan Ragam Hias Makam- makam Tua di Pasareyan Kagungan Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat M. Yaser Arafat, M.A. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)	09:00-09:20
	Presenter 3.2 “Kini Dipagari”: Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Transisi Memori Kolektif Rahmadi Fajar Himawan, S.Sos. (Universitas Gadjah Mada)	09:20 – 09:40

	Presenter 3.3 Preserving the Architectural Character of Heritage Areas in Yogyakarta Dian Lakshmi Pratiwi S.S., M.A Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta	09:40 – 10:00
	Q & A between moderator & speakers	10:00 – 10:15
	Q & A with audience	10:15 – 10:45
10:45 -11:15	Coffee Break	
11:15 – 12:30	Talkshow: Keraton Updates Resource Persons: GKR. Mangkubumi (Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyasa) KRT Suryo Satriyanto (Penghageng Kawedanan Panitikismo) Moderator MJ. Puwakawindra (Abdi Dalem Kawedanan Ripta Kawindra)	
12:30 – 13:30	Lunch Break	
13:30 – 15:45	Sesi IV: Spatial Planning & Landscape	
	Introduction of speakers by moderator Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. (Dean of Law Faculty Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2018-2023/Keraton Yogyakarta Legal Team)	13:30 – 13:40
	Keynote from reviewer 4 Prof. Ir. Bakti Setiawan, MA., Ph.D. (Professor of Urban Planning, Universitas Gadjah Mada, Indonesia)	13:40 – 14:00
	Presenter 4.1 Yogyakarta Axis Continuity: Temporal - Spatial Comparison with Beijing and Paris Asst. Prof. Ts. Dr. Irina Safitri Zen (International Islamic University Malaysia)	14:00 – 14:20

	Presenter 4.2 Walking Tours as Placemaking Strategy: Constructing Spatial Narratives In Jeron Beteng, Yogyakarta Nuzuli Ziadatun Ni'mah, S.T., M.A. (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia)	14:20 – 14:40
	Presenter 4.3 Tata Ruang Keistimewaan DIY melalui Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) dalam Penetapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY 2023-2043 Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Hum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana/Dispertaru) DIY	14:40 – 15:00
	Q & A between moderator & speakers	15:00 – 15:15
	Q & A with audience	15:15 – 15:45
15:45 – 16:00	Closing HRH Princess Bendara	
16:00 – 16:30	Afternoon Tea	

ABSTRACTS



EFEKTIVITAS BENTENG BALUWARTI DALAM PERISTIWA GEGER SEPOY (1812): SEBUAH TINJAUAN BATTLEFIELD ARCHAEOLOGY

THE EFFECTIVENESS OF THE BALUWARTI FORT IN THE GEGER SEPOY (1812): A BATTLEFIELD ARCHAEOLOGY REVIEW

¹*Rizky Ramadhani Satrio Wibisono

1Graduate Student of Archaeology, Faculty of Cultural Science,
Universitas Gadjah Mada

*Corresponding author: rizkyramadhanisatriowibisono@gmail.com

Abstract

In nineteenth-century Java, escalating colonial conflicts compelled local rulers to adapt their defensive architecture to changing modes of warfare. The Baluwarti Fort of the Yogyakarta Palace represents a critical military structure during the *Geger Sepoy* (1812). Using a battlefield archaeology approach, this study examines the fort's spatial configuration to assess its operational effectiveness under combat conditions. The analysis shows that the fortification did not fully adopt bastioned-fort principles, resulting in wide bastion intervals that exceeded the effective range of the Sultanate's artillery and created defensive dead zones along the curtain walls. These architectural limitations, compounded by contemporary military and social conditions, contributed significantly to the failure of the palace's defensive system against the British assault.

Keywords: Baluwarti Fort, Keraton Yogyakarta, *Geger Sepoy*, Battlefield Archaeology, bastion.

Abstrak

Pada abad ke-19, meningkatnya konflik kolonial mendorong penguasa lokal di Jawa untuk menyesuaikan arsitektur pertahanan mereka terhadap perubahan pola peperangan. Benteng Baluwarti Keraton Yogyakarta merupakan struktur militer penting yang berperan dalam peristiwa *Geger Sepoy* (1812). Dengan menggunakan pendekatan arkeologi medan perang (*battlefield archaeology*), penelitian ini menganalisis konfigurasi spasial benteng untuk menilai efektivitas operasionalnya dalam kondisi tempur. Hasil kajian menunjukkan bahwa Benteng Baluwarti tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip benteng ber-bastion, sehingga menghasilkan interval antar bastion yang melebihi jangkauan efektif artileri Kesultanan dan menciptakan zona mati pertahanan pada dinding tirai. Keterbatasan arsitektural tersebut, yang diperparah oleh kondisi militer dan sosial sezaman, berkontribusi signifikan terhadap kegagalan sistem pertahanan keraton dalam menghadapi serangan Inggris.

Kata kunci: Benteng Baluwarti, Keraton Yogyakarta, *Geger Sepoy*, Battlefield Archaeology, bastion.

KARTOGRAFI KRITIS SUMBU FILOSOFI YOGYAKARTA: NEGOSIASI KOSMOLOGI JAWA DAN TATA RUANG KOLONIAL ABAD 19-20

Saifuddin Alif Nurdianto

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sambit, Ponorogo

Email: saifuddinalif2@gmail.com

Abstract

Yogyakarta is a city shaped by Javanese cosmology through an imaginary axis linking Mount Merapi, the Keraton (royal palace), and the Southern Sea. Since the nineteenth century, the Dutch colonial administration introduced a spatial logic aimed at political and economic control. This study examines the relationship between Javanese cosmology and colonial logic in Yogyakarta's urban development. The research uses a qualitative method with a critical cartography approach. Primary sources include: (1) Kaart van de Residentie Djocjakarta (1857); (2) topographic map Jogjakarta (1925); (3) Topographische Kaart der Residentie Djocjakarta (1869); and (4) the Jogjakarta en Omstreken map (1925). The findings show that: (1) Javanese cosmology and the philosophical axis support the Sultan's position through spatial and ritual practices; (2) colonial maps reflect Dutch authority in reorganizing Yogyakarta with Western administrative logic; and (3) the interaction between cosmology and colonial cartography produces a dynamic where spiritual traditions persist alongside colonial structures.

Keywords: *Javanese Cosmology, Colonial Cartography, Philosophical Axis, Spatial Planning, Yogyakarta*

Intisari

Yogyakarta adalah kota yang dibangun dengan prinsip kosmologi Jawa melalui sumbu Merapi-Keraton-Laut Selatan. Namun, sejak abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda menghadirkan logika baru yang berorientasi pada kontrol politik dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan memahami hubungan antara kosmologi Jawa dan logika kolonial dalam perkembangan kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kartografi kritis. Sumber primer penelitian adalah: (1) peta administratif *Kaart van de Residentie Djocjakarta* (1857); (2) peta topografi *Jogjakarta* (1925); (3) peta topografi *Topographische Kaart der Residentie Djocjakarta* (1869); dan (4) peta topografi *Jogjakarta en Omstreken* (1925). Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kosmologi Jawa melalui sumbu filosofi Yogyakarta membentuk tradisi yang memperkuat posisi Sultan melalui pengaturan ruang dan praktik ritual; (2) Peta mencerminkan kekuasaan kolonial yang mengatur Yogyakarta dengan logika Barat; dan (3) Negosiasi antara kosmologi Jawa dengan kartografi kolonial membentuk dinamika Yogyakarta yang mempertemukan tradisi spiritual dan logika kolonial.

Kata Kunci: Kosmologi Jawa, Kartografi Kolonial, Sumbu Filosofi, Tata Ruang, Yogyakarta



FROM SACRED PAVILION TO CULTURAL STAGE: COURT DANCE AND THE REARTICULATION OF ROYAL SPACE AT KERATON YOGYAKARTA (DARI PENDAPA SAKRAL KE PANGGUNG BUDAYA: TARI ISTANA DAN REARTIKULASI RUANG DI KERATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT)

Anastasia Melati Listyorini
Taipei National University of the Arts
melatianastasia@gmail.com

Abstract

This paper examines the transformation of the pendapa at Keraton Yogyakarta from a semi-sacred court pavilion into a regular stage for public cultural performances. Rather than treating architecture as a static backdrop, the study approaches the pendapa as a performative space whose meaning is continually constituted through embodied courtly discipline. Situated within the hierarchical spatial organization and broader cosmological-territorial order of the Javanese court, the pendapa operates as a crucial architectural node where ritual authority, aesthetic form, and public presence intersect. Drawing on performance ethnography, spatial observation, and archival research, the paper explores how weekly court dance performances rearticulate royal space in contemporary contexts. It argues that these performances do not merely adapt the pavilion into public stage (tourism), but actively constitute it as a site of living tradition through the disciplined repetition of embodied courtly movement. In this sense, the pendapa functions as living architecture sustained through embodied repetition and choreographic discipline: a space where spatial philosophy is enacted, not only represented. The study contributes to discussions on royal spatial order by demonstrating how architecture and dance mutually constitute cultural domain within the Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Keywords: Keraton Yogyakarta, Javanese court dance, pendapa, royal spatial order, performance and space, cultural authority

Intisari

Makalah ini mengkaji transformasi pendapa di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dari paviliun istana yang bersifat semi-sakral menjadi panggung reguler bagi pertunjukan budaya publik. Alih-alih memandang arsitektur sebagai latar statis, studi ini menempatkan pendapa sebagai ruang performatif yang maknanya terus-menerus dikonstruksi melalui disiplin tubuh istana yang diwujudkan melalui laku tubuh. Terletak dalam organisasi tata ruang yang hierarkis serta tatanan kosmologis-teritorial yang lebih luas dalam lingkungan istana Jawa, pendapa berfungsi sebagai simpul arsitektural penting tempat otoritas ritual, bentuk estetik, dan kehadiran publik berkelindan. Berdasarkan etnografi pertunjukan, observasi spasial, dan penelitian arsip, makalah ini mengeksplorasi bagaimana pertunjukan tari istana mingguan mereartikulasi ruang kerajaan dalam konteks kontemporer. Dinyatakan bahwa pertunjukan-pertunjukan tersebut tidak sekedar mengadaptasi pendapa menjadi panggung publik (turis), melainkan secara aktif mengonstitusikannya sebagai tempat tradisi yang hidup melalui repetisi disiplin gerak istana

yang dihayati secara tubuh. Dalam pengertian ini, pendapa berfungsi sebagai arsitektur yang hidup yang dipertahankan melalui repetisi yang dihayati secara tubuh dan disiplin koreografis: ruang tempat filsafat spasial tidak hanya direpresentasikan, tetapi dilaksanakan melalui laku. Studi ini berkontribusi pada pembahasan mengenai tata ruang kerajaan dengan menunjukkan bagaimana arsitektur dan tari secara timbal balik membentuk ranah budaya dalam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Kata kunci: Keraton Yogyakarta, tari istana Jawa, pendapa, tata ruang kerajaan, performativitas dan ruang, otoritas budaya

FLOATING PAVILION IN A PLEASURE GARDEN: THE DEPICTION OF A PALACE GARDEN IN PANJI JAYAKUSUMA MSS JAV. 68

Muhammad Faiz
SOAS-Alphawood Alumnus
muhammadfaiz12@live.com

ABSTRACT

This article examines the representation of palace gardens in Panji Jayakusuma MSS Jav. 68 (ff. 26v–27r), with particular attention to the episode describing Dewakusuma and Dewi Pandansari bathing together. Panji Jayakusuma MSS Jav. 68 was commissioned for Nyonya Sakēbēr in Surapringga, an alternative name for Surabaya in East Java. The depiction of the garden corresponds to balekambang, a pavilion on a pond that is usually present in the court garden of Java. This study employs a qualitative, interdisciplinary approach combining close textual reading, visual analysis, and historical contextualisation. By analysing the interaction between text and image, it argues that illustrated manuscripts functioned as crucial sites for imagining courtly space and authority beyond the physical boundaries of the royal capitals.

Keywords: Javanese manuscript, fictive narrative poems, garden, Tamansari, illustrations, wayang-style.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji representasi taman istana dalam manuskrip tersebut, dengan fokus pada adegan ilustrasi Dewakusuma dan Dewi Pandansari yang sedang mandi bersama (ff. 26v–27r). Panji Jayakusuma (British Library, MSS Jav. 68) dipesan untuk Nyonya Sakēbēr di Surapringga (Surabaya), Jawa Timur. Taman yang digambarkan menampilkan balekambang, yaitu paviliun di tengah kolam yang lazim dijumpai dalam taman keraton Jawa. Melalui pendekatan kualitatif dan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis tekstual, kajian visual dan ikonografis, serta kontekstualisasi historis, artikel ini menelaah hubungan antara teks dan gambar. Artikel ini berargumen bahwa manuskrip bergambar berperan sebagai medium penting dalam membayangkan ruang dan otoritas keraton melampaui batas fisik pusat-pusat kerajaan Jawa.

Kata kunci: manuskrip Jawa, puisi naratif fiktif, taman, Tamansari, ilustrasi, bergaya wayang.

AKTIVASI ARSIP VISUAL DAN MEDIA IMERSIF PELESTARIAN NILAI FILOSOFIS TATA RUANG KASULTANAN YOGYAKARTA

Thibburruhany
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Email: thibburruhany@gmail.com

Abstract

The degradation of historic spaces in Yogyakarta has not only affected their physical condition but has also contributed to the gradual fading of the philosophical values embedded in the spatial order of the Yogyakarta Sultanate. The North Square (Alun-Alun Utara), as part of the city's philosophical axis, has experienced transformations in function and meaning that influence how the public understands the space within its historical and cultural context. This study aims to explore the role of visual archive activation through the zine medium as an interpretive platform to represent the changing meanings of this urban space. The research employs a descriptive-interpretative qualitative approach combined with practice-based research. Visual archives were collected from digital and historical documentation sources and organized using a reverse chronological structure to reveal layers of spatial transformation over time. These archives were then processed through visual techniques such as layering, fragmentation, and visual narration in the form of an interactive zine. Rather than measuring the effectiveness of the medium, this study focuses on the design process and the activation of archives as an interpretive practice for understanding spatial change. The findings indicate that the zine format facilitates the arrangement of visual archives in a non-linear manner and creates a reading experience that encourages reflection on the relationship between space, collective memory, and the philosophical values of urban spatial order. Through this approach, archives are positioned not merely as static documentation but as interpretive spaces that enable renewed readings of the historical dynamics of urban environments. This research positions zines as an alternative medium for visual archive activation that is non-linear and non-elitist within the broader context of cultural preservation.

Keywords: *visual archive activation, interactive zine, North Square of Yogyakarta, philosophical axis, cultural preservation*

Intisari

Degradasi ruang bersejarah di Yogyakarta tidak hanya berdampak pada perubahan kondisi fisik, tetapi juga pada memudarnya nilai filosofis dalam tata ruang Kasultanan Yogyakarta. Alun-Alun Utara sebagai bagian dari sumbu filosofis kota mengalami transformasi fungsi dan makna yang memengaruhi cara publik memahami ruang tersebut dalam konteks sejarah dan budaya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran aktivasi arsip visual melalui media zine sebagai medium interpretatif untuk merepresentasikan perubahan makna ruang tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif yang dipadukan dengan praktik berbasis desain (*practice-based research*). Arsip visual dikumpulkan melalui sumber digital dan dokumentasi historis, kemudian disusun dalam struktur kronologis mundur untuk menampilkan lapisan perubahan ruang dari waktu ke waktu. Arsip tersebut selanjutnya diolah melalui teknik *layering*, fragmentasi, dan narasi visual dalam bentuk zine interaktif. Penelitian

ini tidak melakukan pengujian terhadap tingkat efektivitas media, melainkan berfokus pada proses perancangan dan aktivasi arsip sebagai praktik interpretatif dalam memahami perubahan ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zine sebagai medium visual mampu memfasilitasi penyusunan arsip secara non-linear dan menghadirkan pengalaman membaca yang membuka kemungkinan refleksi terhadap hubungan antara ruang, memori kolektif, dan nilai filosofis tata kota. Melalui pendekatan ini, arsip tidak hanya diposisikan sebagai dokumentasi statis, tetapi sebagai ruang interpretasi yang memungkinkan pembacaan ulang terhadap dinamika sejarah ruang kota. Penelitian ini menempatkan zine sebagai medium alternatif dalam aktivasi arsip visual yang bersifat non-linear dan non-elitis dalam konteks pelestarian budaya.

Kata Kunci: aktivasi arsip visual, zine interaktif, Alun-Alun Utara, sumbu filosofis, pelestarian budaya

ARSITEKTUR, RUPA, DAN RAGAM HIAS MAKAM-MAKAM TUA DI PASAREYAN KAGUNGAN DALEM KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT

M. Yaser Arafat

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: arafatnisti@yahoo.com

Abstrak

Sejak berdiri pada 1755, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat telah menjejalkan berbagai tinggalan sejarah dan kebudayaan. Satu di antaranya adalah makam-makam tua di Pasarean Kagungan Dalem. Artikel ini berupaya untuk membaca tinggalan makam-makam kuna di Pasareyan Kagungan Dalem itu. Makam-makam kuna dianalisis dengan menggunakan pendekatan antropologi budaya material (*anthropology of material culture*). Berdasarkan rangka pikir ini, secara arsitektural, makam akan dilihat dari sisi titik temu antara ideologi dan teknologi. Sedangkan untuk kajian rupa dan ragam hiasnya, makam akan dikaji sebagai penanda kubur pada era atau masa tertentu serta penanda identitas dan *encapsulation* (pengkapsulan) atau peringkasan-padatan kekuasaan dan jaringan wacana budaya-politik tertentu dalam hal ini, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Artikel ini menggunakan metode observasi dan kajian literatur. Observasi dilakukan di beberapa Pasarean Kagungan Dalem di wilayah Provinsi DI Yogyakarta yang dulunya merupakan wilayah inti Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Terutama makam-makam yang tercatat di dalam data resmi yang pernah dikeluarkan oleh otoritas di Keraton Yogyakarta hari ini. Artikel ini menemukan beberapa temuan.

Pertama, sebagian besar makam tua di Yogyakarta berada di sisi barat Masjid Pathok Nagara, Masjid Kagungan Dalem, serta Masjid Keprabon, yaitu Masjid Gede Kraton di Kauman dan Masjid Mataram Kotagede. Makam-makam tua sezaman tersebar pula di berbagai Masjid Kagungan Dalem di seluruh wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kedua, makam seorang tokoh cikal-bakal atau sesepuh pemula peradaban cenderung diletakkan di sisi utara kompleks pemakaman. Ketiga, makam-makam itu memiliki bentuk-rupa Nisan Hanyakrakusuman dan Nisan Hamengkubuwanan. Keempat, tidak ada perbedaan terlalu mencolok antara jirat makam tokoh-tokoh di era Kerajaan Mataram Islam dengan tokoh-tokoh pada era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Kelima, jirat dan nisan makam-makam dari masing-masing zaman terdiri dari tumpukan batu andesit potong yang disusun layaknya susunan bangunan candi. Keenam, ragam hias nisan dan jirat makam terdiri dari tumpal, *wulan tumanggal* (bulan sabit), *purnama sidhi* (bulan purnama), Kembang Awan, Kembang Patran atau Kemada, Kembang Waru, dan Surya Suminar. Ketujuh, masing-masing hiasan menjadi ciri atau karakter yang menandai kekhasan makam-makam di area Yogyakarta. Baik berupa tinggalan dari era Kerajaan Mataram Islam maupun dari era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kedelapan, terdapat beberapa penyebutan makam, yaitu *pemut*, *sekarang*, *sarean*, dan *alamat*. Terkadang tertulis pula kalimat berbahasa Arab.

Artikel ini merokemendasikan beberapa hal. Pertama, perlunya penjagaan artefak asli makam baik jirat maupun nisannya. Kedua, perlu pendataan makam-makam. Pembaruan dan penyempurnaan data historis makam-makam tua di Pasarean Kagungan Dalem mutlak sangat diperlukan seiring dengan munculnya kajian sejarah terkini.

Kata kunci: makam tua, Pasarean Kagungan Dalem, budaya material

Abstract

Since its establishment in 1755, the Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat has left behind various historical and cultural legacies. One of these is the collection of ancient graves within the Pasarean Kagungan Dalem (Royal Cemeteries). This article seeks to interpret these ancient grave remains using the anthropology of material culture approach. Based on this framework, the architectural aspect of the graves is analysed through the intersection of ideology and technology. Meanwhile, the study of form and ornamentation examines the graves as markers of a specific era and indicators of identity and encapsulation—understood here as the condensed representation of power and socio-political discourse; in this case, that of the Sultanate of Ngayogyakarta Hadiningrat.

This article employs observation and literature review methods. Observations were conducted at several Pasarean Kagungan Dalem locations within the Special Region of Yogyakarta, which formerly served as the core territory of the Sultanate. The study focuses primarily on graves recorded in official data issued by the current Yogyakarta Palace authorities. The findings of this article are as follows: First, most ancient graves in Yogyakarta are located on the west side of the Pathok Nagara Mosques, Kagungan Dalem Mosques, and Keprabon Mosques (namely the Grand Mosque of the Kauman and the Mataram Mosque in Kotagede). Contemporary ancient graves are also scattered across various Kagungan Dalem Mosques throughout the Sultanate's territory.

Second, the grave of a cikal-bakal (ancestral founder) or a pioneer of civilization tends to be positioned on the north side of the cemetery complex. Third, the graves feature the Nisan Hanyakrakusuman and Nisan Hamengkubuwanan. Fourth, there are no strikingly significant differences between the grave structures (jirat) of figures from the Islamic Mataram Kingdom era and those from the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate era. Fifth, the jirat and headstones from each period consist of stacked, cut andesite stones arranged similarly to temple (candi) structures. Sixth, the decorative motifs on the headstones and jirat include tumpal, wulan tumanggal (crescent moon), purnama sidhi (full moon), Kembang Awan, Kembang Patran or Kemada, Kembang Waru, and Surya Suminar. Seventh, each ornament serves as a distinguishing character or hallmark of graves in the Yogyakarta area, whether they are remnants of the Islamic Mataram Kingdom or the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate. Eighth, there are several terms used to refer to the graves, namely pemet, sekaran, sarean, and alamat. Occasionally, Arabic inscriptions are also present.

This article offers several recommendations. First, it is essential to preserve the original artifacts of the graves, including both the jirat and the headstones. Second, comprehensive data collection is necessary. The updating and refinement of historical data regarding ancient graves in the Pasarean Kagungan Dalem is absolutely vital in light of recent historical studies.

Keywords: *Ancient tomb, the Pasarean Kagungan Dalem, material culture*

“KINI DIPAGARI”¹: ALUN-ALUN UTARA KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DALAM TRANSISI MEMORI KOLEKTIF

Rahmadi Fajar Himawan

Program Magister Sosiologi, Departemen Sosiologi, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta

Email: rahmadifajarhimawan@mail.ugm.ac.id

Abstract

The revitalization of North Square of Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat in 2020-2022 has given rise to a new collective memory, in addition to the persistence of collective memory that has existed since the reign of Sultan Hamengkubuwono IX. In the context of memory studies, North Square was 'celebrated' by various interests that give rise to diverse memories. The contestation of memory, between memory lives on people's mind and the spirit of Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat as 'heritage guard', is unavoidable. This study aims to map the transition points of memory and public sentiment toward the revitalization of North Square of Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. A critical discourse analysis was conducted on online news articles published between 2015 and 2025, in addition to observations of related activities/events and interview with residents around North Square. This study found that collective memory related to North Square undergoing a transition from 'public space' to 'contested space'. Although sentiments around the revitalization project still persist, there are indications that public trust toward Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat has not diminished amidst uncertainty of political constellation in national context. The meaning of 'public space' that persist also triggers public agency in building 'alternative space', which concludes the importance of 'dialogical heritage' idea to address the contestation of memory around North Square.

Keywords: *collective memory, city square, public space, sacred space, contestation*

Intisari

Revitalisasi Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat pada 2020-2022 telah melahirkan memori kolektif baru di masyarakat, disamping keberlanjutan memori kolektif yang telah hidup sejak pemerintahan Sultan Hamengkubawana IX. Dalam konteks kajian memori, Alun-Alun Utara 'dirayakan' oleh berbagai kepentingan yang melahirkan beragam memori. Kontestasi memori, antara ingatan masyarakat dan semangat 'pemuliaan' ruang versi Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, tidak dapat dihindarkan. Artikel ini bertujuan memetakan titik transisi memori dan sentimen masyarakat terhadap revitalisasi Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Analisis wacana kritis dilakukan terhadap berita daring yang diterbitkan dalam rentang 2015-2025, disamping observasi terhadap aktivitas/peristiwa terkait

1 Judul ini diambil dari penggalan judul artikel Lugas Subarkah berjudul "Alun-Alun Utara Kini Dipagari" yang dimuat di *Harian Jogja* pada 2020. Meski artikel tersebut lebih banyak berisikan paparan mengenai pemagaran Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta dari pihak *kraton* dan pemerintah, serta sama sekali tidak memasukkan tanggapan perwakilan pihak masyarakat, penggalan judul artikel tersebut penulis anggap mewakili secara lugas sumber perdebatan wacana memori kolektif yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

dan wawancara masyarakat di sekitar Alun-Alun Utara. Dalam kajian ini, ditemukan bahwa memori kolektif masyarakat terkait Alun-Alun Utara mengalami transisi dari 'ruang publik' menuju 'ruang kontestasi'. Meskipun sentimen dari proyek pemagaran-pemasiran masih bertahan, terdapat indikasi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat justru tidak surut di tengah konstelasi politik nasional yang tidak berketentuan. Makna 'ruang publik' yang bertahan juga melandasi agensi publik dalam membangun 'ruang alternatif', yang menyimpulkan pentingnya gagasan 'warisan dialogis' demi mengatasi perdebatan memori yang tersemat pada Alun-Alun Utara.

Kata Kunci: memori kolektif, alun-alun, ruang publik, ruang sakral, kontestasi

WALKING TOURS AS PLACEMAKING STRATEGY: CONSTRUCTING SPATIAL NARRATIVES IN JERON BETENG, YOGYAKARTA

Rud Yoneko Tunggadewi^{1*}, Armita Sharfina², Nuzuli Ziadatun Ni'mah³

¹ Ministry of Creative Economy of the Republic of Indonesia;

² Independent Researcher; ³ Gadjah Mada University

Email: rudyoneko@gmail.com*; mitasharfina@gmail.com;

nuzuli.ziadatun.n@mail.ugm.ac.id

Abstract

Urban heritage areas are multilayered historical landscapes that integrate tangible and intangible values. However, current challenges such as urban development and tourism commodification threaten the continuity and authenticity of these elements. Within this context, placemaking has emerged as a conservation strategy to interpret embodied socio-cultural values, amplify community participation, and explore alternative narratives. Walking tours, as cultural and spatial practices, provide a key entry point to this approach. Using a qualitative method, this research evaluated two distinct providers, Jogja Good Guide and Alon Mlampah, to analyze the effectiveness of walking tours as a placemaking strategy in the urban heritage landscape of the Jeron Beteng area in Yogyakarta. The research found that the walking method enables multisensory experiences and emotional engagement. While each provider employs different interpretive lenses, ranging from emotional storytelling to archival-based narratives through their tour guides, where both play a crucial role in constructing “the biography of place”. This is achieved through the curation of routes, spatial sequencing, and narrative storytelling. Walking tours foreground lived experiences and enable more democratic narratives for urban heritage landscape.

Keywords: *Placemaking, Walking Tours, Urban Heritage, Jeron Beteng, Spatial Narratives*

Intisari

Kawasan warisan perkotaan merupakan lanskap sejarah berlapis yang memadukan nilai-nilai warisan benda dan tak-benda. Keberlangsungan dan autentisitas kawasan ini kian menghadapi tantangan akibat pesatnya arus pembangunan perkotaan dan komodifikasi pariwisata. Dalam konteks ini, *placemaking* hadir sebagai strategi pelestarian untuk menginterpretasikan nilai-nilai sosial budaya, memperkuat partisipasi komunitas, dan mengali narasi-narasi alternatif yang selama ini tersembunyi. *Walking tours*, sebagai praktik budaya dan spasial, menawarkan titik masuk yang relevan bagi pendekatan *placemaking*. Melalui metode kualitatif, dilakukan analisis komparatif terhadap dua penyedia tur, yaitu Jogja Good Guide dan Alon Mlampah, untuk kemudian menganalisis efektivitas *walking tours* sebagai strategi *placemaking* dalam konteks lanskap warisan perkotaan di Jeron Beteng, Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

walking tours memberikan pengalaman multisensori dan ikatan emosional yang kuat antara peserta dan kawasan. Meskipun setiap penyedia tur menggunakan lensa interpretatif yang berbeda, mulai dari narasi yang berfokus pada aspek emosional hingga narasi historis berbasis arsip melalui *tour guide* mereka, keduanya memainkan peran krusial dalam pembentukan “*biography of place*”. Temuan ini didukung oleh praktik kurasi rute, sekuens spasial, serta penyampaian narasi yang terstruktur. *Walking tours* menegaskan pentingnya pengalaman hidup dan narasi yang lebih demokratis dalam upaya menjaga keberlanjutan kawasan warisan perkotaan.

Kata Kunci: *Placemaking, Walking Tours, Urban Heritage, Jeron Beteng, Spatial Narratives*

YOGYAKARTA AXIS CONTINUITY: TEMPORAL – SPATIAL COMPARISON WITH BEIJING AND PARIS

Irina Safitri Zen

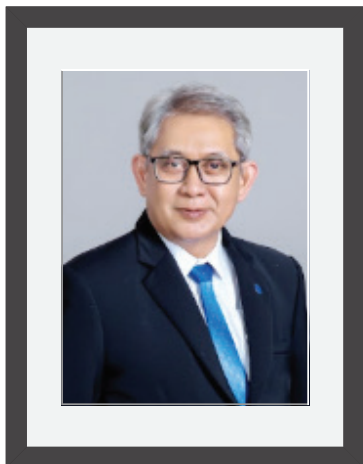
Urban and Regional Planning Department,
Kuliyyah of Architecture & Environmental Design,
International Islamic University Malaysia.
Email: irinazen@iium.edu.my

ABSTRACT

Cosmological axes serve as historic urban pivots linking cosmos, rulers, and communities, yet face preservation-adaptation tensions amid megacity sprawl. This study examines Yogyakarta's 6 km imaginary spine (Merapi-Kraton-Indian Ocean) as exemplary "living heritage," surpassing Beijing's rigid 7.8 km Central Axis (feng shui gates-grids) and Paris's static Haussmann radial Axe Historique in adaptive resilience. Employing Wheatley's Pivot framework and Lefebvre's spatial triad—perceived (GIS<3° deviation), conceived (kejawen mandala vs. feng shui), lived (Grebeg rituals vs. imperial sacrifices)—qualitative analysis of archives, UNESCO dossiers, and planning instruments reveals morphological parallels: SVF 0.4-0.8, FAR gradients, H/W ratios ≤ 3.0 across sacred-linear (Yogyakarta), symmetrical-imperial (Beijing), and secular-radial (Paris) spines. Despite territorial contraction from 300,000 to 32,000 hectares via the 1755 Giyanti partitions, Dutch-Japanese colonial losses, wars, and 2006 quakes, Yogyakarta sustains Catur Gatra Tunggal legibility (Kraton-Alun-alun-Mosque-Market). Syncretic **Paugeran** decrees, **Tata Rakit** zoning (BCR 70%, FAR 0.7, H/W ≤ 1.0), and hybrid heritage impact assessment (HIA) embed Grebeg rituals, Abdi Dalem duties, and kampung agency—outperforming top-down peers Yogyakarta's compact buffer zones (251 ha core/1,200 ha buffer) better protect UNESCO Outstanding Universal Value (OUV Criteria ii, iii, vi) and Sustainable Development Goal 11 (resilient cities) compared to Beijing's vast enclosures (589/4,542 ha) or Paris's expansive skylines (365/2,500 ha). These zones guide uneven urban growth (anisotropic rings) while preserving heritage. Yogyakarta proves Asian hybrid governance works for global Historic Urban Landscape (HUL) approaches.

Keywords: Cosmological Axis, Historical Continuity, Heritage Sustainability, Heritage Resilience

MINI PROFILE EDITOR



Prof. Dr. Drs. R.M. Pramutomo, M. Hum., Guru Besar dalam Bidang Etnokoreologi. meraih gelar Sarjana Seni Tari dari ISI Yogyakarta (1992), gelar Magister Humaniora dari Sekolah Pascasarjana UGM (2001). Tahun 2001-2002 mengikuti *Program of Culture and Performance Studies*, University of California, Los Angeles (UCLA), USA. Gelar Doktor *Performing Arts Studies* diraihnya dari UGM (2008). Pada tahun berikutnya mengikuti *Senior Lecturer Fellowship Program of Academic Recharge* (PAR) di *Leiden Universiteit*, Negeri Belanda. Beliau juga aktif di organisasi sebagai Ketua Dewan Pakar Pusat Kajian Arsip dan Dokumen Seni di K.R.T. *Wiroguno Center*, dan Ketua *Siswa Among Beksa* (2023—

2028). *Editorial Board* pada *International Journal of Culture and History*, Canada sejak tahun 2021 sampai sekarang, *Editorial Board* pada *SPAFA Journal of SEAMEO, Thailand*, tahun 2024 sampai sekarang. Minatnya yang mendalam pada Seni Tari dan Seni Pertunjukan mengantarkannya pada pengalaman workshop dalam berbagai festival tari tingkat nasional dan internasional, di Asia, Amerika, Eropa dan Australia.

Beliau juga seorang penulis dan telah menghasilkan banyak karya ilmiah yang dipublikasikan di berbagai jurnal nasional dan internasional. Sebagai pejabat struktural ISI Surakarta pernah menjadi Kepala Lembaga Penelitian (2013-2017). Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama (2017-2021). Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran ISI Surakarta 2024 sampai sekarang. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Seni Pertunjukan dan Program Pascasarjana, ISI Surakarta.

Prof. Dr. Drs. R.M. Pramutomo, M. Hum., is a Professor in Ethnochoreology, he earned a Bachelor of Dance from ISI Yogyakarta (1992), a Master of Humanities Study from UGM Graduate School (2001). In 2001-2002 he attended a Culture and Performance Studies Program, University of California, Los Angeles (UCLA), USA. He earned a Doctorate degree in Performing Arts Studies from UGM (2008). The following year he attended the Senior Lecturer Fellowship Program of Academic Recharge (PAR) at Leiden Universiteit, the Netherlands. He is also active in organizations as Chair of the Expert Council for The Archives and Art Document Studies Center at K.R.T. Wiroguno Center, and Chairperson of the Siswa Among Beksa Dance Institute (2023-2028). He is an Editorial Board in International Journal of Culture and History, Canada since 2021 to presently. He is also an Editorial Board of SPAFA Journal of SEAMEO, Thailand since 2024 to presently. His deep interest in Dance and Performing Arts led him to experience many national and international workshops and dance festivals, in Asia, America, Europe, and Australia.

He is also a writer and has produced many scientific works published in various national and international journals. As a structural official of ISI Surakarta, he was once the Chair of the Research Institute (2013-2017). Vice Rector III for Student Affairs and Cooperation (2017-2021). Chair of Quality Quaranty and Learning Development at Indonesia Institute of the Arts Surakarta (2024 to presently). Currently active as a permanent lecturer at the Faculty of Performing Arts and Postgraduate Program, ISI Surakarta.

MINI PROFILE REVIEWER



Prof. Koji Miyazaki

Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Lembaga Nasional Studi Humaniora, Jepang dan Professor Emeritus, Universitas Tokyo Kajian Ilmu Asing. Beliau seorang antropolog yang memiliki minat mendalam tentang Kepercayaan dalam Masyarakat Jawa dan perpindahan penduduk di Asia Tenggara. Penelitiannya banyak dikerjakan di Yogyakarta, Johor, Kedah, dan Sabah. Beliau juga membawahi beberapa proyek penelitian kerjasama dengan tema perpindahan penduduk antar negara di Sabah. Karya ilmiahnya yang terpublikasi, antara lain: "Javanese calendar and myth, wuku and the story of Watu Gunung", Sugahara Y. and van der Molen, Willem (eds.); *Transformation of Religions as reflected in Javanese texts*, Tokyo:

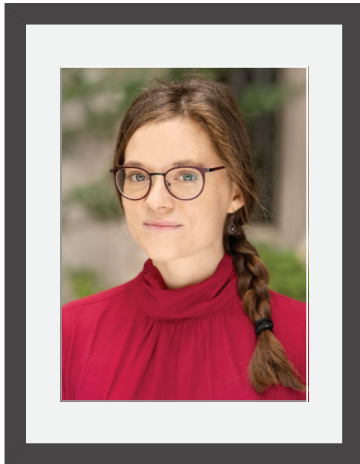
ILCAA, 2018; "Javanese Laborers to North Borneo in the First Half of the Twentieth Century", K. Miyazaki (ed.) *Making of Multi-cultural Sabah*, Tokyo: ILCAA, 2002; "Javanese-Malay: Between Adaptation and Alienation", *Sojourn* 15-1, 2000. Beliau memperoleh gelar doktornya dari Universitas Leiden, Belanda, setelah menyelesaikan studi sarjana dan magisternya di Universitas Kristen Tokyo dan Universitas Metropolitan Tokyo.

Topik Utama: Struktural Konsep Kerajaan di Jawa

Prof. Koji Miyazaki is Executive Director, National Institutes for the Humanities, Japan and Professor Emeritus of Tokyo University of Foreign Studies. An anthropologist whose main interest is in Javanese folk belief and migration in Southeast Asia. He conducted field research in Yogyakarta, Johor, Kedah, and Sabah. And led several joint research projects on transnational migration in Sabah. His major works include: "Javanese calendar and myth, wuku and the story of Watu Gunung", Sugahara Y. and van der Molen, Willem (eds.), *Transformation of Religions as reflected in Javanese texts*, Tokyo: ILCAA, 2018; "Javanese Laborers to North Borneo in the First Half of the Twentieth Century", K. Miyazaki (ed.) *Making of Multi-cultural Sabah*, Tokyo: ILCAA, 2002; "Javanese-Malay: Between Adaptation and Alienation", *Sojourn* 15-1, 2000. He earned his Ph.D. from Leiden University after studying at The International Christian University, Tokyo, and Tokyo Metropolitan University.

Keynote Topic: The Conceptual Structure of a Javanese Kingdom

MINI PROFILE REVIEWER



Dr. Verena Meyer

Merupakan seorang Asisten Ahli dari Leiden Institute of Area Studies (LIAS) bidang Studi Islam di Asia Tenggara, Universitas Leiden. Menyelesaikan Program Master dari Univeritat Passau, Fakultas Filsafat dan Universitas Oxford Fakultas Teologi dan Agama. Program doktornya diselesaikan di Universitas Columbia, dengan topik Kajian Islam. Ia terlatih dalam ilmu teori kritik kontemporer dan kajian sastra Jawa, Melayu, dan Arab guna memperdalam penelitiannya mengenai Identitas Islam, serta peran ingatan dan pewarisan budaya, dalam rangka pertukaran pengetahuan lintas waktu dan tempat. Sebelum bergabung dengan Universitas Leiden

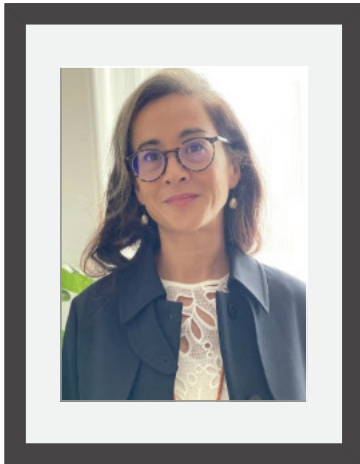
ia telah menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Columbia dan postdoktoralnya dari Sekolah Teologi, Agama dan Masyarakat, Norwegia. Ia menerbitkan hasil penelitian “Future’s Past: The Politics of Memory in Islamic Java” yang merupakan kajian etnografi, arsip dan Pustaka yang komprehensif tentang Islam di Jawa.

Topik Utama: Ingatan dan Konstruksi Identitas Berbasis Keagamaan

Dr. Verena Meyer is an Assistant Professor at the Leiden Institute of Area Studies (LIAS) in the field of Islamic Studies in Southeast Asia, Leiden University. She completed her Master’s Program at the University of Passau, Faculty of Philosophy, and the University of Oxford, Faculty of Theology and Religion. Her doctoral program was completed at Columbia University in Islamic Studies. She was train in the contemporary critical theory, and Javanese, Malay, and Arabic literary studies to deepen her research on Islamic Identity, the role of memory and formation of heritage, and transmission of knowledge exchange across time and place. Before joining as Universitair Docent at Leiden University, she had completed her doctoral program at Columbia University and her postdoctoral at MF Norwegian School of Theology, Religion and Society. She published the results of her research “*Future’s Past: The Politics of Memory in Islamic Java*” which is a comprehensive ethnographic, archival, and bibliographic study of Islam in Java.

Keynote Topic: Memory and constructions of religious identities

MINI PROFILE REVIEWER



Dr. Hélène Njoto Feillard

Adalah sejarawan seni dan arsitektur. Pernah menjabat sebagai *associate researcher* (perwakilan Jakarta) untuk pusat penelitian EFEO (École française d'Extrême-Orient/Sekolah Prancis untuk Timur Jauh). Ia juga merupakan *Associate Fellow* di *Southeast Asia Center* (CASE) di Paris dan anggota komite redaksional Jurnal *Archipel* Prancis serta jurnal Indonesia *Berkala Arkeologi*. Gelar Ph.D-nya diterima dari EHESS pada tahun 2014 dan diterbitkan pada tahun 2024 oleh EFEO dengan judul: "Sultan Pembangun dan Inovasi Arsitektur di Jawa pada Awal Periode Kolonial (abad ke-16 hingga awal abad ke-19)". Tahun 2022-2024 ia memimpin

sebuah proyek pelestarian salah satu masjid tertua di Asia Tenggara di Ambon, Maluku, dengan dukungan pendanaan dari ALIPH foundation (Heritage to Build Peace). Saat ini terlibat dalam penelitian panjang bersama BRIN terkait Seni Islam Awal di Jawa dan Madura dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Minatnya meliputi sejarah budaya, heritage, sejarah seni dan arsitektur, dan studi Asia (Indonesia dan Asia Tenggara).

Topik Utama: Sejarah Arsitektur di Jawa (abad 16 sampai awal abad 19).

Dr. Hélène Njoto Feillard is an art and architecture historian. She took in Jakarta's office as associate researcher at the EFEO (École Française d'Extrême-Orient / French School of the Far East) for 3 consecutive years. She is also an Associate Fellow at the Southeast Asia Center (CASE) in Paris and a member of the French Journal *Archipel* editorial committee and Indonesian journal *Berkala Arkeologi*. Her Ph.D. dissertation from EHESS was published in 2024 by the EFEO under the title "*Sultan-Builders and Architectural Innovations in Java in the Beginning of the Colonial Period (16th-Early 19th century)*". In 2022-2024, she led a conservation project for one of the oldest mosques in Southeast Asia in Ambon, Maluku, supported by the ALIPH foundation (Heritage to Build Peace). She is currently involved in collaborative research with BRIN about Early Islamic Art of Java and Madura from the 16th to the 18th century. Her scope of interest includes cultural history, heritage studies, history of art and architecture, and Asian studies (Indonesia and Southeast Asia).

Keynote Topic: Architecture History in Java (16 century to early 19c).

MINI PROFILE REVIEWER



Prof. Ir. Bakti (Bobi) Setiawan, MA., Ph.D.

Adalah seorang pendidik di bidang Perencanaan Kota, dan telah mengabdikan selama 4 dekade di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Beliau adalah alumni Arsitektur, UGM Angkatan 1984. Lulusan program *Master Urban and Regional Planning*, *Universitas Waterloo*, Canada (1994). Memperoleh gelar Ph.D di bidang *Community and Regional Planning* dari *University of British Columbia* (1998). Tahun 2001, ditunjuk sebagai Direktur Pusat Studi Lingkungan, UGM selama 4 tahun. Selanjutnya ditugaskan menjadi Direktur Program Studi *Urban and Regional Planning*, Departemen Arsitektur dan Perencanaan, UGM. Tahun 2010, memperoleh status

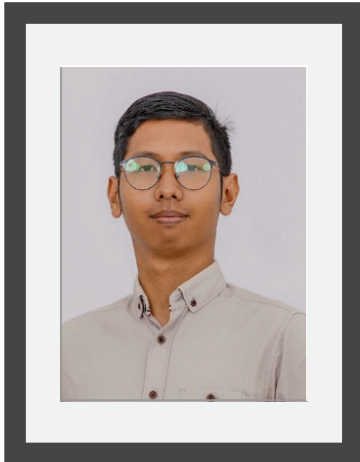
Guru Besar di bidang Perencanaan Kota dari Universitas Gadjah Mada. Selain mengajar beliau ditugaskan sebagai Tenaga Ahli di beberapa Kementerian. Beliau juga merupakan anggota eksekutif *Asian Planning School Association* (APSA) dan *Global Planning Education Association Network* (GPEAN). Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Ketua dewan Kebudayaan DIY, serta bergabung dalam Dewan Pakar MLH PP Muhammadiyah.

Topik Utama: Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Lingkungan

Prof. Ir. Bakti (Bobi) Setiawan, MA., Ph.D., is a professor in Urban Planning, and has taught for 4 decades at Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia. He is an alumnus of Architecture, UGM (1984). Graduated from Master Program in Urban and Regional Planning, University of Waterloo, Canada (1994). He obtained his Ph.D. in Community and Regional Planning from the University of British Columbia (1998). In 2001, he was appointed Director of the Center for Environmental Studies, UGM for 4 years. Later, he was assigned to the position of Director of the Urban and Regional Planning Study Program, Department of Architecture and Planning, UGM. In 2010, he was promoted as Professor in Urban Planning from Gadjah Mada University. In addition to teaching, he has been assigned as an Expert Staff to several Ministries. He is also an executive member of the Asian Planning School Association (APSA) and the Global Planning Education Association Network (GPEAN). Since 2023, he has served as Chair of the Yogyakarta Cultural Council and also a member of the Expert Council of the Muhammadiyah Central Executive Board (MLH).

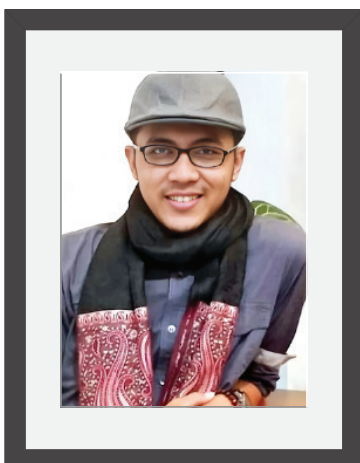
Keynote Topic: Community Development, Environmental Management

PROFIL PENULIS



Rizky Ramadhani Satrio Wibisono, S.Ark. Lahir di Bandarlampung, ia masuk pada Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada tahun 2020 dan lulus di tahun 2024. Minat akademiknya berfokus pada arkeologi masa kolonial, arkeologi perang, arkeologi lanskap, serta kajian permuseuman. Saat ini aktif menulis dan melakukan proyek freelance di bidang kajian warisan budaya, pemetaan warisan budaya, serta kepemanduan pariwisata dan warisan budaya. Ketertarikannya juga mencakup pengelolaan dan interpretasi tinggalan arkeologi masa perang dalam konteks museum dan pelestarian cagar budaya. Perjalanan penulis dapat dilihat lebih lanjut di laman media sosial LinkedIn: Rizky Ramadhani Satrio Wibisono.

Rizky Ramadhani Satrio Wibisono, S. Ark. earned a bachelor's degree in Archaeology from the Faculty of Cultural Sciences, Gadjah Mada University in 2024. His academic interests focus on colonial archaeology, war archaeology, landscape archaeology, and museum studies. He is actively writing and working on freelance projects in the cultural heritage studies, cultural heritage mapping, and tourism and heritage guiding. His interests also include the management and interpretation of wartime archaeological remains within the context of museums and cultural heritage preservation. You can learn more about the author's journey on his LinkedIn page: Rizky Ramadhani Satrio Wibisono.



Saifuddin Alif Nurdianto, M.Pd merupakan lulusan program sarjana Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) tahun 2016 dan magister Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 2018. Saat ini aktif sebagai staf pengajar sejarah di SMAN 1 Sambit, Ponorogo, dan Universitas Terbuka. Beberapa karya ilmiah yang sudah dihasilkan adalah “Kajian Poskolonial Gerakan Pemikiran dan Sikap Ulama Pesantren Tegalsari dalam Pusaran Konflik Multidimensional Di Jawa (1742-1862)” dalam *Theologia* Vol. 29, No. 1 (2018), “*Pesantren Tegalsari: The Synergy between Islam and Local Wisdom in Cultural Acculturation*”, dalam *Tahrir* Vol. 19 No. 1 (2019), “Dokter Bumiputera Lulusan Stovia dan Kontribusinya dalam Penanganan Wabah Flu Spanyol di Hindia Belanda (1918-1920)”, dalam *Patrawidya* Vol. 22 No. 1 (2021), dan “Mistifikasi Masyarakat Jawa Terhadap Pohon Beringin Sebagai Upaya untuk Konservasi Air Tanah dan Pencegahan Bencana Ekologis” dalam *Jantra* Vol. 17 No. 1 (2022).

Saifuddin Alif Nurdianto, M.Pd. earned bachelor of History Education from Universitas Negeri Yogyakarta in 2016 and Master of History Education from Universitas Sebelas Maret in 2018. He is currently active as a history teaching staff at SMAN 1 Sambit, Ponorogo, and the Open University. Some of the scientific works he has produced are "Postcolonial Study of the Movement of Thought and Attitudes of Tegalsari Islamic Boarding School Scholars in the Multidimensional Conflict Vortex in Java (1742-1862)" in *Theologia* Vol. 29, No. 1 (2018), "Tegalsari Islamic Boarding School: Synergy of Islam and Local Wisdom in Cultural Acculturation", in *Tahrir* Vol. 19 No. 1 (2019), "Native Doctors Graduated from Stovia and Their Contributions in Handling the Spanish Flu Outbreak in the Dutch East Indies (1918-1920)", in *Patrawidya* Vol. 22 No. 1 (2021), and "Javanese Community's Mystification of Banyan Trees as an Effort to Conserve Groundwater and Prevent Ecological Disasters" in *Jantra* Vol. 17 Number 1 (2022).



Anastasia Melati Listyorini, S.Sn., M.Hum. sedang menyelesaikan program doktoralnya di bidang Kajian Tari di *Taipei National University of the Arts* dan merupakan peneliti budaya Jawa yang berfokus pada isu migrasi, perempuan, agensi dan performativitas. Ia turut mengajar di *National Taiwan University* serta aktif dalam jejaring seni pertunjukan Asia Tenggara dan Asia Timur. Riset doktoralnya menelaah tari sebagai praktik identitas, iman, dan agensi, khususnya pada pekerja migran Indonesia di Taiwan.

Anastasia Melati Listyorini, S.Sn., M.Hum. is currently attending a doctoral program in Dance Studies at *Taipei National University of the Arts*. She is an outstanding Javanese cultural researcher focusing on issues of migration, women, agency, and performativity. She also teaches at *National Taiwan University* and is active in Southeast Asian and East Asian performing arts networks. Her doctoral research examines dance as a practice of identity, faith, and agency, particularly for Indonesian migrant workers in Taiwan.



Muhammad Faiz, S.Ark., M.A. mendapatkan gelar sarjana arkeologi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021 dan gelar master di *MA History of Art and Archaeology* di *School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London* dengan beasiswa SOAS-Alphawood pada tahun 2025. Ia telah mempublikasikan artikel ilmiah, seperti *Peran Adipati-Adipati Mangkunegaran Dalam Pelestarian Kerpurbakalaan Jawa Kuno (1853-1944)* di *Purbawidya: Journal of Archaeological Research and Development* (2024) dan *"Serat Selarasa: A Javanese tale of three princes with a list of the wayang-style illustrations"* di *Southeast Asia Library Group Newsletter* (2025). Selain itu, Ia juga berbicara di berbagai simposium yang di antaranya adalah *Towards a New Global History of Javanese Court Culture, Politics, and Governance* (2023) di Surakarta dan *KVVAK Young Scholars Symposium* (2025) di Rijksmuseum, Amsterdam.

Muhammad Faiz, S.Ark., M.A. earned a bachelor's degree in Archaeology from the Faculty of Cultural Sciences, Gadjah Mada University, in February 2021, and an MA in the History of Art and Archaeology at the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, under the SOAS-Alphawood Scholarship in 2025. He has published scholarly articles, including *"Peran Adipati-Adipati Mangkunegaran Dalam Pelestarian Kerpurbakalaan Jawa Kuno (1853-1944)"* in *Purbawidya: Journal of Archaeological Research and Development* (2024) and *Serat Selarasa: A Javanese tale of three princes with a list of the wayang-style illustrations* in *Southeast Asia Library Group Newsletter* (2025). He has also presented at symposiums such as *Towards a New Global History of Javanese Court Culture, Politics, and Governance* (2023) and *KVVAK Young Scholars Symposium* (2025) in the Rijksmuseum, Amsterdam.



Thibburhany, M.Sos. is a visual media researcher and practitioner whose work focuses on visual studies, film, and creative storytelling. His research explores visual archives, spatial representation, and practice-based research as a method of knowledge production through media creation. His research-based works include the documentary films *Bisikan Gebang* and *Wirama Raga* (2025), as well as the project *Designing Storytelling Destinations: Integrating Visual Archives of the Past to Highlight the Philosophical Essence of Cultural Heritage Artifacts* at Sonobudoyo Museum (2022). He also develops innovative artistic works such as *Wayang Kreasinema* (2023) and *Wayang Pong Jir Diponegaran* (2026), along with wayang performances that integrate digital music, visual

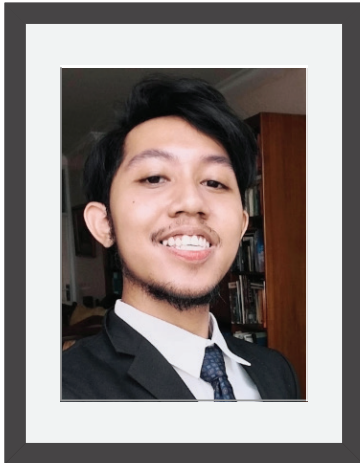
projection as a substitute for the traditional *kelir*, and narratives based on local stories such as *Balung Butho* from Sangiran (2024). His work reflects an ongoing exploration of visual media and culturally grounded storytelling within the context of Javanese tradition.

Thibburruhany, M.Sos. merupakan peneliti dan praktisi media visual yang berfokus pada kajian visual, film, dan pengembangan storytelling kreatif. Penelitiannya mencakup arsip visual, representasi ruang, serta pendekatan practice-based research sebagai metode penciptaan pengetahuan melalui produksi media. Penulis menghasilkan karya berbasis riset, diantaranya film dokumenter Bisikan Gebang dan Wirama Raga (2025), serta proyek kreatif Designing Storytelling Destinations: Integrating Visual Archives of the Past to Highlight the Philosophical Essence of Cultural Heritage Artifacts at Sonobudoyo Museum (2022). Selain itu, penulis mengembangkan karya kesenian inovatif seperti Wayang Kreasinema (2023), *Wayang Pong Jir Diponegaran* (2026), serta pertunjukan wayang dengan integrasi musik digital, proyeksi visual sebagai pengganti kelir, dan narasi berbasis cerita lokal Balung Butho dari Sangiran (2024). Karya-karya tersebut mencerminkan konsistensi dalam eksplorasi media visual dan pengembangan narasi berbasis budaya dalam konteks tradisi dan kebudayaan Jawa, melalui integrasi analisis teoretis dan praktik kreatif.



M. Yaser Arafat, MA. merupakan seorang dosen di Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menamatkan S1 Ilmu Sosiologi Agama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002-2007). Lalu menamatkan S2 Ilmu Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta (2011-2013). Saat ini sedang menempuh S3 Kajian Budaya di UNS Surakarta. Di tengah-tengah masyarakat aktif memberikan pengajian, penyuluhan, dan pendampingan perihal penguatan kebudayaan serta pelestarian, pemetaan, dan pemindaian makam-makam kuno di Jawa. Bukunya yang sudah terbit di antaranya adalah *Nisan Hanyakrakusuman: Batu Keramat dari Pasarean Sultanagungan di Yogyakarta* (2021, Cetakan Kedua: 2023) dan *Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya* (2025), dan beberapa buku lain.

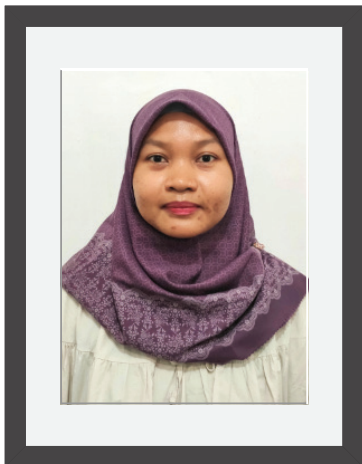
M. Yaser Arafat, MA. is a lecturer in the Sociology of Religion Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. He completed his Bachelor's degree in Sociology of Religion at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002-2007). Later, he completed his Master's degree in Anthropology, Faculty of Cultural Sciences, UGM Yogyakarta (2011-2013). Currently pursuing a Doctoral degree in Cultural Studies at UNS Surakarta. He actively provides religious studies, counseling, and assistance for local communities regarding cultural safeguarding, such as the preservation, mapping, and scanning of ancient tombs in Java. His published books include *Nisan Hanyakrakusuman: Sacred Stone from Pasarean Sultanagungan in Yogyakarta* (2021, Second Edition: 2023) and *Nisan Hamengkubuwanan: Islamic Tomb Artifacts of the 18th-19th Centuries in Yogyakarta and its Surroundings* (2025), and several other books.



Rahmadi Fajar Himawan, S.Sos. meraih gelar Sarjana Sosial dari Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia, pada 2019. Sempat aktif di *non-governmental organization* seperti *Rujak Center for Urban Studies* (2018), Unit Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI (2019), dan *Center for Indonesia's Strategis Development Initiatives* (CISDI) (2020-2021), sebelum berkarir sebagai *market researcher* di *Kadence International* hingga 2025. Saat ini menempuh pendidikan Magister Sosiologi di Departemen Sosiologi, Universitas Gadjah Mada. Beberapa hasil riset independen/bersama yang telah dipublikasikan ataupun disampaikan dalam seminar nasional antara lain *An Exercise in Agency: Experiences*

of Youth and Enabling Support Structures in claiming their SRHR (2020), *Topeng Betawi Dancer in the Moment of Silence: Representation of Betawi Identity in The Paintings of Sarnadi Adam* (2025), dan *Limbo Position and Vulnerability of Campursari Singer: Memory of Wayang Hura-Hura in Pre- COVID 19 Jakarta* (2026). Beberapa tulisan populer dipublikasikan oleh *rujak.org* dan *Inside Indonesia*. Selain jurnal dan tulisan populer, sejumlah cerita pendek (dengan nama pena Cecep Himawan) telah dipublikasikan oleh *SuaraKita* dan *Perspektif Magazine*. Salah satu cerita pendek berjudul "Nama" termuat dalam antologi cerpen *Biodata Pelangi* yang diterbitkan *SuaraKita* pada 2025.

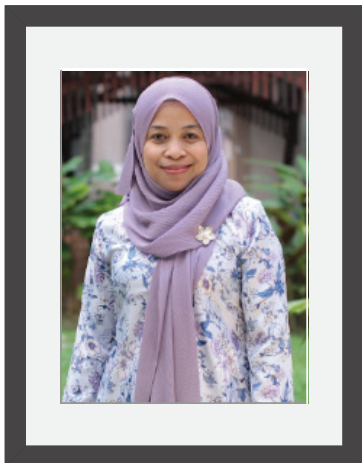
Rahmadi Fajar Himawan S, Sos. earned his bachelor's degree in Sociology, Universitas Indonesia, in 2019. He was active in non-governmental organization such as the *Rujak Center for Urban Studies* (2018), Unit Kajian Gender dan Seksualitas Fisip UI (2019), and center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) (2020-2021), before pursuing a career as a market researcher at *Kadence International* until 2025. He is currently pursuing a Master in Sociology at Universitas Gadjah Mada. He has published or presented in national seminar, including *An Exercise in Agency: Experiences of Youth and Enabling Support Structures in claiming their SRHR* (2020), *Topeng Betawi Dancer in the Moment of Silence: Representation of Betawi Identity in The Paintings of Sarnadi Adam* (2025), and *Limbo Position and Vulnerability of Campursari Singer: Memory of Wayang Hura-Hura in Pre-COVID 19 Jakarta* (2026). He also published several popular articles by *rujak.org* and *Inside Indonesia*. He actively published several short stories (under the pen name of Cecep Himawan) published by *SuaraKita* and *Perspektif Magazine*.



Nuzuli Ziadatun Ni'mah, S.T., M.A. saat ini bekerja di Jakarta sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pariwisata setelah mengawali karirnya di Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019. Telah menamatkan jenjang S1 di Universitas Gadjah Mada pada Program Studi Teknik Arsitektur UGM pada tahun 2015. Ketertarikannya pada ilmu sosial membawanya meneruskan ke jenjang master pada Program Studi Magister Antropologi Universitas Gadjah Mada dan saat ini sedang menempuh studi Doktor Kajian Pariwisata di kampus yang sama. Kini perhatiannya banyak diberikan pada fenomena pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Perspektif multidisiplin yang dipelajari

dari sarjana hingga studi terakhir memberikan pengkayaan sudut pandang dalam melihat fenomena sehari-hari. Saat ini sedang menulis disertasi dengan topik *event* dan festival di Yogyakarta.

Nuzuli Ziadatun Ni'mah, S.T., M.A., is a civil servant at the Ministry of Tourism in Jakarta. He began her service at the Creative Economy Agency in 2019. She completed her undergraduate degree in 2015 at Gadjah Mada University, Architectural Engineering Study Program. Her interest in social sciences led her to pursue a master's degree in Anthropology at Gadjah Mada University, She is currently pursuing a Doctoral degree in Tourism Studies at the same university. Her current focus is on the phenomena of tourism and the creative economy in Indonesia. The multidisciplinary perspectives she has learned from her undergraduate studies as well as her master and doctoral studies have enriched her perspectives in viewing everyday phenomena. She is currently writing a dissertation on the topic of events and festivals in Yogyakarta.



Asst. Prof. Ts. Dr. Irina Safitri Zen adalah seorang Asisten Profesor di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota pada Kulliyyah of Architecture and Environmental Design, IIUM. Sebagai seorang Teknolog terdaftar (Ts.) dan profesional keberlanjutan bersertifikasi ISSP, beliau memiliki keahlian di bidang pengelolaan lingkungan, tata kelola iklim perkotaan, dan keberlanjutan berbasis warisan budaya. Dr. Zen mengintegrasikan pelestarian budaya ke dalam pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan *Traditional Ecological Knowledge* (TEK) untuk menjaga keberlanjutan lanskap sawah terasering Subak di Bali yang diakui sebagai Warisan Dunia UNESCO.

Melalui filosofi *Tri Hita Karana*, beliau menghubungkan praktik-praktik ritual dengan ketahanan sumber daya air di tengah tekanan pariwisata, sehingga memperkuat ketahanan kawasan tersebut. Beliau juga menyoroti model pariwisata multipihak di Geopark Nglanggeran yang memadukan pelestarian warisan budaya dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) guna menciptakan keberlanjutan ekonomi. Karyanya di Tanjung Piai, Johor, menampilkan strategi pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sementara penelitiannya di Sungai Subayang mengintegrasikan kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan ekologi. Dalam UNESCO MasterClass on Man and the Biosphere (MaB)/ World Heritage (Sesi 2), beliau menerapkan kerangka *Socio-Ecological Systems* (SES) yang dikembangkan dari penelitian Subak ke dalam pedoman kawasan cagar biosfer. Pendekatan ini juga menjadi dasar pengembangan modul *Education for Sustainable Development* (ESD) mengenai tata kelola adaptif dan urbanisme rendah karbon. Kontribusi Dr. Zen menjembatani penelitian, kebijakan, dan pelatihan untuk mendukung pencapaian SDGs yang inklusif. Beliau juga berkontribusi dalam penyusunan pedoman UNESCO Jakarta mengenai penerapan ilmu keberlanjutan bagi kawasan cagar biosfer, dengan mendorong keterkaitan antara aspek budaya dan ekonomi di kawasan warisan.

Asst. Prof. Ts. Dr. Irina Safitri Zen is an esteemed Assistant Professor in Urban and Regional Planning at IIUM's Kulliyah of Architecture and Environmental Design. A registered Technologist (Ts.) and ISSP sustainability professional, she excels in environmental management, urban climate governance, and heritage-led sustainability. Zen integrates cultural preservation into sustainable development, championing traditional ecological knowledge (TEK) to sustain Bali's Subak UNESCO rice terraces via Tri Hita Karana philosophy, linking rituals to water security amid tourism threats for resilience—highlighting Nglanggeran Geopark's multistakeholder tourism model blending heritage with corporate social responsibility (CSR) for economic viability. Her works in Johor's Tanjung Piai features community-based sustainable development goals (SDG) strategies, and the Subayang River work embeds local wisdom for ecological balance. In UNESCO's MasterClass on MaB/World Heritage (Session 2), she applies socio-ecological system (SES) frameworks from Subak research to biosphere guidelines, fostering education for sustainable development (ESD) modules on adaptive governance and low-carbon urbanism. Her contributions bridge research, policy, and training for inclusive SDGs. She contributed to UNESCO Jakarta's guidelines using sustainability science for biosphere reserves, promoting cultural-economic ties in heritage sites.

FULLPAPERS

**from the International
Symposium on Javanese
Culture**

Volume 7, 2026



EFEKTIVITAS BENTENG BALUWARTI DALAM PERISTIWA GEGER SEPOY (1812): SEBUAH TINJAUAN BATTLEFIELD ARCHAEOLOGY

THE EFFECTIVENESS OF THE BALUWARTI FORT IN THE GEGER SEPOY (1812): A BATTLEFIELD ARCHAEOLOGY REVIEW

Rizky Ramadhani Satrio Wibisono

Graduate Student of Archaeology, Faculty of Cultural Science,
Universitas Gadjah Mada

Corresponding author: rizkyramadhanisatriowibisono@gmail.com

Abstract

In nineteenth-century Java, escalating colonial conflicts compelled local rulers to adapt their defensive architecture to changing modes of warfare. The Baluwarti Fort of the Yogyakarta Palace represents a critical military structure during the *Geger Sepoy* (1812). Using a battlefield archaeology approach, this study examines the fort's spatial configuration to assess its operational effectiveness under combat conditions. The analysis shows that the fortification did not fully adopt bastioned-fort principles, resulting in wide bastion intervals that exceeded the effective range of the Sultanate's artillery and created defensive dead zones along the curtain walls. These architectural limitations, compounded by contemporary military and social conditions, contributed significantly to the failure of the palace's defensive system against the British assault.

Keywords: Baluwarti Fort, Keraton Yogyakarta, *Geger Sepoy*, Battlefield Archaeology, bastion.

Abstrak

Pada abad ke-19, meningkatnya konflik kolonial mendorong penguasa lokal di Jawa untuk menyesuaikan arsitektur pertahanan mereka terhadap perubahan pola peperangan. Benteng Baluwarti Keraton Yogyakarta merupakan struktur militer penting yang berperan dalam peristiwa Geger Sepoy (1812). Dengan menggunakan pendekatan arkeologi medan perang (battlefield archaeology), penelitian ini menganalisis konfigurasi spasial benteng untuk menilai efektivitas operasionalnya dalam kondisi tempur. Hasil kajian menunjukkan bahwa Benteng Baluwarti tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip benteng ber-bastion, sehingga menghasilkan interval antar bastion yang melebihi jangkauan efektif artileri Kesultanan dan menciptakan zona mati pertahanan pada dinding tirai. Keterbatasan

arsitektural tersebut, yang diperparah oleh kondisi militer dan sosial sezaman, berkontribusi signifikan terhadap kegagalan sistem pertahanan keraton dalam menghadapi serangan Inggris.

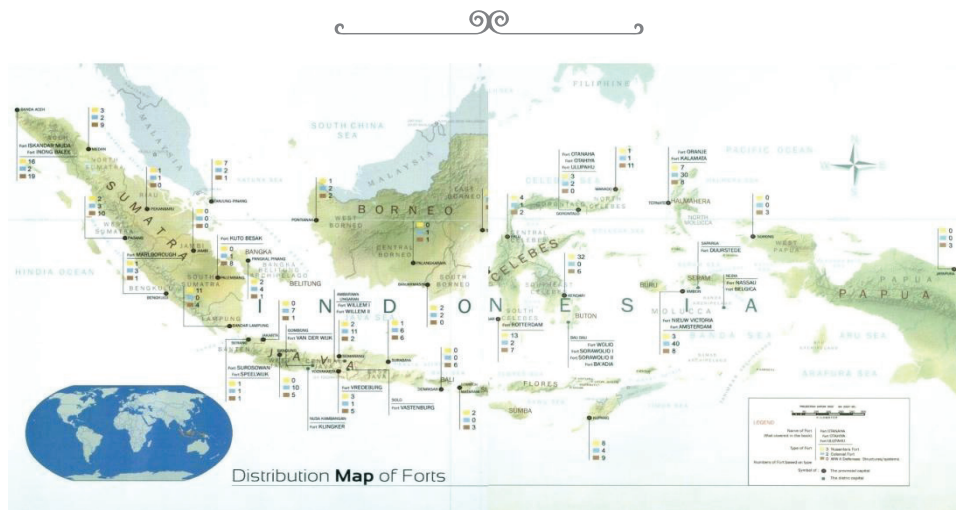
Kata kunci: *Beteng Baluwarti, Keraton Yogyakarta, Geger Sepoy, Battlefield Archaeology, bastion.*

INTRODUCTION

The socio-political dynamics in 19th century Java were characterized by the volatile conditions following the Third Javanese War of Succession (Ricklefs, 2005:219). Political instability compelled both traditional and colonial powers to establish secure zones to mitigate the escalation of conflict that could lead to war. Defensive architecture, such as fortifications, was regarded as a means to provide both protective functions and effective resistance. The competition between local and foreign rulers in implementing defensive systems was intrinsically linked to their respective military architectural technologies. The evolution of human cognition, progressing in tandem with other socio-technological activities, fostered new patterns in the development of increasingly sophisticated fortress modifications (Sacket, 1918).

Prior to the 15th century, combat patterns were generally characterized by close-quarters engagement utilizing traditional weaponry and the strategic exploitation of natural terrain (Sacket, 1918: 694 – 696). These combat patterns were anticipated through defensive architecture that favoured high-altitude locations, elevated curtain walls, and the integration of observation towers (Mišić & Obradović, 2025:2). Sacket (1918:705 – 706) argues that fortification systems are closely linked to the development of gunpowder technology. Initially, gunpowder had small impact on fortress structures; however, the introduction of iron cannonballs in France during the sixteenth century prompted substantial changes in fortification design, as defensive architecture began to adapt to advances in weaponry to enhance defences. This architectural shift was not confined to Europe but extended to the Indonesian Archipelago through interactions with European nations (Rinandi & Suryaningsih, 2015:264).

Rinandi & Suryaningsih (2015) argue that chronologically, fortifications in the Indonesian Archipelago are categorized into three types: traditional fortresses, colonial fortresses, and World War II defensive structures. According to Map 1 produced by the Ministry of Education and Culture, the distribution of fortifications throughout Indonesia appears relatively uniform. In Yogyakarta, two prominent fortifications exist: Fort Vredeburg and the Baluwarti Fort of the Yogyakarta Palace. Fort Vredeburg, a colonial fortification established in 1760 following the Treaty of Giyanti (February 13, 1755), was functioned by the VOC as a settlement integrated with a bastion defence system (Haji, Sulistya, & Suharja, 2007:6). The other fort in Yogyakarta, the Baluwarti Fort was used by the Yogyakarta Palace as the outermost defence system. These two forts are notable for their proximity and their historical correlation during the *Geger Sepoy* incident.



Map 1. Distribution of Fortification in Indonesia
Source: Passchier, Sumintardja, & Subijono, 2012

The *Geger Sepoy* incident forced Sri Sultan Hamengku Buwono II to surrender, subsequently leading to his exile. The failure of the Baluwarti Fort's defensive system to withstand the British assault on June 20th, 1812, raises critical questions regarding its underlying causes. Current historical narratives predominantly focus on the dichotomy of the internal leakage of vital information as the primary cause for the palace's fall. The technical and structural aspects of the Baluwarti Fort defence system implemented by the Yogyakarta Palace have remained scarce for analysis. Abbas (2002) in Alim & Nurul Hidayah (2025:102) states that the archaeological investigation of fortifications aims to analyze their defensive functions and to manifest the political authority and social conditions of the past. Build on the same perspective in archaeology, the author formulates fundamental questions regarding the defensive architectural components and their functions within the Yogyakarta Palace's defence system, which include:

1. What are the constituent components of the defensive architecture within the Baluwarti Fort of the Yogyakarta Palace?
2. To what extent was the Baluwarti Fort's defence system effective in countering British strategies during the *Geger Sepoy* incident, as analyzed through a battlefield archaeology approach?

RESEARCH METHODOLOGY

To examining material remains from conflict perspective, an integrated study encompassing both the object and its context is required. Battlefield archaeology has demonstrated its capacity to reveal patterns of human behaviour under combat conditions, particularly through the analysis of historically battlefield sites. Battlefield actions are shaped by evolving warfare technologies embedded within specific cultural and social contexts, resulting in distinct depositional patterns at military sites from different periods. These patterns, preserved in the archaeological record, reflect technological change and adaptive responses to warfare (Scott & Mcfeaters, 2011:107).

Kim (2014:246) incorporates fortification systems into archaeological studies as an inseparable component of war spaces. The study of fortress architecture constitutes a unique military site category, as it preserves data on both the anticipatory and provocative functions of

a battle (Scott & McFeaters, 2011:104). Such uniqueness is grounded in territorial boundaries, climatic variations, and the specific characteristics of the state (Toy, 1955:xxii).

War spaces serve as an analytical component of the battlefield archaeology approach, used to examine the causes, processes, and impacts of material remains resulting from historical conflicts or battles (Kim, 2014:246). Scott & McFeaters (2011) categorize the analytical components essential for examining sites correlated with armed conflict as follows: military support facilities, troop camps, headquarters, armories, logistical processes, and prisoners of war. This approach serves as a reference for identifying the components and analyzing the functional effectiveness of each defensive architectural element within the Baluwarti Fort of the Yogyakarta Palace.

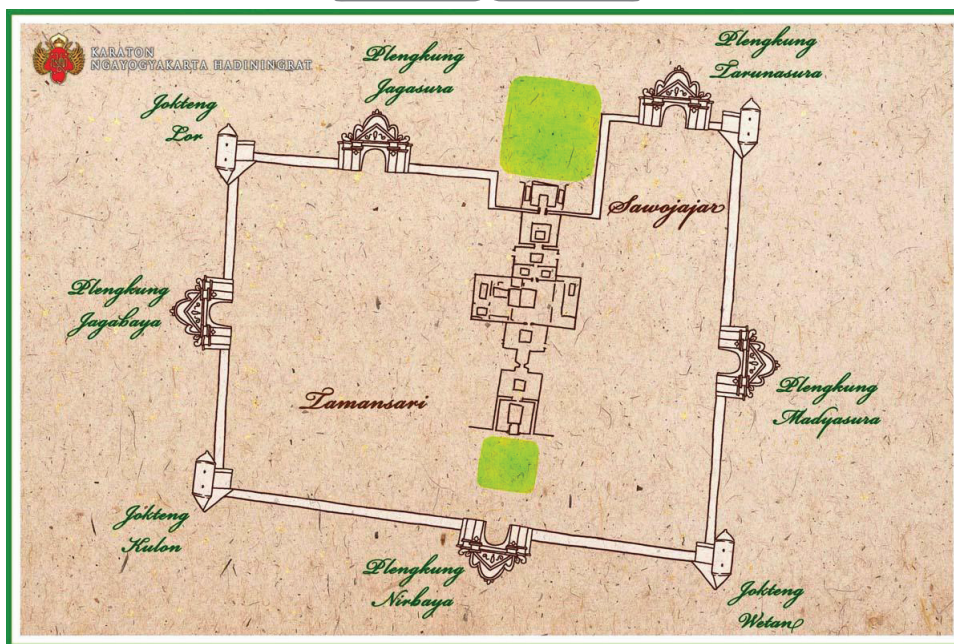
Within the framework of battlefield archaeology, the Baluwarti Fort is not examined merely as a defensive structure, but as an operational war space in which architectural design, artillery capability, troop behaviour, and command logic intersected. The failure of the fort during the *Geger Sepoy* reflects a systemic breakdown in this interaction, where spatial configuration constrained defensive behaviour and amplified technological asymmetry.

RESULT AND DISCUSSION

THE DIMENSIONAL ASPECTS OF THE YOGYAKARTA SULTANATE'S DEFENSES

Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) emphasizes that the urgency of developing defence territories is to counter enemy threats, ensure security, and mitigate disasters. The military landscapes had important role in developing defence territories, which is used a spatial pattern to give a social representation and the significance of military logistical strength in utilizing available resources (Kim, 2014:245). The military landscape observable at the Yogyakarta Palace is divided into two spatial spectrums: macro-defensive and micro-defensive. The macro-defensive spatial spectrum of the palace is formed by its topographical and hydrological landscape, which is divided by six river streams—three rivers on the western side (Winongo River, Bedog River and Progo River) and three on the eastern side (Code River, Gajah Wong River and Opak River) (Sapardan, Suryandi, & Ardiansyah, 2021). The palace's position between these rivers represents the community's local wisdom, symbolizing it as situated on the back of a tortoise. This placement is rooted in the community's observation of the destructive impacts of cold lava eruptions (*lahar*) from Mount Merapi. From another perspective, this macro-defensive spatial spectrum serves as a natural fortification obstructing enemy mobilization toward the palace.

The Yogyakarta Palace's use of the landscape within the micro-spectrum continues to prioritize the advantages of landform features. The micro-defensive spatial spectrum of the Yogyakarta Palace is identified through archaeological remains including the *Cepuri* Fort (inner wall), the *Baluwarti* Fort (outer wall), and the *Jagang* (moat). These micro-defensive components form a joint military and landscape ecosystem. The combination of these elements aims to provide legitimacy, stimulate marvel, intimidate, or inspire those who interact with them (Kim, 2014: 245). Such defensive patterns were highly potential inspired by the defensive ecosystem of the Mataram Islam capital in Kotagede. The Yogyakarta Palace leadership recognized that these patterns remained relevant to contemporary developments. However, the increase in open interactions with new modes of warfare led to ongoing modifications and adaptations of the fortifications.



Sketch 1. Layout of Yogyakarta Royal Palace

Source: kratonjogja.id, 2017

Kim (2014) identifies defensive architectural objects, such as palisades, forts, towers, moats, bastions, defensive ditches, ramparts, natural structures, and any structures representing a significant investment of labour and resources in their construction and maintenance. The Yogyakarta Palace's defence system is categorized within the defensive architecture identified by Kim (2014) as a significant investment by the palace to create a 'war space' across both micro and macro spectrums. Nagornaia & von Lingen (2023:574) state that geographical, social, historical, and mental correlations constitute the primary analytical components for identifying defence systems and battle patterns within the framework of military history. Regarding the dimensional perspective of the Yogyakarta Palace's defence, these geographical, social, historical, and psychological correlations are manifested in the Baluwarti Fort.

The social and political context during the construction of the Baluwarti Fort reveals shift in social frameworks and, roles, as well as the emergence of new strategic practices. This is a result of the polarization of Javanese political power in 1755 following the Treaty of Giyanti, which stemmed from the struggle for the Mataram Islam throne. This conflict is subsequently known as the Third Javanese War of Succession (1746-1757) (Ricklefs, 2005:219). Furthermore, Ricklefs notes that while the warfare of the period was directly proportional to advancements in military technology, these developments failed to achieve optimal results. This occurred because the conflicting parties remained steadfast in their adherence to supernatural roles and customs as a form of legitimacy for Javanese monarchs, rooted in the concept of the *dewa raja*. *Dewa raja* which is the concept about relationship pattern of the Javanese monarchy is oriented toward harmonizing the universe (macrocosm) with the kingdom (microcosm) (Geldern, 1982:2-5). This pattern serves as a tactical paradigm for pursuing of both philosophical and practical objectives.

Sri Sultan Hamengku Buwono I commissioned numerous large-scale and monumental constructions to reinforce his legitimacy as a majesty (Ricklefs, 1974, p. 84). Unfortunately, this initial defensive space functioned more as a *de facto* territorial boundary of the *kuthagara* (center

of power), not solely for defensive purposes. Between 1771 and 1785, the construction of the palace's initial defensive structures remained relatively simple. Early depictions of the Baluwarti Fort, preserved by Nelly (1771) and Brandes (1785), illustrate a defensive system consisting of two layers of palisades guarded by spearmen (Figure 1).

During the period when Raden Mas Sundoro ascended to the position of crown prince and exercised considerable influence, significant changes occurred in the function and structure of the Baluwarti fortifications. The architectural transformation of the Baluwarti Fort represented a commitment to creating a mutually influential military and political ecosystem. This was rooted in the reality that political power in Java was synonymous with military strength; thus, the abolition of military power was equivalent to losing the very substance of statehood (Ricklefs, 1974:423).



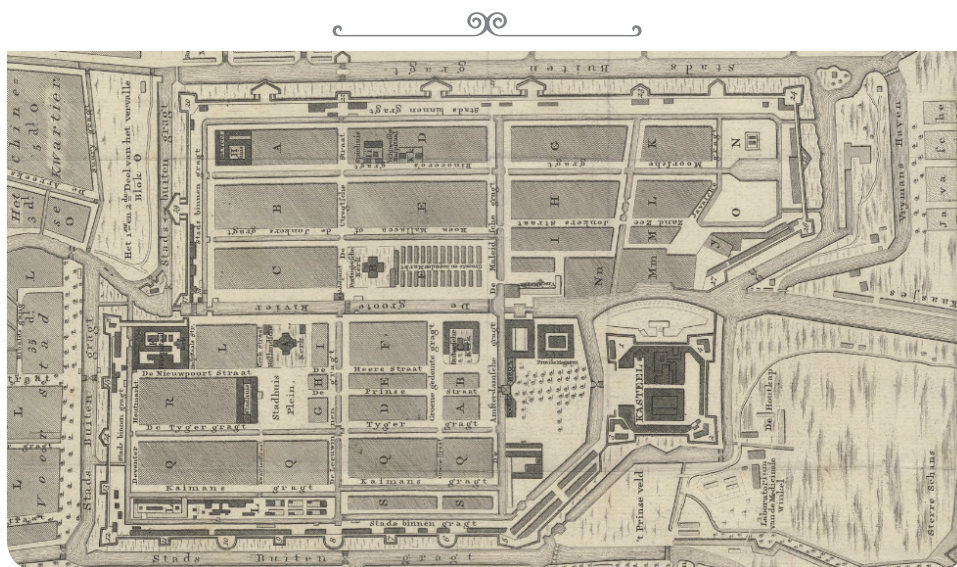
Figure 1. Yogyakarta Royal Palace and Baluwarti Fort
Source: Nelly, 1771

THE ARCHITECTURAL TRANSFORMATION OF BALUWARTI FORT

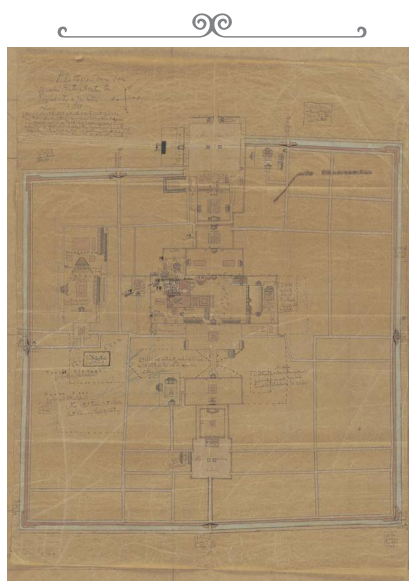
The Baluwarti Fort serves as the outermost fortification of the Yogyakarta Palace, with a western wall measuring 940 meters, an eastern wall measuring 1,140 meters, and a southern wall measuring 1,200 meters (Sketch 1). The structure of the fort exhibits an asymmetrical shape on its eastern side, as it was designed to accommodate the *nDalem Sawojajar*, the residence of the Crown Prince during the reign of Sri Sultan Hamengku Buwono I. The etymology of the name 'Baluwarti' is subject to several historical narratives. The most widely accepted theory suggests that the term originates from the Portuguese word *baluarte*, meaning bulwark or bastion (Priyomarsono, Fatimah, & Kushartomo, 2021:16). Another origin is found in local oral tradition, which interprets 'Baluwert' as an acronym: *ba* from *tiba* (to fall), *lu* from *pung-lu* (bullet or projectile), and *werti* from *wreti* or *wresthi* (rain). In overall, Baluwarti is defined as a fortress designed to repel the heavy rain of enemy cannon fire and weaponry

. Each perspective on the fortress's toponymy converges on the primary function as a defensive architectural component within the palace's military space.

G.W. Wiese reported the architectural transformation of Baluwarti Fort to H.W. Daendels on November 14, 1809. In that report, Patih Danurejo II observed that Crown Prince was reshaping the palace fortifications to resemble the Dutch fortresses in Batavia (Carey, 2019:252). The report refers to structural reinforcement, the replacement of wooden palisade constructions with thick masonry walls, and the addition of bastion defence systems at each corner of the fort. This transformation was based on the palace officials' observations of the VOC's defensive patterns in Batavia. The 'letter' (or structure) referred to by Wiese most likely pertains to the Batavia Castle, which Mas Tumenggung Wiroguno had visited in the 1780s (*ibid*). A comparison between Sketch 1 and Map 2 reveals, at a glance, spatial pattern similarities between the Baluwarti Fort and the Batavia Castle.



Map 2. The spatial layout of Batavia, featuring city walls and fortifications, 1750 - 1800
Source: KITLV COLBN Port 57 N 50, 1750



Map 3. Spatial layout of Keraton and Baluwarti Fort, 1888
Source: KITLV D E 52,8, 1888

Carey (2019) state that Mas Tumenggung Wiroguno's visit to Batavia during the 1780s served as the primary reason for the transformation of the Baluwarti Fort into its current form. The spatial distribution in Batavia encompasses the city center, residential areas, commercial zones, and military sectors (Novita & Mahmud, 1999:83). Sri Sultan Hamengku Buwono II sought to adapt the layout and components of the Batavia Castle, tailoring them to the palace's philosophical framework, geographical conditions, and military doctrines. The Sultanate's efforts to strengthen the military technology were undertaken in preparation for a major war against foreign powers. (Ricklefs, 2005:246). The distribution of spatial requirements within the Baluwarti Fort tends to follows the spatial distribution patterns of Batavia.

Following the Sultan's efforts to strengthen the military technology, here, a few of structural reinforcement was conducted, e.g. replacing the surrounding wooden palisades with double-sided walls, 55centimeters thick, and add a *bligon* (a mixture of sand, lime, and red brick) as the exterior facing layer of the fortress walls (Admin, 2017). Inside the rampart, soil excavated from the *jagang* (moat) was added to reinforce the existing structure. The rampart was further strengthened with a right-angled triangular embankment on the interior side. Each side of the wall featured a single gate known as a *pelengkung* (gate), the northern side, which had two. At every corner of the rampart, bastions were added as part of the defensive system equipped with artillery.

The wooden palisades depicted in the works of A. de Nelly (1771) and Jan Brandes (1785) illustrate that these structures were built in multiple layers and guarded by spearmen. Referring to Keeley, Fontana, & Quick (2007), the early forms of these defensive structures are classified as *enceintes*. An *enceinte* or *curtain* serves as a barrier designed to prevent both physical access and visibility toward a protected location (Keeley et al., 2007:57). These barriers include palisades and moats that separated the private spaces of the elites residing within. Although the palisade physically resembles a standard wooden wall, it does not necessarily function as a practical defensive component. Within the geographical hierarchy of Mataram Islam's power, the fortress serves as the boundary for the *Kuthagara* (the capital's core). In this respect, the *kuthagara* region was reserved exclusively for high-ranking nobility and *priyayi*, as it was perceived as the spiritual and magical center for Javanese society (Nurhajarini, Triwahyono, & Gunawan, 1999:19).

In 1780s, the fort's orientation was shifted from philosophical from to a military function. This transition occurred because Raden Mas Sundoro held a strong anti-colonial stance. Upon ascending the throne, the palace was increasingly prepared for war rather than accepting offers of coalition, as had been the case under Paku Buwono IV. (Ricklefs, 2005:246). These preparations included the construction of parapets without embrasures along the existing curtain walls (Figure 2). The upper section of the fortifications was configured as a *terreplein*, formed by the rampart structure, which functioned as an internal access route for troop movement and redeployment during combat. Access to the *terreplein* was provided at each corner of the Baluwarti Fort via stairways, as well as through the southern *pelengkung*, enabling the circulation and concentration of defensive forces along the fort's perimeter.

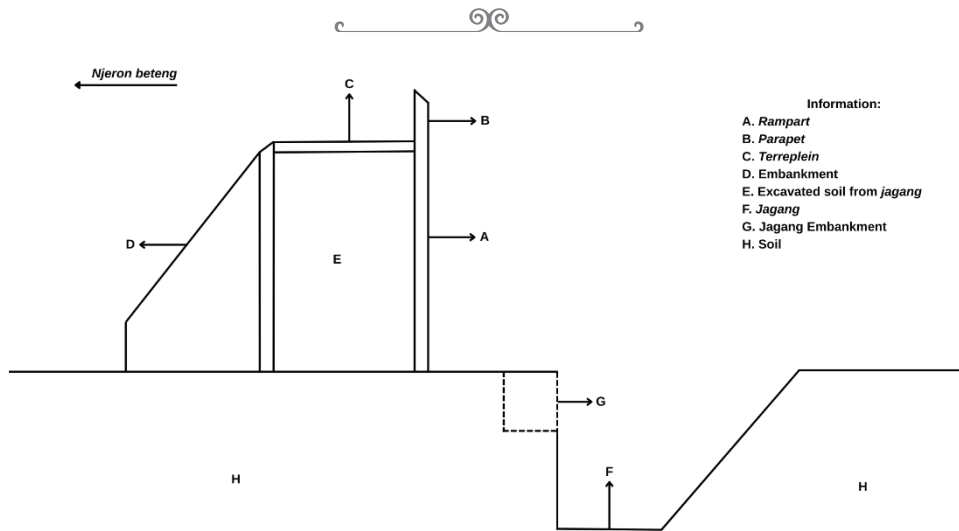


Figure 2. Cross section of Baluwarti Fort
Source: Self documentations, 2025

The Yogyakarta Palace has five *pelengkung* distributed across the four cardinal directions. The northern sector contains two gates (*Tarunasura* and *Jagasura*), while the eastern (*Madyasura*), southern (*Nirbaya*), and western (*Jagabaya*) sectors each contain one. Observation of the map in *Plattegrond van den ganschen Benteng Kraton te Jogjakarta in zijn vollen omvang* (1888) reveal that in the northern and western sectors, there were *padarakan* (guard posts) were located relatively close to each gate. The absence of similar legends for the eastern and southern gates suggests a different security priority pattern compared to the other gateways.

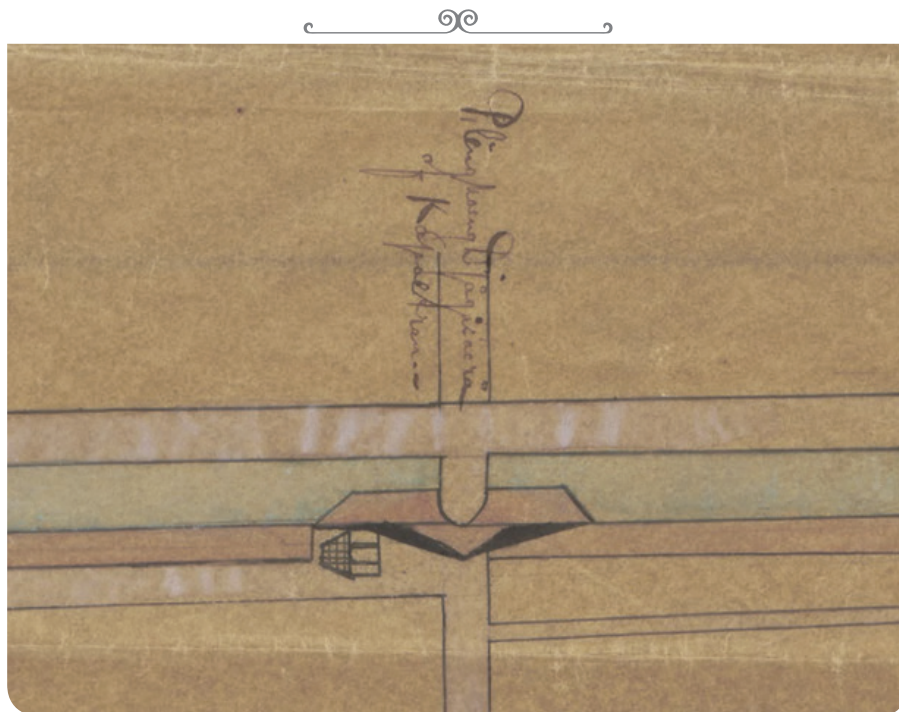


Figure 3. *Padarakan* (guard post) beside *Pelengkung Jagasura*
Source: KITLV D E 52,8, 1888

An 1848 sketch titled *Zuidelijke poort der kraton van Djocjakarta* illustrates the southern *pelengkung* featuring a tower atop the terreplein, with bartizans added to the outer corners of the gateway. The exact function of the tower depicted in the sketch remains undetermined. Based on current field conditions, only the foundation of said tower remains on the terreplein (Sketch 2). The presence of both bartizans and a tower at the *Pelengkung Nirbaya* suggests heightened surveillance over the *Alun-Alun Kidul*. The security of the *Alun-Alun Kidul* was a high priority, as the palace utilized the area as a *gladhen* (training field) for soldiers, particularly leading up to Daendels arrival at the palace (Carey, 2019:243). Based on these considerations, the bartizans and the tower at the *Pelengkung Nirbaya* were crucial for surveillance of the palace's military training facility.

Further, the other part of the architecture is the *jagang* (moat), a manufactured architectural component located on the exterior of the Baluwarti Fort. An excavation conducted by the Department of Archaeology, Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada, and the Cultural Office of Yogyakarta (*Kundha Kabudayan*) on May 15–20, 2013, successfully revealed the *jagang* structure in the southern sector, adjacent to the *Nirbaya* Gate. The excavation results show that the vertical revetment (*talud*) of the *jagang* is 7 meters deep, with the upper 1–2 meters coated in *bligon* and featuring a non-perpendicular inclined plane. The horizontal width of the upper and lower sections remains unconfirmed; however, the excavation findings suggest an asymmetrical moat profile, specifically a *fossa punic*a (Figure 3). This configuration is designed to prevent enemies from escaping the moat due to its steep elevation (Keeley et al., 2007:60).

The systematic transformation at the corners of the Baluwarti Fort adapted the bastion form. A bastion, locally referred to as *pojok benteng* (*jokteng*), is an integrated defensive system designed for firearm-equipped troops to repel attacks, provide fire covering to adjacent bastions, and serve as a surveillance post for the surrounding area (Alim & Nurul Hidayah, 2025; Keeley et al., 2007). The bastion system commonly used in fortresses by the VOC and reached the pinnacle of its perfection during the 16th century (Sacket, 1918:706). The bastions of Baluwarti Fort generally take an arrowhead shape, with the four corners named after the cardinal directions. Within a single bastion, the defensive architectural components consist of bartizans, ramparts, embrasures, loops, merlons, and alleys.

The palace bastions utilize an arrowhead configuration, modified with three bartizans at their corners. This design functions to minimize the impact of dead ground from the various sides of the existing bastions (Keeley et al., 2007:69). Each bastion is equipped with ten loops designed for the placement of heavy artillery. At the rear of the ramparts in the eastern sector bastions (*Jokteng Lor Wetan* and *Jokteng Kidul Wetan*), there are roofed rectangular structures and alleys. According to local accounts, these buildings consist of hollow spaces extending into the lower section of the fortress structure. It remains unclear why these two features are exclusively found in the eastern sector. However, I strongly suspected that the architectural design of the eastern sector corresponds to the distribution of troop strength.



Sketch 2. *Pelengkung Nirbaya* with two *bartizan* (black circles) and watch tower, 1848
Source: KITLV 37A130, 1848

The spatial division within the *njeron beteng* (inner fortress) utilizes toponyms based on the owners of the *ndalem* (aristocratic mansions), the professions of the *abdi dalem* (palace servants), and the specialized skills of the servants residing there. Within the residential clusters of *njeron beteng*, there is the Taman Sari Water Castle, which served as a dedicated communal space for the kings and nobility. Dumarçay (1978:589–623) in Carey (2019:5) mentions that the Taman Sari Water Castle served a dual function that intersected with existing military operations. The military component referred to by Dumarçay pertains to the hollow chambers in the underground tunnels, which are believed to have served as the palace's sites for weapons production¹. This pattern indicates that the palace sought spatial efficiency by integrating residential, communal, and defensive zones into overlapping layers within the Baluwarti Fort area.

BALLISTIC CAPABILITY ANALYSIS: THE PALACE VS THE BRITISH

The morphological transformation of the bastions (*jokteng*) serves as a reference for the shifting military doctrine of the Yogyakarta Sultanate. The influence of the Napoleonic Wars is evident in Daendels's reorganization of cavalry and artillery units in Java, utilizing indigenous troops. The Prangwedana Legion, which Daendels referred to as the 'Napoleonic Grande Armée of Java', transformed became a formidable new threat to local rulers (Raharjo, 2024:12 – 13).

During the British occupation, Raffles established light cavalry units composed of indigenous personnel, specifically intended to augment the existing British cavalry forces (Harfield, 2000:175). Shoffner (1990:8) delineates the duties of the light cavalry as reconnaissance, screening, vanguard operations, and the pursuit of retreating enemies. The mass deployment of cavalry units proved effective in maneuvering, as horses provided superior stamina and speed.

¹ Information presented by Egerton (1815) as cited in McKinnon & Carey (2024) states that the position was located in the western sector of Taman Sari (near the Gapura Agung Taman Sari). This account differs from the information provided by R.M. Ditra Syahrul on December 16, 2025.

During the British siege of the Baluwarti Fort, the 22nd Light Dragoons and the Madras Horse Artillery played a crucial role (Carey, 2019).

Drawing upon European artillery tactics that evolved during the 18th century, the British forces relied on maneuverability, mobility, and high destructive impact. This pattern emulated the massive Napoleonic artillery tactics designed to achieve the strategic objectives of an assault (Hutten, 2015). The strength of the British artillery during the *Geger Sepoy* incident can be observed in the cannon collection at the Vredenburg Fort Museum in Yogyakarta (Figure 5). In terms of dimensions, the European cannons measure approximately 3 meters in length with a bore diameter of 12 centimeters. These cannons were discovered in relatively good condition within the inner courtyard of Vredenburg Fort during the initial revitalization process.

The artillery strength of the Yogyakarta Sultanate can be observed in the collection of the Sonobudoyo Museum (Figure 6). Regarding its dimensions, the palace cannon measures approximately 1.89 meters in length with a bore diameter of 9 centimeters. The cannon features floral ornamentations and an inscription that reads: '*Yasa Dalem Meriyem ing Ngayogyakarta Hadiningrat ing Tahun Alip Sinengkalan Trus Guna Pandita Ratu*'. The cannons remain intact with only minor damage, though the exact timeline of its acquisition by the Sonobudoyo Museum remains unknown.



Figure 4. European Cannon at Vredenburg Fort Museum
Source: Self documentations, 2025



Figure 5. Palace Cannon at Sonobudoyo Museum
Source: Maulana's private collection (with permission), 2025

The measurement results of the British cannon's bore diameter at the Vredeburg Fort Museum indicate that it belongs to the 6-pounder cannon category. Decker (1823) conducted kinetic energy tests generated by several rounds from a 6-pounder cannon. Table 1 illustrates the results of the 6-pounder cannon trials, which demonstrate sufficient accuracy and performance, making it highly suitable for deployment by the horse artillery (Decker, 1823). British forces likely deployed the cannon during the *Geger Sepoy*. Furthermore, Winarni suggests that the British may also have commissioned cannons previously owned by the VOC for the assault ². The rapid transition of power hindered the British from achieving self-sufficiency in weaponry. Consequently, the bombardment sustained by the Baluwarti Fort was significantly intensified especially in *Jokteng Tanjung Anom*. This exerted a profound impact, shattering the morale of the Javanese artillerists due to the overwhelming power of the enemy's cannons (Carey, 2019:389).

Following the British seizure of the palace, they recorded an inventory of 92 cannons, including eight 18-pounders, seven 12-pounders, and several other heavy-caliber artillery pieces (Thorn, 1815:192) and These cannons were distributed across the bastions and extended as far as the *Alun-Alun Utara*. Thorn's report (1815) indicates that while the palace possessed a diverse array of artillery, these assets had not been optimally utilized.

Table 1. Kinetic Energy and 'Perkussionskraft' (striking power) from Forty 6-Pounder Cannon Volleys

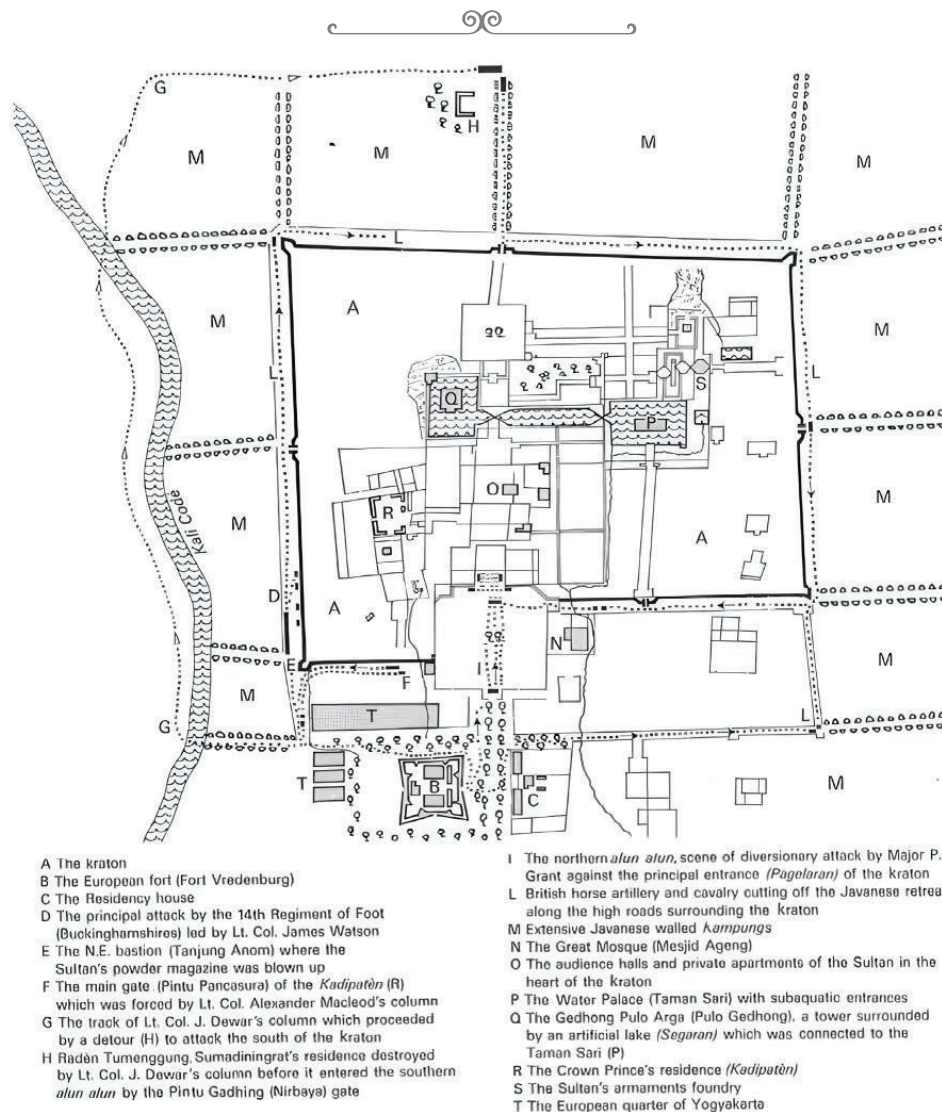
	At 1,300 paces			At 1,500 paces		
	shortest	longest	average	shortest	longest	average
1st graze	1,168	1,678	1,318	1,246	1,711	1,466
2nd graze	1,381	1,868	1,597	1,555	2,080	1,734
3rd graze	1,536	2,000	1,774	1,667	2,200	1,884

Source: Decker (1823:45)

ASSESSING THE COLLAPSE OF THE BALUWARTI FORT'S DEFENCES DURING GEGER SEPOY

On June 20th, 1812, the British forces successfully seized the Yogyakarta Sultanate. The Baluwarti Fort, designed to safeguard the palace, proved incapable of repelling the British offensive, which employed a comprehensive siege technique from multiple directions. Thorn (1815) maps, subsequently republished by McKinnon & Carey (2024:193) illustrates the British assault patterns and troop movements, which were centralized from the western gate of Vredeburg Fort. The British success in breaching the Baluwarti Fort can be analyzed through the lenses of defensive architecture, ballistic aspects, and military strategy.

2 Interview with Winarni, a curator of the Fort Vredeburg Museum, Yogyakarta, conducted on December 18th, 2025.



Map 4. The Invasion Yogyakarta Royal Place during Geger Sepoy June 20th, 1812
 Source: McKinnon & Carey (2024)

Mišić & Obradović (2025:2) posit that the ideal interval between bastions should be calibrated to the artillery's capability to form a cohesive defensive line. The VOC implemented this concept in Batavia by constructing ten bastions and sixteen protruding towers (Map 2). These towers were strategically designed to minimize dead zones and provide sufficient space for defending troops to launch counter-offensives. Such a pattern is absent in the Baluwarti Fort. Ideally, given the extensive distance between its bastions, the curtain walls should have been equipped with loopholes or protruding towers to facilitate defensive maneuvers. The absence of these components meant that the Keraton forces lacked secure spaces from which to seek protection and effectively launch counterattacks against the enemy. However, the limited availability of data on the types of cannons deployed at each bastion makes it impossible to determine with certainty the extent of the Palace's artillery capability in defending the curtain walls.

The aforementioned ballistic analysis suggests that, ideally, the kinetic energy generated by British artillery should have been absorbed by the structure, particularly at the *Jokteng Tanjung Anom*. This defensive capacity was derived from the function of the excavated soil fill within the rampart, which was explicitly intended to mitigate destructive impacts (Mišić & Obradović,

2025:2). However, the British forces employed a combination of artillery types, ranging from light to heavy-caliber cannons. Consequently, the destructive impact sustained by the face wall was far from negligible, compromising the overall integrity of the fortification. Thorn, p. (1815:180) described the defensive strength of the Baluwarti Fort as comprising 92 cannons, wet moats, drawbridges, and ramparts; however, this defence mechanism remained insufficient to withstand the waves of the British assault.

The conceptual flaws of the Baluwarti Fort were further exacerbated by the profound imbalance in artillery strength and technology between the Sultanate and the British. The Palace mobilized local village militias from the fort's surrounding areas. These forces primarily employed traditional weaponry, which had proven effective in neutralizing European cavalry units (Carey, 2019:112). The uneven distribution of firearms benefits lead to in a lack of familiarity with firearms among the general population. Hussy (2008:87) as cited in Kamuri & Fanggidae (2021:58) identifies several factors contributing to the failure of the transition process: communication, timing, and a lack of collective understanding regarding the system. These factors significantly hindered the Sultanate's efforts to modernize its soldiers.

The modernization was hindered by the divergent political doctrines of the two contrasting sides. Carey (2019:396 – 397) argued that the Sultanate's failure was rooted in the paradigmatic political differences between them and the British. Javanese politics permitted each aristocrat to maintain their own private militia as a source of political leverage. This was due to Sri Sultan Hamengku Buwono II's limited ability to effectively mobilize big troops and advocate the court elites in maintaining political stability and Yogyakarta's military advantage against foreign powers.

On the other hand, British implemented troop efficiency measures, driven by a desire for reconciliation that necessitated the minimization of military force (Obe, 2010:215). This policy is evident in the British forces' reliance on cavalry and horse artillery to support infantry operations and to sever all access routes from the Palace (Thorn, 1815, p. 188). Ultimately, this pattern compromised the overall military strength of the kingdom, as the princes often lacked a unified strategic objective. This imbalance in military strength between the two parties resulted in an unequal engagement that unfolded within a relatively short period of time (Thorn, 1815:189).

CONCLUSION

The neutralization of the Yogyakarta Sultanate's defensive system by the British was a multidimensional phenomenon. Although the structural reinforcement of the Baluwarti Fort had progressed from the reign of Hamengku Buwono I until the eve of the *Geger Sepoy*, it lacked integrated support from other critical sectors. The rapid military modernization and the decentralized militia system under individual princes acted as significant impediments to effective defence. The fort's inefficiency is further evidenced by its defensive strategy, which is focused exclusively on its corners. The extensive distance between the bastions, coupled with substandard artillery, created pervasive dead zones that the British strategically exploited.

While this study is currently limited to physical structures, historical contexts, and digital modelling, a more comprehensive studies requires further ballistic analysis and archaeometallurgical studies of the cannons used during the conflict. This research is intended to serve as a foundational framework for broader inquiries within the field of battlefield archaeology.

ACKNOWLEDGEMENT

The author acknowledges Prof. Miyazaki Koji for his valuable comments as a reviewer and Kharisma Nabila, S.Ark., for her constructive input as a peer reviewer. The author also acknowledges Ashila Dhian Elisalise, RM. Ditra Syahrul Noor Wijayadi, S.Ark., Yusuf Adil Syuhada, S.Pd. Gr., Winarni, S.S., M.A., Jujun Kurniawan, M.A., Irvan Maulana, S. S., and Bagus Rhofik, A.Md.Par., for their assistance and for providing information that supported this research. Any remaining errors or interpretations are solely the responsibility of the author.

REFERENCES

- Admin. (2017, October 2). Benteng Keraton Yogyakarta. Retrieved September 9, 2025, from Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat website: <https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting/5-benteng-keraton-yogyakarta/>
- Alim, A., & Nurul Hidayah, S. M. (2025). Archaeological Identification and Cultural Significance of Sorawolio II Fort in Bukit Wolio Indah, Baubau City. *Journal of Law, Social Science and Management Original Research*, 2(1).
- Brandes, J. (1785). *De kraton te Djocja (Mataram)*. (NG-1985-7-3-150). [Drawing] Rijksmuseum. Jogjakarta: Rijksmuseum.
- Carey, P. (2019). *Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785 - 1855* (Vol. 1). Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Decker, C. V. (1823). *The British 6Pdr as a Gun for the Horse Artillery* (G. van Uythoven, Trans.).
- Geldern, R. H. (1982). *Konsepsi Tentang Negara & Kedudukan Raja di Asia tenggara* (D. Noer, Trans.). Jakarta: CV Rajawali.
- Haji, G., Sulistya, A., & Suharja. (2007). *Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta* (W. Indrasana, Ed.). Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Harfield, A. (2000). Raffles and The Java Light Cavalry. *Journal of the Society for Army Historical Research*, 78(315), 173–196. Retrieved from <https://about.jstor.org/terms>
- Hutten, W. (2015). *A Systematic Archaeological Survey of British Artillery Positions During the 1806 Battle of Blaauwberg*.
- Kamuri, K. J., & Fanggidae, R. E. (2021). *Manajemen Perubahan* (S. M. Margaretha Radja, Ed.). Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. Retrieved from www.penerbitlitnus.co.id
- Keeley, L. H., Fontana, M., & Quick, R. (2007). Baffles and Bastions: The Universal Features of Fortifications. *Journal of Archaeological Research*, 15(1), 55–95. <https://doi.org/10.1007/s10814-006-9009-0>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. In Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (3rd ed.). Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kim, N. C. (2014). Cultural Landscapes of War and Political Regeneration. *Perspectives*, 52(2), 244–267. Retrieved from <https://about.jstor.org/terms>

- Krevelt, A. van, Conradi, P., & Plaats, V. van der (Jr.). (1750). *Plan der stad en 't kasteel Batavia*. (COLLBN Port 57 N 50). [Map]. *Nu in Plaat Gebragt, En Te Bekomen Te Amsterdam*. Amsterdam: Leiden University Libraries Digital Collections. Retrieved from <http://hdl.handle.net/1887.1/item:2013979>
- McKinnon, E. E., & Carey, P. (2024). The Scots in Java, 1811-1816. An Episode from the History of the 78th Regiment of Foot (Ross-shire Buffs): The Storming of the Yogyakarta Court, 20 June 1812, and its aftermath. *Archipel*, 107, 175–204. <https://doi.org/10.4000/12fvi>
- Mišić, S., & Obradović, M. (2025). Geometry of bastion fortifications magistral line: influences and development. *NPJ Heritage Science*, 13(1), 1–16. <https://doi.org/10.1038/s40494-025-01632-y>
- Nagornaia, O., & von Lingen, K. (2023). Conflict Landscapes of the Great War: The Spatial and Ecological Dimension of Military History. *Quaestio Rossica*, 11(2), 571–585. <https://doi.org/10.15826/qv.2023.2.806>
- Nelly, A. de. (1771). *Het d'Alam van de sultan zu Mataram*. (NG-400-B). [Drawing]. *Unknown*. Rijksmuseum. Retrieved from <https://id.rijksmuseum.nl/200320836>
- Novita, A., & Mahmud, M. I. (1999). Tata Ruang Etnis Dan Profesi Dalam Kota Batavia (Abad XVII - XVIII). *Berkala Arkeologi*, 19(2), 77–94. <https://doi.org/10.30883/jba.v19i2.824>
- Nurhajarini, D. Ratna., Triwahyono, Tugas., & Gunawan, Restu. (1999). *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Obe, I. A. R. (2010). The British Approach to Counter Insurgency: Myths, Realities, and Strategic Challenges. In H. R. Yarger (Ed.), *Short of General War: Perspectives on The Use of Military Power In The 21st Century* (pp. 207–230). Strategic Studies Institute, US Army War College. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/resrep12050>.
- Passchier, C., Sumintardja, D., & Subijono, E. (2012). *Forts in Indonesia* (I). Jakarta: Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia.
- Priyomarsono, N. W., Fatimah, T., & Kushartomo, W. (2021). *Kajian Peraturan yang Berkaitan Dengan Revitalisasi Baluwerti Kasunanan Surakarta*. Jakarta.
- Raharjo, Y. K. (2024). Kebijakan Pemerintahan Daendels di Jawa 1808 - 1811. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 10(1), 8–15.
- Ricklefs, M. C. (1974). *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi, 1749-1792: A History of The Division of Java*. London: Oxford University Press. Retrieved from <https://archive.org/details/jogjakartaunders0000rick/page/n7/mode/2up>
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern* (3rd ed.; S. Wahono, B. Bilfagih, H. Huda, M. Helmi, J. Sutrisno, & H. Manadi, Trans.). Jakarta: Serambi.
- Rinandi, N., & Suryaningsih, F. (2015). Inventory of Forts in Indonesia. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 2(5W3), 263–270. Copernicus GmbH. <https://doi.org/10.5194/isprsannals-II-5-W3-263-2015>
- Sacket, C. T. (1918). Fortifications as a Dependent Upon Advances in Human Knowledge. *Society of American Military Engineers*, 10(53), 693–715.

- Sapardan, W. O., Suryandi, A. D., & Ardiansyah, P. (2021). *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pp. 4–171. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Scott, D. D., & Mcfeaters, A. P. (2011). The Archaeology of Historic Battlefields: A History and Theoretical Development in Conflict Archaeology. In *Source: Journal of Archaeological Research* (Vol. 19). Retrieved from <https://about.jstor.org/terms>
- Shoffner, T. A. (1990). *Napoleons Cavalry, A Key Element to Decisive Victory*. United States Military Academy, West Point, New York, Kansas.
- Sloet van Oldruitenborgh, A. baron. (1848). *Zuidelijke poort der kraton van Djocjakarta*. (KITLV 37A130). [Drawing]. *Royal Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden*. Leiden: Leiden University Libraries Digital Collections. Retrieved from <http://hdl.handle.net/1887.1/item:853156>
- Thorn, W. (1815). *Memoir of The Conquest of Java: With the Subsequent Operation of The British Forces in The Oriental Archipelago*. London: Library of Congress.
- Toy, S. (1955). *A History of Fortification from 3000 B.C. to A.D. 1700*. London: William Heinemann.
- Unknown. (1888). *Plattegrond van den ganschen Benteng Kraton te Jogjakarta in zijn vollen omvang*. (D E 52,8). [Map]. *Digital Collections of Leiden University Library*. Leiden University Library Digital Collections. Retrieved from <http://hdl.handle.net/1887.1/item:813265>

Kartografi Kritis Sumbu Filosofi Yogyakarta: Negosiasi Kosmologi Jawa dan Tata Ruang Kolonial Abad 19-21

Saifuddin Alif Nurdianto

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sambit, Ponorogo

Email: saifuddinalif2@gmail.com

Abstract:

Yogyakarta is a city shaped by Javanese cosmology through an imaginary axis linking Mount Merapi, the Keraton (royal palace), and the Southern Sea. Since the nineteenth century, the Dutch colonial administration introduced a spatial logic aimed at political and economic control. This study examines the relationship between Javanese cosmology and colonial logic in Yogyakarta's urban development. The research uses a qualitative method with a critical cartography approach. Primary sources include: (1) Kaart van de Residentie Djocjakarta (1857); (2) topographic map Jogjakarta (1925); (3) Topographische Kaart der Residentie Djocjakarta (1869); and (4) the Jogjakarta en Omstreken map (1925). The findings show that: (1) Javanese cosmology and the philosophical axis support the Sultan's position through spatial and ritual practices; (2) colonial maps reflect Dutch authority in reorganizing Yogyakarta with Western administrative logic; and (3) the interaction between cosmology and colonial cartography produces a dynamic where spiritual traditions persist alongside colonial structures.

Keywords: *Javanese Cosmology, Colonial Cartography, Philosophical Axis, Spatial Planning, Yogyakarta*

Intisari:

Yogyakarta adalah kota yang dibangun dengan prinsip kosmologi Jawa melalui sumbu Merapi-Keraton-Laut Selatan. Namun, sejak abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda menghadirkan logika baru yang berorientasi pada kontrol politik dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan memahami hubungan antara kosmologi Jawa dan logika kolonial dalam perkembangan kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kartografi kritis. Sumber primer penelitian adalah: (1) peta administratif *Kaart van de Residentie Djocjakarta* (1857); (2) peta topografi *Jogjakarta* (1925); (3) peta topografi *Topographische Kaart der Residentie Djocjakarta* (1869); dan (4) peta topografi *Jogjakarta en Omstreken* (1925). Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kosmologi Jawa melalui sumbu filosofi Yogyakarta membentuk tradisi yang memperkuat posisi Sultan melalui pengaturan ruang dan praktik ritual; (2) Peta mencerminkan kekuasaan kolonial yang mengatur Yogyakarta dengan logika Barat; dan (3)

Negosiasi antara kosmologi Jawa dengan kartografi kolonial membentuk dinamika Yogyakarta yang mempertemukan tradisi spiritual dan logika kolonial.

Kata Kunci: Kosmologi Jawa, Kartografi Kolonial, Sumbu Filosofi, Tata Ruang, Yogyakarta

PENGANTAR

Perkembangan kota Yogyakarta dipengaruhi oleh pertemuan antara kosmologi Jawa dan logika modernitas kolonial. Sejak awal kota ini dirancang sebagai pusat pemerintahan yang menyatukan dimensi spiritual, politik, dan sosial melalui sumbu Merapi-Keraton-Laut Selatan. Sumbu ini juga menempatkan Sultan yang berkedudukan di Keraton sebagai penghubung antara manusia, alam, dan kekuatan transenden. Situasi kemudian mulai berubah ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan intervensi lebih dalam terhadap kehidupan Kasultanan pada abad ke-19. Tata ruang kota mengalami perubahan signifikan melalui kebijakan kartografi, pembangunan infrastruktur, dan regulasi administrasi pemerintahan (Suryanto, Djunaedi, & Sudaryono, 2015).

Benturan antara kosmologi lokal dan logika kolonial ini berakar dari perbedaan dalam memahami ruang. Kosmologi Jawa memahami ruang sebagai interaksi simbolik antara manusia, alam, dan kekuatan transenden, sementara kolonial Belanda membawa pandangan dunia (*worldview*) modern Eropa yang memandang ruang sebagai entitas homogen, terukur, dan dapat dikendalikan secara rasional (Foucault, 2009). Dalam pandangan dunia kolonial, keteraturan ruang tidak lagi ditentukan oleh makna simbolik atau relasi kosmik, tetapi orientasi teknis yang menempatkan negara sebagai pusat pemerintahan. Kartografi menjadi salah satu alat utama untuk mewujudkan pandangan dunia itu, karena melalui peta ruang direduksi menjadi objek visual yang dapat diatur.

Perbedaan cara pandang terhadap ruang berdampak pada cara masing-masing kekuasaan membangun legitimasi politiknya. Kosmologi tradisional memberikan legitimasi politik-spiritual kepada Sultan, sementara kekuasaan kolonial membangun legitimasinya melalui kontrol administratif dan visual. Ruang kota Yogyakarta menjadi tempat bertemunya dua sistem makna tersebut. Pertemuan ini tidak menghasilkan dominasi tunggal, tetapi memunculkan proses negosiasi yang kompleks. Kosmologi tetap bertahan melalui ritual, narasi budaya, dan praktik sosial, sementara pemerintah kolonial menegaskan kehadirannya melalui tata kota, regulasi, serta pembangunan infrastruktur (Depari, 2017). Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya membahas tentang perbedaan cara pandang, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat Yogyakarta menafsirkan ulang lingkungan sosialnya di bawah penetrasi kolonial.

Pertemuan antara dua sistem makna tersebut dapat ditelusuri melalui berbagai sumber. Catatan arsip kolonial menunjukkan usaha Belanda mengatur ruang kota untuk kepentingan politik dan ekonomi melalui penataan transportasi, batas wilayah, serta fasilitas publik. Di sisi lain, sumber-sumber lokal seperti *babad* dan tradisi lisan menunjukkan bagaimana kosmologi tetap menjadi acuan masyarakat dalam memahami perkembangan kota. Praktik ritual seperti *grebeg*, *labuhan*, dan cerita tutur tentang orientasi ruang menunjukkan bahwa kosmologi tidak hilang, tetapi terus mengakar dalam kehidupan masyarakat. Data etnografis dari kehidupan pasar, praktik budaya, serta memori kolektif masyarakat juga menunjukkan bahwa kosmologi Jawa adalah bagian dari pandangan dunia yang terus dijalankan.

Penelitian mengenai hubungan antara kosmologi Jawa dan tata ruang kota Yogyakarta sudah banyak dilakukan. Salah satu kajian awal dapat ditelusuri dalam karya Anderson berjudul *The Idea of Power in Javanese Culture* yang menyinggung soal simbolisme kekuasaan Jawa, termasuk bagaimana ritual digunakan untuk melegitimasi posisi Sultan sebagai penghubung antara manusia dan kosmos. Sementara itu, penelitian Geertz mengenai agama Jawa juga menyinggung keterkaitan kosmologi dengan praktik sosial masyarakat, meskipun fokusnya lebih pada stratifikasi sosial dan praktik keagamaan. Peneliti lain seperti Behrend dalam artikel *Kraton and Cosmos in Traditional Java* serta de Graaf melalui bukunya *Puncak Kekuasaan Mataram* turut memperkaya pemahaman tentang orientasi kosmologis di Yogyakarta dan simbolisme Kasultanan. Selain itu, studi mengenai kolonialisme dan tata ruang yang dikaji oleh Kusno dalam *Behind the Postcolonial: Architecture, Urban Space, and Political Cultures in Indonesia* melihat bagaimana kekuasaan kolonial menghadirkan modernitas melalui tata kota dan arsitektur. Ricklefs juga ikut berkontribusi dalam penelitian melalui bukunya *A History of Modern Indonesia since c.1200* yang mendokumentasikan perubahan politik, sosial, dan budaya Indonesia dari masa pra-kolonial hingga modern.

Kebaruan penelitian terletak pada fokus kajian di mana kosmologi Jawa dan kartografi kolonial adalah dua paradigma yang saling berhadapan, sekaligus entitas yang saling bernegosiasi dalam pembentukan ruang kota Yogyakarta. Selain itu, artikel ini juga menghubungkan arsip kolonial berupa peta dan dokumen administratif dengan sumber-sumber lokal seperti *babad* serta praktik ritual yang masih hidup di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan kajian lebih komprehensif, karena menunjukkan bahwa ruang kota tidak hanya dibentuk oleh logika fisik kolonial, tetapi juga oleh kosmologi yang diinternalisasi masyarakat melalui tradisi, narasi, dan praktik kultural.

Secara lebih lanjut artikel ini akan membahas tentang negosiasi antara kosmologi Jawa dan kartografi kolonial dalam membentuk ruang kota Yogyakarta. Gambaran spesifik yang dikaji meliputi bagaimana sumbu filosofi tetap hidup sebagai orientasi simbolik meski tata kota kolonial mendominasi, serta bagaimana masyarakat memaknai ruang dalam kehidupan sehari-hari. Harapan dari penelitian adalah untuk memperkaya literatur tentang kajian sejarah kebudayaan Jawa serta memperluas pemahaman tentang bagaimana ruang kota menjadi tempat negosiasi antara kekuasaan, simbol, dan identitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kartografi kritis. Sumber diperoleh dari penelusuran arsip kolonial yang dipadukan dengan *babad* sebagai teks lokal. Arsip kolonial terdiri dari *Gegevens over Djokjakarta* (1925), peta administratif *Kaart van de Residentie Djocjakarta* (1857), peta topografi *Jogjakarta* (1925), peta topografi *Topographische Kaart der Residentie Djokjakarta* (1869), dan peta topografi *Jogjakarta en Omstreken* (1925). Sementara itu teks lokal yang digunakan adalah *Babad Tanah Jawi* dan *Babad Mangkubumi*.

Pendekatan kartografi kritis dari J.B. Harley digunakan untuk membaca peta bukan hanya sebagai representasi teknis, tetapi sebagai instrumen kuasa yang sarat dengan ideologi kolonial. Selain itu, observasi terhadap praktik budaya kontemporer seperti upacara *grebeg*, tradisi *labuhan*, dan pola interaksi masyarakat di sekitar alun-alun maupun pasar, menjadi bagian penting untuk melihat keberlanjutan kosmologi dalam kehidupan sehari-hari.

Teori yang digunakan sebagai alat analisis adalah teori produksi ruang dan interaksi simbolik. Teori produksi ruang dari Henri Lefebvre digunakan untuk menganalisis bagaimana ruang kota Yogyakarta diproduksi melalui relasi kuasa, simbol, dan praktik sehari-hari. Sementara itu, interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead digunakan untuk memahami bagaimana makna ruang dibentuk melalui ritual, simbol, dan interaksi sosial.

Teori lain yang digunakan adalah *governmentality* dari Michel Foucault untuk menjelaskan bagaimana peta kolonial berfungsi sebagai instrumen kuasa untuk mengatur populasi, menormalisasi pandangan administrasi, dan menegakkan legitimasi kolonial. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori hegemoni budaya Antonio Gramsci untuk menjelaskan bagaimana dominasi kolonial bekerja tidak hanya melalui kontrol fisik, tetapi juga melalui pembentukan cara pandang masyarakat terhadap tata ruang kolonial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kosmologi Jawa dan Sumbu Filosofi sebagai Ruang Simbolik

Kosmologi adalah salah satu sistem pengetahuan lokal yang merepresentasikan keteraturan alam semesta melalui hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan transenden. Dalam kosmologi Jawa, dunia dipahami bukan hanya sebagai ruang materi, tetapi juga bagian dari simbol yang memiliki makna (Surjono, Antariksa, & Titisari, 2023). Kosmologi ini tidak terlepas dari orientasi ruang di mana gunung, laut, dan pusat kekuasaan dianggap sebagai poros sakral yang menyatukan dimensi kosmik dengan tatanan sosial-politik. Yogyakarta, sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa, mengejawantahkan kosmologi tersebut melalui sumbu yang membentang dari Gunung Merapi di utara sampai Laut Selatan (Samudra Hindia) di selatan, dengan Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya (UNESCO World Heritage Centre, 2023). Sumbu itu adalah garis imajiner yang merepresentasikan eksistensi keraton sebagai pusat dunia Jawa sekaligus penghubung antara dimensi mikrokosmos (*jagad alit*) dan makrokosmos (*jagad ageng*).

Konsepsi keraton sebagai pusat kosmos dan raja sebagai penghubung dua dimensi kosmik dapat ditelusuri dalam historiografi Jawa klasik. *Babad Tanah Jawi* menggambarkan kekuasaan raja sebagai perwujudan *wahyu keprabon*, yaitu energi kosmis yang menempatkan raja sebagai poros keteraturan dunia (Olthof, 2019). Sementara itu, *Babad Mangkubumi* menjelaskan tentang posisi Sultan Hamengkubuwono I sebagai penguasa politik sekaligus pusat keteraturan kosmik. Dalam naskah ini, Sultan diposisikan sebagai *sri narendra* yang bersemayam di pusat kekuasaan (*ing dhampar retna*) dan dikelilingi oleh para pejabat serta ritus kerajaan yang teratur. Penyebutan Sultan sebagai *sri narendra dan aprabu*, disertai penggambaran ruang istana melalui *dhampar*, busana kebesaran, serta posisi duduk yang bertingkat, menunjukkan bahwa raja, keraton, dan segala perangkat yang mengiringinya dipahami sebagai manifestasi tatanan kosmis (Irawan, 2018).

Konsepsi ini kemudian diperkuat dalam tata ruang Yogyakarta melalui sumbu filosofi yang menghubungkan elemen-elemen simbolik di sekitar keraton. Keberadaan Tugu Pal Putih di utara dan Panggung Krapyak di selatan melengkapi konstruksi ruang tersebut. Tugu Pal Putih di utara keraton melambangkan persatuan antara raja dan rakyat sekaligus simbol penghubung antara manusia dengan Tuhan (Aprilian & Fadhil, 2022). Sementara itu, Panggung Krapyak

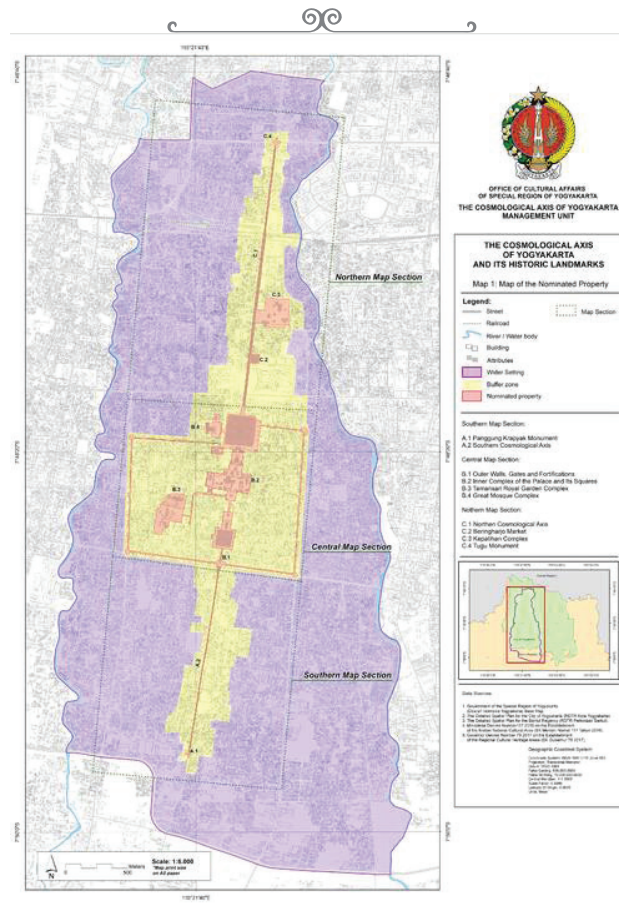
dan kompleks Parangtritis di selatan dikaitkan dengan ritual hubungan simbolik raja dengan penguasa Laut Selatan (Syahdani & Kardanardi, 2023).



Gambar 1. Bentuk awal dari *Tugu Golong Gilig* di Yogyakarta
(Sumber: van Oldruitenborgh & Baron, 1848).

Struktur kosmologis ini kemudian direproduksi melalui praktik ritual kerajaan seperti *labuhan* dan *grebeg*. Upacara *labuhan* yang dilakukan di titik-titik sakral seperti Gunung Merapi, Pantai Parangkusumo, dan Laut Selatan, berfungsi untuk menghormati kekuatan gaib sekaligus memperkuat legitimasi politik Sultan sebagai penjaga harmoni antara manusia dengan alam (Sudarsih, 2020). *Grebeg* melengkapi rangkaian ritual itu dengan menampilkan keraton sebagai pusat otoritas simbolik yang mengatur kehidupan sosial-religius masyarakat.

Simbolisme sumbu filosofi juga tampak dalam arsitektur Keraton Yogyakarta. Susunan ruang keraton dari selatan ke utara menggambarkan perjalanan manusia dari lahir hingga menuju kematangan spiritual (*sangkan paraning dumadi*). Mulai dari Panggung Krapyak sebagai simbol masa kecil, melewati alun-alun sebagai ruang publik yang merepresentasikan interaksi sosial, hingga mencapai kediaman Sultan yang melambangkan puncak spiritualitas. Seluruh perjalanan ruang ini dapat dibaca sebagai narasi filosofis tentang perjalanan hidup manusia menuju kesempurnaan (Permono, 2021).



Gambar 2. Peta Sumbu Filosofi Yogyakarta (Sumber: UNESCO World Heritage Centre, 2023)

Dilihat dari perspektif teori ruang Lefebvre, sumbu filosofi dapat dipahami sebagai *representational space*, yaitu ruang yang dimaknai melalui simbol, mitos, dan praktik sosial (Lefebvre, 2013). Dalam tradisi Jawa, ruang sarat dengan makna kosmologis yang berfungsi sebagai tempat untuk menyatakan eksistensi sebuah kekuasaan. Raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin administratif dan militer (*senopati ing ngalaga*), tetapi juga sebagai pusat harmoni yang bertanggung jawab atas keteraturan dunia (*hamengku buwana*). Legitimasi politiknya hanya dapat diteguhkan melalui relasi kosmik yang selaras, sehingga sumbu filosofi memiliki peran ganda, yaitu sebagai instrumen kosmologi sekaligus instrumen politik.

Kosmologi Jawa, dari pola yang ada, berfungsi sebagai ideologi penopang struktur kekuasaan. Kekuasaan dalam budaya Jawa dipandang sebagai sesuatu yang inheren, bukan hasil kontrak sosial atau mekanisme politik modern. Kekuasaan dilihat sebagai energi kosmis yang dapat dikonsentrasikan pada figur tertentu, terutama raja (Anderson, 2019). Oleh karena itu, keberadaan Keraton Yogyakarta pada pusat sumbu filosofi menunjukkan bahwa kota ini tidak hanya dirancang untuk kebutuhan administratif, tetapi juga untuk mengartikulasikan ideologi kekuasaan yang berbasis pada kosmologi.

Kosmologi Jawa juga menjadi alat untuk membangun kohesi sosial. Melalui simbolisme sumbu Merapi-Keraton-Laut Selatan, masyarakat diajak untuk menerima bahwa tata ruang kota mencerminkan tata ruang kosmos, sehingga kepatuhan pada Sultan identik dengan menjaga keteraturan semesta. Hal itu terlihat dari partisipasi masyarakat dalam ritual publik seperti *grebeg*. Dalam prosesi ini, keraton membagikan *gunungan* yang berisi hasil bumi kepada rakyat.

Gunungan adalah simbol kesuburan dan keberkahan kosmos yang didistribusikan melalui tangan Sultan. Dengan menerima *gunungan*, masyarakat secara simbolik mengakui peran Sultan sebagai penjaga keseimbangan alam sekaligus pemimpin politik (Ubaidillah & Marpuah, 2021). Ritual ini menciptakan ikatan emosional dan ideologis antara rakyat dengan penguasa, yang menunjukkan bagaimana kosmologi Jawa dipraktikkan sebagai instrumen politik.

Penting untuk dicatat bahwa dimensi politik dari kosmologi ini tidak statis. Pada abad 19-20, ketika kekuasaan kolonial Belanda semakin kuat terutama setelah Perang Jawa, makna kosmologi Jawa mulai mengalami tantangan. Pembangunan infrastruktur kolonial, seperti jalan raya dan rel kereta api, secara perlahan menggeser orientasi ruang kota dari sumbu kosmologis ke arah kepentingan administratif kolonial. Meskipun begitu, Sultan tetap mempertahankan makna kosmologi melalui ritual-ritual tradisional, untuk memberikan tanda kepada masyarakat Yogyakarta bahwa kosmos Jawa tetap hidup di balik penetrasi kolonial.

Pola hubungan antara kosmologi dengan kekuasaan seperti di Yogyakarta juga dapat ditemukan dalam kebudayaan lain, misalnya kosmologi Tiongkok pada tata ruang Beijing dan Kota Terlarang. Dalam tradisi kosmologi Konfusian-Daois, ruang kota adalah cerminan keteraturan tatanan semesta, dengan poros utara-selatan sebagai sumbu utama yang menghubungkan Langit, manusia, dan bumi, serta penempatan Kota Terlarang di pusat poros tersebut dengan susunan bangunan simetris-hierarkis sebagai representasi tatanan kosmik (Lewis, 2006). Kasus lain terjadi dalam kebudayaan Eropa pra-modern hingga awal modern. Di Versailles misalnya, istana ditempatkan sebagai pusat geometris dengan poros lurus yang memancar ke lanskap sekitarnya. Pola ini menunjukkan posisi raja sebagai *le Roi Soleil* dan pusat kosmos. Begitu juga dalam konsep kota periode Renaisans seperti Palmanova, bentuk geometris simetris mencerminkan kepercayaan bahwa keteraturan ruang merupakan refleksi harmoni yang bersumber dari Tuhan (Rykwert, 2013).

Kasus di Tiongkok dan Eropa semakin memperkuat argumen bahwa kosmologi dengan kekuasaan merupakan dua hal yang saling terkait serta dapat ditemukan di berbagai kebudayaan, meskipun diwujudkan melalui sistem yang berbeda. Di Yogyakarta pola ini bekerja secara khas melalui kosmologi Jawa yang diwujudkan dalam bentuk sumbu filosofi. Kosmologi Jawa berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan Sultan, membangun kohesi sosial, dan memperkuat identitas politik Jawa dalam menghadapi kekuatan dari luar. Dari perspektif teori hegemoni Gramsci, kosmologi Jawa berperan sebagai *cultural hegemony* yang menanamkan konsensus sosial tentang posisi Sultan dalam kosmos (Gramsci, 2012).

B. Peta Kolonial sebagai Representasi Kuasa

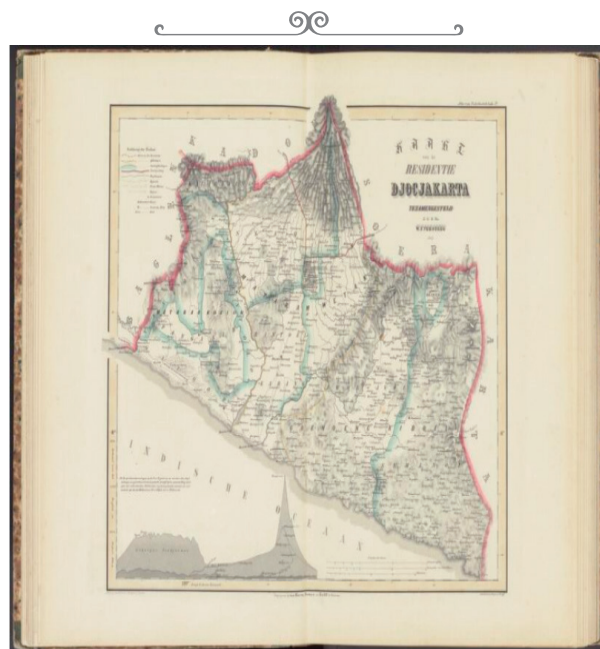
Kartografi kolonial Belanda berangkat dari pandangan dunia (*worldview*) modern Eropa yang menekankan keteraturan ruang melalui prinsip-prinsip geometris, skala, dan orientasi mata angin. Dalam kerangka ini, ruang dipahami sebagai cerminan keteraturan semesta dan kehendak ilahi, untuk kemudian direpresentasikan dalam bentuk visual yang terukur. Keteraturan itu tidak diwujudkan melalui ritual atau simbol, tetapi melalui abstraksi ruang yang memungkinkan penguasa mengelola wilayah secara administratif.

Kartografi kolonial di Hindia-Belanda, khususnya pada abad 19-20, merupakan salah satu instrumen penting dalam politik tanah jajahan. Peta pada masa penjajahan Belanda tidak hanya digunakan sebagai representasi ruang netral tetapi juga alat politik pemerintah kolonial untuk

mengontrol wilayah yang dikuasai. Belanda memproduksi peta tidak hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga untuk mengatur tata kota, memetakan kepemilikan tanah, dan menegaskan otoritasnya sebagai penguasa.

Pemerintah kolonial kemudian mengembangkan teknik pemetaan yang sistematis, meliputi survei, pengukuran triangulasi, dan pencatatan topografi yang akurat menurut standar Eropa (Oudemans, 1891). Belanda bahkan membentuk brigade pemetaan (*opnemingsbrigades*) yang berada di bawah Dinas Topografi pemerintah Hindia-Belanda (*De Topografische Dienst van Nederlands-Indië*) untuk menjalankan program ini. Peta kolonial menekankan dimensi geometris-administratif, sehingga elemen-elemen kosmologis, ritual, dan simbolik yang selama ini membentuk sumbu filosofi menjadi terpinggirkan. Sebagai contoh, orientasi peta dibuat menyesuaikan arah utara mata angin yang baku menurut standar Barat, sehingga garis sumbu Merapi-Keraton-Laut Selatan tidak lagi menjadi acuan penting bagi pemerintah kolonial.

Berbeda dengan orientasi Barat, mata angin dalam kosmologi Jawa dipahami sebagai bagian dari tatanan simbolik yang dirumuskan dalam konsep *keblat papat lima pancer*, yaitu empat penjuru (*lor-kidul-wetan-kulon*) dengan *pancer* (bagian tengah) sebagai pusat keseimbangan kosmis. Konsep ini dipengaruhi oleh kosmologi Hindu, khususnya tentang *dikpāla* dan *pañca mahābhūta*, yang mengaitkan arah dengan unsur-unsur tertentu, meskipun dalam tradisi Jawa hubungan itu tidak selalu digunakan secara konsisten (Lombard, 1996). Di Yogyakarta, tatanan ini tampak pada sumbu Merapi-Keraton-Laut Selatan yang menyatukan makna kosmik, politik, dan spiritual. Sebaliknya, peta pemerintah Hindia-Belanda lebih menekankan pada fungsi teknis pemetaan yang terukur, sehingga sumbu kosmologis Jawa tidak mendapat tempat dalam kartografi kolonial.



Gambar 3. Peta Karesidenan Yogyakarta
(Sumber: Versteeg, Cronenberg, Wolff, & Melvill van Carnbée, 1857)

Peta kolonial kemudian digunakan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan tanah, pajak, dan proyek infrastruktur. Di Yogyakarta, rumusan kebijakan ini termasuk penataan alun-alun, jalan-jalan utama, dan area pemukiman yang disesuaikan dengan kepentingan kolonial.

Contohnya adalah kasus Jalan Malioboro, yang awalnya merupakan bagian dari sumbu kota tradisional dan jalan kerajaan (*rajamarga*) bertransformasi menjadi poros jalan pertokoan utama pada masa kolonial. Selain itu pembangunan fasilitas administrasi di sekitar Malioboro seperti benteng Vredeborg, *societeit* de Vereeniging, dan Javasche Bank juga merefleksikan hegemoni kepentingan kolonial atas fungsi kosmologis tradisional (Nur Fauziah, 2018).

Proses peralihan fungsi ruang itu tidak hanya ditunjukkan dalam peta, tetapi juga dalam dokumen administratif kolonial. Salah satunya adalah *Gegevens over Djokjakarta*, laporan resmi yang disusun oleh Residen Yogyakarta tahun 1925 (Dingemans, 1925). Dokumen ini menjelaskan tentang bagaimana kota Yogyakarta dikelola melalui data statistik, catatan kependudukan, dan inventarisasi infrastruktur kota. Melalui dokumen seperti inilah pemerintah kolonial Belanda merumuskan tata kelola kota, termasuk pembangunan infrastruktur, penataan ruang publik, dan penerapan kebijakan administratif.

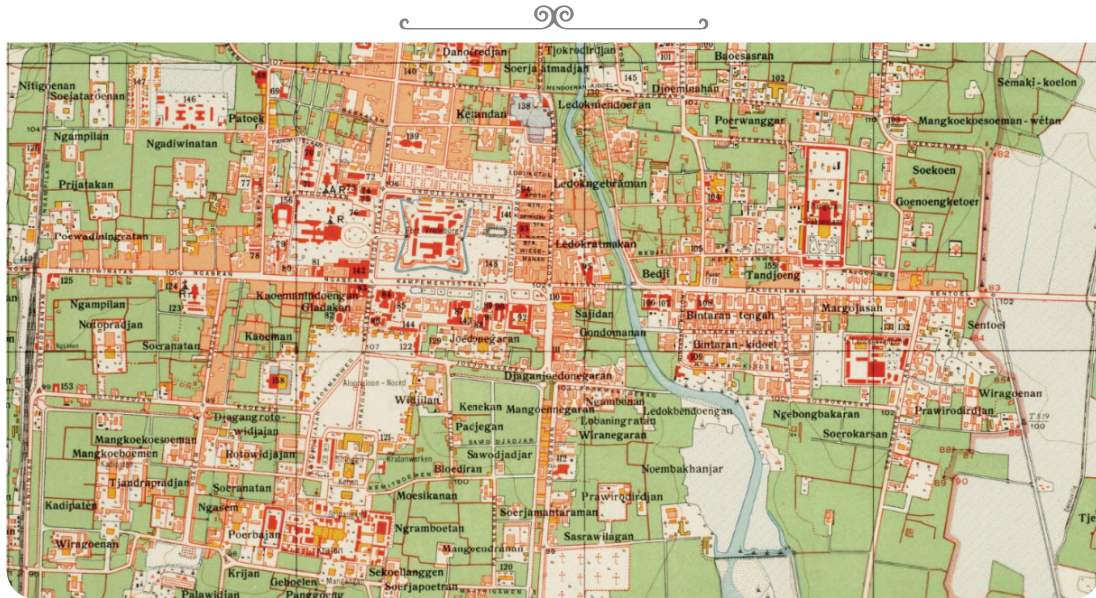
Kartografi kolonial, dalam perspektif teori Foucault, dapat dipahami sebagai bentuk dari instrumen kekuasaan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*) (Foucault & Gordon, 2010). Peta adalah alat pemerintah kolonial untuk membentuk wacana legitimasi politik melalui representasi ruang yang mereka ciptakan. Melalui politik spasial, pemerintah kolonial Belanda menyatakan relasi kekuasaan mereka atas Yogyakarta. Peta menjadi dokumen untuk merepresentasikan ruang kota sesuai perspektif kolonial, sekaligus mereduksi makna kosmologis lokal yang tidak relevan dengan kepentingan kekuasaan.

Harley dalam *The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography* menjelaskan bahwa peta tidak pernah netral, tetapi sarat dengan relasi kuasa dan kepentingan ideologis. Harley menolak pandangan bahwa peta hanya mencerminkan realitas, karena yang terjadi justru sebaliknya, yaitu peta adalah teks budaya yang diproduksi dalam kerangka sosial-politik tertentu. Melalui konsep "*silences*" atau keheningan, Harley menunjukkan bahwa apa yang ditampilkan dan dihapus dalam peta sama-sama penting untuk dibaca secara kritis (Harley & Andrews, 2002). Kasus di Yogyakarta menunjukkan bahwa peta kolonial Belanda seperti *Jogjakarta en Omstreken* tidak menampilkan elemen-elemen kosmologis lokal misalnya Merapi-Keraton-Laut Selatan. Sementara itu, unsur-unsur kolonial seperti fasilitas administrasi, militer, dan pendidikan kolonial justru digambarkan secara detail (Topografische dienst in Nederlandsch-Indië, 1925).

Relevansi peta kolonial terhadap sumbu filosofi Yogyakarta menarik untuk dikaji lebih lanjut. Garis Merapi-Keraton-Laut Selatan, yang sebelumnya memiliki makna kosmik, dalam peta kolonial sering diabaikan atau disesuaikan dengan kepentingan administratif. Peta-peta Belanda lebih menekankan jaringan infrastruktur modern, misalnya dengan menandai Jalan Malioboro sebagai koridor utama yang diarahkan menjadi pusat komersial dan administrasi kolonial (Yunus, 1991). Orientasi ruang kota juga diperkuat dengan kehadiran Stasiun Yogyakarta yang dibuka pada 20 Juli 1887 sebagai bagian dari jaringan rel *Staatsspoorwegen* (SS) dan *Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij* (NIS), sehingga pergerakan barang serta pasukan militer dapat dikontrol langsung oleh pemerintah kolonial (Sulistyani, 2016). Selain itu akses menuju kawasan rekreasi orang Belanda seperti jalan menuju Kaliurang sebagai resort pegunungan, juga dicatat dan diprioritaskan dalam peta (Yunus, 1991).

Strategi visualisasi kuasa selanjutnya dapat dilihat dari simbol dan skala yang digunakan dalam peta. Bangunan kolonial, markas militer, serta fasilitas administratif sering diberi tanda yang menonjol atau digambarkan lebih besar daripada elemen lokal. Hal ini menciptakan hierarki

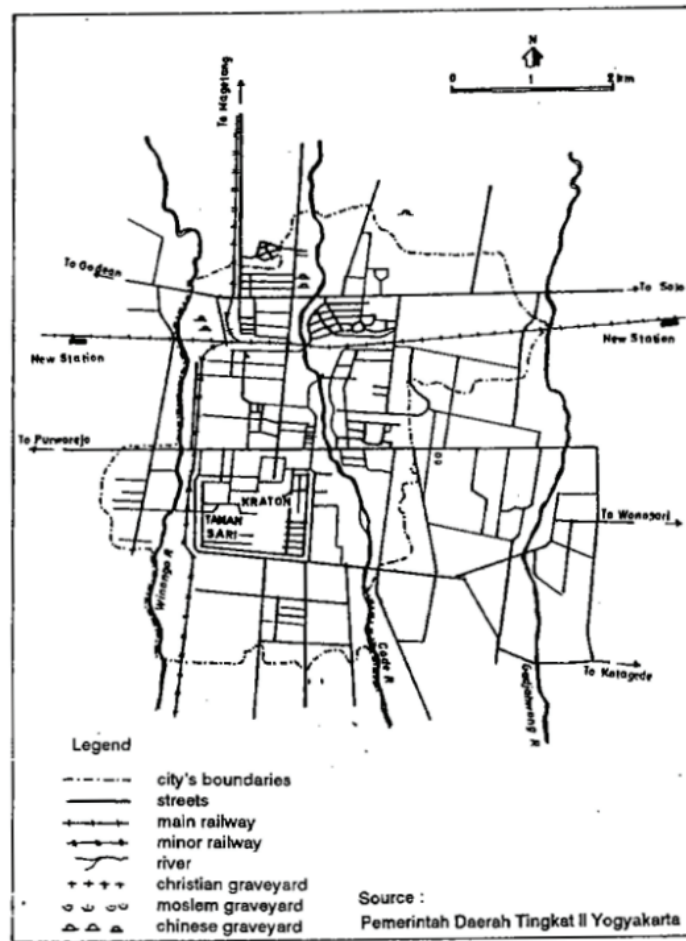
visual yang menempatkan kekuasaan kolonial sebagai pusat dominasi, sementara simbol-simbol kosmologis lokal, seperti Keraton atau Tugu Pal Putih, cenderung diperkecil ukurannya atau ditempatkan sebagai elemen sekunder. Dengan kata lain, peta kolonial bukan hanya gambaran permukaan bumi, tetapi alat untuk membentuk persepsi masyarakat tentang siapa yang berkuasa dan bagaimana ruang dikelola (Harley & Andrews, 2002).



Gambar 4. Peta topografi Yogyakarta yang lebih menonjolkan bangunan-bangunan kolonial (Sumber: Topografische dienst in Nederlandsch-Indië, 1925)

Efek politik tercermin dalam transformasi ruang publik. Alun-alun, jalan utama, dan pemukiman yang sebelumnya memiliki orientasi kosmologis mulai disesuaikan dengan logika kolonial. Praktik ini menandai pergeseran otoritas visual, di mana kekuasaan kolonial diprioritaskan dan kosmologi lokal dilemahkan. Pergeseran itu tampak dalam kebijakan penggunaan tanah, misalnya ketika pemerintah kolonial membuka jalan yang melewati kompleks makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa mempertimbangkan kesakralannya. Bagi Diponegoro, tindakan ini bukan hanya masalah teknis pembangunan, tetapi penghinaan terhadap tradisi dan otoritas spiritual keluarga bangsawan Jawa (Carey, 2014). Kasus inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu utama meletusnya Perang Jawa (1825-1830).

Dampak ideologis kartografi kolonial tampak jelas dalam usaha untuk mendefinisikan ulang makna dari otoritas. Dengan mendokumentasikan kepemilikan tanah, batas administratif, dan fasilitas kolonial, peta diposisikan sebagai instrumen untuk menyatakan bahwa kontrol formal berada di tangan pemerintah kolonial. Dalam kerangka pemikiran Foucault, ini adalah bagian dari praktik *governmentality*, di mana ruang tidak hanya dipetakan secara teknis, tetapi juga dijadikan objek pengawasan, intervensi, dan sarana pembentukan perilaku masyarakat (Foucault, 2009).



Gambar 5. Peta Rencana Tata Kota Thomas Karsten (Sumber: Yunus, 1991)

Meskipun demikian, fungsi peta kolonial tidak berhenti pada dominasi. Di tengah strategi kontrol tersebut, peta justru membuka peluang bagi Sultan untuk memanfaatkannya sebagai sarana penataan kota secara lebih sistematis. Misalnya rencana tata kota Yogyakarta yang dibuat tahun 1936 oleh Thomas Karsten, seorang arsitek dan perencana kota asal Belanda. Dalam rencana ini Karsten membuat tata kota dengan mempertahankan kosmologi lokal, seperti alun-alun Keraton, jalan-jalan lama, serta aktivitas pasar tradisional yang menjadi bagian dari struktur sosial dan budaya kerajaan. Jadi meskipun peta dan rencana tata kota datang dari perspektif kolonial, Sultan tetap memiliki ruang untuk negosiasi, yaitu menyetujui tata letak, menolak usulan yang terlalu merusak fungsi lokal, atau mengatur agar ritual keraton tetap dilakukan di jalan utama (Gunawan, Nindyo, Ikaputra, & Bakti, 2013).

C. Negosiasi Ruang Antara Kosmologi Jawa dan Kartografi Kolonial

Interaksionisme simbolik adalah konsep untuk menggambarkan hubungan antarmanusia dalam menginterpretasikan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi, seperti bahasa, gestur, dan pakaian (Mead, 2015). Interaksi simbolik dalam kasus Yogyakarta abad 19-20 terjadi antara masyarakat tradisional melalui kosmologi lokalnya dengan kekuasaan kolonial melalui kartografi dan administrasi pemerintahan. Kedua sistem ini memiliki logika dan tujuan yang berbeda. Kosmologi Jawa menekankan keteraturan kosmik melalui simbol, sementara pemerintah kolonial mengedepankan fungsi teknis melalui peta, kebijakan administratif, dan

infrastruktur. Interaksi antara keduanya menciptakan ruang yang kompleks, di mana kota menjadi tempat pertarungan kuasa, simbol, dan makna.

Kosmologi Jawa, melalui sumbu imajiner dan filosofi, memberikan struktur simbolik yang mendasari kehidupan sosial-politik di Yogyakarta. Orientasi utara-selatan, dari Gunung Merapi ke Laut Selatan, menempatkan Keraton sebagai pusat kosmos sekaligus pusat legitimasi politik. Pemerintah kolonial Belanda di sisi lain menggunakan peta sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan wilayah jajahan. Kartografi kolonial menekankan pendekatan teknis yang menempatkan fasilitas kolonial sebagai titik sentral. Menariknya, meskipun kosmologi lokal mengalami tekanan dari orientasi kekuasaan kolonial, Sultan dan masyarakat tidak sepenuhnya menyerah pada keadaan. Resistensi terhadap representasi kolonial terjadi, sehingga praktik ritual tetap berlangsung dan makna sumbu filosofi terus hidup dalam memori kolektif rakyat Yogyakarta.

Interaksi ini, menggunakan perspektif teori Lefebvre, menunjukkan bahwa ruang kota bersifat *multi-layered*. Ruang kota bukan hanya elemen fisik, tetapi juga ruang kultural (Lefebvre, 2013). Kartografi kolonial dan kosmologi Jawa menghadirkan lapisan-lapisan makna berbeda yang saling bertemu, bahkan terkadang bertabrakan. Sumbu filosofi hidup sebagai lapisan simbolik yang terus dipertahankan melalui ritual, sementara peta kolonial hidup sebagai lapisan administratif yang menunjukkan kontrol formal.

Negosiasi ini tidak hanya terjadi antara Sultan dan pemerintah kolonial, tetapi juga melibatkan masyarakat Yogyakarta sebagai aktor yang mempraktikkan kedua sistem makna ini (Kusno, 2000). Pola negosiasi serupa ditunjukkan oleh Pemberton dalam kasus Surakarta, di mana kebijakan kolonial dan kosmologi lokal hadir secara berdampingan dalam keseharian masyarakat. Pemberton menggambarkan adanya “garis tak terlihat” (*invisible line*) yang memisahkan sekaligus memungkinkan berjalannya dua sistem kekuasaan itu secara bersamaan (Pemberton, 2018). Dalam konteks Yogyakarta, masyarakat membaca sumbu filosofi sebagai referensi spiritual, sementara peta kolonial sebagai alat administrasi. Ketika dua sistem ini bertemu, muncullah dua interpretasi di mana ritual dipraktikkan sementara penataan fisik kota yang mengikuti logika kolonial juga dilaksanakan.

Interaksi simbolik antara kosmologi lokal dengan kuasa kolonial di Yogyakarta paling terlihat dalam transformasi tata kota dan ruang publik, yang tetap mempertahankan sumbu filosofi sebagai bagian dari ritual. Salah satu contohnya adalah alun-alun utara dan selatan Keraton. Dengan kedatangan Belanda, alun-alun yang sebelumnya berfungsi sebagai ruang kosmologis kemudian diatur ulang untuk kepentingan administrasi dan keamanan kolonial. Jalan-jalan utama diperlebar serta diarahkan untuk mempermudah patroli militer dan transportasi barang, sementara jalur kosmologis menjadi garis imajiner yang tetap dihormati, tetapi tidak lagi menjadi instrumen utama pembangunan.

Jaringan jalan dan rel kereta api yang dibangun kolonial juga menjadi contoh konkret intervensi kekuasaan terhadap ruang kosmologis tradisional. Jalan-jalan baru diarahkan untuk menghubungkan pusat administrasi kolonial dengan daerah produksi atau fasilitas militer, yang tidak jarang melintasi atau memotong jalur sumbu filosofi. Contohnya adalah pembangunan jalur kereta api Yogyakarta-Srandakan pada 1895 yang dirancang untuk menghubungkan pusat administrasi kolonial di Yogyakarta dengan daerah produksi perkebunan tebu di Bantul dan Kulon Progo (Ashari, 2021). Meskipun demikian, Sultan berhasil mempertahankan makna simbolik

sumbu tersebut melalui keberlanjutan fungsi Tugu Pal Putih sebagai penanda kosmologis serta akses ritual ke Gunung Merapi. Intervensi kolonial memang mengubah konfigurasi fisik kota, tetapi tidak sepenuhnya menggeser makna simbolik yang sudah ada.



Gambar 6. Prosesi Acara Grebeg di Kraton Yogyakarta sekitar tahun 1932
(Sumber: *Optocht ter Gelegenheid van Garebeg in de Kraton te Jogjakarta*, 1932)

Respons masyarakat terhadap negosiasi ini beragam. Sebagian kelompok, misalnya pedagang, beradaptasi secara pragmatis serta sebagian yang lain, misalnya *abdi dalem*, cenderung resisten dengan memperkuat aspek simbolik dan spiritual. Keragaman orientasi menunjukkan bahwa negosiasi bukan merupakan peristiwa tunggal, tetapi sebuah proses kompleks yang menuntut rasa saling mengerti antara satu dengan yang lain. Sultan memainkan peran penting dalam menyeimbangkan negosiasi lintas budaya ini agar tidak merusak legitimasi politik dan spiritual yang menopang eksistensinya sebagai penguasa.

Kosmologi lokal yang berakar pada sumbu Merapi-Kraton-Laut Selatan tidak hilang di bawah penetrasi kekuasaan kolonial, tetapi terus hadir sebagai orientasi simbolik yang mengikat praktik sosial dan politik. Kosmologi ini, dalam kerangka *theater state* Clifford Geertz, dipahami sebagai mekanisme kekuasaan yang bekerja melalui representasi simbolik dan kemudian diperkuat dengan pertunjukan ritual (Geertz, 2017). Tata kota, sumbu kosmologis, dan ritual publik seperti *grebeg* dan *labuhan* berfungsi sebagai panggung tempat otoritas Sultan dipertunjukkan di hadapan masyarakat. Kegagalan kartografi kolonial dalam menghapus praktik ini kemudian menghasilkan ruang kota Yogyakarta sebagai tempat bertemunya dua logika kekuasaan, yaitu kekuasaan kosmologis yang diproduksi melalui simbol dan kekuasaan kolonial yang dijalankan melalui pengelolaan teknis.

Sultan Yogyakarta memainkan peran penting dalam mengatur keseimbangan itu. Sultan bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga menjadi figur yang menafsirkan ulang kosmologi tradisional agar tetap relevan dalam ruang yang diintervensi kolonial. Melalui otoritasnya, kosmologi disajikan bukan sebagai warisan statis, tetapi sebagai sumber legitimasi dinamis yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Hal ini tampak dari bagaimana keraton terus diposisikan sebagai pusat moral dan spiritual, meskipun ruang administratif di sekitarnya sudah banyak diubah sesuai dengan kepentingan penguasa kolonial.

Kebijakan Sultan untuk beradaptasi dengan perubahan yang dilakukan oleh penguasa kolonial ternyata juga diikuti rakyat. Rakyat Yogyakarta ikut menafsirkan ulang ruang-ruang kota melalui pengalaman sehari-hari. Di satu sisi masyarakat berinteraksi di dalam tata ruang kolonial yang memfasilitasi perdagangan, mobilitas sosial, dan administrasi pemerintahan, tetapi di sisi lain mereka tetap merawat orientasi kosmologis yang menyatukan kehidupan sosial-spiritual. Kehidupan pasar, upacara lokal, maupun komunikasi lisan yang diwariskan keluarga menjadi jalur penting untuk menjaga makna kosmik (Pramitasari, Anggi, Isnaemi, & Gultom, 2025). Kegiatan inilah yang kemudian membentuk memori kolektif masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun.

Yogyakarta adalah contoh bagaimana kosmologi tradisional dan kartografi kolonial dapat berjalan beriringan, meskipun dengan negosiasi rumit serta proses yang panjang. Yogyakarta tidak bisa dipandang hanya sebagai kota kolonial yang teratur oleh peta, tetapi juga menjadi laboratorium sosial tempat dua sistem saling menguji dan diuji. Dominasi kolonial tidak pernah absolut, sementara kosmologi tradisional juga bukan hanya romantisme historis. Keduanya saling mengisi hingga melahirkan dinamika budaya yang memperlihatkan fleksibilitas Jawa dalam menghadapi perubahan. Sumbu filosofi tidak lagi hanya menjadi garis imajiner, tetapi menjelma sebagai kerangka interpretasi yang memungkinkan masyarakat memaknai kota dengan caranya sendiri. Peta kolonial memang menata kota secara fisik, tetapi kosmologi tradisional tetap hidup dalam praktik ritual dan orientasi ruang. Interaksi keduanya memperlihatkan bahwa ruang kota Yogyakarta dibentuk oleh pertemuan antara rasionalitas kolonial dan kosmologi tradisional.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kosmologi Jawa dan sumbu filosofi di Yogyakarta berfungsi sebagai ruang simbolik yang menunjukkan ikatan manusia dengan alam semesta sekaligus memperkuat legitimasi kekuasaan Sultan. Garis imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton, hingga Laut Selatan tidak hanya dipahami sebagai orientasi geografis, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang menata kehidupan spiritual, sosial, dan politik masyarakat Jawa. Sumbu ini melahirkan tata ruang kota yang berlapis, di mana setiap elemen fisik seperti keraton, alun-alun, masjid, dan pasar memiliki posisi simbolis tertentu. Praktik ritual, upacara, dan narasi kosmologis memperkuat pemaknaan ruang tersebut, sehingga sumbu filosofi menjadi instrumen budaya yang membentuk identitas kolektif.
2. Peta kolonial merupakan representasi kuasa yang mengubah cara ruang kota Yogyakarta dipahami dan diatur. Bagi pemerintah Belanda, peta bukan hanya alat teknis untuk menggambar jalan, rel, atau bangunan, tetapi sarana ideologis untuk mengelola ruang

sesuai kepentingan kolonial. Melalui kartografi, ruang kota direduksi menjadi objek administratif yang bisa dikontrol, diawasi, serta dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan militer. Interaksi simbolik antara ruang dan kosmos perlahan digeser oleh logika fungsional, sehingga orientasi kota lebih menekankan hubungan antara pusat administrasi dengan daerah produksi atau lembaga keamanan. Peta kolonial juga melegitimasi intervensi pembangunan seperti pelebaran jalan, pendirian kantor pemerintahan, dan pembangunan fasilitas publik yang sesuai dengan pola grid kolonial.

3. Negosiasi ruang antara kosmologi Jawa dan kartografi kolonial menghasilkan dinamika yang memperlihatkan ruang kota Yogyakarta sebagai tempat interaksi dua sistem makna. Kolonialisme menghadirkan struktur fisik berupa jalan, pasar, sekolah, dan kantor administrasi yang merepresentasikan logika fungsional, sementara kosmologi Jawa tetap hidup dalam ritual, prosesi keagamaan, dan memori kolektif masyarakat. Keduanya tidak saling meniadakan, tetapi beradaptasi dan membentuk lapisan ruang yang kompleks. Sultan dan masyarakat Yogyakarta menggunakan caranya sendiri dalam mempertahankan orientasi kosmologis tanpa menolak sepenuhnya intervensi kolonial, misalnya dengan memastikan jalur ritual *grebeg* dan *labuhan* tetap berlangsung meski kota dikelilingi infrastruktur kolonial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. R. O. (2019). The Idea of Power in Javanese Culture. Dalam *Culture and Politics in Indonesia* (hlm. 1-70). Ithaca: Cornell University Press.
- Aprilian, R. D., & Fadhil, M. N. (2022). *Tugu Yogyakarta Merentang Masa: Transformasi Bentuk dan Makna Golong-Gilig dan Pal Putih*. Makalah disajikan dalam *International Symposium of Javanese Studies: Kasultanan Yogyakarta and Its Contributions to The Nation*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ashari, E. (2021). *Jalur Kereta Api Yogyakarta-Srandakan: Kepentingan Kolonial dan Dampak Ekonomi Pada Masyarakat Sekitar (1895-1930)*. *MOZAIK Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. (online), Vol. 11, No. 1, hlm: 69-98, doi: <https://doi.org/10.21831/moz.v11i1.45206>
- Behrend, T. E. (1989). *Kraton and Cosmos in Traditional Java*. *Archipel*. (online), Vol. 11, No. 1, hlm: 173-187, doi: <https://doi.org/10.3406/arch.1989.2569>
- Carey, P. B. R. (2014). *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro, 1785-1855*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Depari, C. D. A. (2017). *Transformasi Ruang Kampung Kauman Yogyakarta sebagai Produk Sinkretisme Budaya*. *Jurnal Arsitektur KOMPOSISI*. (online), Vol. 10, hlm. 11, doi: <https://doi.org/10.24002/jars.v10i1.1044>
- Dingemans, L. F. (1925). *Gegevens Over Djokjakarta 1925*. Yogyakarta: Residentie Djokjakarta. [Dokumen arsip]. KITLV, Amsterdam. <https://www.catatannusantara.com/pustaka/jdtmsfhwgdyf4mt-ecf58-lp7s3-7wpb5-3k2wh-rhy8t-lm828-9y4a4-tl6wk>
- Foucault, M. (2009). *Security, Territory, Population: Lectures at The Collège de France, 1977-1978* (G. Burchell, Penerj.). New York, New York: Picador.
- Foucault, M., & Gordon, C. (2010). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Harlow: Pearson Education.

- Geertz, C. (2013). *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Komunitas Bambu.
- Geertz, C. (2017). *Negara Teater: Kerajaan-Kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas*. Yogyakarta: BasaBasi.
- Graaf, H. J. de. (2002). *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta: Pustaka Utama Frafti.
- Gramsci, A. (2012). *Selections from The Prison Notebooks* (Repr.). London: Lawrence & Wishart.
- Gunawan, S. R., Nindyo, S., Ikaputra, I., & Bakti, S. (2013). *Colonial And Traditional Urban Space in Java: A Morphological Study of Ten Cities*. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*. (online), Vol. 40, No. 2, hlm: 77-88, doi: <https://doi.org/10.9744/dimensi.40.2.77-88>
- Harley, J. B., & Andrews, J. H. (Eds.). (2002). *The New Nature of Maps: Essays in The History of Cartography*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Irawan Y. (Ed.). (2018). *Babad Ngayogyakarta: Suntingan Teks*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Kusno, A. (2000). *Behind The Postcolonial: Architecture, Urban Space, and Political Cultures in Indonesia*. London: Routledge.
- Lefebvre, H. (2013). *The Production of Space*. Malden: Blackwell Publishing.
- Lewis, M. E. (2006). *The Construction of Space in Early China*. Albany: State University of New York Press.
- Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa: Silang Budaya; Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia.
- Mead, G. H. (2015). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago press.
- Nur Fauziah, S. M. (2018). *Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial: Malioboro 1756-1941. Lembaran Sejarah*. (online), Vol. 14, No. 2, hlm: 171-193, doi: <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.45438>
- Olthof, W. L. (Ed.). (2019). *Babad Tanah Jawi: Mulai dari Nabi Adam sampai Runtuhnya Mataram*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Optocht ter Gelegenheid van Garebeg in de Kraton te Jogjakarta*. (1932). [Fotografi digital]. KITLV. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:705386>
- Oudemans, J. A. C. (1891). *Die Triangulation von Java: Ausgeführt vom Personal des Geographischen Dienstes in Niederländisch Ost-Indien* (Vol. 1). s Gravenhage: M. Nijhoff [dokumen]. <https://archive.org/details/dietriangulation3418oude/page/n7/mode/2up>
- Pemberton, J. (2018). *On The Subject of "Java"*. Ithaca: Cornell University Press.
- Permono, A. (2021). *Sangkan Paraning Dumadi Sumbu Filosofi Yogyakarta: Dalam Lensa Fenomenologi Hermeneutika*. *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*. (online), Vol. 7, No. 1, hlm: 163-208, doi: <https://doi.org/10.32495/nun.v7i1.233>

- Pramitasari, D., Anggi, M., Isnaemi, L. D., & Gultom, Y. Z. (2025). *Daily Needs Stores in The Collective Memory and Living Heritage of Malioboro, Yogyakarta City, Indonesia*. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*. (online), hlm: 1-16, doi: <https://doi.org/10.1080/13467581.2025.2540081>
- Rykwert, J. (2013). *The Idea of A Town: The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy and The Ancient World*. London: Faber & Faber.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Stanford: Stanford Univ. Press.
- Sudarsih, S. (2020). Metaphysic Dimension in Labuhan Ceremony of Yogyakarta Palace. Dalam B. Warsito, Sudarno, & T. Triadi Putranto (Ed.), *E3S Web of Conferences* (Vol. 202, hlm. 07051).
- Sulistiyani, H. (2016). *The Railway Station in Java: Creation of the New Power Structure 1862-1942*. Disertasi tidak diterbitkan. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
- Surjono, S., Antariksa, & Titisari, E. Y. (2023). *Indonesian Javanese Cosmology and its Transformation in Social Tradition and Built Environment*. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. (online), Vol. 8, No. 11, hlm: 6782-6798, doi: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13931>
- Suryanto, Djunaedi, A., & Sudaryono. (2015). *Aspek Budaya Dalam Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. (online), Vol. 26, No. 3, hlm: 230-252, doi: <https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.26.3.6>
- Syahdani, M., & Kardanardi, L. (2023). *Yogyakarta's Philosophical Axis: A Dynamic Interplay Among UNESCO's Selection Criteria*. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*. (online), Vol. 5, No. 2, hlm: 151-162, doi: <https://doi.org/10.22146/ikat.v5i2.73326>
- Topografische dienst in Nederlandsch-Indië. (1925). *Jogjakarta en Omstreken*. Weltevreden: Topografische dienst. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:2012431>
- Ubaidillah, U., & Marpuah, S. (2021). *Interrelation of Religion and Culture in Gunung Tradition Cosmology: Islamic and Javanese Perspectives*. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*. (online), Vol. 29, No. 2, hlm: 34-55, doi: <https://doi.org/10.19105/karsa.v29i2.3869>
- UNESCO World Heritage Centre. (2023). *The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks-Maps of The Inscribed Property*. Sumber informasi website UNESCO World Heritage Centre. <https://whc.unesco.org/en/list/1671/> (diakses 17 September 2025).
- UNESCO World Heritage Centre. (2023). *Yogyakarta Philosophical Axis*. Sumber informasi website UNESCO World Heritage Centre. <https://whc.unesco.org/en/list/1671/> (diakses 17 September 2025).
- van Oldruitenborgh, S., & Baron, A. (1848). *De Witte Paal te Djocja* [Gambar]. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:852045>
- Versteeg, W. F., Cronenberg, F., Wolff, C. P., & Melvill van Carnbée, P. (Pieter), Baron, 1815-1856. (1857). *Kaart van de Residentie Djocjakarta, 1857* [Peta]. Batavia & 's Hage: Van Haren Noman and Kolff ; Van A.J. Bogaerts (Firma). Diambil dari <http://nla.gov.au/nla.obj-230934882>
- Yunus, H. S. (1991). *The Evolving Urban Planning The Case of The City of Yogyakarta*. *Indonesian Journal of Geography*. (online), Vol. 21, No. 62, hlm: 1-14. doi: <https://doi.org/10.22146/ijg.2193>



Dari Pendapa Sakral ke Panggung Budaya: Tari Istana dan Reartikulasi Ruang di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

From Sacred Pavilion to Cultural Stage: Court Dance and the Rearticulation of Royal Space at Keraton Yogyakarta

Anastasia Melati Listyorini

Taipei National University of the Arts

melatianastasia@gmail.com

Abstract:

This paper examines the transformation of the pendapa at Keraton Yogyakarta from a semi-sacred court pavilion into a regular stage for public cultural performances. Rather than treating architecture as a static backdrop, the study approaches the pendapa as a performative space whose meaning is continually constituted through embodied courtly discipline. Situated within the hierarchical spatial organization and broader cosmological-territorial order of the Javanese court, the pendapa operates as a crucial architectural node where ritual authority, aesthetic form, and public presence intersect. Drawing on performance ethnography, spatial observation, and archival research, the paper explores how weekly court dance performances rearticulate royal space in contemporary contexts. It argues that these performances do not merely adapt the pavilion into public stage (tourism), but actively constitute it as a site of living tradition through the disciplined repetition of embodied courtly movement. In this sense, the pendapa functions as living architecture sustained through embodied repetition and choreographic discipline: a space where spatial philosophy is enacted, not only represented. The study contributes to discussions on royal spatial order by demonstrating how architecture and dance mutually constitute cultural domain within the Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Keywords: Keraton Yogyakarta, Javanese court dance, pendapa, royal spatial order, performance and space, cultural authority

Intisari:

Makalah ini mengkaji transformasi pendapa di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dari paviliun istana yang bersifat semi-sakral menjadi panggung reguler bagi pertunjukan budaya publik. Alih-alih memandang arsitektur sebagai latar statis, studi ini menempatkan pendapa sebagai ruang performatif yang maknanya terus-menerus dikonstruksi melalui disiplin tubuh istana yang diwujudkan melalui laku tubuh. Terletak dalam organisasi tata ruang yang hierarkis serta

tatanan kosmologis-teritorial yang lebih luas dalam lingkungan istana Jawa, pendapa berfungsi sebagai simpul arsitektural penting tempat otoritas ritual, bentuk estetik, dan kehadiran publik berkelindan. Berdasarkan etnografi pertunjukan, observasi spasial, dan penelitian arsip, makalah ini mengeksplorasi bagaimana pertunjukan tari istana mingguan mereartikulasi ruang kerajaan dalam konteks kontemporer. Dinyatakan bahwa pertunjukan-pertunjukan tersebut tidak sekedar mengadaptasi pendapa menjadi panggung publik (turis), melainkan secara aktif mengonstitusikannya sebagai tempat tradisi yang hidup melalui repetisi disiplin gerak istana yang dihayati secara tubuh. Dalam pengertian ini, pendapa berfungsi sebagai arsitektur yang hidup yang dipertahankan melalui repetisi yang dihayati secara tubuh dan disiplin koreografis: ruang tempat filsafat spasial tidak hanya direpresentasikan, tetapi dilaksanakan melalui laku. Studi ini berkontribusi pada pembahasan mengenai tata ruang kerajaan dengan menunjukkan bagaimana arsitektur dan tari secara timbal balik membentuk ranah budaya dalam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Kata kunci: Keraton Yogyakarta, tari istana Jawa, pendapa, tata ruang kerajaan, performativitas dan ruang, otoritas budaya

PENGANTAR

Pendapa keraton Yogyakarta merupakan salah satu simbol arsitektur dan budaya Jawa yang kaya akan nilai sejarah, ritual, dan estetika. Secara tradisional, pendapa berfungsi sebagai ruang semi-suci yang menjadi tempat berlangsungnya berbagai upacara kerajaan, pertemuan resmi, dan pertunjukan tari yang bersifat sakral. Arsitekturnya mencerminkan kosmologi Jawa, menegaskan hierarki sosial, dan memediasi hubungan antara penguasa, lingkungan, serta masyarakat (Handinoto, 2000; Mangunwijaya, 2002; Prijotomo, 2015). Dalam konteks istana, pendapa tidak hanya berperan sebagai struktur fisik, tetapi juga sebagai ruang performatif di mana kekuasaan, etika, dan tatanan kosmik dipresentasikan dan dinegosiasikan (Anderson, 1972; Anderson, 1990).

Sejarah keterbukaan tari klasik keraton terhadap publik tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial dan politik sejak awal abad ke-20. Pada dekade 1920-an, sebagian tari istana mulai diajarkan dan dipertunjukkan di luar lingkungan keraton, menandai pergeseran awal dari praktik yang sebelumnya eksklusif bagi kalangan bangsawan menuju audiens yang lebih luas. Proses ini tidak serta-merta menghilangkan dimensi sakral tari, melainkan membuka ruang baru bagi artikulasi identitas Jawa dalam konteks kolonial dan modernitas awal. Sejarah ini penting sebagai latar belakang untuk memahami bagaimana tari istana dapat tampil di ruang publik tanpa sepenuhnya kehilangan legitimasi simboliknya (Soedarsono, 1984; Hughes-Freeland, 2008).

Seiring perkembangan pariwisata dan globalisasi budaya pada akhir abad ke-20 hingga kini, pendapa tidak lagi hanya menjadi simbol kesakralan istana, tetapi juga panggung bagi pertunjukan mingguan yang ditujukan kepada wisatawan lokal maupun internasional. Transformasi ini menghadirkan dinamika baru dalam cara masyarakat dan pengunjung memahami dan mengalami budaya Jawa, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang otoritas budaya, keaslian, dan komodifikasi tradisi. Dalam konteks urban dan modernitas Indonesia, ruang-ruang budaya seperti pendapa mengalami adaptasi tanpa sepenuhnya terlepas dari makna historis dan politisnya (Nas, 2003; Kleden, 2010).

Fenomena pertunjukan tari di pendapa keraton Yogyakarta menawarkan kasus yang relevan untuk memahami interaksi antara ruang, budaya, dan pariwisata. Pertunjukan tari klasik seperti Bedhaya, Serimpi, Golek, dan juga dramatari tidak hanya berfungsi sebagai medium pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai strategi afirmasi identitas Jawa dan sarana diplomasi budaya. Keterbukaan pendapa bagi publik mengubahnya menjadi ruang interkultural, tempat berbagai pandangan—lokal, nasional, dan global—bertemu dan bernegosiasi. Meskipun demikian, otoritas Kesultanan tetap dipertahankan melalui kurasi repertoar, pengelolaan ruang, dan narasi keaslian yang menyertai pertunjukan. Dengan demikian, pendapa berfungsi sebagai ruang simbolik tempat otoritas budaya, politik, dan estetika dipertemukan dan dinegosiasikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pendapa keraton Yogyakarta berfungsi sebagai simpul arsitektural dalam tatanan kosmologis-teritorial istana Jawa, dan bagaimana makna ruang tersebut terus dikonstruksikan melalui praktik pertunjukan tari yang berlangsung secara rutin. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana arsitektur dan pertunjukan tari secara timbal balik membentuk ranah budaya, menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai *arsitektur budaya yang hidup*, di mana tata ruang kerajaan bukan sekadar diwariskan, melainkan terus diproduksi ulang melalui disiplin gerak dan repetisi koreografis. Secara khusus, penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan posisi pendapa dalam tatanan kosmologis-teritorial keraton Yogyakarta dan bagaimana tatanan tersebut terus dikonstruksikan melalui disiplin gerak dan repetisi koreografis pertunjukan tari; (2) menelaah bagaimana pertunjukan tari klasik berfungsi sebagai praktik kurasi budaya yang menegaskan otoritas simbolik Kesultanan; (3) mengeksplorasi negosiasi keaslian dan relasi kuasa antara keraton, penari, dan audiens dalam konteks pertunjukan mingguan; serta (4) menyumbangkan kontribusi pada diskursus *royal spatial order* dengan menunjukkan bagaimana arsitektur dan tari secara timbal balik membentuk dan memperbarui ranah budaya dalam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Keempat tujuan tersebut dibahas melalui enam bagian analisis yang saling melengkapi, di mana setiap tujuan diuraikan dari dua sudut pandang yang berbeda namun berkaitan.

Penelitian ini bertumpu pada tiga bidang kajian yang saling melengkapi: studi pertunjukan (Hughes-Freeland, 2008; Soedarsono, 1984), arsitektur dan ruang budaya (Anderson, 1972, 1990; Florida, 1995; Mangunwijaya, 2002; Prijotomo, 2015), serta pariwisata budaya (Picard, 1996; Wood, 1993). Ketiganya digunakan untuk memahami pendapa sebagai ruang performatif yang memediasi antara tatanan kosmologis istana, otoritas simbolik Kesultanan, dan dinamika pariwisata global.

Melalui pendekatan etnografi pertunjukan dan analisis ruang, dilengkapi dengan studi pustaka dan wawancara, penelitian ini menegaskan bahwa pendapa keraton Yogyakarta berfungsi sebagai arsitektur budaya yang hidup. Ruang ini memungkinkan keberlanjutan tari klasik sekaligus menegaskan otoritas budaya Kesultanan dalam lanskap pariwisata kontemporer. Transformasi pendapa memperlihatkan ketegangan antara kesakralan dan komodifikasi, antara warisan dan modernitas, serta menunjukkan bagaimana arsitektur dan tari secara timbal balik mengonstitusi tata ruang kerajaan dalam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat melalui praktik performatif yang terus berlangsung.

Lebih dari sekadar perpindahan fungsi, transformasi ini menunjukkan bahwa pendapa sebagai ruang budaya dipertahankan maknanya melalui repetisi disiplin gerak istana yang terus-

menerus dihayati secara tubuh. Setiap pertunjukan bukan hanya pengulangan repertoar, tetapi tindakan konstitutif yang memperbarui makna ruang itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian etnografi pertunjukan (*performance ethnography*) yang dikombinasikan dengan analisis ruang dan kajian arsip. Pendekatan ini dipilih untuk memahami pendapa keraton Yogyakarta tidak hanya sebagai struktur arsitektur fisik, tetapi sebagai ruang performatif yang diproduksi melalui praktik tari, interaksi sosial, dan wacana pariwisata. Dengan merujuk pada studi pertunjukan yang menekankan dinamika tubuh, ruang, dan makna (Hughes-Freeland, 2008), penelitian ini memandang pertunjukan tari sebagai praktik sosial yang membentuk dan dibentuk oleh konteks budaya, politik, dan ekonomi.

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian bersifat deskriptif-interpretatif dengan fokus pada studi kasus pertunjukan tari mingguan di pendapa keraton Yogyakarta. Studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap satu lokasi spesifik yang memiliki kepadatan makna historis, simbolik, dan politis. Pendapa dipahami sebagai ruang budaya yang mengalami transformasi fungsi dari ruang semi-sakral istana menjadi panggung wisata, tanpa sepenuhnya melepaskan legitimasi simboliknya. Rancangan ini memungkinkan peneliti menelusuri kontinuitas dan perubahan praktik budaya dalam rentang historis dan kontemporer.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap pertunjukan tari mingguan di pendapa keraton Yogyakarta, wawancara informal, serta percakapan dengan berbagai aktor yang terlibat dalam praktik pertunjukan. Informan mencakup penari, pengrawit, pengelola pertunjukan, wisatawan domestik dan internasional, serta pengunjung lokal. Data sekunder meliputi arsip sejarah, literatur akademik tentang tari istana Jawa, arsitektur keraton, kosmologi Jawa, dan kebijakan pariwisata budaya di Yogyakarta. Literatur dari Soedarsono (1984), Handinoto (2000), Anderson (1972, 1990), serta kajian pariwisata budaya oleh Picard (1996) dan Wood (1993) digunakan untuk memperkaya konteks historis dan teoretis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama. Pertama, observasi partisipan baik sebagai penari maupun penonton. Observasi dilakukan selama pertunjukan mingguan di pendapa, dengan perhatian khusus pada tata ruang, orientasi penonton, posisi penari dan musisi, alur masuk dan keluar penonton, serta relasi visual dan simbolik antara pendapa dan kompleks keraton. Observasi juga mencakup analisis gerak tari, kostum, iringan musik, dan durasi pertunjukan sebagai bagian dari struktur performatif.

Kedua, wawancara informal dan percakapan dilakukan secara fleksibel untuk menangkap persepsi, pengalaman, dan interpretasi para aktor terhadap pertunjukan dan ruang pendapa.

Wawancara juga dilakukan terhadap penonton. Teknik ini dipilih untuk memungkinkan respons yang lebih natural dan reflektif, terutama terkait isu keaslian, nilai budaya, dan pengalaman wisata. Ketiga, studi arsip dan dokumen digunakan untuk menelusuri sejarah fungsi pendapa, perubahan praktik pertunjukan, serta wacana resmi mengenai pelestarian budaya dan pariwisata di Yogyakarta.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif. Data observasi dan wawancara dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema utama, seperti transformasi ruang, pergeseran audiens, praktik kurasi budaya, dan negosiasi keaslian. Analisis ruang digunakan untuk membaca pendapa sebagai arsitektur budaya yang memediasi hubungan antara sakral dan profan, pusat dan periferi, serta lokal dan global (Priyotomo, 2015; Mangunwijaya, 2002). Temuan empiris kemudian diinterpretasikan dengan merujuk pada kerangka teoretis studi pertunjukan, politik budaya, dan pariwisata budaya untuk memahami bagaimana pertunjukan tari di pendapa berfungsi sebagai praktik pelestarian, strategi legitimasi budaya, dan bentuk produksi wilayah budaya dalam konteks pariwisata global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendapa sebagai Arsitektur Budaya yang Dihidupkan oleh Pertunjukan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapa keraton Yogyakarta, dalam konteks pertunjukan tari mingguan,¹ tidak dapat dipahami semata sebagai ruang arsitektur statis, melainkan sebagai *arsitektur budaya yang hidup*, sebuah ruang yang maknanya terus diproduksi ulang melalui praktik performatif, relasi sosial, dan wacana warisan budaya. Pendapa tidak hanya menjadi latar bagi pertunjukan tari, tetapi turut berperan aktif dalam membentuk cara pertunjukan dipersepsi, dimaknai, dan dilegitimasi oleh penonton. Dengan kata lain, ruang dan pertunjukan saling mengkonstitusi.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa meskipun fungsi pendapa telah bergeser, struktur ruang dan tata letaknya tetap mencerminkan tatanan kosmologis-teritorial istana Jawa; menempatkan pusat kekuasaan sebagai sumbu simbolik yang mengorganisir seluruh relasi antara manusia, alam, dan kosmos. Posisi pendapa dalam tatanan ini bukan kebetulan arsitektural, melainkan ungkapan fisik dari hierarki kosmologis yang mengalir dari pusat istana ke pinggiran wilayah kekuasaan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Priyotomo (2015), ruang dalam tradisi Jawa bukanlah entitas pasif, melainkan *ruang-laku*, yaitu ruang yang memperoleh makna melalui tindakan. Dalam konteks ini, tari klasik yang dipentaskan di pendapa tidak sekadar “mengisi” ruang, tetapi mengaktifkan kembali relasi simbolik antara tubuh penari, arsitektur, dan tatanan kosmos.

1 Observasi dalam penelitian ini mencakup pertunjukan rutin mingguan di Keraton Yogyakarta yang diselenggarakan pada hari Selasa hingga Sabtu, meliputi pentas karawitan (Selasa), wayang kulit (Rabu), wayang golek (Kamis), Macapat (Jumat), dan pentas tari wayang wong (Sabtu), serta latihan tari rutin (*gladhen beksan*) yang diselenggarakan setiap hari Minggu. Fokus utama observasi adalah pertunjukan Sabtu-Minggu dan dinamika penggunaan ruang-ruang pertunjukan dalam kompleks keraton, termasuk Srimanganti, Kasatriyan, Kamandhungan, dan Bangsal Manis. Informasi mengenai jadwal dan perubahan lokasi pertunjukan diperoleh melalui wawancara dengan penari senior dan *pamucal* keraton.

Menurut pengalaman pribadi, ketika tubuh dibawa untuk menari di dalam lingkungan keraton, yaitu di Srimanganti, tubuh lalu “menempatkan diri” selaras dengan atmosfer lingkungannya. Gerak tari yang terukur, ritme yang perlahan, serta orientasi tubuh penari terhadap pusat ruang menciptakan dialog antara koreografi dan arsitektur. Tubuh penari berfungsi sebagai medium yang menjembatani nilai-nilai kosmologis dengan pengalaman estetis penonton.

Dengan demikian, pendapa berfungsi sebagai mediator antara dimensi sakral dan profan. Di satu sisi, ruang ini tetap membawa jejak ritual, etika istana, dan legitimasi simbolik Kesultanan. Di sisi lain, keterbukaannya terhadap publik memungkinkan terjadinya pergeseran fungsi menuju ruang tontonan dan konsumsi budaya.² Namun, pergeseran ini tidak dapat dibaca sebagai bentuk desakralisasi total. Sebaliknya, kesakralan mengalami proses translasi: ia tidak lagi diwujudkan melalui eksklusivitas akses, tetapi melalui tata ruang, kualitas pertunjukan, dan kerangka simbolik yang tetap dikendalikan oleh keraton.



Gambar 1. Penari puteri dengan berpakaian tradisional, yaitu berkebaya dan berjarik, dengan bersanggul sedang *diwejed* (pelatihan teknik tari secara teliti) oleh *pamucal* tari putri.

(Koleksi pribadi Wan-Chao Chang)

2 Wawancara dengan *pamucal* keraton, Angela Retno Nooryastuti (Inul) bahwa kesakralan tidak lagi diwujudkan melalui eksklusivitas akses, melainkan juga kualitas pertunjukan yang dijaga oleh para empu keraton.

Transformasi ini tidak menghapus makna lama, melainkan menumpuk lapisan makna baru. Pendapa menjadi ruang di mana memori sejarah, praktik budaya, dan kebutuhan ekonomi pariwisata bertemu dan dinegosiasikan. Dalam setiap pertunjukan, ruang ini sekaligus menampilkan masa lalu melalui bentuk tari dan idiom estetika istana dan masa kini melalui kehadiran wisatawan, kamera, serta ritme ekonomi budaya. Lapisan-lapisan makna ini tidak selalu harmonis, tetapi justru membentuk ketegangan produktif yang memungkinkan pendapa tetap relevan dalam konteks kontemporer.

Pandangan ini sejalan dengan Mangunwijaya (2002) dan Handinoto (2000) yang menekankan bahwa arsitektur Jawa tidak pernah netral, melainkan selalu terkait dengan etika, kekuasaan, dan relasi sosial. Pendapa keraton Yogyakarta, dalam konteks pertunjukan mingguan, memperlihatkan bagaimana arsitektur dapat menjadi instrumen politik budaya yang halus: ia mengakomodasi perubahan tanpa kehilangan pusat simboliknya. Ruang ini memungkinkan keraton mempertahankan otoritas budaya dengan cara yang tidak konfrontatif, tetapi melalui estetika, ritus, dan pengalaman ruang.

Dengan demikian, pendapa tidak sekadar berfungsi sebagai panggung fisik, melainkan sebagai perangkat kultural yang mengatur bagaimana tari klasik dipresentasikan, dimaknai, dan dilegitimasi. Melalui pertunjukan tari, pendapa terus diproduksi sebagai ruang budaya yang aktif: ruang yang menjembatani sakralitas dan pariwisata, tradisi dan modernitas, serta kekuasaan simbolik dan konsumsi budaya.

2. Dari Eksklusivitas Istana ke Audiens Wisata: Genealogi Keterbukaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan pendapa keraton Yogyakarta terhadap publik tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pergeseran praktik tari istana sejak awal abad ke-20. Berdasarkan kajian arsip dan literatur, sejak dekade 1920-an, sebagian tari klasik keraton mulai diajarkan dan dipertunjukkan di luar lingkungan istana, baik melalui lembaga pendidikan, pertunjukan terbatas, maupun forum kebudayaan. Proses ini menandai momen penting dalam sejarah tari istana Jawa, ketika praktik yang sebelumnya sangat eksklusif, terbatas oleh hierarki sosial, etika keraton, dan protokol ritual, mulai meluas jangkauan audiensnya. Meskipun demikian, keterbukaan ini tetap berada di bawah pengawasan simbolik dan struktural Keraton (Soedarsono, 1984; Hughes-Freeland, 2008).

Salah satu penanda penting proses ini adalah berdirinya Krida Beksa Wirama (1918) di Ndalem Tejakusuman, lembaga pendidikan tari klasik gaya Yogyakarta pertama di luar lingkungan istana yang menarik siswa dari berbagai latar belakang, nasional maupun internasional. Perluasan akses terhadap tari istana pada periode tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk sekularisasi atau pelepasan nilai sakral, melainkan sebagai respons strategis terhadap perubahan sosial dan politik pada masa kolonial akhir. Saat kekuasaan politik keraton mengalami pembatasan, praktik budaya, termasuk tari, menjadi medium penting untuk mempertahankan otoritas simbolik dan identitas kultural Jawa. Dengan demikian, visibilitas publik tari istana sejak 1920-an dapat dibaca sebagai awal proses re-artikulasi kekuasaan budaya, di mana legitimasi tidak lagi hanya bersandar pada eksklusivitas ruang istana, tetapi juga pada pengakuan publik yang lebih luas.

Perlu dicatat bahwa logika penempatan pertunjukan di ruang-ruang tertentu dalam kompleks keraton bukanlah praktik yang lahir dari konteks pariwisata kontemporer. Pramutomo

(2005) mendokumentasikan bahwa pada masa pemerintahan Hamengku Buwana V (1823–1855), pembagian kelas penari Wayang Wong di Keraton Yogyakarta sudah terwujud secara spasial: kelas *ringgit cina* berlatih dan tampil di Bangsal Kemagangan di bagian selatan, kelas *ringgit ěncik* di Bangsal Sri Panganti di bagian utara, sementara kelas *ringgit gupĕrmen*, kelas penari tertinggi, menempati Trtatag Bangsal Kencana di pusat istana. Fakta ini menunjukkan bahwa hierarki artistik dan sosial di keraton sejak lama telah diungkapkan melalui logika spasial yang terstruktur. Dengan demikian, penempatan pertunjukan tari di pendapa Srimanganti dalam konteks ini bukan sekadar keputusan teknis, melainkan melanjutkan tradisi panjang di mana *di mana seseorang tampil mencerminkan siapa dan apa yang ia wakili* dalam tatanan simbolik keraton.

Dinamika logika spasial ini tidak berhenti pada periode historis, melainkan terus berlanjut hingga praktik kontemporer. Pembagian lokasi latihan rutin hari Minggu antara penari *puteri* di Kasatriyan dan penari *kakung* di Srimanganti, misalnya, membawa konsekuensi institusional yang konkret: karena setiap sesi latihan selalu diiringi gamelan langsung, pemisahan lokasi mengharuskan tersedianya dua *bergada* gamelan yang beroperasi bersamaan. Menariknya, alasan di balik keputusan pemisahan ini tidak diketahui oleh para penari maupun pamucalnya sendiri, karena itu merupakan keputusan *pengageng* keraton.³ Fakta ini memperlihatkan bagaimana logika spasial keraton bekerja secara struktural dan hierarkis, tidak selalu melalui komunikasi eksplisit, dan bahwa genealogi keterbukaan spasial keraton bukan sekadar warisan statis, melainkan proses negosiasi yang terus berlangsung hingga kini.

Pertunjukan mingguan di pendapa keraton Yogyakarta pada masa kini dapat dipahami sebagai kelanjutan dari genealogi keterbukaan tersebut, tetapi dalam konteks historis dan ekonomi yang berbeda. Jika pada awal abad ke-20 keterbukaan tari istana berkaitan dengan kolonialisme dan modernitas awal, maka pada akhir abad ke-20 hingga sekarang, praktik tersebut beroperasi dalam kerangka ekonomi pariwisata global. Tari klasik tidak lagi hanya berhadapan dengan publik lokal atau kolonial, tetapi juga dengan audiens internasional yang datang sebagai wisatawan budaya. Namun demikian, seperti pada fase-fase sebelumnya, keterbukaan ini tidak serta-merta menghilangkan otoritas budaya Keraton.

Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa keraton justru mempertahankan dan bahkan memperkuat peran sentralnya sebagai penjaga dan kurator utama tradisi. Kontrol terhadap ruang pendapa, pemilihan repertoar, serta narasi yang menyertai pertunjukan memastikan bahwa meskipun tari ditampilkan untuk publik luas, sumber legitimasi budaya tetap berakar pada institusi istana. Dengan kata lain, keterbukaan terhadap audiens wisata tidak berarti pelepasan kendali, melainkan bentuk pengelolaan visibilitas yang terstruktur.

3 Angela Retno Nooryastuti (Inul) menyebutkan bahwa dinamika perpindahan lokasi ini berulang beberapa kali: sekitar tahun 1990-an latihan sempat diselenggarakan bersama antara penari *puteri* dan *kakung* sebelum bergeser ketika kebutuhan pentas dan latihan berbenturan, dengan Kasatriyan, Srimanganti, dan Bangsal Manis bergantian difungsikan. Pada tahun 2025, Kasatriyan menjalani pemugaran sehingga latihan penari putri dialihkan sementara ke Srimanganti dan penari *kakung* ke Kamandhungan. Pada periode inilah Inul menyadari kehadiran penonton terasa lebih banyak karena ukuran Srimanganti yang lebih kecil. Per Januari 2026, setelah renovasi selesai, latihan penari *puteri* kembali ke Kasatriyan.



Gambar 2. Penonton pada acara *Gladhen Beksan* (latihan menari) penari *kakung* (laki-laki) dengan *pamucal kakung* yang membimbing teknik menari pada hari Minggu, 3 November 2024 (Koleksi Wan-Chao Chang)

Dalam kerangka pemikiran Anderson (1972, 1990), praktik budaya semacam ini dapat dibaca sebagai bagian dari produksi dan reproduksi legitimasi simbolik. Bahasa, ritual, dan representasi budaya berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan otoritas dalam situasi perubahan politik. Dengan tetap menempatkan tari klasik dalam ruang pendapa keraton, bukan di panggung komersial sembarangan, Kesultanan menegaskan bahwa keaslian dan otoritas budaya tetap berpusat pada istana. Ruang menjadi elemen kunci dalam strategi ini: pendapa berfungsi sebagai penanda bahwa keterbukaan terjadi *dari* keraton, bukan *di luar* atau *melampaui* keraton.

Dengan demikian, keterbukaan terhadap publik tidak dapat dipahami sebagai bentuk desakralisasi total, melainkan sebagai strategi re-artikulasi kekuasaan budaya dalam konteks modern dan global. Tari klasik yang tampil di hadapan wisatawan justru memperluas jangkauan simbolik Keraton, memungkinkan nilai-nilai istana hadir dalam sirkulasi global tanpa kehilangan pusat otoritasnya. Genealogi keterbukaan ini memperlihatkan bahwa transformasi praktik budaya di keraton Yogyakarta bersifat berlapis dan historis, di mana perubahan akses dan audiens selalu dinegosiasikan dengan kepentingan legitimasi, identitas, dan kekuasaan simbolik.

3. Pertunjukan Tari sebagai Praktik Kurasi dan Otoritas Budaya

Hasil observasi menunjukkan bahwa repertoar pertunjukan mingguan di pendapa, mencakup Bedhaya, Serimpi, Golek, hingga pertunjukan fragmen, dipilih melalui proses kurasi yang mempertimbangkan nilai simbolik, representativitas budaya istana, dan keterbacaan bagi audiens wisata. Meskipun disajikan dalam durasi lebih singkat dan format yang disesuaikan, struktur koreografi, kualitas gerak, dan tata estetika istana tetap dipertahankan, menunjukkan upaya sadar untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan publik dan integritas tradisi.

Kurasi tersebut mencerminkan bentuk pengelolaan budaya yang hati-hati dan strategis. Alih-alih menghadirkan keseluruhan kompleksitas ritual tari istana, pertunjukan menampilkan elemen-elemen yang dianggap esensial dan representatif dari “budaya Jawa klasik.” Dengan demikian, yang dipertontonkan bukan sekadar tari sebagai bentuk seni, melainkan tari sebagai

tanda budaya (*cultural sign*) yang telah diseleksi dan dirangkai untuk kepentingan presentasi publik. Proses ini menegaskan bahwa kehadiran tari klasik di ruang wisata bukan hasil spontanitas, melainkan hasil keputusan institusional yang merefleksikan kepentingan pelestarian sekaligus representasi.

Kurasi ini sekaligus merupakan bentuk afirmasi otoritas budaya keraton. Seperti dicatat Hughes-Freeland (2008), perubahan dalam tradisi tari Jawa jarang bersifat degeneratif; sebaliknya, perubahan tersebut sering kali merupakan hasil negosiasi yang cermat antara kontinuitas dan transformasi. Dalam konteks pendapa, negosiasi ini tampak dalam cara penataan ruang pertunjukan, pemilihan kostum yang tetap mengikuti pakem istana, penggunaan iringan gamelan dengan struktur konvensional, serta pengaturan jarak antara penari dan penonton. Semua elemen tersebut bekerja bersama untuk mempertahankan aura keistanaan, meskipun pertunjukan berlangsung dalam kerangka pariwisata.

Narasi yang menyertai pertunjukan juga memainkan peran penting dalam praktik kurasi ini. Informasi yang diberikan kepada penonton, baik melalui pemandu wisata, brosur, maupun penjelasan singkat sebelum pertunjukan, membingkai tari yang ditampilkan sebagai warisan budaya otentik yang bersumber dari tradisi istana. Narasi ini tidak hanya berfungsi informatif, tetapi juga normatif: ia mengarahkan cara penonton memahami apa yang mereka saksikan, sekaligus menegaskan posisi keraton sebagai sumber legitimasi utama budaya Jawa. Dalam hal ini, kurasi tidak hanya berlangsung pada level artistik, tetapi juga pada level diskursif.

Dengan demikian, pertunjukan tari di pendapa berfungsi sebagai praktik pedagogis sekaligus politis. Ia mengajarkan “apa itu budaya Jawa” kepada audiens global melalui bahasa tubuh, ruang, dan narasi yang telah dikurasi. Proses pedagogi ini bersifat asimetris: keraton berada pada posisi sebagai pemberi pengetahuan dan otoritas, sementara penonton, terutama wisatawan, menempati posisi penerima. Relasi ini memperlihatkan bagaimana pertunjukan menjadi sarana produksi pengetahuan budaya yang tidak netral, melainkan terikat pada struktur kekuasaan simbolik.⁴

Dalam kerangka Anderson (1990), praktik semacam ini dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme pembentukan dan pemeliharaan otoritas kultural melalui simbol, ritual, dan representasi. Pertunjukan tari di pendapa bukan hanya ekspresi estetis, tetapi juga tindakan simbolik yang menegaskan batas-batas wilayah budaya dan pusat legitimasi. Dengan terus menampilkan tari klasik dalam ruang pendapa keraton, Kesultanan memperkuat klaimnya sebagai penjaga definisi “budaya Jawa yang sah,” sekaligus membedakannya dari bentuk-bentuk representasi budaya yang lebih komersial atau terlepas dari institusi istana.

Oleh karena itu, pertunjukan tari di pendapa tidak dapat dipahami semata sebagai hiburan atau atraksi wisata. Ia merupakan praktik kurasi budaya yang aktif, di mana estetika, pengetahuan, dan kekuasaan saling terkait. Melalui kurasi ini, keraton tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga membangun dan mempertahankan wilayah budaya simbolik yang terus dihadirkan kembali di hadapan publik lokal dan global.

4 Wawancara dengan Wan-Chao Chang, penari profesional yang tinggal di Perancis, yang mengatakan bahwa pertunjukan fragmen meskipun ditujukan untuk turis, tetapi dipertunjukkan secara klasik dengan kualitas yang masih terasa nilai-nilai simbolisnya.

4. Audiens, Tatapan, dan Negosiasi Keaslian

Perubahan komposisi audiens merupakan salah satu temuan kunci penelitian ini dan menjadi faktor penting dalam transformasi makna pertunjukan tari di pendapa keraton Yogyakarta. Jika sebelumnya pendapa terutama ditujukan bagi kalangan internal istana, bangsawan, dan tamu kehormatan dengan pemahaman kontekstual terhadap etika dan simbolisme tari, kini ruang tersebut diisi oleh wisatawan domestik dan internasional dengan latar belakang budaya, pengetahuan, dan ekspektasi yang beragam. Perubahan audiens ini secara signifikan memengaruhi cara pertunjukan dipresentasikan, diterima, dan dimaknai.

Observasi lapangan menunjukkan adanya perbedaan pola respons antara audiens lokal dan internasional. Wisatawan internasional cenderung mendekati pertunjukan sebagai pengalaman budaya yang eksotis,⁵ edukatif, dan visual. Bagi mereka, pertunjukan tari di pendapa sering dipahami sebagai representasi “budaya Jawa” secara umum, bukan sebagai praktik istana yang memiliki lapisan ritual, historis, dan politis yang kompleks. Tatapan ini bersifat selektif dan sering kali terfokus pada aspek visual yaitu kostum, gerak, musik serta nilai keunikan budaya yang dapat dikonsumsi dalam waktu singkat.⁶

Sebaliknya, banyak pengunjung lokal, khususnya masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, memaknai pertunjukan sebagai bentuk koneksi ulang dengan warisan budaya Jawa. Bagi audiens ini, kehadiran di pendapa tidak semata-mata bersifat rekreatif, tetapi juga afektif dan identitarian.⁷ Pertunjukan dipahami sebagai pengingat akan keberlanjutan tradisi istana dan posisi keraton sebagai pusat simbolik budaya Jawa. Perbedaan cara memaknai ini menunjukkan bahwa audiens bukan entitas homogen, melainkan subjek aktif yang membawa latar pengetahuan dan afeksi masing-masing ke dalam ruang pertunjukan.

Dalam konteks ini, keaslian (*authenticity*) tidak bersifat tunggal atau inheren pada bentuk tari itu sendiri, melainkan diproduksi melalui relasi antara penampil, ruang, dan penonton. Keaslian menjadi hasil dari proses negosiasi sosial dan simbolik, bukan kualitas yang tetap dan tak berubah. Seperti ditunjukkan Picard (1996) dan Wood (1993), pariwisata budaya selalu melibatkan ketegangan antara keaslian dan komodifikasi, di mana praktik budaya harus disesuaikan agar dapat dikonsumsi tanpa kehilangan klaim otentisitasnya.

Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komodifikasi tidak selalu berujung pada pengosongan makna atau reduksi nilai budaya. Dalam kasus pendapa keraton Yogyakarta, komodifikasi justru berfungsi sebagai sarana keberlanjutan tradisi, selama praktik tersebut berada di bawah kendali institusi budaya yang memiliki legitimasi historis. Pertunjukan tari menjadi komoditas budaya yang “terkendali,” di mana batas-batas adaptasi ditentukan oleh keraton sebagai otoritas simbolik. Dengan demikian, komodifikasi tidak berdiri sebagai kekuatan eksternal semata, tetapi menjadi bagian dari strategi pengelolaan warisan.

5 Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Yin-Chen Cheng, seniman dari Taiwan, yang melakukan observasi kebudayaan Jawa secara intensif selama hampir setahun untuk melihat dari dekat kebudayaan Jawa, terutama kebudayaan istana, sehingga menimbulkan rasa menghargai yang jauh dari eksotisasi budaya.

6 Wawancara dengan Wan-Chao Chang yang mendeskripsikan kostum, gerak dan musik tampak begitu detail yang hanya ditemui khusus di Pendapa Srimanganti ini.

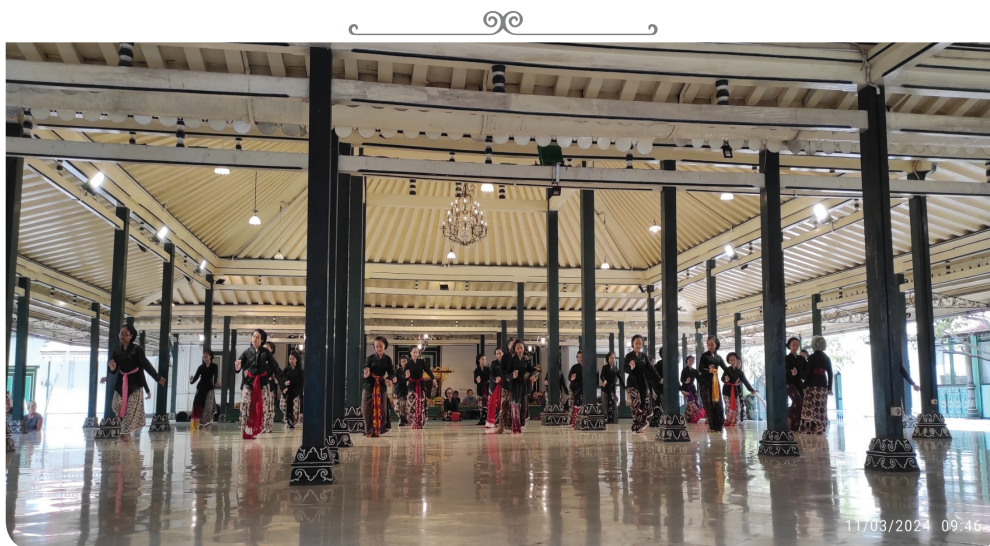
7 Wawancara dengan Purnamasasi, seorang wisatawan lokal, yang membawa kedua anak perempuannya yang masih usia sekolah dasar untuk memperkenalkan pertunjukan tari sebagai bagian dari identitas yang membangun sifat afektif.

Pendapa berfungsi sebagai *authenticity buffer*, ruang yang memberikan konteks legitimasi kuat sehingga pertunjukan tari tetap dibaca sebagai praktik budaya yang sah meskipun berlangsung dalam kerangka wisata. Keaslian di sini tidak hanya ditentukan oleh bentuk koreografi atau kepatuhan terhadap pakem, tetapi juga oleh *lokasi performatif* dan *otoritas penyelenggara*: pertanyaan „apakah ini asli“ dijawab tidak hanya melalui analisis bentuk tari, tetapi juga melalui „di mana tari ini dipentaskan“ dan „siapa yang mengaturnya.“ Dengan demikian, pendapa memungkinkan berbagai rezim tatapan, lokal maupun global, bertemu, sekaligus membingkai pertemuan tersebut dalam struktur simbolik yang tetap berpihak pada otoritas keraton, tanpa menyerahkan definisi keaslian kepada logika pasar wisata.

5. Pendapa sebagai Wilayah Budaya dan Penanda Teritorialitas

Salah satu temuan paling signifikan penelitian ini adalah bagaimana pendapa berfungsi sebagai penanda teritorialitas budaya melalui apa yang dapat disebut *territorial inscription*, penegasan berulang bahwa keraton Yogyakarta tetap menjadi pusat simbolik kebudayaan Jawa. Dalam tatanan kosmologis-teritorial istana Jawa, ruang bukan sekadar lokasi fisik melainkan ekspresi hierarki simbolik yang menghubungkan pusat kekuasaan dengan seluruh ranah kehidupan sosial dan ritual. Pendapa, sebagai simpul arsitektural dalam tatanan ini, menjadi titik di mana teritorialitas budaya dihadirkan kembali secara performatif, bukan melalui batas geografis, tetapi melalui praktik tari yang terulang dan terdisiplin.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, di mana Sultan Yogyakarta sekaligus menjabat sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, praktik budaya semacam ini memiliki implikasi politis yang kuat. Pertunjukan tari di pendapa tidak dapat dilepaskan dari posisi istimewa keraton dalam struktur negara-bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia menganut sistem politik demokratis, status keistimewaan Yogyakarta memungkinkan Kesultanan mempertahankan peran kultural dan politis yang unik. Dalam situasi ini, budaya tidak sekadar menjadi ekspresi estetis, tetapi juga medium legitimasi kekuasaan yang bekerja secara simbolik dan afektif.



Gambar 3. *Gladhen beksan* penari putri pada hari Minggu, 3 November 2024
(Dokumentasi pribadi Wan-Chao Chang)

Mengacu pada Anderson (1990), bahasa, ritual, dan simbol budaya berperan penting dalam mempertahankan dan mereproduksi legitimasi kekuasaan, terutama ketika kekuasaan tersebut tidak selalu diwujudkan melalui mekanisme koersif. Pertunjukan tari di pendapa dapat dibaca sebagai bentuk ritual sekuler-ritual yang tidak bersifat keagamaan, tetapi memiliki fungsi simbolik serupa dengan ritus politik. Melalui tubuh penari, struktur koreografi, dan tata ruang pendapa, keraton secara halus mengingatkan publik akan posisinya sebagai penjaga tradisi, sumber otoritas budaya, dan pusat identitas Jawa.

Ruang pendapa, dalam hal ini, tidak hanya berfungsi sebagai lokasi fisik tempat pertunjukan berlangsung, tetapi sebagai wilayah simbolik yang memproduksi makna politik dan kultural. Dengan mempertahankan pertunjukan di dalam kompleks keraton, Kesultanan menegaskan batas-batas simbolik wilayah budayanya. Pendapa menjadi semacam “zona kultural” di mana nilai-nilai Jawa versi istana dipresentasikan sebagai rujukan utama. Wilayah ini tidak ditandai oleh batas geografis yang kaku, melainkan oleh praktik performatif yang terus diulang dan dikenali oleh publik.

Dimensi teritorialitas ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa pertunjukan berlangsung secara rutin dan terjadwal. Pola ini bukan tanpa preseden historis (Pramutomo, 2005). Ritme mingguan menciptakan kesinambungan temporal yang penting dalam produksi makna. Seperti halnya ritual negara atau upacara resmi, keteraturan waktu berfungsi untuk menormalisasi kehadiran keraton dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yogyakarta. Pendapa menjadi ruang yang secara konsisten “dihidupkan” kembali sebagai pusat budaya, bukan hanya pada momen seremonial besar, tetapi dalam praktik mingguan yang dapat diakses publik.

Ritme ini juga menciptakan jembatan antara masa lalu dan masa kini. Setiap pertunjukan menghadirkan kembali memori sejarah dan kosmologi Jawa melalui bentuk tari klasik, sekaligus merespons kondisi kontemporer melalui kehadiran wisatawan dan logika pariwisata budaya. Dengan demikian, pendapa menjadi titik temu antara ritual dan pariwisata, antara lokal dan global, serta antara tradisi dan modernitas. Ketegangan di antara pasangan-pasangan ini tidak dihapus, tetapi dikelola melalui praktik performatif yang stabil dan terkurasi.

Melalui pertunjukan tari di pendapa, keraton Yogyakarta tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga secara aktif memproduksi wilayah budaya yang relevan dalam konteks politik dan ekonomi saat ini. Teritorialitas yang dibangun bersifat simbolik dan performatif, tetapi justru karena itu efektif: ia bekerja melalui pengulangan, estetika, dan afeksi, bukan melalui paksaan. Pendapa, dalam hal ini, berfungsi sebagai medium utama di mana budaya, ruang, dan kekuasaan saling terjalin dan terus dinegosiasikan.

6. Negosiasi Global dan Lokal dalam Praktik Pertunjukan

Kehadiran wisatawan internasional menempatkan pendapa keraton Yogyakarta dalam jaringan global pariwisata budaya yang lebih luas. Pendapa tidak lagi hanya menjadi ruang internal istana atau arena budaya lokal, tetapi juga menjadi titik temu antara nilai-nilai Jawa dan ekspektasi audiens global. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak sepenuhnya mendikte bentuk, struktur, maupun makna pertunjukan tari di pendapa. Sebaliknya, keraton secara aktif dan selektif menegosiasikan tatapan global dengan kepentingan lokal, sehingga pertunjukan tetap berakar pada kerangka simbolik dan estetika Jawa.

Pertunjukan mingguan dirancang agar dapat diakses oleh wisatawan asing melalui durasi yang relatif singkat, penyederhanaan alur naratif, serta penyajian visual yang kuat melalui kostum dan musik. Akan tetapi, penyederhanaan ini tidak berarti pengosongan makna. Struktur koreografi, penggunaan ruang, serta urutan pertunjukan tetap mengikuti konvensi istana, sehingga nilai-nilai kosmologis dan etika Jawa tetap terjaga. Dengan cara ini, keraton mempertahankan kendali atas representasi budaya Jawa di hadapan audiens global.

Dalam konteks ini, pendapa berfungsi sebagai ruang liminal, yaitu ruang peralihan di mana berbagai kepentingan, nilai, dan perspektif bertemu dan dinegosiasikan. Liminalitas pendapa tampak dalam posisinya yang berada di antara ruang sakral dan ruang publik, antara tradisi istana dan logika pariwisata, serta antara kepentingan pelestarian dan tuntutan ekonomi budaya. Seperti dicatat Nas (2003), ruang budaya di kota-kota Indonesia sering kali menjadi arena adaptasi antara modernitas dan tradisi. Pendapa keraton Yogyakarta menunjukkan bahwa adaptasi tersebut tidak selalu bersifat kompromistis atau subordinatif, melainkan dapat menjadi strategi afirmasi identitas budaya.



Gambar 4: Fragmen Wayang Wong dengan cerita Newatakaca Lena oleh Bale Seni Condoradono pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2024 (Dokumentasi Wan-Chao Chang)

Negosiasi global-lokal ini juga tercermin dalam cara audiens ditempatkan dan diarahkan. Wisatawan diizinkan menyaksikan pertunjukan dari area tertentu tanpa mengganggu struktur ruang utama pendapa. Pengaturan ini menegaskan batas simbolik antara penampil dan penonton, sekaligus antara wilayah istana dan publik. Dengan demikian, meskipun pertunjukan terbuka bagi siapa pun, akses terhadap makna terdalam tetap dikendalikan oleh keraton melalui tata ruang, kurasi, dan narasi institusional.

Merujuk pada Picard (1996) dan Wood (1993), pariwisata budaya selalu menciptakan ketegangan antara keaslian dan komodifikasi, dan dalam kasus pendapa keraton Yogyakarta, ketegangan ini tidak dihilangkan, tetapi dikelola secara aktif. Tari klasik dipresentasikan sebagai warisan budaya yang otentik dalam format yang kompatibel dengan konsumsi wisata, sementara keaslian dipahami bukan sebagai kesetiaan mutlak pada bentuk masa lalu, melainkan sebagai kontinuitas nilai dan otoritas simbolik yang dijaga melalui praktik institusional. Hal ini tampak

pula pada beberapa sanggar dan lembaga pendidikan tari yang tampil di pendapa Srimanganti, di mana fleksibilitas dalam detail gerak, kostum, dan gamelan justru menunjukkan bahwa adaptasi berlangsung dalam batas-batas yang masih dikendalikan oleh logika istana.⁸

Lebih jauh, praktik negosiasi ini menunjukkan bahwa keraton tidak berada pada posisi pasif dalam arus globalisasi budaya. Sebaliknya, ia berperan sebagai aktor budaya yang memiliki kapasitas untuk mengatur bagaimana Jawa direpresentasikan di panggung global. Globalisasi, dalam hal ini, menjadi medan relasi yang memungkinkan keraton memperluas jangkauan simboliknya tanpa kehilangan pusat gravitasi budaya. Pendapa berfungsi sebagai filter kultural, tempat nilai global diterima, disesuaikan, atau ditolak sesuai dengan logika istana.

Dengan demikian, praktik pertunjukan di pendapa keraton Yogyakarta memperlihatkan bahwa hubungan antara global dan lokal bersifat dialogis dan asimetris, bukan deterministik. Globalisasi tidak serta-merta mengikis makna lokal, melainkan membuka ruang bagi negosiasi kreatif dan strategis. Pendapa, sebagai ruang liminal dan simbolik, memungkinkan keraton mempertahankan otoritas budaya sambil berpartisipasi dalam ekonomi dan jaringan pariwisata global. Temuan ini menegaskan bahwa warisan budaya tidak hanya dipertahankan melalui resistensi terhadap globalisasi, tetapi juga melalui kemampuan untuk mengelola dan mengartikulasikannya secara selektif.

Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, pertunjukan tari mingguan di pendapa keraton Yogyakarta merupakan praktik budaya yang kompleks, bukan sekadar aktivitas wisata, melainkan medium simbolik tempat relasi kuasa, kosmologi Jawa, dan kepentingan kontemporer dipertemukan dan diartikulasikan ulang secara terus-menerus.

Sebagai arsitektur budaya yang hidup, pendapa memungkinkan tradisi dipertahankan bukan melalui pembekuan bentuk, melainkan melalui repetisi disiplin gerak istana yang dihayati secara tubuh. Setiap pertunjukan merupakan tindakan konstitutif: tubuh penari yang bergerak dalam struktur koreografi istana secara aktif memproduksi ulang makna ruang, otoritas simbolik, dan nilai kosmologis Jawa. Dengan kata lain, pendapa tidak cukup dipahami sebagai latar fisik yang *diisi* oleh pertunjukan; ia *dihidupkan* melalui disiplin koreografis yang berulang. Transformasi fungsi pendapa dari ruang semi-sakral istana menjadi panggung terbuka bagi publik karenanya tidak mengurangi bobotnya sebagai ruang simbolik, justru karena makna ruang itu terus dikonstruksi ulang melalui laku tubuh yang terdisiplin.

Melalui praktik kurasi pertunjukan, pengaturan ruang, dan ritme pertunjukan yang terjadwal, keraton secara aktif memproduksi makna keaslian versi institusional. Keaslian dalam konteks ini tidak dipahami sebagai reproduksi masa lalu secara utuh, melainkan sebagai kesinambungan nilai, struktur kosmologis, dan etika estetika Jawa yang dijaga melalui kontrol simbolik. Dengan demikian, pertunjukan tari di pendapa berfungsi sebagai mekanisme legitimasi budaya yang bekerja secara performatif, afektif, dan spasial.

8 Wawancara dengan Ali, kepala sebuah sanggar tari klasik gaya Yogyakarta yang kadang-kadang menerapkan fleksibilitas ketika menampilkan keklasikan Yogyakarta, baik berupa tari tunggal, srimpi, bedaya, ataupun fragmen.

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa ruang budaya tidak bersifat netral. Pendapa keraton Yogyakarta merupakan ruang politis dalam pengertian simbolik, di mana batas-batas antara sakral dan profan, lokal dan global, serta tradisi dan modernitas dinegosiasikan secara halus melalui pertunjukan tari. Dalam kerangka ini, komodifikasi tidak serta-merta mengarah pada degradasi makna; sebaliknya, ia dikelola sebagai strategi afirmasi identitas dan keberlanjutan institusional, di mana ketegangan antara nilai ritual dan ekonomi pengalaman dipelihara sebagai bagian dari dinamika budaya itu sendiri. Dengan demikian, pendapa berfungsi sekaligus sebagai pusat otoritas budaya Jawa dan sebagai medium yang memungkinkan nilai-nilai istana hadir dalam sirkulasi publik yang lebih luas.

Studi ini berkontribusi pada diskursus *royal spatial order* dengan menunjukkan bahwa tata ruang kerajaan bukan entitas statis yang diwariskan, melainkan terus diproduksi ulang melalui praktik performatif yang berlangsung secara berulang dan terdisiplin. Pendapa menjadi bukti bahwa arsitektur dan tari secara timbal balik mengonstitusi ranah budaya, dan bahwa tradisi dapat tetap hidup dan berotoritas justru karena kemampuannya untuk diartikulasikan kembali secara sadar melalui laku tubuh dan ruang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pertunjukan tari mingguan di pendapa keraton Yogyakarta berfungsi sebagai praktik budaya yang kompleks, di mana tradisi, ruang, dan otoritas simbolik saling terjalin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapa bukan sekadar latar fisik pertunjukan, tetapi merupakan arsitektur budaya yang hidup: tempat tradisi tari klasik tetap dilestarikan, otoritas Kesultanan ditegaskan, dan pengalaman budaya dikurasi untuk publik lokal maupun internasional. Transformasi pendapa dari ruang sakral istana menjadi panggung wisata menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap publik dapat menjadi strategi afirmasi identitas dan legitimasi budaya, sekaligus sarana keberlanjutan institusional dalam konteks modern dan global.

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi pada diskursus *royal spatial order* dengan menunjukkan bagaimana arsitektur dan tari secara timbal balik membentuk ranah budaya dalam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pendapa tidak semata-mata menjadi cermin tata ruang kerajaan yang sudah ada, tetapi secara aktif dikonstitusikan sebagai simpul arsitektural melalui praktik performatif yang terus berlangsung; tempat otoritas ritual, bentuk estetik, dan kehadiran publik berkelindan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tata ruang kerajaan bukanlah entitas statis yang diwariskan, melainkan sesuatu yang terus diproduksi ulang melalui disiplin koreografis dan repetisi *embodied*. Di samping itu, penelitian ini juga menyumbangkan perspektif bagi studi pertunjukan dan arsitektur budaya yang lebih luas, dengan menunjukkan bahwa kurasi, ritme pertunjukan, dan pengaturan ruang merupakan mekanisme aktif dalam menjaga legitimasi simbolik institusi kerajaan di tengah dinamika pariwisata global.

Penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan, baik tentang pengalaman penonton dan penari secara lebih mendalam, maupun studi komparatif di institusi budaya serupa di Asia Tenggara yang menghadapi tantangan yang sama dalam menegosiasikan tradisi, legitimasi, dan tuntutan global.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Verena Meyer, Ph.D. atas masukan dan perspektif yang memperkaya penelitian ini; kepada Prof. Dr. R.M. Pramutomo atas gagasan sejarah keruangan istana yang menginspirasi; serta kepada seluruh panitia *International Symposium on Javanese Culture 2026* atas dedikasi dalam mewujudkan simposium ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. R. O'G. (1972). *Java in a time of revolution: Occupation and resistance, 1944–1946*. Ithaca: Cornell University Press.
- Anderson, B. R. O'G. (1990). *Language and power: Exploring political cultures in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Florida, N. K. (1995). *Writing the past, inscribing the future: History as prophecy in colonial Java*. Duke University Press.
- Handinoto. (2000). *Sejarah arsitektur Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hughes-Freeland, F. (2008). *Embodied communities: Dance traditions and change in Java*. Oxford: Berghahn Books.
- Kleden, I. (2010). *Budaya sebagai refleksi: Perspektif kontemporer*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Mangunwijaya, Y. B. (2002). *Arsitektur, humanisme, dan budaya Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nas, P. J. M. (2003). *Urban Indonesia: Cultural adaptation in modernity*. Jakarta: KITLV Press.
- Pemberton, J. (1994). *On the subject of "Java"*. Cornell University Press.
- Picard, M. (1996). *Bali: Cultural tourism and touristic culture*. Singapore: Archipelago Press.
- Pramutomo, R.M. (2005). Fenomena Kelas Penari Wayang Wong di Yogyakarta pada Masa Lampau (1823 – 1855). *Jurnal Humaniora* Volume 17 No 3 (pp. 243-251)
- Prijotomo, J. (2015). *Arsitektur laku: Memahami ruang Jawa sebagai tindakan*. Yogyakarta: Penerbit PTL.
- Soedarsono, R. M. (1984). *Wayang wong: The state ritual dance drama in the court of Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wonderful Indonesia. (2022, November 12). The Kraton, reflection of Javanese Cosmos. *Wonderful Indonesia Travel*.
- Wood, R. E. (1993). Tourism, culture, and the sociology of development. In K. G. Gmelch (Ed.), *Tourists and tourism: A reader* (pp. 48–61). Long Grove: Waveland Press



Floating Pavilion in a Pleasure Garden: The Depiction of a Palace Garden in Panji Jayakusuma MSS JAV. 68

Balekambang di Tamansari: Penggambaran Taman Keraton di Panji Jayakusuma MSS JAV. 68

Muhammad Faiz

SOAS-Alphawood Alumnus
muhammadfaiz12@live.com

ABSTRACT:

This article examines the representation of palace gardens in Panji Jayakusuma MSS Jav. 68 (ff. 26v–27r), with particular attention to the episode describing Dewakusuma and Dewi Pandansari bathing together. Panji Jayakusuma MSS Jav. 68 was commissioned for Nyonya Sakēbēr in Surapringga, an alternative name for Surabaya in East Java. The depiction of the garden corresponds to balekambang, a pavilion on a pond that is usually present in the court garden of Java. This study employs a qualitative, interdisciplinary approach combining close textual reading, visual analysis, and historical contextualisation. By analysing the interaction between text and image, it argues that illustrated manuscripts functioned as crucial sites for imagining courtly space and authority beyond the physical boundaries of the royal capitals.

Keywords: Javanese manuscript, fictive narrative poems, garden, Tamansari, illustrations, wayang-style.

ABSTRAK:

Artikel ini mengkaji representasi taman istana dalam manuskrip tersebut, dengan fokus pada adegan ilustrasi Dewakusuma dan Dewi Pandansari yang sedang mandi bersama (ff. 26v–27r). Panji Jayakusuma (British Library, MSS Jav. 68) dipesan untuk Nyonya Sakēbēr di Surapringga (Surabaya), Jawa Timur. Taman yang digambarkan menampilkan balekambang, yaitu paviliun di tengah kolam yang lazim dijumpai dalam taman keraton Jawa. Melalui pendekatan kualitatif dan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis tekstual, kajian visual dan ikonografis, serta kontekstualisasi historis, artikel ini menelaah hubungan antara teks dan gambar. Artikel ini berargumen bahwa manuskrip bergambar berperan sebagai medium penting dalam membayangkan ruang dan otoritas keraton melampaui batas fisik pusat-pusat kerajaan Jawa.

Kata kunci: manuskrip Jawa, puisi naratif fiktif, taman, Tamansari, ilustrasi, bergaya wayang.

INTRODUCTION

Despite their visual richness, there has been no comprehensive study of the illumination or illustration of manuscripts in any Indonesian tradition (Meij, 2017:51). Nevertheless, a small number of studies have addressed specific aspects of manuscript illumination. For example, Saktimulya (1998) examines the *wedana renggan* (the decorative illuminated border) in Sestradisuhul. Only a limited number integrate images as an active narrative device, visually rearticulating the stories they contain. One of the most celebrated examples of illustrated Javanese manuscripts is *Serat Panji Jayakusuma MSS Jav 68*. Illustrations in the manuscript not only act as a visual guide for the story but also possess a reflection of life in Java, both before and contemporary to the manuscript.

Panji Jayakusuma was commissioned for Nyonya Sakėbėr in Surapringga, an alternative name for Surabaya in East Java, on 29 Besar AJ 1731 or 31 March 1805 CE. The manuscript is written in Javanese *Pasisir* style script from the North Coast of Java, on 104 folios or 208 pages of Dutch paper: 'J Honig & Zoonen', each measuring 32x21 cm. Other than that, the manuscript has 132 pages of polychromatic (two or more colours) *wayang* illustrations that retell the story (Ricklefs, Voohoeve, & Gallop, 2014:68; Yayasan Sastra Lestari, 2024). The artist rendered the illustrations with gold, silver, blue, orange, black, grey, green, and brown pigments. However, due to oxidation and the passage of time, the silver pigments now appear significantly darker, closer to black.

Weatherbee (2018:90) identifies the commissioner as "Madam Schaber" (Weatherbee, 2018:90). Carey (2022) offers a more persuasive interpretation, arguing that *Sakėbėr* represents the Javanese pronunciation of *Gezaghebber* (chief administrator). On this basis, Nyonya Sakėbėr is understood to have been the wife of the *Gezaghebber* of Surabaya, Frederik Jacob Rothenbühler. Rothenbühler was a German from Zweibrücken (Pfalz) who entered the Dutch East India Company through the Amsterdam *Kamer* on 11 January 1771. He served as *Gezaghebber* of Surabaya from 1799 to 1809 and later became a supernumerary member of Daendels' Council of the Indies (1809–1811). He was also known as an avid collector, particularly of Javanese manuscripts, and as a keen admirer of Javanese culture. Notably, Nyonya Sakėbėr herself does not appear in Dutch Indies genealogical records, although the couple's two children are documented, suggesting that she may have been Javanese or otherwise indigenous (Carey, 2022).

Rothenbühler was well known for his affinity with Javanese culture and appears to have married a local woman, almost certainly Javanese. According to Carey (2022), this can be inferred from the absence of his wife's name in Dutch Indies genealogical records, where a European or prominent Indo-European spouse would normally appear, and from contemporary characterisations of Rothenbühler as unusually sympathetic towards local inhabitants. The colonial archivist Frederik de Haan described him as "a very handsome man [...] with an exaggeratedly good opinion of the native," suggesting that he was perceived, even within late VOC mestizo society, as closely aligned with the Javanese population (Carey, 2022).

During the British interregnum, Rothenbühler was appointed by Colonel Colin Mackenzie to the land tenure commission of 1812–1813. In 1812, Rothenbühler presented *Serat Selarasa* along with three other manuscripts to Mackenzie, who served alongside Thomas Stamford Raffles during the British occupation of Java (1811–1816). Beyond his military career, Mackenzie was

a prominent orientalist and collector of manuscripts and historical materials from Java and India. Following his death, his extensive collection entered the East India Office Library in 1823 (Weatherbee, 2018:80). Now, the manuscript is in the British Library collection under the accession number MSS Jav. 68.



Figure 1 The depiction of a garden in MSS Jav 68 (source: British Library, 1805:ff. 26v-27r).

One of the most notable features of the manuscript is its depiction of a court garden, illustrated on folios 26v-27r (Figure 1). These images represent a moment when Dewakusuma and Dewi Pandansari are still at the court of Keling, prior to their return to Java. On f. 26v, two female attendants are shown wearing kemben (wraparound cloths worn by women). They carry incense and a vessel containing blue and red square-shaped objects intended for Dewakusuma and Dewi Pandansari. The attendants stand beside a dark grey wall with a gate adorned with three potted plants resembling bonsai. In front of the gate, bricks are arranged in a circular formation, further marking the threshold of the garden space.

On f. 27r, Dewakusuma and Dewi Pandansari are depicted standing hand in hand before a pond. The scene features a pavilion with a *limasan* roof rising above the water, potted plants carefully arranged along the pond's edge, and red and grey fish visible beneath the water's surface. While Keling means Kalingga, a name that refers to the land around the coast of Koromandel (Gericke; Roorda, 1901:508), The manuscript does not depict an Indian court garden. Instead, it presents a structure corresponding to a *balekambang* a pavilion set at the centre of a pond. This type of structure is commonly found in Javanese court gardens (Behrend, 1984:38).

The presence of a *balekambang* is particularly striking given the manuscript's place of production. In the early nineteenth century, Surabaya was a bustling port city under Dutch colonial administration and lacked a major royal court comparable to Surakarta or Yogyakarta, or even other port cities such as Cirebon and Banten. Nor was Surabaya considered a centre of Javanese literary production. The depiction of a court garden in *Panji Jayakusuma* thus raises important questions about the circulation of courtly spatial ideals and the imaginative reconstruction of royal space in a peripheral, colonial urban context. In this sense, the distant court of Keling is rendered through the architectural language of Javanese courtly forms, and its royal space is reconstructed by an artist in Surabaya through the visual idiom of the central courts.

Given his interest in and knowledge of Javanese culture, the decision to depict the pool with a floating pavilion may be connected to Rothenbühler's personal and professional background. Rothenbühler previously served as a secretary of the VOC in Semarang and is known to have accompanied the Governor of Java's Northeast Coast, Pieter Gerardus van Overstraten, on official visits to Yogyakarta. Another notable figure present on these occasions was Willem Wardenaar (1766–1816), who acted as a translator (Rothenbühler, 1882:348). On Saturday, 7 April, Van Overstraten and other Dutch officials inspected the kraton's fishponds and walls. While these accounts do not explicitly mention Taman Sari, it is possible that the fishpond referred to was part of the Taman Sari complex. A slightly earlier account from the reception of Governor Jan Greeve in July–August 1788, the Governor, accompanied by his retinue, proceeded to the kraton, where Sultan Hamengkubuwana I awaited him at the Soero Menganti gate. From there, they moved through to His Highness's fishponds, where they boarded a boat. Setting off in this vessel, they arrived at a tower surrounded by water (Pulo Gedong Pandawa Hangapuri) (Rothenbühler, 1882:352–353). It is therefore plausible that Rothenbühler, in his capacity as secretary, encountered the site first hand.

Denys Lombard (2008:65) has argued that Javanese court gardens were never constructed for enjoyment alone but functioned as sanctuaries where exalted beings withdrew from the everyday world. An oasis in which the ruler became a divine mode of life (Lombard, 2008:65). Yet his analysis focused primarily on surviving architecture and texts, leaving illustrated manuscripts largely unexplored. *Panji Jayakusuma*, therefore, offers an important case study: it demonstrates how courtly gardens were imagined and represented within literary-visual traditions, expanding our understanding beyond physical remains.

This article examines the representation of palace gardens in *Panji Jayakusuma* MSS Jav. 68 (ff. 26v–27r), with particular attention to the episode describing Dewakusuma and Dewi Pandansari bathing together. By analysing the interaction between text, image, and the manuscript's historical context, it argues that illustrated manuscripts functioned as crucial sites for imagining courtly space and authority beyond the physical boundaries of the royal capitals.

RESEARCH METHODS

Centre and Periphery as Relational Constructs

This study employs a qualitative, interdisciplinary approach combining close textual reading, visual, and historical contextualisation. Focusing on *Serat Panji Jayakusuma* MSS Jav. 68, ff. 26v–27r, it analyses the interaction between text and image to examine how court gardens are imagined. Comparative material from Javanese literature, temple reliefs, and palace architecture is used to situate the manuscript within longer visual traditions. A relational centre–periphery framework is applied to interpret the representation of courtly space in a colonial, non-courtly context.

Verena Meyer (2023:178) analyses two accounts concerning Javanese Muslim figures, Sunan Kalijaga and Ahmad Dahlan, who corrected and realigned the *qibla* of their respective mosques toward the Ka'ba. Although Meyer highlights the differences in their historical contexts, epistemological premises, and practical methods, she demonstrates that both narratives operate within a shared religious imaginary in which a peripheral location is oriented toward a

central locus of authority. Crucially, however, the act of alignment does not simply reaffirm the dominance of the centre; rather, it destabilises the presumed fixity of both centre and periphery (Meyer, 2023:178).

As Meyer argues, the relationship between centre and periphery is not static but dynamically produced through acts of orientation and realignment. In the account of Sunan Kalijaga aligning the Mosque of Demak with the Ka'ba, the saint is described as metaphorically grasping both sites and “wiggling” them into alignment. This gesture collapses the distinction between seeking and being: God does not exist as a static entity independent of human pursuit, just as Mecca does not function as a fixed centre apart from Kalijaga's embodied quest to orient himself toward it. The moment of alignment thus constitutes a phenomenological realisation of divine truth and knowledge, in which centre and periphery are mutually constituted rather than hierarchically ordered (Meyer, 2023:191).

A comparable reconfiguration of centre–periphery relations can be observed in Southeast Asian Islamic traditions surrounding *keramat*. As Teren Sevea (2024) notes, *keramat* texts articulate a sacred geography in which saints and holy figures in Southeast Asia are positioned as heirs of the Prophet and, in some cases, as possessing extraordinary spiritual authority. These narratives establish local sacral centres that resist marginalisation within broader Islamic geographies, demonstrating how peripheral sites assert their own religious and historical significance (Sevea, 2024:48).

Although Meyer's and Sevea's analysis is grounded in a religious context, their conceptualisation of centre and periphery is equally applicable to cultural and political formations. In this broader sense, the “centre” need not be Mecca but may instead be a royal capital or court that serves as a source of authority and aesthetic legitimacy. Rather than passively imitating a fixed centre, these adaptations reveal a dynamic process in which the authority of the court was continually renegotiated through its reception and transformation in peripheral contexts.

RESULTS AND DISCUSSION

Court Gardens in the Javanese Context

To understand the depiction of the royal garden in *Panji Jayakusuma*, it is necessary to situate it within the broader tradition of court gardens in Java. Court gardens were prominent features of Southeast Asian palaces from the sixteenth to seventeenth centuries. In Aceh and Malacca, gardens were celebrated in texts such as Taman Ghairah of Aceh in the *Bustan al-Salatin*, though physical remains in the Malay Peninsula are minimal (Lombard, 2008:1). According to Timothy E. Behrend (1984:38), Javanese *taman* or garden consistently emphasised a dualistic symbolism of mountain and sea, expressed through the juxtaposition of elevated elements with ponds, canals, and reservoirs. This symbolism was often explicit in a royal garden, as at Sunya Ragi and the Tasik Ardi (“Sea-and-Mountain”) garden in Banten (Behrend, 1984:38).

This dualism was also reflected in the gardens' functions. On the one hand, royal *taman* served as luxuriant pleasure grounds, offering aesthetic and sensual enjoyment and functioning as idealised paradisiacal retreats for the ruler. On the other hand, the same spaces could operate as *patapan*, or ascetic retreats, where the king engaged in meditation and spiritual discipline. Their enclosed, moated, and mountainous layouts rendered these gardens sacred microcosms,

analogous to the *kraton* and modelled on the cosmological world-mountain, enhancing their perceived spiritual efficacy. Javanese literary sources attest to the construction of numerous royal pleasure gardens from the Old Javanese period through the Islamic era, although few survive today. Notable remains include Tasik Ardi (Banten), the palace gardens of Cirebon and Sunyaragi (Cirebon, West Java), Baleretna, and Taman Sari (Behrend, 1984:38-39). Central to these gardens was the *balekambang*, which functioned not merely as an architectural ornament but as a locus for ritual, leisure, and the performance of royal authority.



Figure 2 Floating pavilion in Sunyaragi, Cirebon. It resembles the archetype of a *balekambang* (Source: Leiden University Library, 1935:KITLV 89458).

The depiction of gardens in *Panji Jayakusuma* also resonates strongly with earlier Hindu-Buddhist visual and literary traditions, such as texts composed during the Majapahit period (thirteenth–fifteenth centuries CE). In *Sudamala* Canto 3, the burial ground in which the heroic saviour Sadewa has just been bound by the goddess Durga, is suddenly transformed into a splendid garden (*kang setra taman dadine*). Durga turns into beautiful Uma, who is her original form. The Park is described as extraordinarily beautiful, filled with a profusion of flowers, most notably the magnificent *aśoka*, and centred on a square pavilion with a pool, into which the goddess gazes and perceives her reflection, realising that her former ugliness has been dispelled (Lombard, 2008:45-46). The pavilion in the middle of a pool that was mentioned in the text corresponds to the *balekambang*, which proves its appearance in the earlier literary tradition.

In the *Negarakṛtāgama* Canto 26, *stanza 1*, the governors under Majapahit are said to have offered a *kirtt*, a work of exceptional value, comprising small dwellings with adjoining courtyards (*natar*) constructed on stilts extending slightly into the sea and connected to the shore by a raised footpath (*laryya-laryyan*). This architectural arrangement evokes the *balekambang* built on artificial islets in ponds or lakes, which were prized by Javanese and Balinese rulers and elites as sites for leisure, meditation, and refined reflection (Pigeaud, 1962:79). Ramayana reliefs at Candi Panataran (fourteenth century CE) juxtapose serene royal pool scenes with moments of violence and destruction, most notably when Anoman sets Lañkā ablaze while ducks swim calmly nearby and warriors prepare to defend the court (see Figure 3). A *balekambang* with a small hut on it is

positioned at the centre of the pool, while numerous water channels line its edges, feeding the pool. The *balekambang* appears as a world unto itself, seemingly untouched by the surrounding chaos. Such visual polarities emphasise the garden as a symbolic site of harmony, order, and cultivated refinement that exists alongside, and in tension with, conflict and destruction.



Figure 3 The depiction of a palace garden with balekambang in Candi Penataran (source: Muhammad Faiz, 2024).

The making of the court garden was then also done by the Islamic Mataram kingdom. Javanese chronicles (*babad*) record an active tradition of court garden construction from the early seventeenth century onward, in which rulers invested heavily in landscaped environments structured around water, pavilions, and enclosed spaces. During his reign (1601–1613), Panembahan Seda ing Krapyak commissioned several major garden projects, beginning in 1605 with Dana Laya, a large pleasure garden incorporating a substantial pond known as Segaran *ing Sirnabuni*. This was followed in 1610 by the garden of Gading, located south of the palace at Kotagede, and in 1611 by an extensive hunting preserve (*krapyak*) named Beringan. These projects combined ornamental, recreational, and symbolic functions, integrating water features, controlled landscapes, and designated spaces for royal movement and ritual activity (Lombard, 2008:4).

Garden building continued under Sultan Agung (r. 1613–1645), whose reign saw the construction of increasingly ambitious hydraulic and architectural works. Contemporary Dutch accounts and Javanese chronicles describe the excavation of vast basins near the palace at Karta, the damming of the Opak River to create artificial lakes, and the establishment of new palace complexes organised around water. Although few of these early gardens survive, their scale and complexity indicate that garden construction was a central component of court architecture. Later complexes, most notably Taman Sari in Yogyakarta (c. 1758), preserve key elements of this tradition, including pools, water channels, and central pavilions, offering a tangible model of earlier court garden design (Lombard, 2008:4-6).

Unlike other royal gardens in Java, Tamansari is a site that is notable as a tourist destination in Yogyakarta, attracting astonishment from both Javanese and European authors. The complex

was built during the time of the first sultan, Hamengkubuwana I (1755-1792) and took 32 years to complete. According to folklore mentioned by Căndranagara (1880:244), Tamansari was designed by a stranded Portuguese named Demang Tegis (Căndranagara, 1880:244). However, European authors, such as P.J. Veth and Y. Groneman, suggested that it was the Javanese who designed it with the help of a Buginese and was inspired by European buildings in Batavia. Groneman further mentioned that Tumenggung Mangundipura is the architect (Soekiman, 1993:19-20). Djoko Soekiman (1993) suggested that according to a manuscript in the Yogyakarta palace, the regent of Madiun, Raden Ranga Prawirasentika, was ordered to inspect bricks for Tamansari construction, and the date of establishment is 1684 Java year or 1758 CE. The main building structure was finished in 1765 (Soekiman, 1993:20-21). However, Soekiman does not specify the manuscript on which this claim is based, leaving the evidentiary basis of this account unclear.

Tamansari was named the water castle or water palace, due to its elaborate system of waterworks, including artificial pools, waterways, and subterranean channels that structured the site. William Thorn, in his *Memoir of the Conquest of Java*, described Tamansari as the most remarkable building in the palace. The only way to enter the chateau is by entering an underwater passage. He also mentioned that the water palace has pleasant little gardens, fountains, as well as numerous interconnected apartments arranged in such a complex manner that they could easily disorient a visitor (Thorn, 1815:291-292). The memoir also includes an illustration of Taman Sari while it was still in use (see figure 4).



Figure 4 The illustration of Tamansari in *the Memoir of the Java Conquest*. It is apparent that the structure was still surrounded by a man-made water body (source: Thorn, 1815:292).

A structure with a similar name is also present in the Kraton of Surakarta, named Tamansari Bandengan. Unlike the Yogyakarta's Tamansari, the Tamansari in Surakarta is significantly smaller and nestled inside the inner wall of the palace. It was believed to be built during the time of Pakubuwana II (1726-1749). The Bandengan consists of a pool with an artificial island in the middle, with an open structure named Manten on it. The structure was used for a ruler to teach philosophy and other knowledge to his family members (Miksic, 2012:80).

Other literature that is contemporary to *Panji Jayakusuma* also mentions the depiction of a palace garden, one of which is *Serat Damarwulan* MSS Jav 89. The manuscript was collected in Cirebon, a coastal city in West Java, by the British East India Company colonel, Raban, and is now stored in the British Library (Coster-Wijsman, 1953:153). It also recounts sensory experience in the garden. Despite being an illustrated manuscript like *Panji Jayakusuma*, *Serat Damarwulan* has no illustrations of a garden. In contrast to *Panji Jayakusuma*, *Serat Damarwulan* also illustrates a floating pavilion but has no illustration of it. On the other hand, it does not recount the romantic atmosphere which *Panji Jayakusuma* has.

As mentioned in the manuscript:

14. *iya isun prênahêna | sing kiwa dalêmmu iki | sang nata alon ngandika | mring wong kalang nuli dadi | sêgaran toya wêning | dipun talang saking gunung | anjrah kang pêpêthetan | made kambang wus dumadi | masjid alit palataran banon pêthak | |*

15. *ingidêran lawan toya | jinalatundhandha awêning | pagêre sarwa linepa | anjrah ingkang puspasari | argulo lan mêlathi | sumanarsa tunjung tutur | sêkar gambir anglayap | cêmpaka wilis ngidêri | padalêman wus dadya sinirap pelag | |*

(61. *Sinom. Damarwulan* MSS Jav 89. Yayasan Sastra Lestari, 2022).

English translation:

14. *Yes, I have ever witnessed it | to the left of your house | then the king speaks | I saw the construction worker finish their work | a big reservoir with clear water | with the water channelled from the mountain | foliage presents everywhere | a floating pavilion stood fully realised | a modest mosque with white brick veranda | |*

15. *Surrounded by water | a pool with pristine water | and plastered wall | with flowers everywhere | the highland rose and jasmine | white champaca and blue lily telling grace | gambir flower drifting on the breeze | the pale magnolia circling around | The house itself stood handsome beneath its shingled roof | |*

In this sense, the garden depicted in *Panji Jayakusuma*, complete with a floating pavilion, flowering vegetation, and ornamental fish, both continues and reinterprets earlier iconographic and narrative traditions associated with Majapahit and later royal gardens such as Tamansari and Sunyaragi. At the same time, the court garden functions as a site of encounter and union, a role that corresponds closely to Old Javanese and later literary traditions. It is not merely a pleasure garden for royal repose, but a space imbued with deeper spiritual and cosmological significance.

Synopsis of *Panji Jayakusuma*

To understand the depiction of the royal garden in *Panji Jayakusuma*, it is necessary to consider the narrative context in which the scene appears, as well as the position of the illustration within the broader structure of the text. *Panji Jayakusuma* (British Library, MSS Jav. 68) retells a variant of the Panji cycle, narratives that recount a legendary past in Java, in which four kingdoms were ruled by four brothers: Koripan or Kahuripan (also known as Janggala), Daha (Kadiri or Mamenang), Gegelang (Urawan), and Singhasari. The marriage between the crown prince of Koripan and the princess of Daha constitutes a central motif across all Panji stories. At the outset of these narratives, the couple is betrothed. However, the princess subsequently

disappears, prompting Panji to leave the palace and embark on a search for her (Zoetmulder, 1983:534-535).

This manuscript, however, opens not with Panji himself but with the journey of Dewakusuma and his brothers to the kingdom of Keling. Their voyage is prompted by an epidemic afflicting the country, which the king seeks to end through a contest: any man who can lift the sacred flag known as *wênara pêthak* (“the white monkey”) is granted marriage to his daughter, Dewi Pandansari. Dewakusuma succeeds in the challenge and thus marries Pandansari. Dewakusuma and Pandansari moved to their new home in the north of the market. The manuscript illustrates the intimacy of the couple, including taking a bath in the court garden with their attendants, an episode that forms the focus of the present illustration.

However, Dewakusuma’s family demands that he returns to Java. He and Pandansari then return to Java by ship with their retinue. During the journey, they encounter a toad absorbed in meditation. Disturbed by the sight, Dewakusuma attempts to kill it, whereupon the toad transforms into two figures: Ki Sedana and Dewi Sri. Ki Sedana falls in love with Dewi Sri, described as his elder sister, but their union is forbidden. In order for their love to be realised, the two are destined to undergo reincarnation: Ki Sedana is reborn in Jenggala, while Dewi Sri is reborn in Kediri.

Upon Dewakusuma and Dewi Pandansari’s arrival in Java, Dewakusuma divides the island into four realms. He rules Jenggala himself, while Kediri is entrusted to Lembu Amijaya, Gegelang to Lembu Pangarang, and Singasari to the spouse of the youngest sister. Pandansari subsequently bears a child into whose body the soul of Ki Sedana enters. The child is named Panji Inu Kertapati, but Pandansari dies shortly after his birth.

As he comes of age, Panji Inu Kertapati seeks his destined counterpart, the reincarnation of Dewi Sri. However, her soul does not enter the body of the Jenggala princess, rendering their planned marriage illicit. Raden Brajanata, jealous that his brother marries first, murders Dewi Sri. The soul of Dewi Sri (Ki Sadana’s soulmate) then enters the womb of Dewi Lembusyara, the wife of the king of Kediri, and she is reborn as Dewi Candrakirana. The narrative continues with the eventual meeting of Panji Inu Kertapati and Dewi Candrakirana, culminating in their marriage. The story concludes with Panji Jayakusuma’s victory over an attack from the kingdom of Prenggi.

The description of the court garden in the text

A closer reading of the textual description of the garden further clarifies how the manuscript constructs this courtly space. The narrative written in the manuscript provides a vivid depiction of the garden: the pond is clear and glittering, populated by local fishlocal species such as *badher bang*, *palung* (hampal fish), and *tambra* (Javanese mahseer), while the surrounding area is adorned with flowering plants. Rather than focusing primarily on architectural structures, the text foregrounds sensory experience, particularly olfactory impressions and the atmosphere of romance that permeates the garden.

However, the manuscript does not mention a floating pavilion or gate with foliage on it, despite its presence in the illustration. The garden, as articulated in the verse, is less a fixed architectural setting than an affective space shaped by scent, sound, and embodied interaction.

The illustration thus reflects the artist's own conception of what a courtly pool should look like, shifting attention toward architectural form in contrast to the writer's emphasis on sensory and emotional experience.

The passage reads as follows:

39. *puspa abyor tulyaa angrawit | toyanya anyêntur | lirap-lirap adêrês iline | sêndhang agung gumilang awêning | mina wira-wiri | badhèr bang lan palung | |*

40. *ting calirap tāmbra nungsung warih | amijah mêncolot | samya mangêlung sridênta galihe | sêkar mênur gambir lan mêlathi | samaran amrik | gandane kang santun | |*

41. *têping taman kêlangkung radin | wus siram sakloron | angrèk prana anarat layone | gêlung lukar ganira amrik | dhatêng pasang guci | tinundha sang ayu | |*

42. *samya salin sinjang sarwa adi | wau sang akaron | para arum nāngga panampane | jêbad sari munggèng pacrikaning | myang ngrasuk sang dèwi | gānda nrus anglangut | |*

43. *sah kinanthi astane sang dèwi | dening Prabu Anom | anggarêbêk para ayu kabèh | lir Sang Kumajaya lan Sang Ratih | turun saking swargi | têdhak anèng ngriku | |*

44. *langkung sihyèn kaandon akrami | Sang Aprabu Anom | kusumaningrat iya trisnane | lir amintuna kêlayan mimi | Sang Prabu Anom sih | rantang-rèntèng runtut | |*

45. *dhasaripun sang rêtna linuwih | sami tan noragong | ya ta tulus sang rêtna ayune | amupugi sasêlaning èstri | gèmi anêstiti | sung bêkti ing kakung | |*

6. Mijil Panji Jayakusuma MSS Jav 68. (Yayasan Sastra Lestari, 2024). English translation:

39. *Flowers scattered with their scent | the water falling down | quietly flowing its current | In the great pool with clear water | fishes wander around | the badher bang and palung | |*

40. *The tāmra fish wander in the water | then it protrudes from the water | While the night blooming jasmine creeps along the trunk | Menur, gambir, and melathi jasmine flowers | vaguely drift off their fragrance | its scent is the essence | |*

41. *The pond edge is wide enough | possible to wash the whole body | with the dying heart orchid | creeping loosely while spreading scents | and then comes the one who holds the pot | the ladies who hold it | |*

42. *The two then changed into their finest wraparound cloths | and they, who are in love | were attended by the ladies-in-waiting who carried trays | the sweet-smelling oil was lit | and the scent penetrated into Padmasari | the fragrance goes deeper | |*

43. *By the guide of the lady's hand | the young prince | forth to greet all the fair ones | as they are Kumajaya and Ratih¹ | descend from the heaven | reside among them | |*

44. *and the lovers go deeper | the young prince | their love blossomed | like mimi and mintuna² | the compassionate young prince | walk hand in hand neatly | |*

45. *For she is a woman of exceptional virtue | as it has no end | truly gorgeous she is
| surpassing other women | diligent and composed | and offers devoted respect to her
man | |*

In this passage, the garden is animated through flowing water, wandering fish, and drifting floral scents, while the lovers' movements, changing garments, holding hands, walking together, are seamlessly integrated into the landscape. Metaphors likening the couple to Kumajaya and Ratih, divine embodiments of love, further heighten the garden's role as a charged, intimate space. The comparison to *mimi* and *mintuna*, animals conventionally associated with inseparable pairs in Javanese culture, underscores the ideal marital harmony. Taken together, the text constructs the garden not as a neutral backdrop but as an affective and morally inflected environment that facilitates romance and intimacy.

The disparity between text and image, therefore, invites closer scrutiny. The presence of a balekambang in the illustration may reflect a broader visual or architectural convention in which a large palace pond is almost automatically associated with a floating pavilion, even when the narrative itself remains silent on this feature. In this sense, the image draws upon a repertoire of courtly spatial ideals that exceed the immediate textual description.

This observation becomes particularly significant when considered in relation to place. As discussed earlier, Surabaya in the early nineteenth century was a colonial port city rather than a royal capital. Yet the manuscript's imagery repeatedly evokes architectural and spatial forms associated with Javanese courts. Rather than viewing this as an inconsistency, it is more productive to understand the manuscript as a site where royal space is imaginatively constructed. Through the interplay of text and image, *Panji Jayakusuma* articulates a vision of kingship and courtly life that is not dependent on the physical presence of a palace. In doing so, it demonstrates how illustrated manuscripts could function as powerful media for reimagining royal authority and sacred space within a colonial, non-courtly environment.

Keling and Jenggala within the 19th-century Surabaya?

While this imagery participates in a long-standing courtly aesthetic, it is also possible that the manuscript does not refer exclusively to distant or idealised models. Instead, it may reflect locations closer to the artist's lived environment, particularly the coastal milieu of Surabaya.

Surabaya was once an influential polity in East Java. It was once one of the biggest powers, rivalling the newly emerged and expanding Mataram from the inland part of Java. owing to its strategic location on the Brantas River delta and key maritime trade route. By the late fifteenth and sixteenth centuries, Surabaya had emerged as a major political and military power in eastern Java. It was strong enough to mobilise polities around it to protect against Mataram (H.J. De Graaf, 2020:48; Ricklefs, 2008:265,279).

However, the city was conquered by Mataram under Sultan Agung in 1625. This campaign constituted one of Mataram's most challenging military efforts, requiring the subjugation of Surabaya's allies in Sukadana and Madura as well as a sustained siege of the city itself (H.J. De Graaf, 2020b:126,133,152). In November 1743, the Dutch East India Company seized Surabaya from a weakened Mataram Sultanate (Ricklefs, 2008:123).

H. J. de Graaf and Pigeaud (2019:281) suggest that Surabaya once functioned as an important literary centre on the north coast of Java. In the sixteenth century, following Surabaya's conquest by Mataram, a prince known as Pangeran Pekik was brought to the Mataram court. According to Javanese literary tradition, Pekik was the son of Surabaya's last ruler, Jayalengkara, and was himself a prolific author. He is credited with composing several texts, including a legal work titled *Jaya Lengkara*. In the nineteenth-century court of Surakarta, Pekik was retrospectively celebrated as the author of a number of romantic narratives, most notably Damarwulan. Moreover, Panji narratives flourished in East Java largely due to the cultural influence of the Surabaya court, and their dissemination to other regions, such as Palembang, whose founders are said to have originated from Surabaya, further underscores the city's role as a centre of literary production and transmission (De Graaf & Pigeaud, 2019:283). Nevertheless, these claims remain largely dependent on later literary and courtly traditions, and further investigation is required to substantiate Surabaya's position within the literary landscape of Java.

Despite the absence of a surviving royal palace, Surabaya retains toponyms associated with a *keraton* to this day. Although its courtly structures were never on the scale of the great royal centres of Surakarta and Yogyakarta, several historical accounts indicate the existence of courtly architecture suggestive of a ducal seat. In the 18th Century, Francois Valentijn, a Dutch Calvinist and author, describes the city of Surabaya in his time as one of the foremost and largest cities of the realm, with some 10,000 households. Over it ruled the prince of Surabaya, who counted among his subjects not only the ruler of Sukadana but also the queen of Landak (Borneo). The prince, who was also the second coastal lord of the kingdom of Mataram, resided in a very fine *dalem* or court, maintained a splendid state, and possessed a handsome stable for his elephants. He was therefore often seen riding through the streets of Surabaya with one of his brothers on a large elephant, fitted with a latticed seat for two persons. The streets of the city were wide, and the *paseban* (*alun-alun*), where mirror combats were regularly held, was neatly laid out. Between the *dalem* and the fortress of the Honourable Company lay an extensive marketplace, where one could buy all manner of goods cheaply (Faber, 1931:15-16).

Although Valentijn provides no detailed description of the Surabaya *dalem* itself, it is possible that the court included architectural features commonly found in Javanese royal complexes, such as a royal garden. At the very least, this allows later generations to reconstruct an image of what the palace may have been like, even though its physical form no longer survives.

However, in other parts of the manuscript, the depiction of a palace appears to draw closely on the artist's or author's everyday environment. The architectural archetype resembles building found in Kampung Peneleh (see Figure 6). The structures shown in the illustrations feature *atap kampung* (gabled roofs) with *kemuncak* (decorated ridge ornaments). In addition, the buildings are equipped with doors fitted with *bovenlicht* (fanlights), a feature commonly found in colonial Java.



Figure 5 a depiction of a court in f.090r Panji Jayakusuma MSS Jav 68
(Source: British Library, 1805:f.090r).



Figure 6 Peneleh in Surabaya 1904. The buildings in this settlement resemble those in Panji Jayakusuma
(source: Leiden University Library, 1904:KITLV 120233)

This description points to the presence of a now-lost ducal court in Surabaya, whose material and ceremonial features echoed broader Javanese courtly norms. In this context, the illustrated manuscript *Panji Jayakusuma* can be read as participating in the imaginative reconstruction of courtly space within a city that no longer possessed a functioning *keraton*. The manuscript commissioner's husband, Rothenbühler, was known as an admirer of Javanese culture and an avid collector of manuscripts and artefacts. It is therefore unsurprising that the manuscript reflects a careful curation of courtly imagery. The juxtaposition of Surabaya's historical status as a former ducal centre with the manuscript's visual articulation of idealised palace space suggests an enduring memory of courtly authority, reimagined through text and image in a nineteenth-

century colonial port city. The manuscript thus brings together courtly ideals associated with the political and cultural “centre” and architectural forms drawn from the colonial urban “periphery”.

CONCLUSION

The depiction of the Palace Garden in *Panji Jayakusuma* does not merely function as a narrative backdrop but operates as a meaningful visual and symbolic space through which ideals of courtly order, refinement, and authority are articulated. The illustrations in *Panji Jayakusuma* demonstrably continue visual and literary traditions that can be traced back to the Hindu–Buddhist period, revealing a long-standing continuity in the representation of royal gardens within Javanese cultural history. Through established visual conventions, the garden is presented as an extension of the court itself.

The manuscript also invites reflection on how authors and artists positioned their works in relation to the political and cultural centre, in this case, the Javanese court. The illustrator or the commissioner, Nyonya Sakëbërpan, may have consciously aligned his imagery with courtly ideals, whether as an intentional act of affiliation with the centre or through adherence to prevailing visual conventions of the time. In either case, the garden imagery reflects a shared visual vocabulary through which the court was imagined, understood, and represented.

By situating the *Panji Jayakusuma* garden scene within the broader context of Javanese cultural history, this article argues that manuscript illustration offers an underexplored yet valuable perspective on the courtly garden. It demonstrates how literary and artistic traditions actively participated in the construction and transmission of royal ideals across time and media. While the Taman Sari of Yogyakarta stands today as the most monumental and material expression of this tradition, the manuscript evidence reveals that such garden imagery was already deeply embedded within the Javanese cultural imagination.

REFERENCES

- Behrend, T. E. (1984). Kraton, taman, mesjid: A brief survey and bibliographic review of Islamic antiquities in Java. *Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter*, 12(35), 29–55. <https://doi.org/10.1080/03062848408729594>
- Căndranagara. (1880). *Lampah-lampahipun Radèn Mas Arya Purwalêlana*. Batavia: Ogêlvi èn Ko.
- Carey, P. (2022, September 26). Frederik Jacob Rothenbühler and his wife as collectors of Javanese manuscripts in the early 19th century. Retrieved August 27, 2025, from Asian and African studies blog website: <https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2022/09/frederik-jacob-rothenbuhler-and-his-wife-as-collectors-of-javanese-manuscripts-in-the-early-19th-cen.html>
- Coster-Wijsman, L. (1953). Illustrations in a Javanese manuscript (met platen). *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 109(2), 153–163.
- De Graaf, H. J., & Pigeaud, TH. G. TH. (2019). *Kerajaan Islam Pertama di Jawa*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Faber, G. H. Von. (1931). Oud Soerabaia. In *Oud Soerabaia*. Surabaya: Gemeente Soerabaia.
- Gericke; Roorda. (1901). *Javaansch-Nederlandsch Handwoordenboek*. Leiden: E. J. Brill. Retrieved from https://www.sastra.org/katalog/judul?ti_id=918

- H.J. De Graaf. (2020). *Awal Kebangkitan Mataram Masa Pemerintahan Senapati (IV)*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Horne, E. C. (1974). *Javanese-English Dictionary*. New Haven and London: Yale University Press. Retrieved from https://www.sastra.org/katalog/judul?ti_id=1968
- Lombard, D. (2008). *Gardens in Java*. Jakarta: The National Research and Development Centre of Archeology.
- Meij, D. van der. (2017). *Indonesian manuscripts from the islands of Java, Madura, Bali and Lombok*. Leiden: Brill.
- Meyer, V. (2023). Where Is Mecca? Or, Map and Territory: Reflections from Java. In *Storied Island* (pp. 176–200). BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004678897_009
- Miksic, J. N. (2012). *The court of Surakarta*. Jakarta : BAB Publishing Indonesia.
- Pigeaud, T. G. (1962). *Java in the 14th Century: a Study in Cultural History, The Nagara Kertagama by Rakawi Prapanca of Majapahit, 1365 A.D*. Berlin: Springer Science+Business Media.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since C.1200*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.
- Ricklefs, M. C., Voohoeve, P., & Gallop, A. T. (2014). *Indonesian Manuscripts in Great Britain: A Catalogue of Manuscripts in Indonesian Languages in British Public Collections*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rothenbühler, F. J. (1882). Dagregister of dagelijksche aantekeningen van het voorgevallene ter geleentheid van de verwisseling van de, door het overlijden van den Sulthan Hamangkoe Boeana Seno Patty Ingalaga Abdul Rachman Sahidin Panatto Gama Califatollah. *Tijdschrift van Het Bataviaasch Genootschap*, 27, 295–362.
- Saktimulya, S. R. (1998). *Fungsi Wedana Renggan dalam sestradisuhul* (Master's thesis, Universitas Gadjah Mada).
- Sevea, T. (2024). Keramat: Muhammad's Heirs and Nodes of a Multi-Centered Islam in Southeast Asia. *International Journal of Islam in Asia*, 4(1–2), 48–74. <https://doi.org/10.1163/25899996-20241068>
- Soekiman, D. (1993). *Tamansari*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Jakarta.
- Thorn, W. (1815). *Memoir of the Conquest of Java*. London: T. Egerton; National Library Board Singapore. Retrieved from <https://www.nlb.gov.sg/main/bookdetail?cmsuud=9ab5cbe7-f2d5-4342-98dc-3df40dd865f>
- Weatherbee, D. E. (2018). An inventory of the Javanese paper manuscripts in the Mackenzie collection, India Office Library, London, with a note on some additional Raffles MSS. *Southeast Asia Library Group Newsletter*, (50).
- Yayasan Sastra Lestari. (2022). Damarwulan, British Library (MSS Jav 89), akhir abad ke-18, #1012.
- Yayasan Sastra Lestari. (2024). Panji Jayakusuma, British Library (MSS Jav 68), 1805, #1041.
- Zoetmulder, P. (1983). *Kalangwan: sastra Jawa Kuno selayang pandang*. Jakarta: Djambatan.

Aktivasi Arsip Visual dan Media Imersif Pelestarian Nilai Filosofis Tata Ruang Kasultanan Yogyakarta

Thibburruhany

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email: thibburruhany@gmail.com

Abstract:

The degradation of historic spaces in Yogyakarta has not only affected their physical condition but has also contributed to the gradual fading of the philosophical values embedded in the spatial order of the Yogyakarta Sultanate. The North Square (Alun-Alun Utara), as part of the city's philosophical axis, has experienced transformations in function and meaning that influence how the public understands the space within its historical and cultural context. This study aims to explore the role of visual archive activation through the zine medium as an interpretive platform to represent the changing meanings of this urban space. The research employs a descriptive-interpretative qualitative approach combined with practice-based research. Visual archives were collected from digital and historical documentation sources and organized using a reverse chronological structure to reveal layers of spatial transformation over time. These archives were then processed through visual techniques such as layering, fragmentation, and visual narration in the form of an interactive zine. Rather than measuring the effectiveness of the medium, this study focuses on the design process and the activation of archives as an interpretive practice for understanding spatial change. The findings indicate that the zine format facilitates the arrangement of visual archives in a non-linear manner and creates a reading experience that encourages reflection on the relationship between space, collective memory, and the philosophical values of urban spatial order. Through this approach, archives are positioned not merely as static documentation but as interpretive spaces that enable renewed readings of the historical dynamics of urban environments. This research positions zines as an alternative medium for visual archive activation that is non-linear and non-elitist within the broader context of cultural preservation.

Keywords: visual archive activation, interactive zine, North Square of Yogyakarta, philosophical axis, cultural preservation

Intisari:

Degradasi ruang bersejarah di Yogyakarta tidak hanya berdampak pada perubahan kondisi fisik, tetapi juga pada memudarnya nilai filosofis dalam tata ruang Kasultanan Yogyakarta. Alun-Alun Utara sebagai bagian dari sumbu filosofis kota mengalami transformasi fungsi dan makna yang memengaruhi cara publik memahami ruang tersebut dalam konteks sejarah dan

budaya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran aktivasi arsip visual melalui media zine sebagai medium interpretatif untuk merepresentasikan perubahan makna ruang tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif yang dipadukan dengan praktik berbasis desain (*practice-based research*). Arsip visual dikumpulkan melalui sumber digital dan dokumentasi historis, kemudian disusun dalam struktur kronologis mundur untuk menampilkan lapisan perubahan ruang dari waktu ke waktu. Arsip tersebut selanjutnya diolah melalui teknik *layering*, fragmentasi, dan narasi visual dalam bentuk zine interaktif. Penelitian ini tidak melakukan pengujian terhadap tingkat efektivitas media, melainkan berfokus pada proses perancangan dan aktivasi arsip sebagai praktik interpretatif dalam memahami perubahan ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zine sebagai medium visual mampu memfasilitasi penyusunan arsip secara non-linear dan menghadirkan pengalaman membaca yang membuka kemungkinan refleksi terhadap hubungan antara ruang, memori kolektif, dan nilai filosofis tata kota. Melalui pendekatan ini, arsip tidak hanya diposisikan sebagai dokumentasi statis, tetapi sebagai ruang interpretasi yang memungkinkan pembacaan ulang terhadap dinamika sejarah ruang kota. Penelitian ini menempatkan zine sebagai medium alternatif dalam aktivasi arsip visual yang bersifat non-linear dan non-elitis dalam konteks pelestarian budaya.

Kata Kunci: aktivasi arsip visual, zine interaktif, Alun-Alun Utara, sumbu filosofis, pelestarian budaya

PENGANTAR

Penetapan Yogyakarta sebagai ibu kota Kesultanan yang didirikan pada tahun 1755 tidak dapat dipisahkan dari visi politik dan pertimbangan kosmologis Pangeran Mangkubumi, yang kemudian dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono I. Setelah Perjanjian Giyanti, sang pangeran memilih untuk membuka hutan Beringan sebagai lokasi ibu kota kerajaan yang baru. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan strategis atau geografis, tetapi juga dipandu oleh pemikiran kosmologis Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan tatanan ilahi. Dalam pandangan dunia ini, kraton dipahami sebagai pusat simbolis alam semesta, di mana pengaturan spasial berfungsi sebagai media untuk menyampaikan ajaran filosofis tentang hubungan antara manusia dan kosmos. Unsur-unsur arsitektur, vegetasi, dan urutan spasial di sekitar Kraton Yogyakarta sengaja diatur untuk mewakili tahapan simbolis keberadaan manusia, mencerminkan konsep filosofis seperti *Sangkan Paraning Dumadi*, yang merujuk pada asal usul dan takdir akhir kehidupan manusia (Sunjata, Tashadi, & Astuti, 1995).

Prinsip-prinsip kosmologis ini terwujud dalam tata ruang Yogyakarta melalui poros simbolis yang menghubungkan Gunung Merapi di utara, kompleks Kraton di tengah, dan Laut Selatan di selatan. Dalam struktur perkotaan, keselarasan kosmologis ini diwakili secara lebih konkret melalui poros filosofis yang menghubungkan Panggung Krapyak, Kraton, dan Tugu Pal Putih. Poros ini mewujudkan perjalanan simbolis yang mencerminkan hubungan antara kehidupan manusia, kesadaran spiritual, dan harmoni kosmik. Dalam pemikiran filosofis Jawa, struktur spasial ini terkait erat dengan nilai-nilai seperti *Manunggaling Kawula lan Gusti*; kesatuan antara manusia dan Tuhan dan *Hamemayu Hayuning Bawana*, yang menekankan tanggung jawab etis manusia untuk menjaga harmoni di alam semesta (Suwito, 2020). Dalam pengertian ini, pengaturan spasial Yogyakarta bukan hanya sistem perencanaan kota tetapi juga narasi budaya yang mewujudkan pandangan dunia filosofis masyarakat Jawa.

Dalam kerangka ini, Kraton Yogyakarta berfungsi tidak hanya sebagai lembaga politik tetapi juga sebagai pusat produksi budaya Jawa. Secara historis, kraton telah berfungsi sebagai inti dari mana nilai-nilai budaya, ritual, tradisi seni, dan norma-norma sosial disebarkan ke wilayah sekitarnya, termasuk daerah yang dikenal sebagai *nagara*, *nagaragung*, dan *mancanagara*. Melalui upacara, seni pertunjukan, arsitektur, dan simbolisme spasial, kraton terus mereproduksi dan mentransmisikan makna budaya yang membentuk identitas masyarakat Jawa (Suwito, 2020). Namun, keberlanjutan sistem simbolik ini semakin terancam oleh transformasi urban yang cepat dan perubahan cara masyarakat kontemporer memandang warisan budaya.

Seiring waktu, sejumlah situs bersejarah yang pernah menjadi bagian dari jaringan spasial simbolik Yogyakarta telah mengalami kerusakan fisik serta kehilangan makna budaya secara bertahap. Beberapa situs yang secara historis memainkan peran penting dalam narasi spasial dan politik Kesultanan Mataram dan Yogyakarta kini hanya terpelihara dalam bentuk fragmen yang sulit diinterpretasikan oleh masyarakat umum tanpa pengetahuan sejarah. Misalnya, bekas ibu kota kerajaan Plered kini sebagian besar hanya berupa jejak arkeologis, sementara lanskap batu kapur Gunung Gamping telah mengalami degradasi lingkungan akibat aktivitas penambangan yang berkepanjangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelestarian warisan budaya tidak dapat hanya bergantung pada konservasi fisik, tetapi juga harus melibatkan strategi interpretatif yang memungkinkan makna historis tetap relevan bagi masyarakat kontemporer. Para sarjana dalam studi warisan budaya berpendapat bahwa warisan budaya harus dipahami bukan hanya sebagai kumpulan artefak sejarah, tetapi sebagai proses dinamis pembentukan makna yang menghubungkan pengalaman masa lalu dengan identitas budaya masa kini (Ashworth, Graham, & Tunbridge, 2007).

Tantangan dalam mempertahankan makna budaya juga tercermin dalam cara masyarakat kontemporer memahami nilai-nilai filosofis yang tertanam dalam struktur spasial Yogyakarta. Sebuah studi tentang persepsi publik terhadap transformasi filosofis Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun banyak penduduk mengenali landmark utama di sepanjang poros filosofis kota seperti Tugu Pal Putih, Jalan Malioboro, dan kompleks Kraton pemahaman mereka tentang makna filosofis yang terkait dengan elemen spasial ini tetap terbatas dan membutuhkan interpretasi dan sosialisasi budaya yang berkelanjutan (Sadana, Prasetya, & Dharmaraty, 2024). Kondisi ini mengungkapkan kesenjangan yang semakin besar antara kehadiran fisik ruang-ruang bersejarah dan makna simbolis yang ingin dikomunikasikan oleh ruang-ruang tersebut dalam filsafat budaya Jawa.

Dalam mengatasi kesenjangan ini, arsip dapat memainkan peran penting dalam merekonstruksi dan menafsirkan kembali makna historis yang tertanam dalam lanskap budaya. Yogyakarta, sebagai kota yang berkembang selama periode kolonial, memiliki koleksi materi arsip yang relatif kaya, termasuk catatan tekstual, peta, foto, ilustrasi, dan gambar arsitektur. Materi-materi ini mendokumentasikan berbagai aspek kehidupan perkotaan di berbagai periode sejarah, termasuk upacara kerajaan, pertemuan publik, administrasi kolonial, dan transformasi ruang perkotaan. Di antara materi arsip ini, arsip visual sangat signifikan karena menangkap konfigurasi spasial, aktivitas sosial, dan lanskap budaya dengan cara yang tidak dapat sepenuhnya diwakili oleh dokumen tekstual. Foto dan catatan visual berfungsi tidak hanya sebagai dokumentasi sejarah tetapi juga sebagai artefak budaya yang melestarikan narasi visual tentang bagaimana ruang digunakan, dialami, dan ditafsirkan oleh berbagai komunitas dari waktu ke waktu (Edwards, 2011).

Terlepas dari nilai historisnya, banyak arsip visual sebagian besar masih kurang dimanfaatkan dan sering diperlakukan sebagai koleksi pasif yang disimpan di dalam lembaga arsip atau museum. Aksesibilitasnya seringkali terbatas, dan cara penyajiannya tidak selalu memfasilitasi keterlibatan publik yang lebih luas. Akibatnya, potensi arsip visual sebagai media untuk mengkomunikasikan nilai-nilai budaya dan makna filosofis belum sepenuhnya dieksplorasi. Perkembangan terkini dalam studi kearsipan menyoroti pentingnya aktivasi arsip, sebuah konsep yang memandang arsip sebagai entitas dinamis yang dapat ditafsirkan ulang dan dikontekstualisasikan kembali melalui praktik kreatif untuk menjangkau khalayak yang lebih luas (Ketelaar, 2001; Ernst, 2013). Melalui proses remediasi, materi sejarah dapat diubah menjadi format media baru yang menghasilkan narasi alternatif dan mode keterlibatan budaya baru (Bolter & Grusin, 1999).

Dalam perspektif yang lebih luas, media imersif menawarkan pendekatan yang menekankan keterlibatan pengalaman antara audiens dan narasi budaya. Media imersif sering dikaitkan dengan teknologi digital seperti realitas virtual atau instalasi interaktif; Namun, pengalaman imersif juga dapat diciptakan melalui media analog yang dirancang dengan cermat yang menggabungkan penceritaan visual, urutan naratif, dan interaksi fisik (Gruau, 2003). Salah satu media yang menawarkan potensi tersebut adalah zine. Zine adalah publikasi independen yang dicirikan oleh format eksperimentalnya, gaya naratif pribadi, dan fleksibilitas visual. Melalui kolase, ilustrasi, dan tata letak berurutan, zine memungkinkan para kreator untuk mengeksplorasi narasi visual yang menantang mode produksi pengetahuan konvensional. Dalam beberapa tahun terakhir, zine telah mengalami peningkatan popularitas di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z, sebagai platform untuk ekspresi budaya alternatif dan penceritaan akar rumput (Duncombe, 2008).

Penelitian ini berfokus pada Alun-Alun Utara Yogyakarta sebagai studi kasus utama. Sebagai halaman depan seremonial Kraton, Alun-Alun Utara secara historis berfungsi sebagai panggung utama tempat otoritas kerajaan, kehidupan sosial, dan ritual budaya beririsan. Ruang ini telah lama dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa penting seperti upacara kerajaan, festival Sekaten, dan berbagai pertemuan politik. Lanskap ikoniknya, yang ditandai dengan keberadaan dua pohon beringin kembar yang dikenal sebagai Waringin Kurung, melambangkan perlindungan, keseimbangan, dan otoritas moral Sultan. Karena signifikansi historisnya dan penggunaan publik yang berkelanjutan, Alun-Alun Utara telah didokumentasikan secara ekstensif melalui foto dan catatan visual dari periode kolonial hingga saat ini. Pada saat yang sama, upaya renovasi baru-baru ini yang melibatkan pemasangan pagar dan pengenalan permukaan yang ditutupi pasir telah memicu perdebatan publik mengenai apakah perubahan tersebut selaras atau menyimpang dari nilai-nilai filosofis yang tertanam dalam pengaturan spasial tradisional lapangan tersebut.

Kontroversi seputar transformasi ini menyoroti kebutuhan akan pendekatan interpretatif yang dapat menghubungkan kembali arsip sejarah dengan audiens kontemporer. Dengan menyajikan arsip visual melalui penceritaan yang mendalam, dimungkinkan untuk menafsirkan kembali ruang-ruang sejarah bukan hanya sebagai lokasi fisik tetapi sebagai narasi berlapis yang mengungkapkan hubungan yang berkembang antara kekuasaan, masyarakat, dan kosmologi dalam budaya Jawa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan zine interaktif sebagai media imersif untuk mengaktifkan arsip visual yang berkaitan dengan nilai-nilai spasial filosofis Kesultanan Yogyakarta, dengan fokus khusus pada Alun-Alun Utara. Melalui integrasi materi arsip, narasi visual, dan desain sekuensial, penelitian

ini mengeksplorasi bagaimana aktivasi arsip yang kreatif dapat berkontribusi pada pelestarian dan reinterpretasi warisan budaya dalam konteks kontemporer.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan desain penelitian kualitatif yang mengintegrasikan penelitian kearsipan dengan produksi kreatif berbasis praktik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana arsip visual historis yang berkaitan dengan filosofi tata ruang Kesultanan Yogyakarta dapat ditafsirkan ulang dan diaktifkan kembali melalui media visual imersif berupa zine. Proses penelitian dilakukan dalam dua tahap yang saling terkait: investigasi kearsipan dan penerjemahan kreatif. Tahap pertama berfokus pada pengumpulan dan interpretasi materi historis, sedangkan tahap kedua menerjemahkan temuan tersebut ke dalam narasi visual yang terstruktur.

Tahap awal melibatkan tinjauan pustaka yang ekstensif untuk membangun pemahaman komprehensif tentang landasan filosofis dan organisasi spasial Kesultanan Yogyakarta, khususnya makna simbolis dan fungsi historis Alun-Alun Utara. Buku, artikel ilmiah, dan studi sejarah tentang kosmologi Jawa, perencanaan spasial kerajaan, dan peran budaya Kraton ditelaah untuk mengidentifikasi kerangka teoritis utama yang berkaitan dengan konsep filosofis dalam kosmologi Jawa dan manifestasinya dalam struktur spasial perkotaan. Tahap ini memberikan dasar konseptual untuk menafsirkan arsip visual dan untuk menentukan kerangka naratif yang nantinya akan dikembangkan dalam zine.

Tahap kedua berfokus pada pengumpulan materi arsip visual yang terkait dengan Alun-Alun Utara melalui sumber digital. Strategi pencarian digital digunakan dengan memanfaatkan berbagai platform, termasuk mesin pencari, platform berbagi gambar, dan jejaring media sosial yang mengkurasi dokumentasi sejarah Yogyakarta. Platform seperti Google Images, Pinterest, Instagram, dan grup Facebook yang didedikasikan untuk sejarah Yogyakarta digunakan untuk mengidentifikasi materi visual yang beredar di komunitas sejarah publik. Materi tambahan diperoleh dari repositori video daring seperti YouTube dan situs web institusional termasuk situs web resmi Kraton Yogyakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, Museum Sonobudoyo, dan Jogja Heritage Society. Sumber-sumber ini menyediakan akses ke foto, ilustrasi, dan dokumentasi acara budaya yang terjadi di Alun-Alun Utara.

Selain platform digital, penelitian ini juga mengandalkan dokumentasi visual dari arsip media cetak. Ini termasuk foto-foto pers dan liputan surat kabar tentang peristiwa-peristiwa bersejarah penting yang terjadi di Alun-Alun Utara, seperti peringatan penobatan raja (*Jumenengan Dalem*) pada tahun 1989 dan pertemuan publik besar-besaran yang dikenal sebagai *Pisowanan Ageng* selama periode Reformasi pada tahun 1998. Catatan visual modern ini disertakan karena mewakili bagian dari memori kolektif penduduk Yogyakarta mengenai peran simbolis lapangan tersebut dalam kehidupan sosial dan politik.

Untuk memperoleh dokumentasi sejarah yang lebih lama, penelitian ini juga mengeksplorasi koleksi digital yang dikelola oleh lembaga-lembaga warisan budaya di Belanda, yang menyimpan arsip visual era kolonial yang luas terkait dengan Indonesia. Koleksi-koleksi ini termasuk repositori digital Eye Film Museum, WereldMuseum, Koleksi Digital Universitas Leiden, dan Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie yang dikelola oleh Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, dan Sains Belanda. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci spesifik yang berkaitan dengan Alun-Alun Utara dan Kraton Yogyakarta untuk mengidentifikasi foto, cuplikan film, dan gambar historis yang menggambarkan lingkungan spasial dan aktivitas sosial di sekitar lapangan selama periode kolonial. Banyak dari materi ini sekarang menjadi bagian dari domain publik karena usianya, sehingga dapat diakses untuk reinterpretasi akademis dan kreatif.

Setelah mengumpulkan materi tekstual dan visual, data dianalisis melalui proses kualitatif bertahap. Tahap pertama melibatkan verifikasi sumber dan identifikasi kontekstual. Pada tahap ini, setiap arsip visual diperiksa untuk menentukan perkiraan periode, lokasi, dan konteks historisnya. Langkah ini sangat penting karena foto arsip Alun-Alun Utara dan Selatan sering menampilkan karakteristik visual yang serupa, dan tanpa verifikasi yang cermat, kedua lokasi tersebut dapat salah diidentifikasi. Oleh karena itu, penanda spasial spesifik seperti struktur arsitektur, bangunan di sekitarnya, pola vegetasi, dan pengaturan upacara digunakan sebagai indikator untuk membedakan Alun-Alun Utara dari situs serupa lainnya.

Tahap kedua terdiri dari klasifikasi kronologis dan periodisasi. Arsip visual dikelompokkan ke dalam beberapa fase sejarah untuk menelusuri transformasi fungsi spasial dan aktivitas publik di Alun-Alun Utara dari waktu ke waktu. Melalui klasifikasi ini, arsip mengungkapkan pergeseran bagaimana Alun-Alun Utara berfungsi sebagai ruang seremonial, area berkumpul publik, dan representasi simbolis otoritas kerajaan.

Tahap ketiga melibatkan interpretasi tematik. Pada tahap ini, sumber tekstual dan arsip visual dibandingkan untuk mengidentifikasi narasi berulang tentang peran budaya dan politik Alun-Alun Utara. Melalui sintesis antara teks historis dan arsip visual, penelitian ini membangun kerangka naratif yang menyoroti hubungan yang berkembang antara ruang, praktik ritual, dan memori kolektif dalam masyarakat Yogyakarta.

Tahap akhir penelitian menerjemahkan temuan analitis ini ke dalam desain zine interaktif. Zine ini berfungsi sebagai media bercerita yang imersif yang mengorganisir materi arsip ke dalam narasi visual berurutan. Melalui kombinasi gambar, keterangan, dan tata letak visual, zine ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali arsip sejarah dan menyajikannya dalam format yang mudah diakses oleh audiens kontemporer sambil mempertahankan integritas historis sumber arsip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Lanskap Kosmologis Alun-Alun Lor

Struktur spasial Kesultanan Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari pandangan filosofis yang tertanam dalam kosmologi Jawa. Kompleks istana kerajaan (Kraton Yogyakarta) tidak hanya dirancang sebagai pusat politik tetapi juga sebagai representasi simbolis dari tatanan kosmik, mencerminkan sistem filosofis yang menghubungkan makrokosmos (alam semesta) dengan mikrokosmos (kehidupan manusia). Dalam kerangka ini, alun-alun utara (Alun-Alun Lor) memainkan peran penting sebagai ruang perantara yang menghubungkan otoritas sakral Kraton dengan dunia sosial yang lebih luas di luar temboknya.

Teks dan manuskrip sejarah, termasuk deskripsi yang ditemukan dalam Serat Salokapatra, mengungkapkan bahwa pengaturan spasial kompleks Kraton Yogyakarta dirancang dengan cermat untuk mencerminkan prinsip-prinsip kosmologis. Sumbu filosofis yang membentang dari Gunung Merapi di utara hingga Laut Kidul di selatan membentuk garis simbolis yang mewakili keseimbangan antara kekuatan alam dan otoritas politik. Menurut Lombard (1996), perencanaan kota Jawa pada periode klasik dan awal modern sering mengikuti pola kosmologis di mana pusat-pusat politik diatur sebagai model simbolis alam semesta. Dalam lanskap kosmologis ini, Kraton Yogyakarta menempati posisi sentral sebagai *axis mundi* (poros), yang mewakili titik di mana kekuatan kosmik terkonsentrasi dan dimediasi melalui penguasa.



Gambar 1. Sumbu filosofis Yogyakarta yang mewakili hubungan kosmologis antara Gunung Merapi, Kraton, dan Laut Selatan.
(Sumber: Dok. Pribadi, 2026)

Dalam kerangka simbolis ini, Alun-Alun Lor berfungsi sebagai ruang transisi di mana otoritas Sultan dimanifestasikan secara publik. Alih-alih hanya berfungsi sebagai lapangan terbuka, alun-alun ini secara historis berfungsi sebagai panggung seremonial untuk ritual kerajaan, audiensi politik, parade militer, dan pertemuan publik. Tata ruang Alun-Alun Utara; khususnya kehadiran pohon beringin kembar yang dikenal sebagai *ringin kurung*; memperkuat makna simbolisnya. Pohon-pohon ini ditempatkan di tengah alun-alun dan dikelilingi oleh pagar, membentuk penanda spasial yang secara visual menambatkan seluruh lanskap.

Interpretasi antropologis tentang kerajaan Jawa menekankan bahwa kekuasaan kerajaan diekspresikan melalui pertunjukan ritual dan simbolisme spasial. Geertz (1980) menggambarkan istana kerajaan Asia Tenggara sebagai “negara teater,” di mana otoritas politik dijalankan melalui pertunjukan seremonial daripada hanya kontrol administratif. Dalam konteks Yogyakarta, alun-alun berfungsi sebagai arena pertunjukan di mana otoritas Sultan secara visual dan simbolis ditampilkan kepada publik. Upacara kerajaan seperti *Grebeg*, *Sekaten*, dan prosesi penobatan secara historis berlangsung di ruang ini, mengubah alun-alun menjadi panggung untuk komunikasi ritual antara penguasa dan masyarakat.

Woodward (2011) lebih lanjut menjelaskan bahwa tata ruang Kraton Yogyakarta mencerminkan sintesis antara kosmologi Islam dan tradisi filosofis Jawa kuno. Penyelarasan bangunan, jalur seremonial, dan ruang publik mewujudkan konsep spiritual seperti harmoni (rukun) dan keseimbangan (keseimbangan). Alun-alun, yang terletak tepat di utara gerbang Kraton, menjadi zona liminal di mana otoritas sakral bertransisi ke dunia sehari-hari kota.

Magnis-Suseno (1997) juga menekankan bahwa filsafat politik Jawa memandang kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral dan spiritual, bukan sekadar fungsi administratif. Penguasa diharapkan menjaga harmoni antara kekuatan kosmik dan tatanan sosial. Simbolisme spasial alun-alun mencerminkan gagasan filosofis ini: alun-alun merupakan tempat otoritas kerajaan sekaligus tempat berkumpulnya rakyat, melambangkan hubungan antara penguasa dan masyarakat.

Arsip visual dari abad ke-18 dan ke-19 memperkuat interpretasi ini. Foto-foto awal, ilustrasi kolonial, dan sketsa Kraton Yogyakarta secara konsisten menggambarkan alun-alun sebagai lanskap terbuka yang luas yang didominasi oleh dua pohon beringin kembar. Sosok manusia sering ditampilkan dalam formasi seremonial, menunjukkan bahwa ruang tersebut terutama digunakan untuk ritual kolektif daripada aktivitas sehari-hari. Representasi visual tersebut menegaskan bahwa Alun-Alun Lor berfungsi sebagai komponen integral dari lanskap kosmologis dan politik kraton.

Transformasi Spasial dan Modernitas Perkotaan

Meskipun makna simbolis Alun-Alun Lor berasal dari filsafat kosmologi Jawa, fungsi spasial alun-alun tersebut telah berevolusi secara signifikan dari waktu ke waktu. Arsip visual mengungkapkan transformasi bertahap dari ruang upacara kerajaan yang eksklusif menjadi ruang publik perkotaan multifungsi.

Selama periode kolonial, alun-alun tersebut tetap terkait erat dengan otoritas kerajaan, namun juga terintegrasi ke dalam struktur administrasi kolonial. Foto-foto dari akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh menunjukkan kehadiran pejabat Belanda yang menghadiri upacara kerajaan di alun-alun, menunjukkan hubungan yang dinegosiasikan antara Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah kolonial. Administrasi kolonial mengakui pentingnya simbolis alun-alun tersebut dan mengizinkan upacara tradisional untuk terus berlanjut, sekaligus memasukkan istana ke dalam sistem politik kolonial yang lebih luas.



Gambar 2. Foto Arsip bersejarah yang menampilkan upacara adat Kraton Yogyakarta di Alun-Alun Utara selama periode kolonial.
(Sumber: Dok. Pribadi, 2026)

Sejarawan perkotaan telah mencatat bahwa kota-kota kolonial sering mengalami pengaturan spasial hibrida dimana ruang simbolis asli hidup berdampingan dengan infrastruktur administrasi modern (Nas, 1993). Di Yogyakarta, kondisi hibrida ini terlihat melalui pengenalan elemen-elemen modern seperti jalan raya, penerangan listrik, dan jaringan transportasi di sekitar alun-alun. Perubahan infrastruktur ini secara bertahap mengintegrasikan alun-alun ke dalam tatanan kota yang berkembang.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, signifikansi politik alun-alun semakin meluas. Periode ketika Yogyakarta menjadi ibu kota sementara Indonesia (1946–1949) menandai momen penting di mana ruang kerajaan terjalin dengan identitas politik nasional. Dokumentasi sejarah menunjukkan bahwa alun-alun digunakan untuk pertemuan publik, perayaan nasional, dan upacara militer selama periode revolusi.

Transformasi alun-alun berlanjut selama akhir abad ke-20 ketika menjadi ruang publik utama dalam lanskap perkotaan Yogyakarta. Festival budaya, demonstrasi politik, dan acara komunitas mulai berlangsung secara teratur di alun-alun. Salah satu peristiwa yang sangat signifikan terjadi selama gerakan Reformasi pada Mei 1998, ketika ribuan orang berkumpul di Alun-Alun Lor untuk mendengarkan pernyataan publik Sultan Hamengkubuwono X selama krisis politik yang menyebabkan jatuhnya rezim Orde Baru. Momen ini menggambarkan bagaimana alun-alun tersebut berfungsi sebagai ruang di mana otoritas kerajaan dan ekspresi politik demokratis beririsan.

Para ahli tata ruang berpendapat bahwa alun-alun publik sering berfungsi sebagai arena di mana identitas kolektif dan hubungan politik dinegosiasikan. Lefebvre (1991) menekankan bahwa ruang perkotaan diproduksi secara sosial melalui interaksi antara kekuasaan politik, praktik sosial, dan makna simbolis. Dalam kasus Alun-Alun Lor, alun-alun tersebut terus-menerus ditafsirkan ulang melalui berbagai konteks politik; dari upacara kerajaan hingga administrasi kolonial dan pertemuan demokratis modern.

Transformasi terbaru kawasan Alun-Alun Utara berkaitan dengan berbagai program penataan ruang yang dilakukan dalam konteks penguatan kawasan Sumbu Filosofis Yogyakarta sebagai situs warisan dunia. Upaya ini mencakup penataan ulang material permukaan alun-alun, pengendalian aktivitas publik, serta penyesuaian visual kawasan dengan nilai historis yang dianggap merepresentasikan kosmologi Jawa. Kebijakan tersebut menunjukkan dinamika yang sering muncul dalam pengelolaan kawasan warisan budaya, di mana upaya pelestarian sering kali bernegosiasi dengan praktik sosial yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Arsip Visual dan Konstruksi Memori Budaya

Analisis arsip visual mengungkapkan bagaimana citra historis berkontribusi pada konstruksi memori budaya seputar Alun-Alun Lor. Foto, ilustrasi, peta, dan citra udara tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi peristiwa masa lalu tetapi juga sebagai elemen naratif yang membentuk bagaimana masyarakat mengingat ruang-ruang historis.

Menurut Nora (1989), masyarakat modern semakin bergantung pada situs material dan arsip untuk melestarikan memori kolektif karena bentuk-bentuk transmisi memori tradisional semakin menurun. Dalam konteks ini, arsip visual berfungsi sebagai *lieux de mémoire*, atau situs memori, di mana pengalaman historis dilestarikan dan ditafsirkan kembali melalui gambar.

Materi arsip yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup beberapa periode sejarah dan bentuk media. Representasi visual awal mencakup foto-foto kolonial yang dihasilkan oleh fotografer profesional seperti Kassian Céphas, yang karyanya mendokumentasikan upacara kerajaan dan arsitektur Kraton Yogyakarta pada akhir abad kesembilan belas. Gambar-gambar ini sering kali dipesan oleh Kraton Yogyakarta atau otoritas kolonial, dan oleh karena itu mencerminkan perspektif resmi tentang budaya kerajaan.



Gambar 3. Penggunaan arsip visual dari beragam sumber.
(Sumber: Dok. Pribadi, 2026)

Arsip-arsip selanjutnya mencakup foto-foto surat kabar, citra udara, dan rekaman dokumenter yang menggambarkan alun-alun sebagai ruang kota yang dinamis yang digunakan

untuk berbagai kegiatan publik. Gambar digital kontemporer yang dibagikan melalui platform media sosial semakin memperluas catatan visual, menggambarkan bagaimana alun-alun terus berfungsi sebagai tempat berkumpul utama dalam kehidupan sehari-hari kota.

Namun, banyaknya materi visual juga menghadirkan tantangan metodologis. Banyak foto historis menggambarkan alun-alun utara dan selatan kompleks istana dengan karakteristik visual yang serupa, sehingga sulit untuk membedakannya tanpa verifikasi yang cermat. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif yang memeriksa penanda spasial seperti bangunan di sekitarnya, susunan pohon, dan elemen arsitektur.

Melalui proses ini, arsip-arsip tersebut diorganisasikan ke dalam beberapa kategori tematik dan kronologis yang mencerminkan transformasi besar dalam sejarah spasial alun-alun. Kategori-kategori ini meliputi periode awal Kraton Yogyakarta, periode kolonial, periode revolusi, era pasca-kemerdekaan, dan revitalisasi kota kontemporer.

Pengorganisasian tematik ini memungkinkan arsip visual tidak hanya dipahami sebagai artefak historis yang terpisah, tetapi sebagai elemen naratif yang saling terhubung dalam mengungkap pola transformasi ruang yang lebih luas. Dengan menyandingkan gambar dari periode yang berbeda, penelitian ini merekonstruksi garis waktu visual yang menggambarkan bagaimana makna simbolis dari persegi telah berkembang dari waktu ke waktu.

Aktivasi Arsip dan Media Imersif sebagai Komunikasi Warisan Budaya

Komponen terakhir dari penelitian ini melibatkan transformasi materi arsip menjadi media naratif imersif melalui pembuatan zine Tapak Kala. Pendekatan ini mencerminkan konsep aktivasi arsip, yang memandang materi arsip sebagai sumber daya yang dapat menghasilkan makna budaya baru ketika disajikan melalui format media kreatif.

Penelitian arsip tradisional seringkali berfokus pada pelestarian dan dokumentasi materi sejarah. Namun, perkembangan terkini dalam teori arsip menekankan pentingnya mengaktifkan arsip melalui reinterpretasi dan keterlibatan publik (Cook, 2013). Aktivasi arsip melibatkan pengkontekstualisasian ulang materi sejarah sehingga dapat mengkomunikasikan narasi baru yang relevan bagi audiens kontemporer.



Gambar 4. Cover depan dan isi dalam zine dengan elemen scrapbook dan formal.

(Sumber: Dok. Pribadi, 2026)

Dalam proyek ini, foto arsip, peta, dan sumber tekstual dikurasi dan disusun ulang menjadi narasi visual yang menelusuri transformasi historis Alun-Alun Lor. Format zine dipilih karena fleksibilitasnya sebagai media bercerita visual. Berbeda dengan publikasi akademis konvensional, zine memungkinkan desainer untuk menggabungkan gambar, tipografi, dan fragmen naratif dengan cara eksperimental yang mendorong pembaca untuk secara aktif terlibat dengan konten.

Desain Tapak Kala menggabungkan beberapa elemen imersif yang dimaksudkan untuk meningkatkan interaksi pembaca. Lapisan visual menyandingkan gambar dari periode sejarah yang berbeda, memungkinkan pembaca untuk membandingkan transformasi spasial dari waktu ke waktu. Kode QR yang tertanam di dalam halaman menghubungkan ke materi audiovisual, memungkinkan pembaca untuk mengakses rekaman arsip tambahan dan narasi lisan. Halaman kosong sengaja disertakan untuk mendorong pembaca mencatat refleksi mereka sendiri saat mengunjungi alun-alun.

Dalam studi media, imersi mengacu pada pengalaman terlibat secara mental dan emosional dalam lingkungan naratif (Murray, 1997). Meskipun pengalaman imersif sering dikaitkan dengan teknologi digital seperti realitas virtual, penelitian ini menunjukkan bahwa media cetak juga dapat menciptakan lingkungan bercerita imersif melalui desain visual dan urutan naratif.



Gambar 5. Interaksi pembaca dengan Zine sebagai pengalaman imersif.

(Sumber: Dok. Pribadi, 2026)

Prototipe zine dibagikan secara informal kepada beberapa pembaca sebagai uji awal terhadap respons pembaca. Tanggapan mereka menunjukkan bahwa integrasi arsip visual dan fragmen naratif pendek dapat membantu pembaca menghubungkan dokumentasi sejarah dengan pengalaman spasial saat ini di Alun-Alun Utara. Beberapa pembaca berkomentar bahwa materi visual memungkinkan mereka untuk mengenali lapisan sejarah ruang tersebut yang sebelumnya mereka abaikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa aktivasi arsip melalui media kreatif dapat berfungsi sebagai salah satu strategi untuk mengkomunikasikan warisan budaya kepada khalayak yang lebih luas. Dengan mengubah materi arsip menjadi narasi yang mendalam, penelitian sejarah dapat meluas melampaui konteks akademis dan berkontribusi pada literasi budaya publik.

Kontribusi Teoretis: Aktivasi Arsip sebagai Metodologi

Di luar hasil praktisnya, penelitian ini mengusulkan aktivasi arsip sebagai kerangka metodologis untuk mempelajari ruang-ruang historis. Pendekatan ini mengintegrasikan analisis arsip, penceritaan visual, dan interpretasi spasial untuk merekonstruksi lanskap budaya yang mungkin tidak lagi sepenuhnya terlihat di lingkungan perkotaan kontemporer.



Gambar 6. Arsip visual dan elemen teks untuk memperkuat narasi dan pemaknaan filosofi Sangkan Paraning Dumadi.
(Sumber: Dok. Pribadi, 2026)

Aktivasi arsip melibatkan tiga tahap utama. Tahap pertama adalah penggalian arsip, yang berfokus pada pengumpulan dan verifikasi materi historis dari berbagai sumber. Tahap kedua adalah rekonstruksi interpretatif, di mana materi arsip dianalisis untuk mengidentifikasi pola transformasi spasial dan makna budaya. Tahap terakhir adalah reaktivasi naratif, di mana interpretasi ini dikomunikasikan melalui format media imersif.

Dengan menggabungkan tahapan-tahapan ini, aktivasi arsip menjembatani kesenjangan antara penelitian sejarah dan keterlibatan budaya publik. Ia mengubah arsip dari repositori statis menjadi alat dinamis untuk interpretasi budaya dan penceritaan.

Dalam konteks studi warisan perkotaan, pendekatan ini juga berkontribusi pada bidang penelitian memori spasial yang berkembang, yang meneliti bagaimana narasi historis tertanam dalam lanskap perkotaan. Para ahli di bidang ini berpendapat bahwa kota berfungsi sebagai struktur memori berlapis di mana masa lalu dan masa kini hidup berdampingan melalui arsitektur, monumen, dan ruang publik (Till, 2005).



Gambar 7. Penggunaan *temporal layering*, dan periodisasi sebagai penanda naratif dalam zine Tapak Kala.
(Sumber: Dok. Pribadi, 2026)

Alun-Alun Lor merupakan contoh dari kondisi berlapis ini. Meskipun alun-alun ini telah mengalami banyak transformasi selama dua abad terakhir, simbolisme spasialnya terus membentuk bagaimana orang mengalami dan menafsirkan tata ruang Kraton Yogyakarta. Dengan mengaktifkan arsip visual melalui media imersif, penelitian ini mengungkap narasi sejarah tersembunyi yang tertanam dalam ruang urban ikonik ini.

KESIMPULAN

Studi ini meneliti bagaimana materi arsip visual dapat diaktifkan sebagai media untuk mengkomunikasikan nilai-nilai filosofis yang tertanam dalam struktur spasial Kesultanan Yogyakarta. Melalui kasus Alun-Alun Utara di dalam kompleks istana Keraton Yogyakarta, penelitian ini menunjukkan bahwa ruang-ruang historis di Jawa tidak dapat dipahami hanya sebagai lingkungan fisik tetapi harus diinterpretasikan dalam kerangka yang lebih luas dari kosmologi Jawa dan memori budaya.

Analisis menunjukkan bahwa pengaturan spasial lanskap Kraton Yogyakarta mencerminkan tatanan kosmologis yang menghubungkan poros sakral kota dengan otoritas simbolis Kesultanan. Alun-Alun Utara secara historis berfungsi sebagai ruang transisi antara kraton dan masyarakat perkotaan yang lebih luas, tempat otoritas kerajaan, pertunjukan ritual, dan kehidupan publik beririsan. Makna spasial ini terkait erat dengan gagasan filosofis Jawa tentang harmoni antara makrokosmos dan mikrokosmos, seperti yang dibahas oleh para sarjana seperti Denys Lombard, Clifford Geertz, Mark R. Woodward, dan Franz Magnis-Suseno. Namun, transformasi perkotaan kontemporer secara bertahap telah menggeser persepsi publik terhadap alun-alun dari lanskap kosmologis dan seremonial menjadi ruang perkotaan rekreasi dan wisata. Akibatnya, banyak makna filosofis yang tertanam dalam organisasi spasialnya tidak lagi diakui secara luas oleh publik.

Dengan meneliti foto-foto historis, ilustrasi arsip, peta, dan sumber tekstual, penelitian ini merekonstruksi memori visual Alun-Alun Utara di berbagai periode sejarah. Studi ini mengungkapkan bahwa arsip visual tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi sejarah tetapi juga sebagai sumber interpretatif yang memungkinkan peneliti untuk menelusuri transformasi spasial dan makna budaya dari waktu ke waktu. Melalui pembacaan komparatif gambar arsip, sejarah berlapis alun-alun menjadi terlihat, menggambarkan bagaimana otoritas politik, praktik

seremonial, dan pembangunan perkotaan telah membentuk ruang tersebut di berbagai konteks sejarah.

Salah satu kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengusulan aktivasi arsip sebagai pendekatan metodologis untuk komunikasi warisan budaya. Alih-alih memperlakukan arsip sebagai catatan sejarah statis, studi ini menunjukkan bagaimana materi arsip dapat diorganisasi ulang, diinterpretasikan, dan dikontekstualisasikan kembali untuk menghasilkan bentuk naratif baru yang membuat pengetahuan sejarah dapat diakses oleh audiens kontemporer. Dalam konteks ini, arsip visual berfungsi sebagai fragmen naratif yang dapat disusun kembali menjadi struktur interpretatif yang koheren.

Penerjemahan narasi arsip ini ke dalam zine Tapak Kala merupakan upaya eksperimental untuk menjembatani penelitian sejarah dengan praktik bercerita visual. Format zine memungkinkan integrasi gambar, teks pendek, dan referensi spasial dalam media naratif yang ringkas yang mendorong pembaca untuk mengalami materi arsip dengan cara yang lebih interaktif. Alih-alih menyajikan sejarah semata-mata melalui wacana akademis, zine beroperasi sebagai antarmuka naratif yang mengundang pembaca untuk terlibat dengan lapisan sejarah Alun-Alun Utara sambil secara bersamaan merefleksikan pengalaman spasial mereka sendiri di situs tersebut.

Pendekatan ini menyoroti potensi media kreatif untuk mendukung pelestarian warisan budaya dengan memperluas cara-cara penyampaian pengetahuan sejarah. Temuan ini menunjukkan bahwa format penceritaan visual seperti zine dapat melengkapi mode interpretasi warisan akademis dan institusional konvensional, khususnya dalam konteks dimana arsip sejarah masih kurang dimanfaatkan dalam wacana budaya publik.

Penelitian di masa mendatang dapat mengeksplorasi lebih lanjut kemungkinan aktivasi arsip melalui format media imersif lainnya, termasuk penceritaan digital, pameran interaktif, atau bahkan *augmented reality*. Perkembangan tersebut dapat memperluas peran arsip visual di luar dokumentasi menuju keterlibatan budaya partisipatif. Dengan mengintegrasikan penelitian arsip, interpretasi spasial, dan praktik media kreatif, studi tentang warisan perkotaan dapat berkontribusi tidak hanya pada pengetahuan akademis tetapi juga pada pemahaman publik yang lebih luas tentang lanskap budaya yang dibentuk oleh memori sejarah dan tradisi filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azoulay, A. (2008). *The civil contract of photography*. New York: Zone Books.
- Cook, T. (2013). *Evidence, memory, identity, and community: Four shifting archival paradigms*. Chicago: Society of American Archivists.
- Edwards, E. (2001). *Raw histories: Photographs, anthropology and museums*. Oxford: Berg.
- Geertz, C. (1980). *Negara: The theatre state in nineteenth-century Bali*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Halbwachs, M. (1992). *On collective memory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space*. Oxford: Blackwell.

- Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa: Silang budaya* (Vol. 2). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Macdonald, S. (2013). *Memorylands: Heritage and identity in Europe today*. London: Routledge.
- Magnis-Suseno, F. (1997). *Javanese ethics and world view: The Javanese idea of the good life*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Murray, J. H. (1997). *Hamlet on the holodeck: The future of narrative in cyberspace*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. London: Routledge.
- Sunjata, I. W. P., Tashadi, & Astuti, S. R. (1995). *Makna simbolik tumbuh-tumbuhan dan bangunan kraton: Suatu kajian terhadap Serat Salokapatra* (Ed. 1). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suwito, Y. S. (2020). *Kraton Yogyakarta pusat budaya Jawa*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Till, K. E. (2005). *The new Berlin: Memory, politics, place*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Woodward, M. R. (2011). *Java, Indonesia and Islam*. Dordrecht: Springer.

Buku kumpulan artikel:

- Russell, T., & Lubart, J. P. (2018). Creativity and innovation in cultural interpretation. Dalam P. J. Black & A. Lucas (Eds.), *Handbook of creative research methods* (hlm. 62-84). London: Routledge.
- Sadana, A. S., Prasetya, L. E., & Dharmaraty, A. P. (2024). Pemahaman masyarakat terhadap transformasi nilai-nilai filosofis dalam tata ruang Kota Yogyakarta. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Teknologi (Semrestek) 2023*

Journal Articles (International)

- Aciri, A., & Meyer, V. (2019). Indic-Islamic encounters in Javanese and Malay mystical literatures. *Indonesia and the Malay World*, 47(139), 277–284.
- Macdonald, S. (2016). Is difficult heritage still difficult? Why public acknowledgment of past perpetration may no longer be so unsettling to collective identities. *Museum International*, 67(1-4), 6-22.
- Waterton, E., & Watson, S. (2015). Heritage and community engagement: Collaboration or contestation? *Journal of Heritage Tourism*, 10(2), 1-15.

Journal Articles (Indonesia)

- Ardiyansyah, P. (2022). Writings of Borobudur: Making sense of an early modern Javanese manuscript within the production of archaeological knowledge in Indonesia. *Berkala Arkeologi*, 42(2), 165–178.
- Prasetya, E., & Dewanto, W. (2024). Behavior and culture and their influence on the spatial arrangement of the Yogyakarta Palace. *Jurnal Hirarchi*.

- Savitri, P. L., Purbadi, Y. D., & Sumardiyanto, B. (2020). Architectural acculturation: Islamic and Javanese spiritual elements in Sumur Gumuling design at Tamansari Yogyakarta. *Jurnal Arsitektur Komposisi*.
- Surjono., Antariksa., & Titisari, E. Y. (2023). Javanese cosmology and its transformation in social tradition and built environment. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Rusli, A. B., & Talibo, I. (2020). Muslim Jawa: Masjid, keraton dan pasar. *Potret Pemikiran*, 24(1).
- Widyastuti, S. H. (2022). Studi Islam dalam kawasan sastra Jawa. *Kejawen: Jurnal Kebudayaan Jawa*.

Manuscripts / Historical Sources

- Serat Salokapatra. (n.d.). *Serat Salokapatra* [Manuscript]. Koleksi Arsip Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Arsitektur, Rupa, dan Ragam Hias Makam-makam Tua di Pasareyan Kagungan Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat

M. Yaser Arafat

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: arafatnisti@yahoo.com

Abstrak

Sejak berdiri pada 1755, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat telah menjejalkan berbagai tinggalan sejarah dan kebudayaan. Satu di antaranya adalah makam-makam tua di Pasarean Kagungan Dalem. Artikel ini berupaya untuk membaca tinggalan makam-makam kuna di Pasareyan Kagungan Dalem itu. Makam-makam kuna dianalisis dengan menggunakan pendekatan antropologi budaya material (*anthropology of material culture*). Berdasarkan rangka pikir ini, secara arsitektural, makam akan dilihat dari sisi titik temu antara ideologi dan teknologi. Sedangkan untuk kajian rupa dan ragam hiasnya, makam akan dikaji sebagai penanda kubur pada era atau masa tertentu serta penanda identitas dan *encapsulation* (pengkapsulan) atau peringkasan-padatan kekuasaan dan jaringan wacana budaya-politik tertentu dalam hal ini, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Artikel ini menggunakan metode observasi dan kajian literatur. Observasi dilakukan di beberapa Pasarean Kagungan Dalem di wilayah Provinsi DI Yogyakarta yang dulunya merupakan wilayah inti Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Terutama makam-makam yang tercatat di dalam data resmi yang pernah dikeluarkan oleh otoritas di Keraton Yogyakarta hari ini. Artikel ini menemukan beberapa temuan.

Pertama, sebagian besar makam tua di Yogyakarta berada di sisi barat Masjid Pathok Nagara, Masjid Kagungan Dalem, serta Masjid Keprabon, yaitu Masjid Gede Kraton di Kauman dan Masjid Mataram Kotagede. Makam-makam tua sezaman tersebar pula di berbagai Masjid Kagungan Dalem di seluruh wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kedua, makam seorang tokoh cikal-bakal atau sesepuh pemula peradaban cenderung diletakkan di sisi utara kompleks pemakaman. Ketiga, makam-makam itu memiliki bentuk-rupa Nisan Hanyakrakusuman dan Nisan Hamengkubuwanan. Keempat, tidak ada perbedaan terlalu mencolok antara jirat makam tokoh-tokoh di era Kerajaan Mataram Islam dengan tokoh-tokoh pada era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Kelima, jirat dan nisan makam-makam dari masing-masing zaman terdiri dari tumpukan batu andesit potong yang disusun layaknya susunan bangunan candi. Keenam, ragam hias nisan dan jirat makam terdiri dari tumpal, *wulan tumanggal* (bulan sabit), *purnama sidhi* (bulan purnama), Kembang Awan, Kembang Patran atau Kemada, Kembang Waru, dan Surya Suminar. Ketujuh,

masing-masing hiasan menjadi ciri atau karakter yang menandai kekhasan makam-makam di area Yogyakarta. Baik berupa tinggalan dari era Kerajaan Mataram Islam maupun dari era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kedelapan, terdapat beberapa penyebutan makam, yaitu *pemut*, *sekaran*, *sarean*, dan *alamat*. Terkadang tertulis pula kalimat berbahasa Arab.

Artikel ini merokemendasikan beberapa hal. Pertama, perlunya penjagaan artefak asli makam baik jirat maupun nisannya. Kedua, perlu pendataan makam-makam. Pembaruan dan penyempurnaan data historis makam-makam tua di Pasarean Kagungan Dalem mutlak sangat diperlukan seiring dengan munculnya kajian sejarah terkini.

Kata kunci: makam tua, Pasarean Kagungan Dalem, budaya material

Abstract

Since its establishment in 1755, the Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat has left behind various historical and cultural legacies. One of these is the collection of ancient graves within the Pasarean Kagungan Dalem (Royal Cemeteries). This article seeks to interpret these ancient grave remains using the anthropology of material culture approach. Based on this framework, the architectural aspect of the graves is analysed through the intersection of ideology and technology. Meanwhile, the study of form and ornamentation examines the graves as markers of a specific era and indicators of identity and encapsulation—understood here as the condensed representation of power and socio-political discourse; in this case, that of the Sultanate of Ngayogyakarta Hadiningrat.

This article employs observation and literature review methods. Observations were conducted at several Pasarean Kagungan Dalem locations within the Special Region of Yogyakarta, which formerly served as the core territory of the Sultanate. The study focuses primarily on graves recorded in official data issued by the current Yogyakarta Palace authorities. The findings of this article are as follows: First, most ancient graves in Yogyakarta are located on the west side of the Pathok Nagara Mosques, Kagungan Dalem Mosques, and Keprabon Mosques (namely the Grand Mosque of the Kauman and the Mataram Mosque in Kotagede). Contemporary ancient graves are also scattered across various Kagungan Dalem Mosques throughout the Sultanate's territory.

Second, the grave of a *cikal-bakal* (ancestral founder) or a pioneer of civilization tends to be positioned on the north side of the cemetery complex. Third, the graves feature the *Nisan Hanyakrakusuman* and *Nisan Hamengkubuwanan*. Fourth, there are no strikingly significant differences between the grave structures (*jirat*) of figures from the Islamic Mataram Kingdom era and those from the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate era. Fifth, the *jirat* and headstones from each period consist of stacked, cut andesite stones arranged similarly to temple (*candi*) structures. Sixth, the decorative motifs on the headstones and *jirat* include *tumpal*, *wulan tumanggal* (crescent moon), *puhnama sidhi* (full moon), *Kembang Awan*, *Kembang Patran* or *Kemada*, *Kembang Waru*, and *Surya Suminar*. Seventh, each ornament serves as a distinguishing character or hallmark of graves in the Yogyakarta area, whether they are remnants of the Islamic Mataram Kingdom or the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate. Eighth, there are several terms used to refer to the graves, namely *pemut*, *sekaran*, *sarean*, and *alamat*. Occasionally, Arabic inscriptions are also present.

This article offers several recommendations. First, it is essential to preserve the original artifacts of the

graves, including both the jirat and the headstones. Second, comprehensive data collection is necessary. The updating and refinement of historical data regarding ancient graves in the Pasarean Kagungan Dalem is absolutely vital in light of recent historical studies.

Keywords: Ancient tomb, the Pasarean Kagungan Dalem, material culture

LATAR BELAKANG

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri setelah penandatanganan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Secara resmi Pangeran Mangkubumi mendapatkan setengah wilayah Mataram Islam seiring penetapannya sebagai raja dengan gelar Sultan Hamengku Buwono I bergelar *Senapati ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Kalipatulah Ingkang Jumeneng Kaping Satunggal ing Ngayogyakarta Hadiningrat*. Sebulan setelah Perjanjian Giyanti, tepatnya pada 13 Maret 1755 (29 Jumadilawal 1680), Sultan Hamengku Buwono I mendeklarasikan berdirinya wilayah Yogyakarta.

Pada 7 Oktober 1756, Sultan Hamengku Buwono I mulai menempati istana yang dibangun di hutan Pabringan terhitung sejak 5 April 1755. Hingga saat ini, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang lebih dikenal secara populer dengan nama Keraton Yogyakarta terus bergerak. Kerajaan ini meninggalkan banyak jejak-jejak kebudayaan dan sejarah. Mulai dari naskah-naskah tua, bangunan kuna, tari-tarian, persenjataan, falsafah, upacara-upacara suci, dan sebagaimana akan dikaji di sini, makam-makam kuna sejak era Kerajaan Mataram Islam hingga era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Artikel ini berupaya untuk mengkaji tinggalan makam-makam tua tersebut dari tiga aspek, yaitu: arsitektur, bentuk-rupa, dan ragam hias. Pertanyaan mendasar artikel ini adalah perihal karakteristik arsitektural dan bentuk-rupa makam-makam tua tinggalan sejarah Kerajaan Mataram Islam hingga Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tidak hanya itu, ragam hias di makam-makam tersebut juga akan dikuak tidak hanya untuk menemukan karakteristik ornamental yang dapat dijadikan sebagai ragam hias khas Yogyakarta di masa kini.

METODE PENELITIAN

Makam-makam kuna dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan antropologi budaya material (*anthropology of material culture*). Pendekatan ini melihat makam sebagai *things* (benda-benda) yang jelas (*concrete*) dan nyata (*real*) wujudnya, *objects* (barang-barang) yang dapat dilihat dengan sentuhan atau pengamatan, dan *artefacts* (artefak-artefak) yang berupa sebagai produk atau jejak fisik aktivitas manusia (Woodward 2007, 15). Artinya, makam adalah karya kultural manusia yang berfungsi sebagai penanda kubur, mencakup segala hal yang tampak, berwujud secara fisik, diproduksi sebagai hiasan artistik, dan bertujuan religi (Charlotte 1987, 183; Kipfer 2008, 190–91).

Berdasarkan rangka pikir ini, secara arsitektural, makam akan dilihat dari sisi titik temu antara ideologi dan teknologi (Seymour 1986, 16). Bahwa makam menunjukkan batasan dan kebutuhan lingkungan dan cara hidup manusia serta konsep tentang kehidupan individu dan keluarganya. Sedangkan untuk kajian rupa dan ragam hiasnya, makam akan dikaji sebagai penanda kubur pada era atau masa tertentu serta penanda identitas dan *encapsulation* (pengapsulan) atau peringkasan-padatan kekuasaan dan jaringan wacana budaya-politik tertentu

(Woodward 2007, 6), dalam hal ini, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Artikel ini menggunakan metode observasi dan kajian literatur. Observasi dilakukan di berbagai Pasarean Kagungan Dalem di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan sekitarnya. Pada 2010, setidaknya tercatat ada 38 Pasarean/Petilasan Kagungan Dalem yang dikelola langsung oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat melalui Kawedanan Pengulon (Dipodiningrat 2010). Ada pula publikasi resmi tentang beberapa kompleks pemakaman itu. Misalnya, buku *Cengkorongan Gambar Sarta Pratelan Ingkang Sami Semare ing Kagungan Dalem Pasareyan Imagiri, Girilaya, Sarta Banyusumurup ing Ngayogyakarta Hadiningrat Ugi Pasareyan Tegal-Arum ing Tegal* yang diterbitkan oleh Kawedanan Hageng Sriwandawa Bagian Puralaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (KRT Mandayakusuma 1950). Buku ini berisi informasi tentang tokoh-tokoh yang dimakamkan di Pasarean Imogiri dan Pasarean Giriloyo, Pasarean Banyusumurup, dan Pasarean Tegalarum. Buku ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai nama-nama ruang pengelompokan kompleks pemakaman dan denah makam mulai dari jalan masuk hingga titik utama makam.

Ada lagi buku berjudul *Kagungan Dalem Pasareyan Hastana Kitha Ageng Ngayogyakarta-Hadiningrat* mengabarkan sejarah mula-buka wilayah Kotagede, nama-nama tokoh yang dimakamkan di Makam Kotagede yang berada di sisi barat Masjid Gedhe Mataram Kotagede, denah makam masing-masing tokoh yang diterangkan, dan pranata busana di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (KPH Mandayakusuma 1987a). Sejarah para raja dan denah makam-makamnya juga dijelaskan di dalam buku *Silsilah Raja-raja Mataram* (Yudodiprojo 1995a). Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa tinggalan berupa makam kuna Dinasti Mataram benar-benar merupakan produk budaya penting yang dijaga di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.



Gambar 1: peta Masjid Pathok Negara, Masjid Kagungan Dalem, dan Pasarean Kagungan Dalem yang diobservasi. Foto: diolah dengan AI lalu dipoles.

Hanya saja, kajian ini tidak menyasar semua Pasarean Kagungan Dalem. Makam-makam kuna yang dikaji dibatasi pada Pasarean Kagungan Dalem yang terdapat di empat Masjid Pathok Negro, yaitu Masjid Pathok Nagara Ad-Darojat Babadan di arah timur, Masjid Pathok Nagara Sulthoni Plosokuning di arah utara, Masjid Pathok Nagara An-Nur Mlangi di arah barat, Masjid Pathok Nagara Nurul Huda Dongkelan di arah selatan. Ditambah dengan Pasarean Kagungan Dalem di Masjid Kagungan Dalem Sultoni Wotgaleh, Berbah, dan Pasarean Kagungan Dalem Masjid Sultonain, Nitikan, Pasarean Kagungan Dalem Girilaya, Imogiri, dan Pasarean Kagungan Dalem Astana Mulya Gambiran, Yogyakarta.

Eksistensi makam-makam kuna di Nusantara sebagai sasaran kajian ilmiah pernah diteliti oleh Hasan Muarif Ambary. Ia melihat keragaman nisan di setiap wilayah sebagai buah pertumbuhan kebudayaan di pusat-pusat islamisasi dan ekspansi politik perdagangan di Indonesia. Baik di Sumatera (Aceh dan Minangkabau), Jawa (Demak dan Tralaya), Sulawesi Selatan (Goa-Tallo dan Bone-Soppeng), dan Ternate (Ambary 1984, 341–42, 382).

Makam-makam Islam di Aceh mulai diteliti pada 1906. Meski sempat dijeda pada 1908, penyelidikan, pemugaran, pemotretan makam-makam kuna di Blangmeh dan Samudra, Aceh, dilaksanakan pada 1912. Lalu diteruskan lagi pada hingga 1917. Penelitian terus dilanjutkan hingga mencapai wilayah Kuta-Raja dan sekitarnya yang masih termasuk kawasan Aceh (Tjandrasasmita 1992, 107–8). Sejak itu, terdapat cukup banyak karya ilmiah tentang makam-makam kuna di Indonesia.

Ada satu karya awal tentang nisan makam Islam di Jawa, yaitu di Tralaya, Jawa Timur, yang pernah diteliti oleh Louis-Charles Damais (1957). Ia mengulas nisan-nisan bergurat aksara Jawa kuna yang populer disebut oleh masyarakat sekitar sebagai *makam pitu*. Pada warsa 1980-an, Ambary pernah pula menulis perihal nisan-nisan makam Islam di Nusantara. Ia mengelompokkan nisan-nisan makam di Indonesia ke dalam beberapa tipe (1998, 104). Pertama, tipe Aceh. Kedua, tipe Demak-Tralaya. Ketiga, tipe Bugis-Makassar. Keempat, tipe lokal. Ambary, sebagaimana disinggung di atas, sebelumnya juga telah mengkaji nisan-nisan di Indonesia melalui disertasinya (1984).

Pada masa yang nyaris sama, Othman Yatim lantas mengkaji nisan-nisan Aceh yang kemudian ia sebut sebagai Batu Aceh (1985). Perret & Razak (1999) lalu menyentuh kajian tentang Batu Aceh di Malaysia. Kajian nisan-makam terus bersambung hingga Herwandi yang mengulik nisan-nisan di Sumatera Barat (2003). Karya terbaru khususnya tentang Batu Aceh adalah disertasi Husaini Ibrahim yang mengulas nisan-nisan Plak-Plieng di Aceh hingga “meruntuhkan” kajian nisan Aceh sebelumnya (2014).

Khusus untuk kajian makam-makam kuna di Yogyakarta memang masih cukup jarang. Meski demikian, ada sedikit irisan perspektif ilmiah tentang makam-makam kuna di Yogyakarta. Misalnya kajian Adrisijanti tentang kekunaan Islam di Imogiri dari perspektif tinjauan seni pada bangunan pemakaman dan juga hiasan yang terukir di bagian *kelir* serta dinding atau tembok pemakaman (1973). Adrisijanti juga mengulas perihal pemakaman Mataram Islam dalam rangka studi pendahuluan di bidang arkeologi perkotaan (1986).

Ulasan mengenai situs-situs pemakaman kuna Mataram Islam pada era Amangkurat I di situs pemakaman Banyusumurup, Imagiri, Bantul, Yogyakarta telah dilakukan oleh Novida Abbas (1984). Ia menyajikan catatan lapangan dari pengamatan atas kompleks pemakaman

Banyusumurup yang dibangun oleh Sunan Amangkurat I dari aspek keletakan makam, pembagian halaman pemakaman, perlakuan terhadap tokoh yang dimakamkan, dan deskripsi tentang beberapa nisan yang memiliki inskripsi serta informasi.

Lota menerbitkan buku berjudul *Album Pasareyan Raja-Raja Mataram* (1993). Buku ini berisi foto nisan, jirat makam, cungkup, peta letak, serta ragam hias di dinding-dinding situs pemakaman. Beberapa situs pemakaman yang gambarnya diambil adalah makam Kotagedhe berikut masjidnya dan makam Pajimatan, Imagiri, dan bangunan-bangunan kuna di sekitarnya. Buku ini cukup membantu untuk meninjau gambar bentuk nisan Sultan Agung dan makam-makam utama lainnya yang saat ini tidak boleh diambil gambarnya. Sayangnya, buku ini tidak menampilkan analisis bentuk-rupa nisan.

Widodo dan Tim Balai Arkeologi Yogyakarta meneliti nisan-nisan dalam pewayaharan Karaton Mataram Islam pasca 1755 (1998). Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah. Hasil penelitian ini berupa temuan nisan-nisan dari dua wilayah, yaitu *monconagoro* dan *negoroagung*. Masing-masing wilayah memiliki tipe nisan sendiri yang dibagi ke dalam tiga tipe dan empat tipe.

Widodo dan Tim Balai Arkeologi Yogyakarta melanjutkan penelitian tentang nisan-nisan dalam pewayaharan Karaton Mataram Islam pasca 1755 yang mengambil beberapa lokasi situs pemakaman (2000). Pertama, situs pemakaman Pajimatan, Imagiri, Bantul, Yogyakarta. Kedua, situs pemakaman Citrokusumo, Kauman, Sendang, Cangakan, Jepara, Jawa Tengah. Ketiga, situs makam Sunan Kudus di Kudus, Jawa Tengah. Keempat, situs makam Kadilangu, Jawa Tengah. Penelitian ini menemukan tipe-tipe nisan pada pada masa Kasultanan Yogyakarta yang dibagi ke dalam empat wilayah, yaitu *pesisir*, *mancanegara*, *negaragung*, *kutagara*, dengan kekhasan nisan masing-masing. Meski menampilkan sketsa tipologi nisan dari empat wilayah itu, namun, karya ini problematis sebab ia justru tidak menjadikan makam-makam di Pasarean Kagungan Dalem sebagai sasaran kajian.

Chawari menulis tentang studi kelayakan arkeologi untuk konteks pengembangan pemakaman Pajimatan, Imogiri, secara terpadu dan terintegrasi. Oktarini, Widyatwati, dan Rukiyah sedikit menyinggung tentang cerita pembangunan makam Pajimatan, Imogiri dari aspek kajian naskah *Serat Pengetan Jasan Dalem Para Nata* dan cerita rakyat masyarakat di sekitar pemakaman tentang proses pembangunan itu (2017). Riswinarno membahas tentang pemakaman para ratu Mataram Islam di Kotagedhe. Ia menemukan bahwa ada pola-pola tertentu dalam pemanfaatan ruang di dalam pemakaman, baik ruang secara horizontal maupun secara vertikal. Pola-pola tersebut terjadi oleh karena pengaruh budaya ataupun religi Jawa dengan Islam (2018).

Afwadzi mengkaji tentang makam di Taman Makam Seniman dan Budayawan Giri Supto, yang terletak di bukit Gajah, Giri Rejo, Imagiri, Bantul, Yogyakarta. Ia menemukan bahwa makam seniman memiliki identitas eksklusif yang dibangun berdasarkan profesi seniman. Baik berbentuk unsur-unsur artistik nisan, lambang unik bidang kesenian seniman tatkala masih hidup, pemajangan hasil karya seni, dan upacara pemakaman yang dibalut dengan pagelaran kesenian (2018).

Arafat mengkaji tentang nisan-nisan makam tokoh-tokoh yang berdasarkan sumber-sumber sejarah dan cerita lisan masyarakat di Yogyakarta, hidup pada era Sultan Agung. Nisan-nisan itu

lantas disebut dengan istilah Nisan Hanyakrakusuman sebagai tanda adanya produk kebudayaan berupa nisan pada era Sultan Agung (2021b). Pada 2023, Ghozali menerbitkan buku *Nyarkub: Mengkaji Kuburan* (2023). Ia membabarkan banyak catatan berisi pembahasan dan penampilan gambar-gambar nisan induk dari setiap wilayah di Jawa. Ada nisan dari Cirebon, Tralaya, Bogor, Sidoarjo, Mojokerto, Madura, Bali, Bayat, Surabaya, dan masih banyak lagi.

Terakhir, pada 2025, Arafat meneliti makam-makam tua di Yogyakarta-Jawa Tengah dan sekitarnya. Berdasarkan temuannya, pada masa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, terhitung sejak 1755 hingga 1900, terdapat tangguh atau tipologi nisan yang ia sebut dengan istilah Nisan Hamengkubuwanan sebagai tanda bahwa terdapat produk budaya material berupa nisan yang diciptakan pada era Sultan Hamengku Buwono.

Publikasi ini cukup membantu untuk membaca fakta tinggalan makam-makam tua di Yogyakarta khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya. Hanya saja, Arafat tidak secara khusus mengkaji aspek arsitektural, bentuk-rupa, dan ragam hias. Lagi pula, karya itu tidak pula menysar secara khusus makam-makam Kagungan Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain itu, secara umum, sebagian besar karya yang mengkaji nisan-nisan makam di Jawa menggunakan perangkat ilmu arkeologi. Sedangkan artikel ini menggunakan perspektif antropologi budaya material, yaitu perspektif bahwa makam merupakan hasil karya manusia yang mencakup segala hal tampak, berwujud secara fisik, yang diciptakan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat 2009, 144).

HASIL PEMBAHASAN

1. Lokasi Makam dan Penjagaan Kraton

Sebagian besar makam sepuh para pendahulu peradaban di Yogyakarta, terutama yang berasal dari era 1700-an pertengahan hingga 1800-an akhir, berada di sisi barat Masjid Pathok Nagara, Masjid Kagungan Dalem, serta Masjid Keprabon, yaitu Masjid Gede Kraton di Kauman dan Masjid Mataram Kotagede. Konsep peletakan makam di sisi barat atau di area sekeliling masjid ini merupakan penerapan *sunnah* Nabi Muhammad SAW yang diteladankan melalui peletakan Makam Baqi' di sisi selatan Masjid Nabawi Madinah.



Gambar 2: Makam Baqi' di Madinah. Tampak sejajar dengan kubah masjid.
Foto koleksi pribadi penulis.

Makam-makam Pasarean Kagungan Dalem, dalam sejarahnya, selalu dalam pengawasan dan penjagaan Kraton Yogyakarta. Ini ditunjukkan oleh tradisi perawatan makam dan penaburan kembang atas perintah Sultan sejak lama. Dalam sebuah surat resmi yang diperkirakan dikeluarkan pada 22 Oktober 1804, disebutkan ada perintah dari Sultan Hamengku Buwono II untuk menganggarkan uang pembelian bunga guna ditaburkan di berbagai makam. Mulai makam-makam di Yogyakarta hingga makam-makam di wilayah pesisir Jawa (Carey 1980, 171).

Di antara makam-makam yang dijatah uang pembelian bunga adalah makam Imagiri, Girilaya, Banyusumurup, Kotagede, Nitikan, Kuncen, Plered, Wotgaleh, Pamancingan (saat ini Parangtritis), Mlangi, Dongkelan, Papringan, Gunung Puyuh, Gunung Kelir, Tegil Pengawe, Demakijo, Tegalyasa, Krapyak, Arjawinangun, Krapyak, Jeramlegi, Jenu, Benggangan, Lempuyangan, Blunyah, Balong. Makam-makam di daerah luar Yogyakarta dan pesisir Jawa juga dijatah uang pembelian bunga. Makam-makam yang disebutkan adalah: Tegalwangi, Giri, (Bukit) Airmata, Ampel, Demak, Bonang, Banon Petak, Keramat, Sendang (Duwur?), Kudus, Katerban, Kubur Panjang Tanah Suci, Gapura, Giriyata, Geseng, Taragnyana, Kalinyamat (Lepen Nyamat), Pangulu Batang, Pandhanarang, Balethokan, Ngadilangu, Pakandhangan Sedayu, Kabongson, Penampel, Semawis dan Kaji, Bungkul, Murya, Sela, Madiyun, Serang, Kertasana Nyai Dipati, Kyai Wiryanegara I, Ratu Menang Jipang, Kemayan Sokawati, Butuhkuyang, Butuhluyu, Langkungan, Giyana, Magora, Pangalasan Jatonsnem, Pataran.

Selain itu, beberapa makam Kagungan Dalem yang utama, misalnya Pasarean Kagungan Dalem Pajimatan Imogiri dan Giriloyo dibangun di gunung atau bukit. Jika tidak, biasanya makam-makam para pendahulu, terutama para Raja Mataram Islam sejak Sultan Agung hingga Sultan Yogyakarta dan Sunan Surakarta dibangun di tempat yang tinggi atau tempat yang ditinggikan. Beberapa kalangan sarjana menganggap bahwa tradisi penguburan ini berhubungan dengan konsep penghormatan pada leluhur pada era Hindu-Budha. Dianggap bahwa jenazah ditempatkan di tempat yang tinggi sebagai upaya orang Jawa agar menyatu dengan para dewa (Montana 1990).

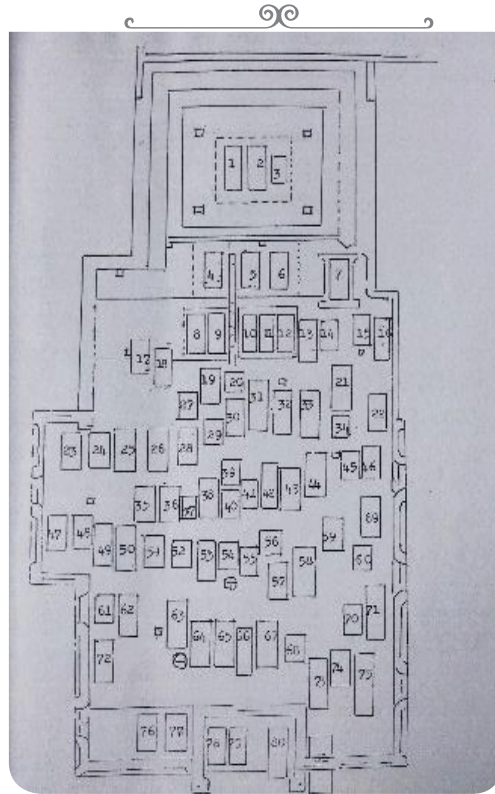
Padahal dalam kosmologi Jawa-Islam, penempatan pemakaman dan penguburan jenazah pada tempat yang tinggi sebagai penghormatan dan permohonan pengampunan untuk para pendahulu kepada Allah swt. Tidak hanya itu, tradisi penguburan di tempat yang tinggi ini juga mengikuti teladan Nabi Muhammad saw yang membangun makam Baqi' di samping Masjid Nabawi Madinah di sebuah bukit atau tempat yang tinggi (lihat Gambar 1).

2. Tata Letak Makam

Makam seorang tokoh cikal-bakal atau sesepuh pemula peradaban cenderung diletakkan di sisi utara komplek pemakaman. Konsep geografi nalarinya adalah bahwa arah utara adalah arah tertinggi seumpama gunung. Orang yang sudah meninggal lebih dulu atau orang pertama atau generasi awal yang meninggal akan dimakamkan di arah paling utara, paling atas. Mulai dari utara-timur, utara-tengah, utara-barat. Begitulah *paugerannya*.

Bila tidak berada di utara, biasanya makam sesepuh atau tokoh cikal-bakal berada di tengah. Ia menjadi *pancer* dari setiap makam yang berada di segenap arah mata angin: timur, barat, utara, selatan. Pada awalnya, makam sepuh yang berada di tengah ini berada di utara. Hanya saja, generasi yang wafat setelahnya, mungkin karena pertimbangan kecukupan ruang, memakamkan orang-orang yang wafat di sisi utaranya makam sepuh itu. Keadaan ini menjadikan pemakaman

seumpama *mandala*. Lalu makam sesepuh itu menjadi *pancer* atau pusatnya. Teladan ini juga menjadi ciri pemakaman Baqi' di Madinah.



Gambar 3: Denah makam utama Kagungan Dalem Pasarean Astana Ageng Kotagede Yogyakarta. Pada bagian paling atas atau paling utara, terdapat makam Panembahan Joyoprono sebagai cikal-bakal wilayah Alas Mentaok dan Nyai Ageng Henis sebagai ibu Kyai Ageng Pamanahan

3. Pembangunan Cungkup dan Tajug

Tidak jarang, makam para sesepuh yang berada di kompleks Pasarean Kagungan Dalem akan dibangun cungkup, yaitu bangunan sederhana atau kompleks yang diperuntukkan sebagai rumah makam. Cungkup dibangun sebagai upaya untuk melindungi makam dari terpaan hujan maupun panas. Meski demikian, di balik upaya perlindungan itu terdapat intensi pemuliaan pada para pendahulu, terutama tokoh sesepuh yang dimakamkan di sana. Untuk kasus makam Kagungan Dalem di Kotagede, dibangun cungkup besar yang sering disebut tajug.





Gambar 4: Cungkup makam Kyai Nur Iman di Mlangi dan Kyai Hanafi di Plosokuning (kiri-kanan atas) dan cungkup makam Kyai Syihabudin di Dongkelan dan KRT Sumodiningrat di Jejeran (kiri-kanan bawah). Sumber: koleksi pribadi penulis.

4. Bentuk-Rupa Nisan: Nisan Hanyakrakusuman dan Nisan Hamengkubuwanan

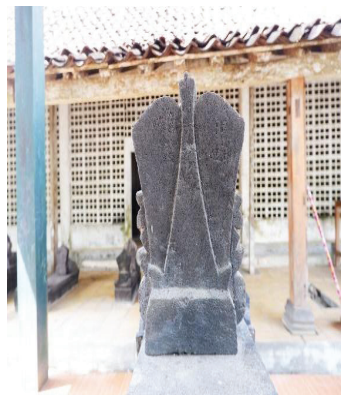
Makam-makam para pendahulu Kerajaan Mataram Islam hingga Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki beragam bentuk-rupa nisan yang khas. berdasarkan temuan Arafat (Arafat 2021a, 2025), terdapat dua tangguh nisan yang dimiliki oleh dua zaman itu. Pertama, Nisan Hanyakrakusuman, yaitu nisan makam yang diciptakan dan dipakai di Jawa terhitung sejak era Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613-1645). Kedua, Nisan Hamengkubuwanan, yaitu nisan makam yang mulai muncul dan dipakai sebagai penanda kubur di Jawa terhitung sejak era Sultan Hamengku Buwono I.

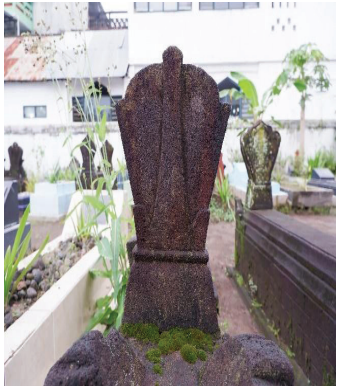
Nisan Hanyakrakusuman terdapat di komplek Pasarean Kagungan Dalem yang berisi makam tokoh-tokoh dari era Kerajaan Mataram Islam. Misalnya di Kagungan Dalem Pasarean Girilaya, Kagungan Dalem Pasarean Pajimatan, Kagungan Dalem Pasarean Astana Gambiran, Kagungan Dalem Pasarean Masjid Sultoni Wotgaleh, dan Kagungan Dalem Pasarean Masjid Sultoni Nitikan. Baik nisan maupun jirat makam-makam itu terbuat dari batu andesit.

Tangguh Nisan Hanyakrakusuman	Tipe	Lokasi	Perkiraan
	A	Kagungan Dalem Pasarean Girilaya	1500-1600 awal

	B	Kagungan Dalem Pasarean Nitikan	1600-an
	C	Kagungan Dalem Pasarean Astana Mulya Gambiran	1600-1700 awal
Tabel 1: Bentuk-Rupa Nisan Hanyakrakusuman di Pasarean Kagungan Dalem era 1600-1700-an awal			

Sedangkan di kompleks Kagungan Dalem Pasarean Masjid Pathok Negara dan Pasarean Masjid Kagungan Dalem lainnya, bentuk-rupa nisan itu didominasi oleh Nisan Hamengkubuwanan. Hal ini dapat dimaklumi sebab tokoh-tokoh yang dimakamkan di sana merupakan tokoh yang tercatat hidup di era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Makam kuna dengan bentuk-rupa berciri Nisan Hamengkubuwanan secara umum terbuat dari batu andesit dan batu gamping atau batu putih. Berbeda dengan makam-makam kuna berciri Nisan Hanyakrakusuman yang terbuat dari batu andesit.

Tangguh Nisan Hamengkubuwanan	Tipe	Lokasi	Perkiraan
	A	Kagungan Dalem Pasarean Mlangi	1700- pertengahan hingga 1800 akhir

	B	Kagungan Dalem Pasarean Dongkelan	1700- pertengahan hingga 1800 akhir
	C	Kagungan Dalem Pasarean Plosokuning	1700- pertengahan hingga 1800 akhir
	D	Kagungan Dalem Pasarean Babadan	1700- pertengahan hingga 1800 akhir
	E	Kagungan Dalem Pasarean Jejeran	1700- pertengahan hingga 1800 akhir
Tabel 2: Nisan-nisan makam era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat			

5. Bentuk-Rupa Jirat

Secara umum tidak ada perbedaan terlalu mencolok antara jirat makam tokoh-tokoh di era Kerajaan Mataram Islam dengan tokoh-tokoh pada era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Setidaknya, kesamaan bentuk jirat itu dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa temuan di bawah ini.

a. Susunan Batu Tumpuk

Jirat makam-makam dari masing-masing zaman terdiri dari tumpukan batu andesit potong yang disusun layaknya susunan bangunan candi. Susunan itu memakai sistem kunci dan ditutup dengan semacam atap kijing. Sering ditemukan jirat makam tokoh-tokoh utama bertumpuk hingga mencapai tujuh tingkat.



Tabel 3: bentuk jirat makam era Kerajaan Mataram Islam (kiri) dan era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (tengah dan kanan). Sumber: foto koleksi pribadi penulis

b. Pasca 1800-an Hingga 1900-an

Pada era pasca 1800-an pertengahan atau menjelang 1900, jirat makam-makam lebih sering tidak terdiri dari tumpukan batu. Umumnya ada dua rupa struktur: terdiri dari dua batu besar yang disatukan dan satu batu besar yang diukir dengan goresan bermotif tumpuk hingga menyerupai undak-undakan.

Memasuki era 1900-an, jirat makam hanya terdiri dari satu batu besar saja dengan ukiran di bagian mustaka dan kaki atau tanpa ukiran sama sekali. Produk kijing yang hanya menggunakan satu dan dua batu besar ini dapat dimengerti. Ia merupakan sebuah upaya manusia modern untuk menghindari kesusahan penyusunan bangunan kijing seperti rumus penyusunan bangunan sebuah candi.

Teknik pembangunan kijing bergaya candi tentu harus melibatkan pengetahuan arsitektural kuno. Ribet, repot, tidak ringkas, dan bertentangan dengan keinginan peradaban modern yang cenderung mengutamakan kemudahan, kegunaan, dan keringkasan. Bahasa lainnya: masyarakat modern hanya membutuhkan kijing yang efektif dan efisien. Dari sanalah kijing satu batu diproduksi.



Gambar 5: jirat makam era 1800-an akhir-1900 yang hanya terdiri dari satu batu (monolit).
Sumber: foto koleksi pribadi penulis

6. Ragam Hias Nisan dan Jirat Makam

a. Tumpal

Tumpal adalah hiasan berbentuk segitiga sama kaki. Tumpal, di Jawa, sering menjadi hiasan di kepala sarung batik dan juga di segenap panil-panil bangunan kuna. Di dalam kebudayaan Melayu, tumpal disebut juga *pucuk rebung*. Oleh beberapa sesepuh, rasi hias tumpal ini terkadang disebut *teja* atau *sorot*, yang berarti cahaya. Pada Nisan Hanyakrakusuman, tumpal seolah menjadi rasi hias wajib. Sedangkan pada Nisan Hamengkubuwanan, tumpal selalu dapat ditatap di badan nisan-nisan.

Keunikannya, tumpal di Nisan Hamengkubuwanan cenderung tidak meruncing dan kerap disertai dengan dua kelopak daun yang membentuk segitiga di bagian atas pinggang kanan-kiri. Terkadang tumpal di Nisan Hamengkubuwanan kerap berisen-isen atau berisi motif gegarisan seumpama daun *blarak* (daun kelapa). Selain itu juga *isen-isen* di dalam tumpal itu berupa motif belah ketupat yang diarsir.





Gambar 5: tumpal di nisan era Kerajaan Mataram Islam (atas) dan tumpal di nisan era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bawah). Sumber: foto koleksi pribadi penulis

b. Wulan Tumanggal

Wulan tumanggal artinya bulan sabit. Ada pula penyebutan berbunyi *wulan temanggal*. Seperti halnya di Nisan Hanyakrakusuman, hiasan ini nyaris tergrat di seluruh badan Nisan Hamengkubuwanan. Ada catatan khusus untuk lambang *wulan tumanggal* di Nisan Hamengkubuwanan. Di Nisan Hanyakrakusuman, hiasan ini terpahat secara sangat halus dan nyaris sempurna layaknya *wulan tumanggal* atau bulan sabit sebagai benda alamiah pada lazimnya yang membentuk sudut-siku serta garis sisi atas yang melengkung. Pada Nisan Hamengkubuwanan, terkadang *wulan tumanggal* terpahat dengan garis sisi atas yang rata hingga ia menyerupai bulan setengah. Biasanya, untuk *wulan tumanggal* yang menyerupai bulan setengah ini menjadi tanda bahwa sosok yang dimakamkan adalah perempuan. Selain itu, di Nisan Hamengkubuwanan, ditemukan pula ukiran *wulan tumanggal* yang tidak terlalu halus.

Pada Nisan Hamengkubuwanan, terdapat *wulan tumanggal* yang memiliki *isen-isen* atau isian kalimat tauhid, syahadat, dan ukiran nama sosok yang dimakamkan. Ada pula *wulan tumanggal* yang tidak memiliki lengkungan garis atas. Awalnya saya mengira *Wulan Tumanggal* hanya terpahat di nisan makam. Ternyata ia juga terpahat di jirat makam era Yogyakarta, namun, tidak pada era Mataram Islam. Selain itu, hiasan *wulan tumanggal* terbalik hingga menyerupai payung ternyata terdapat di beberapa jirat makam *hamengkubuwanan*.





Gambar 6: Hiasan wulan tumanggal di nisan era Kerajaan Mataram Islam (atas), di nisan era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (tengah) dan di jirat makam era yang sama (bawah).
Sumber: foto koleksi pribadi penulis

c. Purnama Sidhi

Purnama sidhi (bulan purnama) disebut juga *wulan andadari*, *sitaesmi*, *badra*, *basanta*, *lentreh*, *candrakantha*. Di Nisan Hanyakrakusuman dari zaman *sultanagungan*, *guratan purnama sidhi* berada di bawah kekerapan kehadiran *wulan tumanggal*. Kehadiran *purnama sidhi* di Nisan Hamengkubuwanan juga berada di bawah kekerapan kehadiran *wulan tumanggal*. Terkadang, bersama *wulan tumanggal*, ia menampilkan di nisan makam seorang tokoh tertentu. Hiasan *Purnama Sidhi* ternyata juga ditemukan berada kijing makam. Meski selama penelusuran ini baru ditemukan satu, namun, itu sudah menunjukkan bahwa *Purnama Sidhi* tidak mesti berada di nisan.





Gambar 7: *Purnama sidhi* (bulan purnama) di nisan era Kerajaan Mataram Islam (atas) dan di nisan era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bawah). Sumber: koleksi pribadi penulis

d. Kembang Awan

Hiasan ini tumbuh di bagian pinggir sisi timur dan barat nisan. Dilihat dari arah depan, terkadang ia mencitrakan bentuk naga. Hingga memasuki abad ke-19, rasi hias kembang awan masih terus mewujud di nisan-nisan, meskipun, bentuknya tidak sehalus kembang awan di Nisan Hanyakrakusuman.



Gambar 8: kembang awan di nisan era Kerajaan Mataram Islam (atas) dan kembang awan di nisan era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bawah). Sumber: foto koleksi pribadi penulis

e. Kembang Patran atau Kemada

Kemada adalah ukir-ukiran yang melambangkan kembang teratai atau padma. Hiasan ini biasanya tergurat di atas bagian pinggang nisan. Terkadang ia memanunggal dengan tumpal. Terkadang ia lebih sering berdiri sendiri. Bagian tengahnya sering mencitrakan atap sebuah candi, gapura, dan puncak terbuka yang berpadu dengan kembang wajik. Sedangkan bagian lain kembang ini berbentuk gegarisan yang berbaris mulai dari ujung sisi timur ke tengah dan ujung sisi barat ke tengah.

Hiasan ini disebut pula *kembang patran* yang dipahami sebagai perlambangan Kemada atau daun teratai. Ia dapat ditemukan di nisan-makam orang Jawa sejak era Sultan Agung hingga hingga di nisan-makam tokoh-tokoh generasi Wali Songo. Memasuki era *hamengkubuwanan*, hiasan ini masih tertampil di berbagai nisan-makam dengan berbagai variasinya.



Gambar 9: Kemada atau kembang patran di nisan era Kerajaan Mataram Islam (atas) dan era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bawah). Sumber: foto koleksi pribadi penulis.

f. Kembang Waru

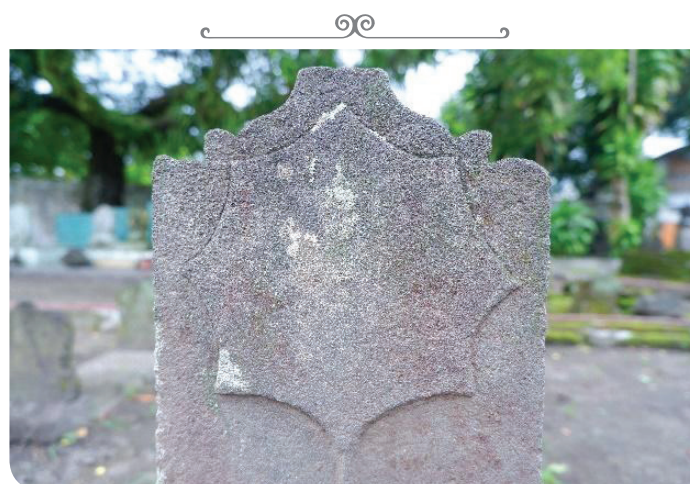
Ragam hias ini hanya ditemukan pada makam-makam era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Meski tidak banyak, tapi eksistensi ragam hias ini ternyata juga terukir di jirat makam era tersebut.



Gambar 10: Hiasan Kembang Waru di nisan makam era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (atas) dan di jirat makam pada era yang sama (bawah). Sumber: foto koleksi pribadi penulis.

g. Surya Suminar

Hiasan ini disebut juga *surya sinurat*, *kembang pepe*, dan sebutan bersinonim lainnya. Ia kerap ditemukan di nisan makam era Kerajaan Mataram Islam, namun, belum ditemukan pada era Kasultanan Ngayogyakarta.



Gambar 9: Hiasan surya suminar atau matahari bersinar

7. Rupa-rupa Istilah Penyebutan Makam dan Pemakaman

Di makam-makam era *hamengkubuwanan*, tidak atau belum ditemukan kata “nisan” yang tercantum di batu nisan atau di batu kijing makam. Justru ada kata lain yang lebih berciri semiotis dan ilmiah, yaitu kata *pemut*, *sekaran*, *sarean*, dan *alamat*. Misalnya di makam KRT Wiryawinata, di Jejeran, Bantuk, Yogyakarta, tertulis kalimat dalam aksara Arab Pegon berbahasa Jawa halus: *punika pemut sareanipun Radin Tumenggung Wiryawinata*. Nisan-makam tokoh ini akan dibahas di buku ini. Terkadang tertulis pula kalimat berbahasa Arab: *hadza alamatu-l-qabri*.

Pemut adalah sebuah kata dari Bahasa Jawa, artinya *peringat*. *Sekaran* juga sebaris kata dari Bahasa Jawa, artinya kembang atau bunga. Kuburan disebut kembang atau bunga karena ia memang sasaran penaburan bunga. Bunga di sini bukan sebatas arti bunga dalam makna harfiah, melainkan, bunga sebagai kiasan dari makna doa-doa. Kata terakhir untuk menyebut kuburan atau nisan adalah *alamat*. Kata ini berasal dari Bahasa Arab, artinya, tanda yang mengakibatkan pengetahuan akan sesuatu.

8. Perlunya Peremajaan Data dan Pengamanan Artefak Asli

Ada beberapa masalah yang terjadi di beberapa Pasarean Kagungan Dalem terkait dengan eksistensi makam-makam tua. Pertama, ada banyak makam tua para pendahulu yang telah mengalami renovasi dan pembaruan material hingga menyebabkan batu jirat dan nisan aslinya hilang. Biasanya diganti dengan batu marmer mewah. Sayangnya, pasca pembaruan makam itu, tidak ditemukan batu-batu jirat dan nisan asli. Hal ini misalnya terjadi di Pasarean Kagungan Dalem Masjid Sulthoni Wotgaleh dan terutama di Pasarean Kagungan Dalem Kotagede.

Kedua, karena itu, hilang pula benda tinggalan asli sejarah yang seharusnya menunjukkan banyak hal, misalnya adanya simbol-simbol tertentu yang tidak bisa lagi dibaca dan dipahami. Dengan demikian, hilang pula pengetahuan tertentu yang tertera di simbol itu. Pada titik inilah, perlu upaya pelacakan tinggalan batu-batu nisan dan jirat yang seharusnya masih terletak di area pemakaman.

Ketiga, terjadi kesulitan pelacakan dan bahkan kehilangan data mengenai tokoh-tokoh yang dimakamkan di beberapa Pasarean Kagungan Dalem. Misalnya Pasarean Kagungan Dalem yang berada di sisi barat Masjid Keprabon, Kauman. Makam utama di pemakaman ini sudah diganti dengan batu modern dan cungkup makamnya dijadikan sebagai tempat penyimpanan alat-alat kebersihan. Selain itu, banyak makam tua yang terbengkalai dan bahkan disingkirkan di pojok-pojok pemakaman. Hal ini tentu cukup mengundang keprihatinan.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan beberapa kesimpulan. Pertama, sebagian besar makam sepuh para pendahulu peradaban di Yogyakarta berada di sisi barat Masjid Pathok Nagara, Masjid Kagungan Dalem, serta Masjid Keprabon, yaitu Masjid Gede Kraton di Kauman dan Masjid Mataram Kotagede. Makam-makam tua sezaman tersebar pula di berbagai Masjid Kagungan Dalem di seluruh wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kedua, makam seorang tokoh cikal-bakal atau sesepuh pemula peradaban cenderung diletakkan di sisi utara kompleks pemakaman.

Ketiga, makam-makam para pendahulu Kerajaan Mataram Islam hingga Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki bentuk-rupa Nisan Hanyakrakusuman dan Nisan Hamengkubuwanan. Keempat, tidak ada perbedaan terlalu mencolok antara jirat makam tokoh-tokoh di era Kerajaan Mataram Islam dengan tokoh-tokoh pada era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Keempat, jirat dan nisan makam-makam dari masing-masing zaman terdiri dari tumpukan batu andesit potong yang disusun layaknya susunan bangunan candi. Susunan itu memakai sistem kunci dan ditutup dengan semacam atap jirat. Kelima, pasca 1800-an hingga 1900-an jirat makam-makam lebih sering tidak terdiri dari tumpukan batu. Memasuki era 1900-an, jirat makam hanya terdiri dari satu batu besar saja dengan ukiran di bagian mustaka dan kaki atau tanpa ukiran sama sekali.

Keenam, ragam hias nisan dan jirat makam terdiri dari tumpal, *wulan tumanggal* (bulan sabit), *purnama sidhi* (bulan purnama), Kembang Awan, Kembang Patran atau Kemada, Kembang Waru, dan Surya Suminar. Masing-masing hiasan menjadi ciri atau karakter yang menandai kekhasan makam-makam di area Yogyakarta. Baik berupa tinggalan dari era Kerajaan Mataram Islam maupun dari era Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Ketujuh, terdapat beberapa penyebutan makam, yaitu *pemut*, *sekaran*, *sarean*, dan *alamat*. Terkadang tertulis pula kalimat berbahasa Arab: *hadza alamatu-l-qabri* yang artinya inilah penandan kubur. Semua sebutan itu tergores di makam dengan menggunakan aksara Arab, Jawa, dan juga Arab pegon.

Artikel ini merokemendasikan beberapa hal. Pertama, perlunya penjagaan artefak asli makam baik jirat maupun nisannya. Terutama terkait banyak makam-makam para cikal-bakal Yogyakarta yang telah dipugar dan diganti bahan material batu andesit dengan menjadi batu marmer. Kedua, perlu pendataan makam-makam yang telah dipugar dan pelacakan artefak aslinya berada di mana. Sebab pengetahuan tentang tokoh-tokoh itu terkait dengan simbol-simbol di makam mereka. Hilangnya artefak asli makam mereka menunjukkan hilang pula pengetahuan tertentu. Ketiga, terjadi kesulitan pelacakan dan bahkan kehilangan data mengenai tokoh-tokoh yang dimakamkan di beberapa Pasarean Kagungan Dalem.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Novida. 1984. "Catatan Singkat Mengenai Kompleks Makam Banyusumurup, Imogiri." *Berkala Arkeologi* 5(2): 51–60. doi:10.30883/jba.v5i2.426.
- Adrisijanti, Inajati. 1973. "Kekunoan Islam Di Imagiri, Tinjauan Terhadap Seni Bangun Dan Seni Hiasnya." Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Adrisijanti, Inajati. 1986. "Makam-Makam Kerajaan Mataram (Studi Pendahuluan Tentang Keterkaitannya Dengan Perkotaan)." In *Pertemuan Ilmiah Arkeologi IPIA) IV*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 278–89.
- Afwadzi, Benny. 2018. "Makam Seniman: Perkembangan Identitas Pemakaman Di Era Modern." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1(Agustus): 101–18. doi:10.15575/jw.v3i1.2018.

- Ambary, Hasan Muarif. 1984. *L'art Funeraire Musulman En Indonesie Des Originaux Aur IX Seclé*. Disertasi Ecole Des Hautes Etudes En Sciences, Paris.
- Ambary, Hasan Muarif. 1998. *Menemukan Peradaban: Arkeologi Dan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Puslit Arkenas.
- Arafat, M. Yaser. 2021a. *Nisan Hanyakrakusuman: Batu Keramat Dari Pasarean Sultanagungan Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Suka Press.
- Arafat, M. Yaser. 2025. *Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX Di Yogyakarta-Jawa Tengah Dan Sekitarnya*. Yogyakarta: MJS Press.
- Arafat, M.Yaser. 2021b. *Nisan Hanyakrakusuman: Batu Keramat Dari Pasarean Sultanagungan Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Suka Press.
- Carey, Peter BR. 1980. *The Archive of Yogyakarta, Volume I: Documents Relating to Politics and Internal Court Affairs*. Oxford: Oxford University Press.
- Charlotte, Seymour-Smith. 1987. "Macmillan Dictionary of Anthropology."
- Damais, Louis-Charles. 1957. "Études Javanaises: I. Les Tombes Musulmanes Datées de Trâlâyâ." *Bulletin De L'École Française D'Extrême-Orient* 48(2): 353–415.
- Dipodiningrat, KRP. 2010. *Riwayat Lan Sejarah Pasarean/Petilasan Kagungan Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat*. Yogyakarta: Kawedanan Pengulon Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
- Ghozali, M. Lutfi. 2023. *Nyarkub Mengkaji Kuburan*. Surabaya: Arah Baca.
- Herwandi. 2003. *Bungong Kalimah: Kaligrafi Islam Dalam Balutan Tasawuf Aceh (Abad Ke-16-18 M)*. Padang: Andalas University Press.
- Ibrahim, Husaini. 2014. *Awal Masuknya Islam Ke Aceh: Analisis Arkeologi Dan Sumbangannya Pada Nusantara*. Banda Aceh: Aceh Multivision.
- Kipfer, Barbara Ann. 2008. *Dictionary of Artifacts*. John Wiley & Sons.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. XI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lota, Hesus. 1993. *Album Pasareyan Raja-Raja Mataram*. Yogyakarta: Textbook.
- Mandayakusuma, KPH. 1987a. *Kagungan Dalem Pasareyan Hastana Kitha Ageng Ngayogyakarta-Hadiningrat*. Yogyakarta.
- Mandayakusuma, KPH. 1987b. *Kagungan Dalem Pasareyan Hastana Kitha Ageng Ngayogyakarta-Hadiningrat*. Yogyakarta.
- Mandayakusuma, KRT. 1950. *Cengkorongan Gambar Sarta Pratelan Ingkang Sami Semare Ing Kagungandalem Pasareyan Imagiri, Girilaya, Sarta Banyusumurup Ing Ngayogyakarta Hadiningrat Ugi Pasareyan Tegal-Arum Ing Tegal*. Yogyakarta: Kawedanan Hageng Sriwandawa Bagian Puralaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
- Montana, Suwedi. 1990. "Tradisi Kematian Setelah Agama Islam Di Indonesia." In *Proceedings Analisis Hasil Penelitian Arkeologi I Plawangan, 26-31 Desember 1987*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 197–221.

- Oktarini, Dwi Atma;, Ken; Widyatwati, and Rukiyah. 2017. "Sejarah Berdirinya Makam Imogiri Antara Naskah Serat Pengetan Jasan Dalem Para Nata Dengan Cerita Rakyat (Kajian Intertekstual)."
- Othman, Mohd Yatim. 1985. "Batu Aceh : A Study of 15-19 Century Islamic Gravestones in Peninsular Malaysia." Durham University.
- Riswinarno. 2018. "Tata Ruang Dan Keruangan Kompleks Makam Kotagede (Sinkretisasi Budaya Jawa Dengan Islam)." *Thaqafiyat* 19(2): 186–213.
- Seymour, Smith Charlotte. 1986. *Macmillon Dictionary of Anthropology*. Macmillan Press Limited.
- Tjandrasmita, Uka. 1992. "Riwayat Penyelidikan Kepurbakalaan Islam Di Indonesia, 50 Tahun Lembaga Purbakala Dan Peningkatan Nasional 1913-1963." *Jakarta: Puslit Arkenas*.
- Widodo, Sambung dkk. 1998. *Penelitian Nisan Dalam Pewilayahan Kerajaan Mataram Islam Pasca 1755 Tahap III*. Yogyakarta.
- Widodo, Sambung dkk. 2000. *Nisan Dalam Pewilayahan Kerajaan Mataram Islam Pasca 1755 (Tahap IV)*. Yogyakarta.
- Woodward, Ian. 2007. *Understanding Material Culture*. Sage.
- Yudodiprojo, KRT. 1995a. *Silsilah Raja-Raja Mataram*. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Yudodiprojo, KRT. 1995b. *Silsilah Raja-Raja Mataram*. Yogyakarta: Yogyakarta.

“Kini Dipagari”: Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Dalam Transisi Memori Kolektif

Rahmadi Fajar Himawan

Program Magister Sosiologi, Departemen Sosiologi, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta

Email: rahmadifajarahimawan@mail.ugm.ac.id

Abstract:

The revitalization of North Square of Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat in 2020-2022 has given rise to a new collective memory, in addition to the persistence of collective memory that has existed since the reign of Sultan Hamengkubuwono IX. In the context of memory studies, North Square was ‘celebrated’ by various interests that give rise to diverse memories. The contestation of memory, between memory lives on people’s mind and the spirit of Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat as ‘heritage guard’, is unavoidable. This study aims to map the transition points of memory and public sentiment toward the revitalization of North Square of Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. A critical discourse analysis was conducted on online news articles published between 2015 and 2025, in addition to observations of related activities/events and interview with residents around North Square. This study found that collective memory related to North Square undergoing a transition from ‘public space’ to ‘contested space’. Although sentiments around the revitalization project still persist, there are indications that public trust toward Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat has not diminished amidst uncertainty of political constellation in national context. The meaning of ‘public space’ that persist also triggers public agency in building ‘alternative space’, which concludes the importance of ‘dialogical heritage’ idea to address the contestation of memory around North Square.

Keywords: *collective memory, city square, public space, sacred space, contestation*

Intisari:

Revitalisasi Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat pada 2020-2022 telah melahirkan memori kolektif baru di masyarakat, disamping keberlanjutan memori kolektif yang telah hidup sejak pemerintahan Sultan Hamengkubawana IX. Dalam konteks kajian memori, Alun-Alun Utara ‘dirayakan’ oleh berbagai kepentingan yang melahirkan beragam memori. Kontestasi memori, antara ingatan masyarakat dan semangat ‘pemuliaan’ ruang versi Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, tidak dapat dihindarkan. Artikel ini bertujuan memetakan titik transisi memori dan sentimen masyarakat terhadap revitalisasi Alun-Alun Utara Karaton

Ngayogyakarta Hadiningrat. Analisis wacana kritis dilakukan terhadap berita daring yang diterbitkan dalam rentang 2015-2025, disamping observasi terhadap aktivitas/peristiwa terkait dan wawancara masyarakat di sekitar Alun-Alun Utara. Dalam kajian ini, ditemukan bahwa memori kolektif masyarakat terkait Alun-Alun Utara mengalami transisi dari 'ruang publik' menuju 'ruang kontestasi'. Meskipun sentimen dari proyek pemagaran-pemasiran masih bertahan, terdapat indikasi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat justru tidak surut di tengah konstelasi politik nasional yang tidak berketentuan. Makna 'ruang publik' yang bertahan juga melandasi agensi publik dalam membangun 'ruang alternatif', yang menyimpulkan pentingnya gagasan 'warisan dialogis' demi mengatasi perdebatan memori yang tersemat pada Alun-Alun Utara.

Kata Kunci: memori kolektif, alun-alun, ruang publik, ruang sakral, kontestasi

PENGANTAR

Proyek revitalisasi (pemagaran-pemasiran) Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang terjadi dalam rentang 2020-2022 erat berhubungan dengan narasi perlindungan 'sumbu filosofis' (Aramita & Karyadi 2018; Haq 2023; Sadana & Dharmaraty 2024) dan erat pula kaitannya dengan pengejaran pengakuan dari UNESCO (Syahdani & Kardanardi 2022). Meskipun tiga tahun telah lewat pasca rampungnya proyek revitalisasi, memori masyarakat tetap menempatkan Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai ruang publik (Minanto, 2018; Sadana & Dharmaraty, 2024). Meskipun Alun-Alun Utara sebagai suatu ruang publik juga kerap diidentifikasi dengan kriminalitas (Ibrahim 2024; Samsa & Anggara, n.d.), tidak dapat dipungkiri bahwa Alun-Alun Utara sebagai suatu 'ruang terbuka' tidak hanya mewadahi interaksi sosial-ekonomi (Muhamad & Faradisa 2021; Rukayah & Bharoto 2012), namun juga lokasi di mana aspirasi masyarakat didengar dan diakomodasi oleh sultan yang berkuasa ketika seruan aspirasi diselenggarakan (A., 2003; Suryo, 2004; Wardani, 2012).

Tidak hanya di D.I. Yogyakarta, *alun-alun* telah terikat pula dengan identitasnya sebagai ruang publik di kota lain, setidaknya di Pulau Jawa, sebagai warisan dari 'kota lama' yang diwariskan setidaknya merentang dari Kerajaan Majapahit (Arsyad & Sarwadi 2019; Miqdad, Rahmah, & Jani 2025; Basundoro 1960; A. Hidayat & Widriyakra 2018; Rukayah & Bharoto 2012; Nur & Rohmah, n.d.; Widyawati 2024) ataupun kreasi inovatif 'kota baru' (Budiman, Sulistyantara, & Zain 2014; Putra et al. 2015; Widyaevan 2015). Akan tetapi, kenyataan yang perlu diperhatikan dalam memerhatikan *alun-alun* sebagai ruang publik adalah kenyataan bahwa *alun-alun*, sebagaimana ruang urban pada umumnya, memiliki makna yang diproduksi (dan direproduksi) oleh beragam kepentingan) – kontestasi makna ruang urban, sebagai konsekuensinya, senantiasa tidak dapat dihindarkan (Sarasmata, 2019).

Pertama kali dicetuskan oleh Maurice Halbwachs (Halbwachs, 1992), konsep memori kolektif mengalami pengembangan pemahaman, di mana memori kolektif tidak hanya dipahami sebagai hasil pembentukan sudut pandang individual, namun juga sebagai proses dari interaksi individu dengan individu lain, memori, dan paparan informasi (Hutton, 1998; Shahzad, 2012). Dalam konteks ini, berbagai situasi yang dialami Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, perlu dilihat sebagai entitas yang 'diingat' (Pennebaker & Banasik, 1997) melalui diskursus 'tentang masa lalu' yang senantiasa 'diperingati' (*commemoration*) (Steiner & Zelizer, 1995). Perlu diingat bahwa praktik 'memperingati masa lalu' tersebut tidak akan pernah homogen: praktik

tersebut senantiasa menimbulkan memori yang berbeda, bergantung pada 'pihak siapa' yang memproduksi, mereproduksi, mempertahankan, dan membumikan memori (Molden, 2016). Sebagai konsekuensinya, akan selalu mengalir beragam memori (yang berpotensi mengkontestasi satu sama lain) meskipun memori tersebut bersumber dari satu kejadian/situasi yang sama (Molden, 2016).

Dalam konteks kajian ini, proyek pemagaran-pemasiran Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat pada akhirnya menghasilkan beragam memori yang saling berkelindan, dan bahkan berkontestasi (Budiman & Kusno 2015). Terlebih lagi, memori kolektif yang merujuk pada situasi 'yang sudah berlalu' seringkali berdaya dalam mempengaruhi tindakan/gagasan di 'masa kini' dan 'masa depan' (Budiman & Kusno 2015). Kajian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana proyek pemagaran-pemasiran Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang berlangsung pada 2020-2022, pada akhirnya melahirkan berbagai memori atau gagasan, yang tetap hidup meski proyek revitalisasi tersebut telah berlalu. Secara lebih lanjut, kajian ini berusaha menggali bagaimana sentimen 'sesungguhnya' dari memori publik terkait Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat berperan dalam pembentukan relasi masyarakat dengan *kraton*, serta bagaimana memori terkait melandasi tindakan masyarakat dalam merespon proyek pemagaran-pemasiran yang telah terjadi pada Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

METODE PENELITIAN

Dalam konteks penggalian memori kolektif, media jurnalistik menjadi salah satu perangkat vital dalam merekam memori kolektif masyarakat (Kitch, 2005). Di tengah aktivitas produksi-konsumsi konten media sosial oleh subjek independen yang tidak terwadahi secara formal, media jurnalistik masih berdaulat dalam menarasikan memori dan berdaya dalam memaparkan narasi tersebut hingga menjangkau komunitas yang lebih luas (Kitch, 2005). Berita jurnalistik digunakan tidak hanya untuk diambil paparannya, namun dianalisis dengan pendekatan *verstehen* (memahami): penulis berusaha melakukan praktik empati terhadap berita jurnalistik, mendalami makna dan motif penulis sebagai produsen teks (Creswell, 2014; Xie, 2018). Analisis wacana kritis kemudian digunakan untuk menggali permaknaan komprehensif terkait teks (Van Dijk, 2013). Secara lebih lanjut, analisis wacana kritis berusaha mengungkap bagaimana teks diproduksi, bagaimana kemudian teks mewakili kepentingan tertentu, dan mengungkap konteks/situasi ketika sebuah teks diproduksi (Van Dijk, 2013).

Kajian ini mengumpulkan surat kabar daring dokumentasi Google News demi menjamin bahwa surat kabar daring yang digunakan sebagai bahan analisis adalah berita populer yang masif diakses oleh masyarakat, atau menjangkau *views*. Penentuan surat kabar daring dilakukan secara *purposive* dengan mengfokuskan pencarian sumber data hanya pada pemberitaan terkait proyek revitalisasi Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebagai cara memudahkan analisa transisi wacana memori, penulis kemudian memetakan berita daring yang terkumpul dan menerapkan analisis wacana kritis di tiap periode pemberitaan demi menggali sentimen publik.

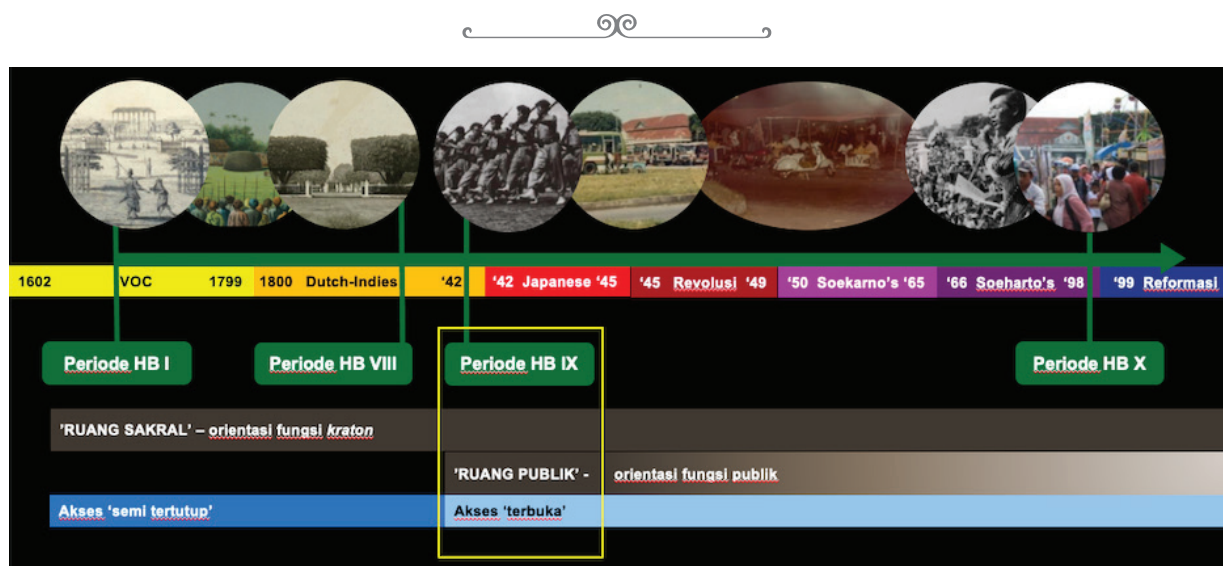
Dalam perkembangan selanjutnya, demi mencari tahu bagaimana sentimen publik di taraf diskursus mengejawantah dalam situasi materil pasca revitalisasi Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (hingga 2025), penulis melakukan penggalian data primer, berupa (1) observasi partisipatoris terhadap aktivitas masyarakat/peristiwa yang memungkinkan

terlihatnya sentimen masyarakat terhadap kehidupan politik lokal-nasional di penghujung 2025 (dalam hal ini, rangkaian *Garebeg Mulud* tahun Dal 1959 dan rangkaian aksi massa yang kemudian memunculkan Aksi Damai 1 September di Bundaran UGM), serta (2) wawancara tidak terstruktur dengan pelaku jual-beli (penjaga warung, tukang parkir, tukang becak) dan masyarakat awam yang beraktivitas di sekitar Alun-Alun Utara sepanjang minggu keempat Februari 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONTEKS PEMBENTUKAN MEMORI: RUANG SAKRAL DALAM PERALIHAN ZAMAN

Hingga pada 2019, produk jurnalistik Pra-Pemagaran (2015-2019) masih menyajikan gambaran identik Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai suatu ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat (Budi, 2018; Khalika, 2019; Muryani, 2015; Nugroho, 2019) – disamping ‘propaganda pariwisata’ berupa reportase deskriptif pemandangan Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai suatu obyek pariwisata (Budi, 2018; Khalika, 2019; Muryani, 2015; Nugroho 2019) dan deskripsi fisik ‘pada masa lampau’ (Khalika, 2019; Muryani, 2015; Nugroho, 2019). Menarik untuk disimak bahwa reportase daring periode Pra-Pemagaran (hingga 2019) tidak luput mengingatkan bahwa Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ‘di masa lampau’ sesungguhnya merupakan ‘halaman depan Kraton Yogyakarta’ yang tidak dibuka untuk umum, dan perubahan dari ‘bukan ruang publik’ menjadi ‘ruang publik’ disebabkan oleh ‘perkembangan zaman’ (Muryani, 2015). Memori masyarakat, yang menempatkan Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai ruang publik, tidak lain adalah refleksi atas ‘perkembangan zaman’ yang dimaksud. Dalam *Transformation of Public Space: Social and Spatial Changes (A Case Study of Yogyakarta Special Province, Indonesia)*, Widiyastuti telah menarik kesimpulan bahwa transformasi Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi ‘ruang publik’ merupakan refleksi atas dinamika politik yang terjadi di masa Sultan Hamengkubawana XI (Widiyastuti, 2013, 2012).



Gambar 1. Linimasa Transformasi ‘Peringatan’ Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Source: Widiyastuti (2012) dengan pengolahan kembali oleh penulis.

Pada awal penginisiasian pada masa Sultan Hamengkubawana I (Pangeran Mangkubumi) hingga Sultan Hamengkubawana VIII, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat memposisikan Alun-Alun Utara sebagai 'ruang semi tertutup' (Putra et al., 2015; Widiyastuti, 2013). Ketika Alun-Alun Utara dibangun sebagai bagian integral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa Sultan Hamengkubawana I yang berkelindan dengan periode VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie* – Perusahaan Hindia Timur Belanda) (1756-1800), Yogyakarta merupakan basis kekuatan militer sekaligus aktivitas administrasi & politik yang tengah menjaga kemungkinan penetrasi lebih dalam pengaruh politis VOC sekaligus menandingi kuasa politis-magis Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Etos pembangunan di masa Sultan Hamengkubawana I yang berorientasi pada pertahanan, administrasi, dan politik (baik praktis ataupun magis) kemudian tercermin dalam penataan spasial Alun-Alun Utara yang menyimbolkan 'penyatuan manusia dengan Tuhan' (melalui letaknya yang bergaris lurus dengan 'sumbu filosofis', pohon beringin kembar Kyai Dewandaru dan Kyai Janandaru di tengah alun-alun, dan seluruh permukaan ditutup pasir), keberadaan pagar kayu tirus berlapis ganda (*pinacak suji*) di sekeliling alun-alun yang dijaga ketat para *abdidalem*, dan pendirian 19 *bangsal pekapalan* (tempat peristirahatan para bupati) di sekeliling penjuru angin alun-alun (Pigeaud, 2003). Perluasan dari etos pertahanan, penjagaan sistem administrasi, penguatan kuasa politis, dan penegakan kuasa magis kemudian tercermin dari aktivitas penggunaan Alun-Alun Utara: pelatihan militer, *garebeg*, *sekaten*, *laku pepe*, *rampogan*, serta berbagai upacara yang mempertemukan sultan dengan masyarakat demi menjaga gagasan 'keseimbangan kosmos' (Behrend, 2018).

Etos kuasa magis pula yang menjadikan alun-alun hanya dapat diakses oleh pihak tertentu. Dalam konteks 'ruang semi tertutup', pembatasan akses Alun-Alun Utara menandai transisi wilayah yang kompleks (sakral-profan, pria-wanita, bangsawan-masyarakat biasa, publik-privat), yang tidak hanya dijaga oleh *pinacak suji* dan para *abdidalem*, namun juga stratifikasi sosial yang menempatkan sultan (sebagai 'representasi Tuhan di dunia') di posisi tertinggi pada struktur masyarakat (Suparwoko et al., 2020; Tohar et al., 2019). Meski terdapat beberapa perubahan fisik minor dan aktivitas penggunaan yang mengalami transformasi ataupun dipensiunkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda (1800-1940), beberapa upacara (*garebeg* dan *sekaten*) serta pembatasan akses tetap berlangsung sebagai usaha mempertahankan Alun-Alun Utara sebagai ruang sakral.

Situasi keamanan Indonesia yang tidak kondusif akibat serangan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) di era Pasca-Proklamasi 1945 mengakibatkan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 (hingga 1949). Di bawah pemerintahan Sultan Hamengkubawana IX, penggunaan Alun-Alun Utara mulai diimbui oleh kepentingan nasional, ditandai dengan parade militer pada 5 Oktober 1946 untuk memperingati satu tahun Tentara Republik Indonesia, diikuti dengan orasi akbar Presiden Sukarno pada 1948 untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Pasca kembalinya ibukota dari Yogyakarta ke Jakarta pada 28 Desember 1949 tidak hanya membangunkan kembali prosesi *kraton* (*garebeg* dan *sekaten*) yang sempat terhenti akibat keamanan nasional yang tidak kondusif, namun juga penetrasi kepentingan nasional tetap berlanjut dengan hadirnya propaganda program pemerintah dalam 'pasar malam' *sekaten* yang durasinya diperpanjang (dari 7 hari ke 30 hari) mulai tahun 1950 (Ni'mah, 2007).

Penetrasi kepentingan nasional berlanjut di masa pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998) (Woodward, 2011) dengan berlakunya program nasional di Alun-Alun Utara (upacara pengibaran bendera setiap Senin pagi, SKJ (*Senam Kesegaran Jasmani*) di Jumat pagi, dan *jogging*

massal di Minggu pagi) yang motivasinya cenderung diarahkan untuk menghindarkan publik dari aktivitas politik, terutama yang disinyalir dapat memotori sentimen anti-pemerintah (Lim, 2006). Kontrol ‘kesakralan’ terhadap Alun-Alun Utara beralih dari ‘penjagaan ruang kosmos’ menuju ‘penjagaan keamanan nasional’, melalui izin ketat terhadap aktivitas publik apapun (Lim, 2006). Pada periode ini pula kios/warung temporer mulai berdiri di Alun-Alun Utara seiring dengan hadirnya kesempatan ekonomi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan gelombang pariwisata di era kepemimpinan Presiden Soeharto, menandai dimulainya aktivitas-aktivitas personal seperti jual-beli benda keperluan sehari-hari hingga *nongkrong* yang jamak dilakukan kaum muda (Widamaryani, et.al., 2003). Aktivitas masyarakat ‘sehari-hari’ di Alun-Alun Utara terus berlangsung hingga masa Sultan Hamengkubawana X, membentuk (dan mempertahankan) memori ‘ruang sakral’ yang atas pergantian sultan berangsur-angsur lebih dikenal sebagai ‘ruang publik’.

Perlu diperhatikan bahwa sentimen atas memori ‘ruang publik’ pada Alun-Alun Utara yang tetap bertahan di masa Sultan Hamengkubawana X tidak hanya menguat dari langgengnya aktivitas masyarakat yang pada awalnya berbasis kepentingan ekonomi dimulai pada masa Sultan Hamengkubawana IX, namun juga glorifikasi ingatan masyarakat dalam meruntuhkan ‘penjagaan keamanan nasional’. Pada 20 Maret 1998, berbagai lapisan masyarakat memenuhi Alun-Alun Utara demi menemui Sultan Hamengkubawana X dan menuntut reformasi (menjelang penurunan Presiden Soeharto). Aksi yang kemudian dikenal sebagai ‘Pisowanan Ageng 1998’ tersebut tidak hanya menegaskan agensi masyarakat memutuskan kontrol rezim nasional terhadap berbagai aktivitas politik, namun juga partisipasi aktif masyarakat di ‘ruang sakral’ yang berangsur dianggap sebagai ‘ruang publik’

TRANSISI MEMORI DI ERA SULTAN HAMENGKUBAWANA X: KONTESTASI MEMORI PUBLIK VS NARASI KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT

Dalam diskursus yang diproduksi surat kabar daring terkait Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat di era Pra-Pemagaran (2019) hingga Pasca-Pemasiran (2022-2025), dapat dilihat bagaimana Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat perlahan mengalami transisi memori kolektif. Transisi bermula dari periode Pra-Pemagaran yang diingat sebagai ‘ruang terbuka’ (bagi publik) menuju ‘ruang tertutup’ (pada periode Pasca-Pemagaran, Pemasiran, dan Pasca-Pemasiran). Mulai pada periode Pemagaran (2020), karakteristik ‘lokasi aktivitas masyarakat’ yang biasa membangun citra Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam media publik seketika digantikan oleh ‘rincian proyek’ pemagaran (Adham 2020a; Adham 2020b; Danar 2020; Hidayat 2020; Muttakin 2020; Ris/Cak 2020; Subarkah 2020a; 2020b; Sabandar 2020; Widiyartono 2020; “Alun-alun Utara..” 2020a; “Kembali seperti...” 2020b). Surat kabar daring mempertanyakan argumen di balik proyek pemagaran tersebut.

Dalam konteks eksistensi memori, nampak bahwa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat berusaha menembus wacana terkait citra Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat melalui narasi ‘pengembalian kodrat’. Mewujudkan transisi Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, dari sebelumnya ‘ruang publik’ menuju pengembalian status sebelumnya menuju ‘ruang tertutup’ oleh pihak *kraton*, tidak hanya mengandung beban historis yang diwariskan oleh Sultan Hamengkubawana I sebagai perancang Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat itu sendiri, namun juga beban memori kolektif yang telah

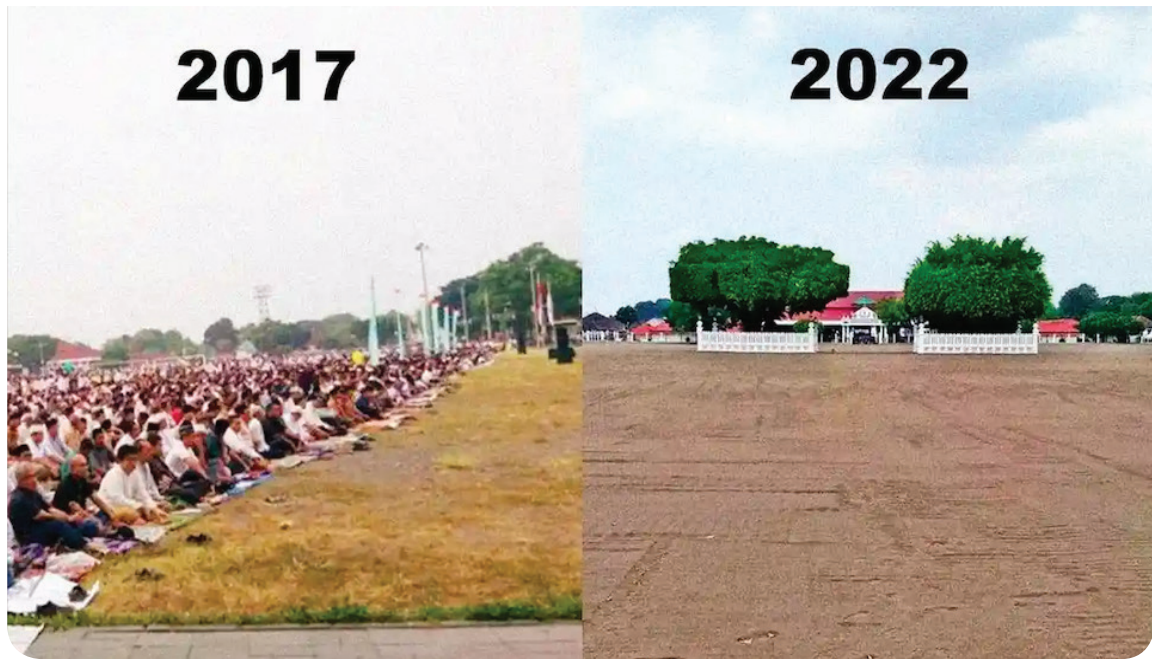
dibangun oleh Sultan Hamengkubawana IX. Kenyataan bahwa masyarakat telah memposisikan Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai ruang publik dalam memori kolektif mereka telah disadari oleh Sultan Hamengkubawana X bahwa proyek pemagaran kelak menimbulkan kepanikan masyarakat. Tanggapan Sultan Hamengkubawana X terkait jaminan akses publik (melalui keberadaan pintu di keempat sisi alun-alun) kemudian didukung oleh pernyataan Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Aris Eko Nugroho, (Mustaqim, 2020; Widiyartono, 2020), yang menjamin aksesibilitas publik terhadap Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan prosedur permohonan izin penggunaan kepada *kraton*.



Gambar 2. Proses pemagaran Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat pada 2020.

Source: Kompas

Sebuah artikel yang diterbitkan Harian Jogja pada 2020 menyiarkan sikap Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), yaitu Dani Eko Wiyono, terhadap proyek pemagaran Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang justru dilakukan di tengah pandemi COVID-19 (Subarkah, 2020b). Sinyal diskursif kontra pemagaran dikarenakan periode eksekusi proyek yang ‘tidak pas’, kemudian membuahkan konsekuensi berupa luapan sentimen yang mendukung wacana kontra pemagaran pada periode Pasca-Pemagaran (2020-2022). Pada awal Juli 2021, GKR Candrakirana menjadisorotan publikat *tweet* yang ditulis beliau di portal Twitter demi menanggapi diskursus pengguna Twitter terkait proyek pemagaran Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat di masa pandemi COVID-19 yang menelan anggaran Dana Keistimewaan (Danais) sebesar Rp 2,3 milyar. Penggalan isi *tweet* yang berbunyi “Alun-alun itu pekarangan rumah bagi Raja” menjadi penggalan *tweet* yang diutilisasi pengguna Twitter untuk meluapkan sentimen kontra pemagaran Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.



Gambar 3. Perbandingan Situasi Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat
(Sebelum & Sesudah Revitalisasi)

Source: Tribun Jogja

Dalam benak masyarakat, Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat berubah status dari sebelumnya dikenal sebagai ‘ruang publik’ menjadi ‘ruang pribadi’ yang penuh dengan konsekuensi. Surat kabar daring kemudian memberitakan dampak pemagaran bagi aktivitas masyarakat (Izzuddin, 2022a, 2022c; Yudianto, 2021a, 2021b; “Mengenang 6 Kegiatan...” 2022b). Sejumlah pertanyaan retorik tajam tidak henti mewarnai pemberitaan daring *Mojok.co* di setiap artikel yang berfokus membahas konsekuensi pemagaran (seperti anggapan hilangnya ‘janji demokrasi’ dalam kutipan populer Sultan Hamengkubawana IX “Takhta untuk Rakyat” dan bagaimana praktik demokrasi dapat dilakukan masyarakat. ‘di masa lampau’ dengan *tapa pepe* dan pengumpulan masyarakat pada peristiwa ‘Pisowanan Ageng 1998’ (Yudianto, 2020)) atau pembahasan terkait isu urban lainnya yang menyertakan alun-alun (Yudianto, 2021c, 2021d, 2021e). Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak hanya diingat sebagai ruang publik yang telah direnggut menjadi ‘halaman rumah raja’ (kembali), namun juga sebagai ikon pengingat akan terjadinya perebutan makna ruang, hakikat penggunaan Dana (setidaknya di masa pandemi COVID-19), dan pengembalian relevansi retorika kedudukan mornarki.

Dimulai pada April 2022, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat memulai proyek ‘revitalisasi’ lanjutan yaitu penutupan area Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pasir. Bagi Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, pemasiran menjadi titik final dalam rangkaian revitalisasi Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat mengembalikan wajah Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi ‘seperti dulu’ (Bayu, 2022). Namun, bagi masyarakat, alun-alun dengan ‘lautan pasir’ di tahun 2022 adalah ‘wajah baru’ (Resmiyati, 2022; Saputra, 2022; “Wajah Baru...” 2022c). Meskipun pemberitaan daring di periode ini terkesan ‘merayakan’ rampungnya misi istana dalam ‘pengembalian kodrat’ Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dan terkesan pula sebagai sekadar ‘propaganda pariwisata’ yang meromantisasi situasi di periode Pra-Pemagaran (Maryamah, 2025; Ratih Apriliana,

2025; „Alun-Alun Utara...” 2025a; „Alun Alun Utara...” 2025b; „Revitalisasi Alun-Alun...” 2025e; „Perbedaan Alun-Alun...” 2025f“), terlihat jelas bahwa ‘dua wajah’ Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat selalu terpancang di benak publik, ‘dulu vs sekarang’ (Rezqiana, 2022).

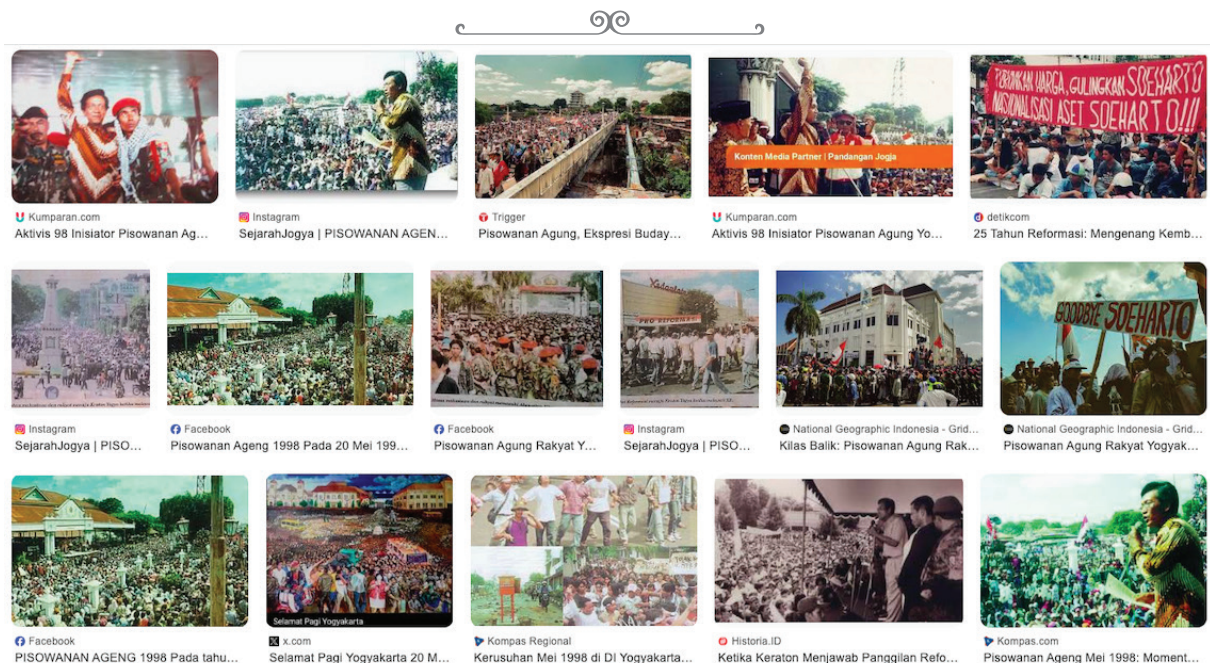
Wajah Alun-Alun Utara yang mengalami ‘pengembalian kodrat’ di ‘masa sekarang’ senantiasa terus berhadapan dengan wajah Alun-Alun Utara sebagai ruang publik di ‘masa dulu’. Sejalan dengan bertahannya Alun-Alun Utara sebagai ruang publik dalam memori kolektif masyarakat, konsekuensi atas rangkaian pemagaran-pemasiran yang terjadi juga hidup dalam wacana yang tersiar di surat kabar daring. *Mojok.co* melalui beberapa artikelnya di periode Pasca-Pemasiran (2022-2025) gencar menyulut pertanyaan retorik terkait ‘hakikat’ proyek pemagaran, konsisten merayakan memori sebagai ruang publik, konsekuensi yang dihadapi masyarakat, dan bagaimana masyarakat berupaya melakukan resiliensi pasca rangkaian proyek pemagaran-pemasiran (Effendi, 2024; Izzuddin, 2022b, 2023). Retorika yang menjadikan Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pengingat ‘ketidakberpihakan’ istana pada rakyat dimunculkan *Mojok.co* seolah hendak menegaskan bahwa Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat masih menjadi ikon pengingat bagi masyarakat yang terus-menerus mempertanyakan makna eksistensi istana bagi masyarakat.

SITUS ‘SUMBU HISTORIS’ UNESCO DAN MEMORI: ALUN-ALUN UTARA KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DALAM PERBANDINGAN

Merefleksikan debat wacana seputar pemagaran-pemasiran Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlangsung antara 2020-2022 (dan masih terus menjadi basis pembentukan memori publik baru hingga 2025), patut digarisbawahi bahwa titik pemicu sentimen kontra-pemagaran diawali dengan kepanikan terhadap hilangnya ‘ruang publik’, yang kemudian berujung kepada frustrasi masyarakat terhadap penanganan COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa titik kontra-pemagaran tersebut telah menjadi memori publik tersendiri. Patut diingat bahwa menghadapi memori publik, yang berkaitan dengan suatu ruang historis yang telah diimbuhi dengan ‘diskursus warisan yang diotorisasi’ (Smith, 2006), tidak hanya secara eksklusif dialami oleh Alun-Alun Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Selain memasukkan ‘Sumbu Kosmologis Yogyakarta’ dalam *World Heritage List* pada 2023 (WHC, 2023) (di mana Alun-Alun Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat termasuk dalam ‘sumbu kosmologis’ tersebut), UNESCO telah mencantumkan ‘sumbu bangunan sejarah’ di negara lain (yang juga menyertakan ruang di luar bangunan sebagai bagian dari kompleks bangunan sejarah) dalam *World Heritage List*, di antaranya ‘Sumbu Pusat Beijing’ (Republik Rakyat Cina) pada 2024 (yang menyertakan Lapangan Tiananmen) (WHC, 2024a) dan ‘Tepian Sungai Seine’ (Prancis) pada 1991 (yang menyertakan Taman Tuileries) (WHC, 2024b). Secara general, kedua ‘ruang di luar bangunan’ dalam ‘sumbu historis’ memiliki irisan kesamaan dan perbedaan perlakuan dengan Alun-Alun Utara, yang justru menempatkan Alun-Alun Utara dalam posisi unik. Pada inisiasi awal, sebagai ‘ruang semi tertutup’ yang masih dapat diakses masyarakat (meski dari golongan tertentu atau hanya pada kesempatan/upacara tertentu), Alun-Alun Utara lebih didominasi oleh fungsi sakral, dengan latihan militer sebagai ‘segelintir’ fungsi profan (pertahanan). Lapangan Tiananmen, meskipun juga dianggap ruang sakral dari ‘ketertutupan sepenuhnya’ dari akses publik pada periode Dinasti Ming (1368-1644) hingga Dinasti Qing (1644-

1911) (sebagaimana gagasan penempatan raja sebagai entitas tertinggi dalam struktur sosial masyarakat) (Fan, 2012; Hung, 2005), tidak memberikan celah akses partisipasi publik dalam situasi tertentu. Fungsi latihan dan parade militer, yang telah berlangsung sejak awal pendirian Alun-Alun Utara, baru dilangsungkan di Lapangan Tiananmen pada masa pemerintahan Presiden Mao Zedong (1949-1976) sebagai bagian selebrasi Hari Nasional setiap 1 Oktober (Hung, 2005). Taman Tuileries, sekalipun pada awal penginisasiannya oleh Catherine de' Medici pada abad 16 diperuntukkan untuk keperluan yang sepenuhnya profan (sarana perburuan dan taman hiburan) (Iandoli, 1883), 'ketertutupan sepenuhnya' di abad 16 sebagai perlambang hak istimewa bangsawan tidak berlangsung lama. Aktivitas yang sepenuhnya profan terus berlangsung hingga Taman Tuileries dibuka untuk publik, berturut-turut pada abad 17 dan abad 19 (Lee, 2013; Tombs, 1999).



Gambar 4. Memori 'Pisowanan Ageng 1998' yang terpublikasi luas dan dapat diakses di laman Google.

Source: Penulis.

Meskipun 'diskursus warisan yang diotorisasi' dari ketiga situs 'sumbu historis' juga menghadapi tantangan dari memori publik, terdapat perbedaan konteks perlawanan memori. Ketika 'diskursus warisan yang diotorisasi' pada Alun-Alun Utara menghadapi sentimen berbasis anggapan negatif terhadap *timing* pengwujudan 'Warisan Dunia' itu sendiri, Lapangan Tiananmen dan Taman Tuileries dapat dikatakan mengalami pertarungan memori berbasis ketidakpuasan masyarakat dikarenakan memori kolektif yang tidak terwadahi (Smith, 2006). Sebagaimana Alun-Alun Utara, baik Lapangan Tiananmen dan Taman Tuileries sempat menjadi situs 'partisipasi publik' dalam konstelasi politik nasional. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa Alun-Alun Utara terletak dalam suatu daerah yang memiliki otonomi tersendiri dalam wilayah nasional. Sultan, sebagai pemegang kuasa di wilayah berotonomi khusus, memungkinkan dirinya mengambil posisi tersendiri dalam politik nasional (Setyaningsih, 2015). Sebagai contoh, aksi massa seperti yang terjadi pada 'Pisowanan Ageng 1998' berakhir dengan Sultan Hamengkubawana X membentuk solidaritas kolektif 'memanggil Reformasi 1998' tanpa adanya perlawanan fisik, dan pada akhirnya membangun kebanggaan publik di wilayah

Yogyakarta terhadap retorika ‘Tahta untuk Rakyat’ (Setyaningsih, 2015; Yudianto, 2020). Aksi massa yang pernah terjadi di kedua situs di ‘sumbu historis’ lain, sebaliknya, memperlihatkan akhir berupa ‘peristiwa berdarah’.

Posisi kedua situs di teritori yang langsung berhubungan dengan politik nasional menjadikan akhir ‘peristiwa berdarah’ di kedua situs sebagai trauma kolektif yang tetap melekat di benak masyarakat luas, baik terhadap peristiwa pembantaian itu sendiri dan terhadap rezim yang tengah berkuasa. Peristiwa ‘Pembantaian di Lapangan Tiananmen 1989’ dan serangkaian pembantaian di Taman Tuileries di berbagai periode sejarah Prancis (Revolusi Prancis 1789, Revolusi Juli 1830, Komune Paris 1870) menimbulkan trauma kolektif berskala nasional yang justru tidak terakui (Hung, 2005; Lee, 2013; Wilson, 1978; Yu, 2008). Partai Komunis Cina membentuk narasi nasional seputar sejarah ‘efektifitas’ kuasa Partai Komunis Cina dengan menihilkan terjadinya ‘Pembantaian di Lapangan Tiananmen 1989’ (Hung, 2005), dan segala bentuk peringatan peristiwa tersebut oleh masyarakat di media sosial menjadi sasaran sensor pemerintah (Seet et al., 2024). Lahan sisa reruntuhan Istana Tuileries, yang habis dibakar massa pada peristiwa Komune Paris 1870, justru nyaris menimbulkan pelupaan masyarakat terhadap peristiwa ‘revolusi lain’ dalam sejarah Prancis (Iandoli, 1883).

Kebimbangan pemerintah nasional dalam memutuskan tindakan terhadap lahan tersebut justru ditanggapi sebagai keengganan otoritas dalam mewedahi trauma kolektif (Lee, 2013). Secara lebih jauh, sebagaimana ditekankan oleh Harrison, kedua situs di ‘sumbu historis’ justru mengajak publik untuk membangun ‘ingatan baru’ dengan melupakan ‘ingatan lama’ lewat komodifikasi ruang (Harrison, 2013). Kedua situs dianggap ‘menjual masa lalu’ (yang telah diseleksi ‘diskursus otoritas’) atau ‘menjual sesuatu di situs masa lalu’ dengan risiko hilangnya identitas publik (Macdonald, 2013). Lapangan Tiananmen menjadi sekadar objek pariwisata yang hanya dapat diakses melalui reservasi tidak berbayar (Fan, 2012), sementara Taman Tuileries berusaha menarik perhatian turis internasional lewat pembangunan kaldron Paralimpiade dan Olimpiade Musim Panas 2024 (Alouane et al., 2024).

KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT MEWADAHIR IRISAN MEMORI: NGALAP BERKAH DI TENGAH KERESAHAN REZIM NASIONAL

Tiga tahun usai proyek pemagaran-pemasiran dirampungkan, dan dua tahun setelah dimasukkan dalam *World Heritage List* (terpantau hingga 2025) (WHC, 2023), Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta mengalami nasib penggunaan yang berbeda dengan dua situs ‘ruang terbuka’ di ‘sumbu historis’ yang telah dibahas sebelumnya. Alun-Alun Utara justru benar-benar mengalami penjagaan dengan tidak difungsikan untuk aktivitas selain sebagai ‘ruang sakral’ yang ‘tertutup sepenuhnya’, namun tidak pula mengalami komodifikasi yang memenangkan kepentingan otoritas. Meskipun tidak benar-benar pula menjadi ‘ruang semi tertutup’ sebagaimana inisiasi awalnya pada masa Sultan Hamengkubawana I, pihak *kraton* tetap menggelar *hajad dalem* (*garebeg* dan *sekaten*) meski tidak melibatkan penggunaan Alun-Alun Utara sebagaimana telah dilakukan pasca revitalisasi (Wicaksono, 2023).

Patut untuk dicermati bahwa usaha Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk tetap melaksanakan ‘seremoni kenegaraan’ tidak luput memperhatikan dua hal yang pada pembahasan sebelumnya nampak dipisahkan oleh perdebatan wacana: penjagaan Alun-Alun Utara sebagai

‘ruang sakral’ dan ingatan masyarakat atas partisipasi publik. Arak-arakan *Garebeg Mulud* di 2025 (Tahun Dal 1959) tidak melintasi jalur di tengah Alun-Alun Utara setelah melalui Bangsal Pagelaran (sebagaimana yang terjadi di masa Pra-Pemagaran), melainkan melintasi jalanan sisi barat Alun-Alun Utara (Wicaksono, 2023). ‘Pembagian’ hasil bumi yang tersemat di seluruh permukaan *gunungan* yang diarak dalam *Garebeg Mulud* dilaksanakan di tiga titik yaitu halaman Masjid Gedhe Kauman, Kantor Gubernur DIY, dan Pura Pakualaman (Giri, 2025; Pangaribowo & Susanti, 2025; “Garebeg Mulud...” 2025c). Gamelan pusaka Kanjeng Kyai Gunturmadu & Kanjeng Kyai Ngagawilaga tetap dibunyikan di *pagongan* Masjid Gedhe Kauman mulai dari *miyos gangsa* (29 Agustus 2025) hingga *kondur gangsa* (4 September 2025) (“Miyos Gangsa...” 2025d). ‘Pasar malam’ yang yang senantiasa digelar bersamaan dengan *sekaten* tetap dilangsungkan dengan mengalami *rebranding* menjadi ‘Pesta Rakyat Istimewa’ dan dipindahkan ke Stadion Mandala Krida (Lantiva, 2025).

Di tengah sentimen masyarakat yang masih tetap hidup atas proyek pemagaran-pemasiran Alun-Alun Utara, *hajad dalem* yang digelar Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat tetap disambut antusiasme publik, seolah masih menandai kepercayaan masyarakat yang sesungguhnya masih utuh terhadap sultan (Woodward, 1991). Observasi penulis di situs penyelenggaraan *sekaten* dan *garebeg* pada 2025 menemukan gelombang masyarakat yang berdatangan tidak hanya dari wilayah D.I. Yogyakarta, namun juga dari provinsi di luar D.I. Yogyakarta. “*Ngalap berkah*” (‘mencari berkah’) merupakan jawaban umum dari pertanyaan seputar motivasi orang-orang yang memadati gerbang, pelataran, dan tangga *pagongan* Masjid Gedhe Kauman. Sebagaimana penyelenggara *kondur gangsa* di tahun-tahun sebelumnya, masyarakat dari berbagai lapisan saling berdesakan menanti kehadiran *ngarsa dalem*, saling berebut posisi seraya mengulurkan tangan tatkala Sultan Hamengkubawana X menapaki tangga *pagongan*, dan melempar *udhik-udhik* di dalam *pagongan* serta pelataran Masjid Gedhe Kauman. Antusiasme yang serupa (dan justru lebih riuh) tetap bertahan pada keesokan harinya, ketika ‘pembagian hasil bumi’ lewat *gunungan* yang diletakkan di Masjid Gedhe Kauman diselenggarakan setelah arak-arak *garebeg* selesai.

Terlepas dari sentimen negatif yang datang dari publik, terutama pada masa proyek pemagaran-pemasiran Alun-Alun Utara di mana masyarakat mempertanyakan penggunaan Dana Keistimewaan di masa pandemi Covid-19 dan secara sinis mengulang retorika ‘Tahta untuk Rakyat’ di berbagai kesempatan, tidak dapat dipungkiri bahwa kepercayaan terhadap makna *kraton* di tengah kehidupan sehari-hari (disinyalir) masih bertahan. Namun, alih-alih sebagai tanda ‘menyerah’-nya masyarakat terhadap diskursus dibalik proyek pemagaran-pemasiran, antusiasme masyarakat terhadap kehadiran *ngarsa dalem* dapat dimaknai sebagai harapan publik di tengah situasi rezim nasional yang tidak menentu, atau yang disebut Byerne (2014) sebagai *revivalisme ‘agama populer’*.



Gambar 5. Pembingkai media terhadap situasi di mana Sri Sultan Hamengkubawana X mendatangi Gedung Polda DIY pada 29 Agustus 2025 untuk menemui massa yang melakukan ‘aksi solidaritas’ terhadap tragedi kematian Affan Kurniawan.

Source: Brilio Video Indonesia.

Patut diingat bahwa berlangsungnya prosesi *Garebeg Mulud* di 2025 berkelindan dengan serangkaian demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus di hadapan Gedung MPR-DPR di Senayan, Jakarta Selatan, di mana eskalasi protes memuncak setelah suatu kendaraan taktis (‘rantis’) menghantam sopir *ojek online* (‘ojol’) berusia 21 tahun bernama Affan Kurniawan pada malam hari di 28 Agustus 2025. Prosesi *miyos gāngsā*, sebagai titik permulaan prosesi *Garebeg Mulud* pada malam hari di 29 Agustus 2025, bertepatan dengan ‘aksi solidaritas’ massa di depan Gedung Polda DIY di Ring Road Utara. ‘Aksi damai’ publik di Yogyakarta demi merespon situasi politik nasional digelar pada 1 September 2025 – empat hari sebelum prosesi *kondur gāngsā*. Kecemasan masyarakat, termasuk warga D.I. Yogyakarta, akan situasi politik nasional yang penuh ketidakpastian, dapat dikatakan menjadi basis masyarakat untuk melupakan sentimen negatif terhadap ‘tahta’ dan mulai menggantungkan ‘harapan akan kedamaian’ pada *ngarsā dalem*. *Hajad dalem* yang berlangsung pada Agustus-September 2025 dan antusiasme publik dapat dilihat tidak lagi hanya sebagai sarana ‘panggung otoritas’ memperlihatkan kewibawaan (Hughes-Freeland, 1991), ataupun usaha masyarakat kembali pada ‘akar kepercayaan’ di tengah kosmopolitanisme (Schlehe, 2019). Secara lebih jauh, dalam konteks rezim nasional yang tidak menentu dan menemukan momentum eskalasi pada Agustus-September 2025, kebangkitan kepercayaan terhadap *ngarsā dalem* adalah (indikasi) kebangkitan keyakinan terhadap ‘kuasa kosmologis’. Di tengah keresahan dunia materil (rezim nasional) yang menimbulkan kecemasan

dan ketidaktentuan nasib, 'kuasa kosmologis' menjadi sasaran tumpuan harapan publik (Byrne, 2014).

MENGATASI MEMORI KOLEKTIF YANG 'TERLANJUR' HIDUP VERSI PUBLIK: INDIKASI KEBERADAAN RUANG ALTERNATIF

Dalam suatu artikel yang diterbitkan *Mojok.co* (yang memperlihatkan citra sebagai media progresif selama berlangsungnya 'proyek revitalisasi' Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat), terdapat wacana perlunya 'ruang publik baru' demi mengakomodir memori atas ruang publik, sebagaimana digulirkan dalam testimoni sosiolog Universitas Gadjah Mada, A.B. Widyanta, "*Ketika alun-alun juga hendak diposisikan sebagai ruang sakral yang tidak lagi untuk publik, tentu harus ada penggantinya, itu yang perlu dijawab*" (Izzuddin, 2022b). Meskipun demikian, wacana tersebut memerlukan pemikiran lebih lanjut mengingat situasi kota yang 'padat pemukiman' (Izzuddin, 2022b). Terlepas apakah pemerintah D.I. Yogyakarta dan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat benar-benar memikirkan wacana 'pengganti alun-alun' atau tidak, memori kolektif yang menempatkan Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam benak publik akan (selalu) terus hidup. Sebagai situs yang terlanjur diingat sebagai 'ruang publik' dan bukan sebagai 'ruang semi tertutup', suatu situs dapat memiliki biografi tersendiri yang dibangun atas narasi kolektif (Edensor, 2002). Menarik untuk diperhatikan bahwa narasi kolektif terkait Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, dalam hal ini makna 'partisipasi publik', mengambil alih agensi masyarakat pasca proyek pemagaran-pemasiran. Makna 'partisipasi publik' yang telah hidup telah mendorong publik untuk memposisikan ruang urban lain (yang telah eksis) sebagai 'ruang publik' alternatif.

Masih bersamaan dengan periode terselenggaranya *Garebeg Mulud* – tepatnya pada 31 Agustus 2025 – rapat teknis lapangan ('teklap') demi menggelar 'aksi damai' (sebagai pernyataan solidaritas atas kematian pengemudi *ojek online* ('ojol') Affan Kurniawan di suatu pembubaran demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025) membuahkan tiga kemungkinan lokasi. Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (yang dalam notulensi rapat 'teklap' disebut sebagai 'Altar') merupakan salah satu opsi yang dipilih, dengan mempertimbangkan titik lokasi 'Altar' sebagai wilayah strategis di jantung kota, titik evakuasi massa yang lebih beragam, dan aksesibilitas terjangkau pada Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang memungkinkan kemudahan dalam meraih dukungan Sultan Hamengkubawana X untuk massa aksi. Meskipun pada akhirnya titik lokasi aksi damai pada 1 September 2025 yang disepakati adalah Bundaran UGM (Universitas Gadjah Mada), 'teklap' pada 31 Agustus 2025 tetap menyepakati karakteristik aksi damai yang telah digagas sejak awal berlangsungnya 'teklap', yaitu massa aksi yang "duduk aja di sana" dan "dilakukan terus menerus hingga Sultan membersamai kita (massa aksi)."



Gambar 7. Aksi *tapa pepe* pada 2019 yang dilakukan 5 PKL yang berjualan di sekitar Jl. Brigjend Katamso.
Source: ANTARA News.

Contoh seperti pemilihan ‘Altar’¹ sebagai salah satu opsi penyelenggaraan ‘aksi damai’ sebagai respon terhadap situasi rezim politik yang tengah berlangsung, serta pemilihan taktik ‘duduk menanti keberpihakan *ngarsâ dalem*’ sebagai bentuk ‘aksi damai’, menyeret ingatan terhadap aksi *tapa pepe*, yang pada masa lampau dapat digelar masyarakat di Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, serta peristiwa ‘Pisowanan Ageng 1998’. Perlu diingat, ketika rapat ‘teklap’ berlangsung pada 31 Agustus 2025, dan ‘aksi damai’ benar-benar digelar

1 Tanpa mengurangi rasa hormat penulis dan demi kemudahan penyebutan obyek kajian, penulis memohon izin untuk memakai istilah ‘Altar’ untuk merujuk pada Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat pada beberapa paragraf berikutnya. Pemakaian istilah tersebut juga sebagai upaya penulis dalam mengabadikan ‘bahasa populer’ yang berkembang di masyarakat (atau, setidaknya, dipakai selama rapat ‘teklap’ 31 Agustus 2025 berlangsung), yang secara tidak langsung berkaitan dengan memori kolektif masyarakat – inti dari ‘pembahasan’ artikel ini.

pada 1 September 2025 di Bundaran UGM², tiga tahun telah berlalu sejak Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat mengalami revitalisasi. Irisan ‘biografi’ Alun-Alun Utara (salah satunya sebagai situs pembobolan masyarakat terhadap ‘penjagaan keamanan nasional’ di periode menjelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto), tidak dapat dipungkiri, tetap bertahan. Namun, alih-alih tertinggal dalam sentimentalitas masa lampau, masyarakat bergerak mencari ‘ruang alternatif’, tidak hanya dalam konteks partisipasi aktif dalam politik nasional, namun juga konteks kehidupan sehari-hari³.

Pembahasan analisis diskursus pada surat kabar daring terkait pemberitaan Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam rentang 2015-2025 menyiratkan gagasan bahwa upaya pembentukan ‘memori baru’ Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak serta menghapus ‘memori lama’ yang terpatrit di benak masyarakat. Meskipun Alun-Alun Utara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat secara fisik mendapatkan ‘wajah baru’, ‘wajah lama’ sebagai warisan masa pemerintahan Sultan Hamengkubawana IX terbukti masih dipertahankan oleh masyarakat. Berbagai sentimen yang kemudian timbul dari proyek pemagaran-pemasiran terhadap kuasa *kraton* (betapapun sarkastik sifatnya), tidak pula menyurutkan dua hal penting yang telah terjadi, setidaknya hingga tahun 2025: (1) menebalnya kepercayaan publik terhadap *ngarsa dalem*, terutama pada konteks di mana rezim nasional tidak dapat diharapkan lagi oleh publik, dan (2) agensi publik untuk tetap memelihara ingatan atas ‘ruang publik’ yang pernah hidup di ‘Altar’, sekaligus membangun ‘ruang alternatif’.

-
- 2 Beberapa minggu berselang usai aksi damai pada 1 September 2025, Bundaran UGM kembali menjadi situs aksi bagi organisasi “Kenduri Suara Ibu Yogyakarta” pada 26 September dan 3 Oktober 2025 – kali ini memprotes program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan menyebabkan keracunan massal (lihat artikel *Tempo* pada 26 September 2025, “Tuntut Pemerintah Hentikan Program MBG, Suara Ibu Indonesia Pukul Panci”). Pada hari yang sama, Sultan Hamengkubawana X menghadiri acara “Launching Gerakan Pangan Murah” di Kantor DKP DIY, Yogyakarta, dan merespon pula keracunan massal yang terjadi disebabkan hidangan MBG yang terindikasi basi ketika didistribusikan kepada penerima. Rekaman testimoni sultan kemudian tersebar luas di media sosial, terutama Instagram, dan menangguk sentimen positif dari masyarakat, menandai kesan keberpihakan *kraton* terhadap masyarakat.
 - 3 Sedikit yang tersisa dari para pedagang yang membuka lapak dan masih mempertahankan lapaknya di (sekitar) Alun-Alun Utara. Meskipun mayoritas beranggapan bahwa proyek revitalisasi tidak lagi membuat Alun-Alun Utara “seramai dulu” (sebagaimana testimoni seorang pemilik warung di sebelah Masjid Gedhe Kauman), keluhan tersebut seringkali ditutupi dengan kesadaran bahwa Yogyakarta senantiasa menjadi situs pariwisata populer, dan jaminan “tetap ada yang beli/mampir” tetap ada dengan pengunjung yang tetap berdatangan (“tahun baru kemarin ya ada saja yang datang,” ujar seorang tukang becak). Banyak pedagang yang kini mencari ‘lapak alternatif’ dengan berpindah ke area lain, seperti Alun-Alun Selatan (“tapi tidak tahu ya kalau dipagari juga, wah!”) di mana dipercaya oleh para pedagang / pelaku usaha kaki lima lainnya sebagai sasaran masyarakat ‘langganan’ Alun-Alun Utara sebelum revitalisasi, atau berpindah ke daerah Utara (tepatnya daerah sekitar UGM dan UNY) yang menjadi lingkungan kampus dan tidak pernah sepi oleh mahasiswa. Tukang becak memiliki isu tersendiri dikarenakan popularitas mereka tersaingi oleh keberadaan ‘ojek online’. Dalam reportase *Mojok.co* pada 12-16 Juni 2024, dilaporkan pula adanya rekam jeak aktivitas prostitusi dalam tenda atau lapak-lapak pedagang, yang dikenal sebagai ‘prostitusi korek api’, di mana kini sudah ditertibkan dan banyak di antara para penjajanya berpindah (kembali) ke Sarkem. Secara lebih lanjut, dalam pengamatan penulis pada penghujung 2025 dan awal 2026, masyarakat penjaja dagangan/jasa Alun-Alun Utara memiliki resiliensi tersendiri: mencari ‘lapak alternatif’ merupakan tindakan yang paling sering diambil. Meskipun (tiga tahun berselang sejak 2022) para penjaja barang/jasa mengakui bahwa pendapatan mereka tidak berubah atau justru meningkat seiring dengan gelombang kedatangan turis, perbedaan pendapatan yang benar-benar terperinci terkait situasi sebelum dan sesudah revitalisasi dapat dikaji lebih jauh untuk menentukan apakah hasil resiliensi para pelaku usaha pasca revitalisasi benar-benar sesuai dengan yang diharapkan para pelaku usaha.

KESIMPULAN

Bahasan tentang Alun Alun Utara pasca renovasi akan selalu memanggil memori kolektif masyarakat sekitarnya. Membaca kembali bangkitnya keutuhan kepercayaan masyarakat D.I. Yogyakarta terhadap *ngarsa dalem* dan kuasa publik dalam mencari ‘ruang alternatif’ tanpa melupakan memori kolektif, penulis menemukan gagasan Rodney Harrison tentang ‘warisan dialogis’ (*dialogical heritage*) dapat menjadi refleksi bermakna demi menutup tulisan ini. “*Model warisan dialogis*,” sebagaimana diungkapkan Harrison, “*tidak hanya relevan dalam membantu kita memahami gesekan antara ‘Warisan Dunia’ (World Heritage) dan tradisi lokal tertentu di mana keduanya dapat berkonflik, tetapi juga membantu kita menghubungkan warisan budaya dengan isu yang lebih luas terkait lingkungan, politik, dan sosial*” (Harrison, 2013).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Dr. Hélène Njoto Feillard (selaku *reviewer*) dan Prof. Dr. Drs. R.M. Pramutomo, M. Hum. (selaku editor) yang telah memberikan catatan revisi, rekomendasi bahan penulisan, dan sumbangan pemikiran terhadap tulisan ini, terutama pada fase 2nd/final Writing Workshop pada 14 Februari 2025. Penulis juga menghaturkan terima kasih pada segenap masyarakat (dari/luar D.I. Yogyakarta) yang telah bersedia menjadi informan penulis selama proses penulisan kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A., S. D. (2003). *Prinsip Perancangan Alun-Alun Kota Yogyakarta*. Institut Teknologi Bandung.
- Adham, Affan Safani. (2020, June 6). Riwayat Panjang dan Makna Filosofis Alun-alun Utara Yogyakarta Alun-alun Utara. *Telisik.Id*. <https://telisik.id/news/riwayat-panjang-dan-makna-filosofis-alun-alun-utara-yogyakarta>
- Adham, Azam Sauki. (2020, June 7). Kembalikan Keaslian, Alun-alun Utara Yogyakarta Dipasang Pagar. *Portal Jogja*. <https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/yogyaistimewa/pr-25396853/kembalikan-keaslian-alun-alun-utara-yogyakarta-dipasang-pagar>
- Alouane, R., Luiz, P., Oliveira, S. De, Doria, C., Ervine, J., Gillett, R. A., Graham-goering, E., Levett, G., Lewis, R. W., Smith, A. W. M., Wardhaugh, J., Eldridge, C., & Smith, A. W. M. (2024). Roundtable : Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. *French History*, 38(January), 478–506.
- Alun-alun Utara Yogyakarta Akan Dipasang Pagar Besi dengan Motif Pancak Suji. (2020a, June 8). *KumparanNEWS*. <https://kumparan.com/kumparannews/alun-alun-utara-yogyakarta-akan-dipasang-pagar-besi-dengan-motif-pancak-suji-1tZY73637Xr>
- Alun Alun Utara Yogyakarta Populer Karena Sejarah Budaya Sosial. (2025b). Skedupark.Id.
- Alun-Alun Utara Yogyakarta Sejarah, Budaya, dan Pesona yang Memukau. (2025a). Skedupark.Id.
- Aramita, A., & Karyadi, Y. (2018). Transformasi Unsur Fisik Pembentuk Sumbu di dalam Alun-Alun Terhadap Kompleks Pemerintah di Jawa. *Jurnal RUAS*, 16(1), 46–57.

- Arsyad, G., & Sarwadi, A. (2019). RUANG TERBUKA PUBLIK DI KOMPLEK ALUN-ALUN UTARA. *Arcade - Jurnal Arsitektur*, 3(3), 179–187.
- Basundoro, P. (1960). The Two alun-alun of Malang (1930 – 1960). In F. Colombijn & J. Côté (Eds.), *Cars, Conduits, and Kampongs: The Modernization of the Indonesian City, 1920-1960*. <https://doi.org/10.1163/9789004280724>
- Bayu. (2022, April 14). Alun-Alun Utara Jogja Mulai Direvitalisasi Agar Seperti Dulu. *StarjogjaFM*. <https://radiostar.harianjogja.com/2022/04/14/alun-alun-utara-jogja-mulai-direvitalisasi-agar-seperti-dulu/>
- Behrend, T. E. (2018). Kraton and Cosmos in Traditional Java. *Archipel*, 37(II), 173–187.
- Budi, R. S. (2018, March 2). Alun-alun Utara Yogyakarta Ruang Publik Untuk Lebih Dekat Dengan Rakyat. *Sobat Jogja*. <https://www.sobatjogja.com/alun-alun-utara-yogyakarta/>
- Budiman, A., Sulistyantara, B., & Zain, A. F. (2014). DETEKSI PERUBAHAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA 5 KOTA BESAR DI PULAU JAWA (Studi kasus : DKI JAKARTA , KOTA BANDUNG , KOTA SEMARANG , KOTA JOGJAKARTA , DAN KOTA SURABAYA). *Jurnal Lanskap Indonesia*, 6(1), 7–15.
- Budiman, M., & Kusno, A. (2015). Introduction: Collective Memory, Marginality, and Spatial Politics in Urban Indonesia. In M. Budiman & A. Kusno (Eds.), *Collective Memory, Marginality, and Spatial Politics in Urban Indonesia* (1st ed.). Palgrave Macmillan.
- Byrne, D. (2014). *Counterheritage: Critical Perspectives on Heritage* (1st ed.). Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage.
- Danar. (2020, June 8). Alun-Alun Utara Bakal Dipagari , Ternyata Ini Alasannya. *Kr Jogja*. <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242518044/alunalun-utara-bakal-dipagari-ternyata-ini-alasannya>
- Edensor, T. (2002). *National Identity, Popular Culture and Everyday Life* (1st ed.). Berg.
- Effendi, A. (2024, June 12). Menelusuri Jejak Prostitusi di Alun-Alun Utara, Tandingan Sarkem yang Berlokasi di Dekat Kraton Jogja. *Mojok.Co*. https://mojok.co/liputan/ragam/jejak-prostitusi-di-alun-alun-utara-dekat-kraton-jogja/?utm_source=mojok_widget&utm_medium=aggregator
- Fan, Z. (2012). The Axis of Ancient BeiJing that Declared the World Cultural Heritage and the Tourism of BeiJing. *International Forum on Urbanism. Conference*, 100, 1–9.
- Feh. (2021, July 6). Alun-alun Yogya Dipagar , Warganet : Raja Tak Butuh Rakyat ? *Publicanews*. <https://www.publica-news.com/berita/daerah/2021/07/06/44646/alunalun-yogya-dipagar-warganet-raja-tak-butuh-rakyat.html>
- Garebeg Mulud Dal 1959, Keraton Yogyakarta Dorong Semangat Revitalisasi Budaya. (2025c). Karaton Ngayogyakarta Hadinngrat. <https://www.kratonjogja.id/peristiwa/1431-garebeg-mulud-dal-1959-keraton-yogyakarta-dorong-semangat-revitalisasi-budaya/>

- Giri, H. (2025). *Garebeg Maulud 2025 Istimewa, Bertepatan Dengan Tahun Dal*. TVRI Yogyakarta News. <https://tvriyogyakartanews.com/2025/09/06/garebeg-maulud-2025-istimewa-bertepatan-dengan-tahun-dal/>
- Haq, S. A. (2023). Analisis Yang Sakral Sumbu Filosofis Yogyakarta Dalam Pemikiran Mircea Eliade. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 8(2).
- Harrison, R. (2013). *Heritage: Critical Approaches* (1st ed.). Routledge.
- Hidayat, A., & Widriyakara, Y. A. (2018). POSTCOLONIAL STUDY ON ALUN-ALUN AREA IN PROBOLINGGO CITY. *INTERNATIONAL PROCEEDINGS LOCAL GENIUSES GENERATE FUTURE DESIGN*, 65–76.
- Hidayat, W. (2020, July 7). Rp 2,3 Miliar untuk Pemagaran Alun-Alun Utara Yogyakarta. *Republika*. <https://visual.republika.co.id/berita/qd3dmi283/rp-23-miliar-untuk-pemagaran-alunalun-utara-yogyakarta>
- Hughes-Freeland, F. (1991). A Throne for the People: Observations on the Jumenengen of Sultan Hamengku Buwono X. *Indonesia*, 51(51), 129–152.
- Hung, W. (2005). *Remaking Beijing: Tiananmen Square and the Creation of a Political Space* (1st ed.). Reaktion Books.
- Iandoli, L. J. (1883). The image of the Tuileries Palace in the French press and memoirs , 1871 – 1883. *Journal of European Studies*, 37(2), 139–157.
- Ibrahim, J. (2024). Kriminalitas, Hegemoni, dan Politik: Baru, Premanisme di Yogyakarta Pada Masa Orde. *Jurnal Kawistara*, 14(1), 18–37.
- Izzuddin, H. (2022a, July 20). Penampakan Terkini Alun-alun Utara Jogja Setelah Jadi Lautan Pasir. *Mojok.Co*. <https://mojok.co/kilas/penampakan-terkini-alun-alun-utara-jogja-setelah-menjadi-lautan-pasir/>
- Izzuddin, H. (2022b, July 25). Alun-alun Utara Keraton Jogja yang Kembali Sakral dan Supardi yang Tak Lagi Bisa Jualan. *Mojok.Co*. <https://mojok.co/liputan/geliatwarga/alun-alun-utara-keraton-jogja-yang-kembali-sakral-dan-supardi-yang-tak-lagi-bisa-jualan/>
- Izzuddin, H. (2022c, November 5). Kenangan Warga di Alun-Alun Utara Jogja , Hal-hal Indah yang Tak Bisa Terulang Kembali. *Mojok*. <https://mojok.co/liputan/geliatwarga/kenangan-warga-di-alun-alun-utara-jogja-hal-hal-indah-yang-tak-bisa-terulang-kembali/>
- Izzuddin, H. (2023, September 21). Alun-alun Utara vs Alun-alun Selatan , Warga Jogja Ungkap Mana yang Lebih Berkesan Sebelum Perubahan Terjadi. *Mojok*.
- Kembali seperti Jaman Dulu , Alun-alun Utara Dikelilingi Pagar*. (2020b, June 9). *Jogya.Com*. <https://jogya.com/kembali-seperti-jaman-dulu-alun-alun-utara-dikelilingi-pagar/>
- Khalika, N. (2019, August 24). Tak Sekadar Ruang Terbuka, Ini Fungsi Alun-alun Utara Kraton Jogja. *IDN Times Jogja*. <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/nindias-khalika/tak-sekadar-ruang-terbuka-ini-fungsi-alun-alun-utara-kraton-jogja?page=all>
- Kitch, C. (2005) *Pages from the Past: History and Memory in American Magazines*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

- Lantiva, M. C. (2025, April 15). Pesta Rakyat Istimewa 2025 di Mandala Krida Ramaikan Yogyakarta 11 April hingga 27 April 2025. *Radar Jogja*. <https://radarjogja.jawapos.com/event/2504150061/pesta-rakyat-istimewa-2025-di-mandala-krida-ramaikan-yogyakarta-11-april-hingga-27-april-2025>
- Lee, D. (2013). Paris Commune of 1871 Sites of Memory : The Destruction of Public Buildings During the Paris Commune of 1871. *Journal of Undergraduate Research*, 2013(1).
- Macdonald, S. (2013). *Memorylands: Heritage and Identity in Europe Today* (1st ed.). Routledge.
- Maryamah, L. F. (2025, May 22). Sejarah Alun-alun Utara Jogja , Alami Pergeseran Fungsi. *IDN Times Jogja*. <https://jogja.idntimes.com/travel/destination/alun-alun-utara-jogja-c1c2-01-d37wh-vm7vly>
- Mengenang 6 Kegiatan Seru yang Pernah Ada di Alun-Alun Utara Jogja, Masih Ingat? (2022b, June 18). *JPNN.Com*, 6. <https://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/3401/mengenang-6-kegiatan-seru-yang-pernah-ada-di-alun-alun-utara-jogja-masih-ingat>
- Minanto, A. (2018). Kota, Ruang, dan Politik Keseharian: Produksi dan Konsumsi Ruang Bersenang-senang dalam Geliat Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 41–56.
- Miqdad, A., Rahmah, A., & Jani, M. (2025). Pola Aktivitas Pengunjung Sektor Informal pada Ruang Publik pasca Revitalisasi Alun-Alun Utara Kota Surakarta. *Uniplan: Journal of Urban and Regional Planning*, 6(1), 15–25.
- Miyos Gangsa Dal 1959: Tradisi Udhik-Udhik, Simbol Berkah dan Doa Raja bagi Kawula. (2025d). Karaton Ngayogyakarta Hadinngrat. <https://www.kratonjogja.id/peristiwa/1425-miyos-gangsa-dal-1959-tradisi-udhik-udhik-simbol-berkah-dan-doa-raja-bagi-kawula/>
- Muhamad, M., & Faradisa, S. R. N. (2021). Study of city public open space elements as an urban tourism (case study of public open space in Yogyakarta City). *3rd International Seminar on Livable Space*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/780/1/012028>
- Mulai Direvitalisasi, Fasad Alun-alun Utara Jogja Dikembalikan Seperti Zaman Dahulu. (2022, April 14). *Jogya.com*. <https://jogya.com/fasad-alun-alun-utara-jogja-dikembalikan-seperti-zaman-dahulu/>
- Muryani, L. (2015, January 27). Alun-Alun Utara Jogja , Antara Simbol dan Tanda Perubahan Jaman. *Kanaljogja.Id*. <https://kanaljogja.id/alun-alun-utara-jogja/>
- Mustaqim, A. (2020, July 17). Warga Harus Izin Keraton Yogyakarta untuk Akses Alun-alun. *Medcom.Id*.
- Muttakin, I. (2020, July 5). Kejar Pengakuan UNESCO , Pemagaran Keliling Alun-Alun Yogyakarta Capai 70 Persen. *Jatimtimes*. <https://jatimtimes.com/baca/217985/20200705/073000/kejar-pengakuan-unesco-pemagaran-keliling-alun-alun-yogyakarta-capai-70-persen>
- Nugroho, W. S. (2019, December 14). TRIBUN WIKI: Menelisik Sejarah dan Filosofi yang Ada di Alun-Alun Utara Yogyakarta. *Tribunjogja.Com*. <https://jogja.tribunnews.com/2019/12/14/tribun-wiki-menelisik-sejarah-dan-filosofi-yang-ada-di-alun-alun-utara-yogyakarta>
- Nur, E., & Rohmah, L. (n.d.). PENGELOLAAN RUANG PUBLIK (STUDI KASUS PEMBANGUNAN ALUN-ALUN LAMONGAN). *Humanis*, 14(1).

- Pangaribowo, W. S., & Susanti, R. (2025, September 5). Keraton Yogyakarta Gelar Grebeg Maulud, Gunung Brama Keluar 8 Tahun Sekali. *Kompas.Com*. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2025/09/05/134540178/keraton-yogyakarta-gelar-grebeg-maulud-gunung-brama-keluar-8-tahun?page=all>
- Pemuliaan Kawasan Keraton Yogyakarta, Pasir di Alun-alun Utara Diganti. (2022, April 15). *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hiburan/pemuliaan-kawasan-keraton-yogyakarta-pasir-di-alun-alun-utara-diganti-369788>
- Perbedaan Alun-Alun Utara dan Selatan Jogja Lebih dari Sekadar Ruang Terbuka. (2025f, June 10). *Skedupark.Id*.
- Pigeaud, T. (2003). The northern palace square in Yogyakarta. In *THE KRATON: Selected essays on Javanese courts* (1st ed., pp. 1–12). KITLV Press.
- Porter, T. (2004). *Archispeak: An illustrated guide to architectural terms* (1st ed.). Spon Press.
- Putra, A. D., Azwir, M., Octaviany, V., & Nilamsuci, R. (2015). Kajian Transformasi Bentuk dan Fungsi Alun-alun Bandung Sebagai Ruang Terbuka Publik. *Reka Karsa*, 3(3), 1–13.
- Ratih Apriliana. (2025). *Alun-alun Utara Napak Tilas Yogya Tempo Dulu*. TravelsPromo.
- Resmiyati. (2022). *Latar Belakang Alun-Alun Utara dengan Wajah Barunya*. Mijil.Id. <https://mijil.id/t/latar-belakang-alun-alun-utara-dengan-wajah-barunya/5730>
- Rezqiana, A. N. (2022, July 13). Dulu vs Sekarang , Inilah Wajah Terbaru Alun-alun Utara Yogyakarta dan Filosofinya. *Tribun News*. <https://jogja.tribunnews.com/2022/07/13/dulu-vs-sekarang-inilah-wajah-terbaru-alun-alun-utara-yogyakarta-dan-filosofinya>
- Revitalisasi Alun-Alun Utara Kembalikan Nilai Historis dan Filosofis Kawasan Kraton. (2025e). *Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta*.
- Rijpkema, S. (2021). Composing the East : Depictions of the Yogyakarta Court in the 18th Century. *International Conference on Art, Design, Education and Cultural Studies (ICADECS)*, 2021, 1–8. <https://doi.org/10.18502/kss.v5i6.9171>
- Ris/Cak. (2020, June 8). Alun-Alun Utara Keraton Yogya Bakal Dipagar Keliling. *Warta Jogja*. <https://www.wartajogja.id/2020/06/alun-alun-utara-keraton-yogya-bakal.html>
- Rukayah, R. S., & Bharoto. (2012). Bazaar in Urban Open Space as Contain and Container Case study : A lun-alun Lama and Simpang Lima Semarang , Central Java , Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 50(July), 741–755. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.077>
- Sabandar, S. (2020, June 10). Pembangunan Pagar Mengelilingi Alun-Alun Utara Yogyakarta, untuk Apa? *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/regional/read/4274589/pembangunan-pagar-mengelilingi-alun-alun-utara-yogyakarta-untuk-apa>
- Sadana, A. S., & Dharmaraty, A. (2024). Pemahaman Masyarakat Terhadap Transformasi Nilai-nilai Filosofis Dalam Tata Ruang Kota Yogyakarta. *Semrestek 2023, February*.
- Samsa, A., & Anggara, V. (n.d.). *RELASI KUASA ORGANISASI KEMASYARAKATAN ISLAM DAN PENGUASA (Studi Kasus Praktik Shadow State Gerakan Pemuda Ka ' bah Khittah Yogyakarta dalam Pengelolaan Alun-Alun Utara)*. 53–67.

- Saputra, A. H. (2022, July 28). Alun-alun Utara Yogyakarta Punya Wajah Baru. *Rembuk*.
- Sarasmita, A. (2019). (Co)Production of Urban Public Space : Contested Informality in an Indonesian. *Traditional Dwellings and Settlements Review*, 30(2), 47–60.
- Schlehe, J. (2019). Cosmopolitanism , Pluralism and Self-Orientalisation in the Modern Mystical World of Java. *Asian Journal of Social Science*, 47(3), 364–386. <https://doi.org/10.1163/15685314-04703005>
- Seet, S., C., E., & Jr., T. (2024). Re-meme-bering Tiananmen ? From collective memory to meta-memory on TikTok. *Media, Culture, & Society*, 46(2), 272–291. <https://doi.org/10.1177/01634437231191413>
- Smith, L. (2006). *Uses of Heritage* (1st ed.). Routledge.
- Subarkah, L. (2020a, June 8). Alun-Alun Utara Kini Dipagari. *Harian Jogja*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/06/08/510/1041276/alun-alun-utara-kini-dipagari>
- Subarkah, L. (2020b, June 28). Pembangunan Pagar Alun-Alun Utara Senilai Rp2,3 Miliar di Tengah Pandemi Dinilai Tidak Tepat. *Harian Jogja*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/06/28/510/1043024/pembangunan-pagar-alun-alun-utara-senilai-rp23-miliar-di-tengah-pandemi-dinilai-tidak-tepat>
- Suparwoko, Raharjo, W., & Saifudin, A. (2020). Islamic Values of The Northern Town Square of the Yogyakarta Sultanate. *TATA LOKA*, 20(2), 271–286.
- Suryo, D. (2004). Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta. *The 1st International Conference on Urban History*, 1–12.
- Syاهدani, M., & Kardanardi, L. (2022). Yogyakarta ' s Philosophical Axis : A Dynamic Interplay Among UNESCO ' s Selection Criteria. *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 5(2), 151–162. <https://doi.org/10.22146/ikat.v5i2.73326>
- Tohar, I., Hardiman, G., & Sari, S. R. (2019). Traces of Transcendental Space as Components to Preserve Yogyakarta Palace's Meaning. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 10(03), 1461–1470.
- Tombs, R. (1999). *The Paris Commune 1871* (1st ed.). Longman.
- Van Dijk, T. A. (2013). *News as discourse*. Routledge.
- Viral Cuitan Putri Keraton Jogja soal Penanganan COVID-19 dan Alun-alun Dipagari. (2021, July 6). *Kumparan*. <https://kumparan.com/tugujogja/viral-cuitan-putri-keraton-jogja-soal-penanganan-covid-19-dan-alun-alun-dipagari-1w4lyINsTLH>
- Viral Alun-alun Utara Yogya Dijual Virtual, Pemda Siapkan Opsi Hukum. (2022a, January 5). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220105205622-12-743097/viral-alun-alun-utara-yogya-dijual-virtual-pemda-siapkan-opsi-hukum>
- Wajah Baru Alun-Alun Utara, Sejarah dan Filosofinya. (2022c, August 14). *Jogja Keren*. <https://jogjakeren.com/wajah-baru-alun-alun-utara-sejarah-dan-filosofinya/>
- Wardani, L. K. (2012). Pengaruh Pandangan Sosio-Kultural Sultan Hamengkubuwana IX terhadap Eksistensi Keraton Yogyakarta. *Jurnal Masyarakat Dan Kebudayaan Politik*, 25(1), 56–63.

- WHC. (2023). *The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks*. World Heritage List. <https://whc.unesco.org/en/list/1671/>
- WHC. (2024a). *Beijing Central Axis: A Building Ensemble Exhibiting the Ideal Order of the Chinese Capital*. World Heritage List. <https://whc.unesco.org/en/list/1714/>
- WHC. (2024b). *Paris, Banks of The Seine*. World Heritage List. <https://whc.unesco.org/en/list/600/>
- Wicaksono, P. (2023, April 19). Grebeg Syawal Keraton Yogyakarta Sabtu Ini Tak Lewat Alun Alun Utara, Ini 5 Gunung yang Diarak. *Tempo.Co*. <https://www.tempo.co/hiburan/grebeg-syawal-keraton-yogyakarta-sabtu-ini-tak-lewat-alun-alun-utara-ini-5-gunung-yang-diarak-196161>
- Widiyartono, R. (2020, October 4). Pagar Besi Alun-alun Utara Jogja Ditarget Rampung Akhir Juli. *SuaraBaru.Id*. <https://suarabaru.id/2020/10/04/pagar-besi-alun-alun-utara-jogja-ditarget-rampung-akhir-juli>
- Widiyastuti, D. (2013). *Transformation of Public Space : Social and Spatial Changes (A Case Study of Yogyakarta Special Province, Indonesia)* (Issue April). Technical University of Dortmund.
- Widiyastuti, D. (2012). Memorable Square: Identities, Meanings and the Production of Urban Space in Yogyakarta,. In M. Schrenk (Ed.), *REAL CORP 2012: RE-MIXING THE CITY – Towards Sustainability and Resilience?* (Vol. 0, Issue May, pp. 1291–1300).
- Widyaevan, D. A. (2015). The Change of Public Perception towards Alun-Alun Bandung as a City Center. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 184(August 2014), 135–143. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.072>
- Widyawati, R. A. L. (2024). *Alun-Alun dalam Tata Ruang Kota Lama: Tinjauan Alun-Alun Demak dan Yogyakarta*.
- Wilson, C. (1978). Memory and the politics of forgetting Paris , the Commune and the 1878 Exposition universelle. *Journal of European Studies*, 35(1), 47–63.
- Woodward, M. R. (1991). The “ Garebeg Malud “ in Yogyakarta : Veneration of the Prophet as Imperial Ritual. *Journal of Ritual Studies*, 5(1), 109–132.
- Xie, Q. (2018). Critical Discourse Analysis of News Discourse. *Theory and Practice in Language Studies*, 8(4). <https://doi.org/10.17507/tpls.0804.06>
- Yu, S. (2008). Redefining the Axis of Beijing: Revolution and Nostalgia in the Planning of the PRC Capital. *JOURNAL OF URBAN HISTORY*, 34(4), 571–608. <https://doi.org/10.1177/0096144207313880>
- Yudianto, P. (2020, July 24). Mendebat Pagar Alun-alun Utara Jogja yang Kehilangan Fitrah ‘Takhta untuk Rakyat’-nya. *Terminal Mojok*. <https://mojok.co/terminal/mendebat-pagar-alun-alun-utara-jogja-yang-kehilangan-fitrah-takhta-untuk-rakyat-nya/>
- Yudianto, P. (2021a, May 29). Wawancara Eksklusif dengan Korban Kebakaran Alun-alun Utara Jogja. *Mojok.Co*. <https://mojok.co/terminal/wawancara-eksklusif-dengan-korban-kebakaran-alun-alun-utara-jogja/>
- Yudianto, P. (2021b, July 5). Dilema Pagar Alun-alun Jogja: Takhta untuk Rakyat atau Halaman Rumah Sultan? *Mojok.Co*. <https://mojok.co/terminal/dilema-pagar-alun-alun-jogja-takhta-untuk-rakyat-atau-halaman-rumah-sultan/>

- Yudianto, P. (2021c, October 2). Kraton Jogja Ingin Terbuka bagi Kaum Muda dengan Sibuk Renovasi? Nice! *Mojok.Co*. <https://mojok.co/terminal/kraton-jogja-ingin-terbuka-bagi-kaum-muda-dengan-sibuk-renovasi/>
- Yudianto, P. (2021d, October 15). Pasar Malam Sekaten di Alun-alun Dilarang , tapi Dibuka di Mal? Jogja Memang Istimewa! *Mojok.Co*. <https://mojok.co/terminal/pasar-malam-sekaten-di-alun-alun-dilarang-tapi-dibuka-di-mal-jogja-memang-istimewa/>
- Yudianto, P. (2021e, November 10). Dana Keistimewaan Jogja 2022 Sebesar Rp1,32 Triliun: Buat Apa Aja? *Mojok.Co*. <https://mojok.co/terminal/dana-keistimewaan-jogja-2022-sebesar-rp132-triliun/>

Walking Tours as Placemaking Strategy: Constructing Spatial Narratives in Jeron Beteng, Yogyakarta

Rud Yoneko Tunggadewi¹*, Armita Sharfina², Nuzuli Ziadatun Ni'mah³

¹ Ministry of Creative Economy of the Republic of Indonesia;

² Independent Researcher; ³ Gadjah Mada University

Email: rudyoneko@gmail.com*; mitasharfina@gmail.com;
nuzuli.ziadatun.n@mail.uqm.ac.id

Abstract:

Urban heritage areas are multilayered historical landscapes that integrate tangible and intangible values. However, current challenges such as urban development and tourism commodification threaten the continuity and authenticity of these elements. Within this context, placemaking has emerged as a conservation strategy to interpret embodied socio-cultural values, amplify community participation, and explore alternative narratives. Walking tours, as cultural and spatial practices, provide a key entry point to this approach. Using a qualitative method, this research evaluated two distinct providers, Jogja Good Guide and Alon Mlampah, to analyze the effectiveness of walking tours as a placemaking strategy in the urban heritage landscape of the Jeron Beteng area in Yogyakarta. The research found that the walking method enables multisensory experiences and emotional engagement. While each provider employs different interpretive lenses, ranging from emotional storytelling to archival-based narratives through their tour guides, where both play a crucial role in constructing “the biography of place”. This is achieved through the curation of routes, spatial sequencing, and narrative storytelling. Walking tours foreground lived experiences and enable more democratic narratives for urban heritage landscape.

Keywords: Placemaking, Walking Tours, Urban Heritage, Jeron Beteng, Spatial Narratives

Intisari:

Kawasan warisan perkotaan merupakan lanskap sejarah berlapis yang memadukan nilai-nilai warisan benda dan tak-benda. Keberlangsungan dan autentisitas kawasan ini kian menghadapi tantangan akibat pesatnya arus pembangunan perkotaan dan komodifikasi pariwisata. Dalam konteks ini, *placemaking* hadir sebagai strategi pelestarian untuk menginterpretasikan nilai-nilai sosial budaya, memperkuat partisipasi komunitas, dan mengali narasi-narasi alternatif yang selama ini tersembunyi. *Walking tours*, sebagai praktik budaya dan spasial, menawarkan titik masuk yang relevan bagi pendekatan *placemaking*. Melalui metode kualitatif, dilakukan analisis komparatif terhadap dua penyedia tur, yaitu Jogja Good Guide dan Alon Mlampah, untuk

kemudian menganalisis efektivitas *walking tours* sebagai strategi placemaking dalam konteks lanskap warisan perkotaan di Jeron Beteng, Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *walking tours* memberikan pengalaman multisensori dan ikatan emosional yang kuat antara peserta dan kawasan. Meskipun setiap penyedia tur menggunakan lensa interpretatif yang berbeda, mulai dari narasi yang berfokus pada aspek emosional hingga narasi historis berbasis arsip melalui *tour guide* mereka, keduanya memainkan peran krusial dalam pembentukan “*biography of place*”. Temuan ini didukung oleh praktik kurasi rute, sekuens spasial, serta penyampaian narasi yang terstruktur. *Walking tours* menegaskan pentingnya pengalaman hidup dan narasi yang lebih demokratis dalam upaya menjaga keberlanjutan kawasan warisan perkotaan.

Kata Kunci: *Placemaking, Walking Tours, Urban Heritage, Jeron Beteng, Spatial Narratives*

INTRODUCTION

Research Background

Urban heritage sites are inherently multilayered cultural landscapes, where tangible elements, such as streetscapes, architectural structures, and landmarks, deeply intertwined with intangible practices including collective memories, rituals, and symbolic meanings embedded within everyday life (ICOMOS, 2011). These layers sustain cultural continuity and enable societies to preserve and reinterpret historical knowledge across generations (Zejnilić et al., 2023:96).

Despite their profound cultural significance, these urban heritage sites are increasingly vulnerable to the pressures of rapid urban development which often leads to the disruption of historic spatial arrangements and erosion of the socio-spatial relationships vital for maintaining community memory (Zejnilić et al., 2023:86). Concurrently, cultural tourism often results in the commodification of heritage, simplifying complex histories into marketable narratives (Botezat et al., 2025:186; Plate, 2006:112) and weakening authenticity (Rindrasih & Witte, 2021, 137-138). Heritage is therefore caught between preservation and commercial reinterpretation (Wang & Stock, 2024:1–2), highlighting the need for experiential approaches, such as walking tours, that foster deeper, community-rooted engagement.

Against this backdrop, placemaking functions through a dynamic-relational and contextual lens, interconnecting historic cities and communities to reveal the social values and intangible appreciations embedded within the urban landscape (García-Esparza et al., 2023:38–39). This concept underscores that the creation of the sense of place and collective identity is fundamentally tied to the bodily experiences of being and moving in material space, where space is continuously revised and transformed (Zejnilić et al., 2023:80–81). Through narrative construction and multisensory engagement, placemaking cultivates a strong sense of place that extends beyond the material (Ellery et al., 2021:72; García-Esparza et al., 2023:38–39).

This study focuses on *Jeron Beteng*, Yogyakarta, a densely layered heritage district situated within the fortified walls of the *Keraton Yogyakarta*. The area is a unique composite of royal traditions, *kampung* (local neighbourhood) socio-spatial organization, and intergenerational memories. In recent years, the area has experienced a rapid proliferation of walking tour initiatives, attracting a diverse audience of tourists, students, residents, local communities, and urban enthusiasts. Preliminary mapping identified seven active providers, three of which, Jogja

Good Guide (JGG), Jogja Walking Tour (JWT), and Alon Mlampah (AM), were selected for their consistency and substantial engagement in curating routes and narratives inside *Jeron Beteng* area. These tours function as curated pathways for embodied spatial knowing using movement, storytelling, and sensory interaction to build the sense of place (García-Esparza et al., 2023:31; Markwell et al., 2004:470). However, the research could not be further conducted with JWT due to time constraints, specifically the unavailability of their walking tour schedule in *Jeron Beteng* during the research process.

Walking tours are increasingly recognized for their potential to democratize heritage interpretations by lowering barriers to participation and legitimizing diverse narrative voices often overlooked in authorized discourses (Wang & Kao, 2017:1014). They function as assemblages of guides, audiences, narratives, and material environments that co-produce new interpretations and generate cognitive and emotional resonance, strengthening place attachment (Wang & Kao, 2017:1004; Singleton, 2024:187).

Despite their growing prevalence and recognized interpretive power, walking tours remain under-conceptualized within placemaking scholarship. Existing studies situate them within the frameworks of tourism, heritage interpretation, (Plate, 2006; Wang & Kao, 2017; Tahir, et. al., 2025) or participatory design methods (Singleton, 2024), without systematically examining their potential as structured placemaking interventions that actively reconstruct the biography of a place (Markwell et. al., 2004; García-Esparza et. al., 2023). This study, therefore, addresses this gap by asking: How are walking tours applied as an effective placemaking strategy in the urban heritage landscape of *Jeron Beteng* area of Yogyakarta?

The research objective is to examine how walking tours operate as a placemaking strategy by reconstructing spatial narratives and mapping experiential engagements in a rapidly transforming urban heritage site. The study will be grounded in the theoretical framework of placemaking, viewing walking tours as a crucial cultural-spatial practice that actively generates meaning, identity, and collective memory.

Heritage should be understood as a dynamic cultural process continually reformulated through narrative, performance, and community interpretation (Erek et al., 2025:139–140). This dynamism arises because tangible and intangible heritage mutually shape each other within their socio-cultural contexts (Erek et al., 2025:137–138). Consequently, cultural heritage forms a crucial component for strengthening local identity and anchoring community belonging (Djukic et al., 2023:13). Ultimately, community participation in heritage placemaking fosters shared meaning-making and contributes to sustainable development by ensuring local ownership and relevance (Djukic et al., 2023:15). To achieve this, inclusive and evolving heritage narratives depend on public engagement, interpretive mediation, and storytelling practices that reveal tacit meanings and collective memories concealed beneath physical structures (Costa et al., 2025:163–166).

Placemaking acts as a conceptual lens for understanding how communities create socially and symbolically meaningful places by synthesizing spatial form, cultural identity, and everyday practices (García-Esparza et al., 2023:17; Nursanty et al., 2024:15). Rooted in layered histories and dynamic memory, this approach emphasizes inclusive processes that foster a sense of place—the emotional and cognitive attachment formed through lived experience and social relations (Erek et al., 2025:153–154; Ellery & Ellery, 2019:248). Significantly, this attachment develops along a

continuum influenced by the degree of community participation, which is vital for strengthening collective identity, belonging, and long-term stewardship (Ellery et al., 2021:72).

In historic cities, placemaking must extend beyond material conservation to engage multidimensional aspects such as intangible heritage, everyday practices, and narrative meanings (García-Esparza et al., 2024:38–39). Heritage is thus understood as a dynamic cultural process, continually recreated through narration, performance, and interpretation (Erek et al., 2025:137–140). Multisensory and narrative-based approaches enable more inclusive engagement with diverse values and memories, reinforcing place attachment and supporting sustainable, community-centered heritage environments amid ongoing urban change (Costa et al., 2025:163–166).

Walking tours function as a multisensory and embodied practice, slowing down the perceptual experience to enhance spatial awareness and sensitivity to environmental cues—sounds, smells, textures, and rhythms—that structure lived experience (García-Esparza et al., 2023:31; Markwell et al., 2004:460). This process democratizes interpretation, surfaces diverse narratives, and reveals hidden heritage layers, moving heritage understanding beyond conventional tourist discourse (Wang & Kao, 2017:1014; Markwell et al., 2004:470). As conceptual assemblages, they generate new spatial imaginaries and reinforce place identity (Wang & Kao, 2017:1004).

Walking tours also function as placemaking tools by structuring embodied movement into curated narrative experiences that connect stories to spaces to construct place biographies (Singleton, 2024:187). Analogous to the way narrative practices, such as literature, influence perception and foster attachment, placemaking relies on narrative representation to shape how places are perceived, understood, and emotionally inhabited (Botezat et al., 2025:184–185). These tours translate this narrative function into situated, embodied practice, where in situ storytelling activates layered heritage meanings for multi-background participants. This narrative mediation and multisensory engagement, tours generate cognitive and emotional resonance, strengthen place attachment, and support inclusive heritage placemaking beyond commodified tourist representations.

METHODS

The study adopts a qualitative approach focusing on *Jeron Beteng* area, the inner wall settlement of the *Keraton Yogyakarta*. Data collection was conducted through a sequence of interrelated methods that integrated walking tour practices as both research objects and collaborative platforms. Archival research was first undertaken to understand historical documents, base maps, and key publications, tracing the key philosophies and cosmological foundations of the *Keraton Yogyakarta* alongside urban transformation to provide historical depth to contemporary tour narratives. This was followed by participatory observation through direct engagement in walking tours organized by the two active providers JGG and AM. Each representing distinct approaches to heritage interpretation, ranging from community-driven to regular heritage-focused tours and narrative-rich thematic experiences. This comparative participation enabled in-depth observation of differences in storytelling, interactions, and cultural framing. To deepen the analysis, semi-structured interviews were conducted with provider representatives to explore their narrative approaches, thematic priorities, and challenges in interpreting socio-cultural dynamics and historical layers of the place.

A comparative analysis then conducted by comparing narrative strategies, interactions, and interpretive tools between the two providers. This analysis reveals narrative tensions and delivering ability of each provider to the walking tour participants, showing how different placemaking approaches are applied through walking tour practices in *Jeron Beteng* area. Spatial mapping was then employed as a comparative analytical tool by reconstructing and overlaying the walking routes of the two providers. This process identified symbolic landmarks, community nodes, and street layouts visited by the two providers to highlight the flow and possible shared storylines, as well as unique or less visible sites emphasized by specific tours. It also showed how each stop is narrated and framed through historical, cultural, or everyday practices. This analysis also draws on the researcher's reflective accounts developed through participatory observation.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Result

1.1. Jogja Good Guide

Background and Narrative Approach

Jogja Good Guide (JGG) was founded in Jakarta in 2014, inspired by one of its founders' experiences participating in walking tours abroad. From its inception, JGG adopted a system of daily tours, ensuring that tours remained accessible regardless of advance registration. In 2016, JGG expanded its operations to Yogyakarta, where it has since become one of the city's longest-running walking tour providers. The Yogyakarta branch is managed by local resident who hold Yogyakarta identification and professional tour guide certification through Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). All guides undergo formal training and certification, combining historical knowledge with guiding expertise.

While JGG selects physical sites based on visual appeal and spatial quality, its tours prioritize storytelling over architectural description alone. The guides emphasize memorable narratives rather than factual density, aiming for participants to leave with stories that resonate emotionally rather than solely photographic documentation. JGG's routes generally follow flexible storylines structured as a compilation of narratives, each selected for its emotional, symbolic, or historical impact. Importantly, JGG's storytelling style has evolved over time in response to participant feedback, gradually balancing historical content with humour, emotional engagement, and entertainment. Multisensory elements—such as walking pace, spatial transitions, sound, and food—are intentionally incorporated, while the tours also function as a bridge to local Micro Small Medium Enterprises (MSMEs) and street vendors, integrating cultural experience with everyday economic activity.

Structure and Narrative of the *Jeron Beteng* Walking Tour

The *Jeron Beteng* walking tour by JGG was a two to three hours walk structured around six main stops (Figure 1), supplemented by narrative explanations delivered between stopping landmarks. The route emphasized emotional and symbolic storytelling, positioning JGG as an interpretive mediator that bridges participants with the philosophical values of the Yogyakarta Sultanate. The tour begun by introducing the dual spatial structure of the *Keraton: Baluarti*,

which encloses and protects the residential area of *Jeron Beteng*, and *Cepuri*, which defines the inner *Kedaton* or the Sultan's private domain. The tour was confined to the area outside the *Kedaton* (outside *Cepuri*) but within *Jeron Beteng* (inside *Baluarti*). (Figure 2-a)

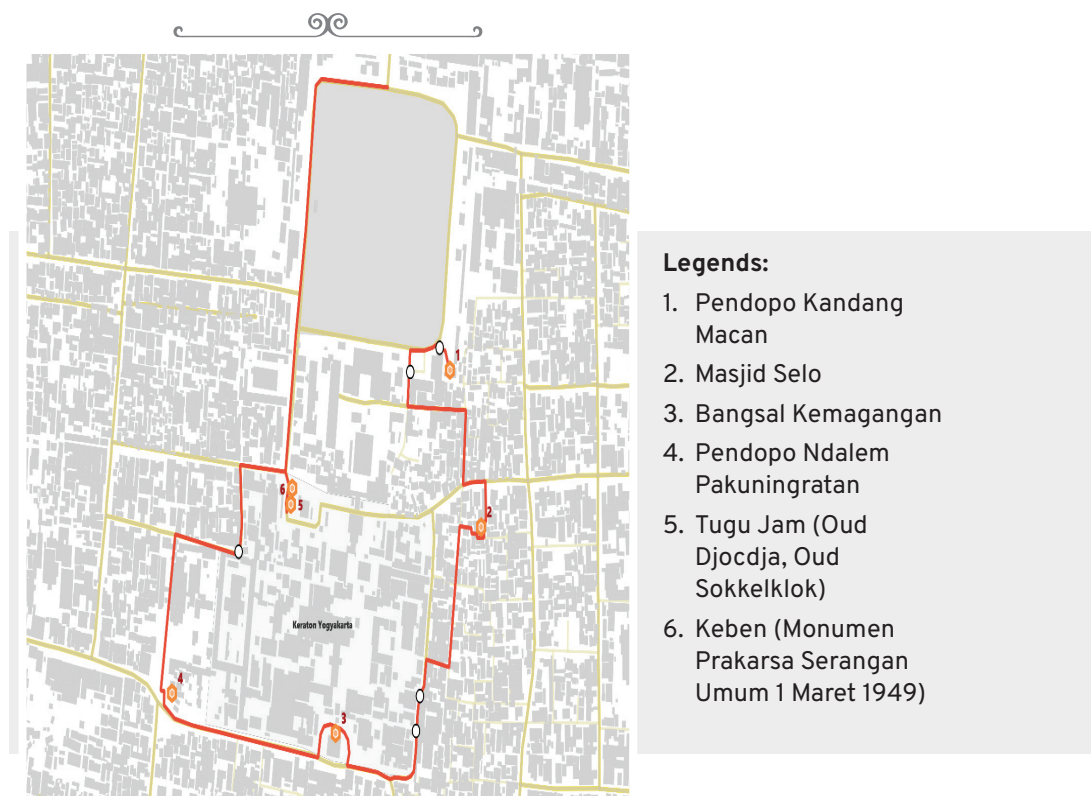


Figure 1. Jeron Beteng Walking Tour Route by Jogja Good Guide
Source: Ni'mah, 2026

Before reaching the first stop, participants gathered at *Alun-Alun Utara*, the northern royal square, where the guide explained the material transformation of the site, the symbolism of sand, the philosophical and imaginary axes of Yogyakarta, and the symbolic vegetation around, particularly the banyan trees. The guide also explained the historical function of the *Pekapalan* buildings, which originally served as horse parking areas for regional regents before later being transformed into dining spaces. In addition, participants were introduced to *Laku Pepe*, a traditional Javanese form of protest involving sunbathing in the *Alun-Alun* as a means of conveying aspirations directly to the Sultan.

The first stop was *Pendopo Kandang Macan* (Figure 2-b). At this point, JGG built emotional resonance through the narrative of *Rampokan Macan*, using it as a narrative hook to capture attention and empathy from participants. The guide integrated conservation values and political metaphors by interpreting the symbolism of *Rampokan Macan* as an integral part of the site's historical narrative. As a form of conservation critique, the guide emphasized that this tradition is often perceived as contributing to the extinction of the Javan tiger, thus transforming it into a moral message encouraging contemporary wildlife conservation.



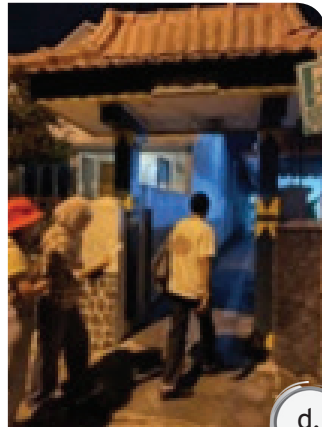
a.



b.



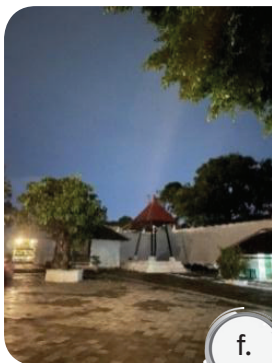
c.



d.



e.



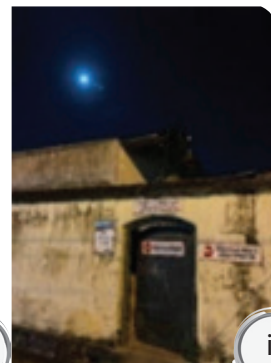
f.



g.



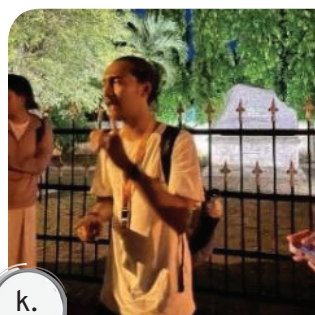
h.



i.



j.



k.

- a. Alun-alun Utara
- b. Pendopo Kandang Macan
- c. Masjid Selo
- d. Narrow Alleys leading to Masjid Selo
- e. Bangsal Kemagangan
- f. Timekeeping Bell
- g. Pendopo Ndalem Pakuningratan
- h. Angkringan
- i. Hidden Access within Keraton
- j. Tugu Jam (Oud Djocdja, Oud Sokkelklok)
- k. Keben (Monumen Prakarsa Serangan Umum 1 Maret 1949)

Source: documentation by Ni'mah, 2026

Figure 2. Tangible and Intangible Elements of *Jeron Beteng* Walking Tour Route by Jogja Good Guide

On the way to the second stop, the tour passed through *Kampung Musikanan*. Here, the guide explained the dynamics of social and cultural practices through the profession of *abdi dalem*. The origins of the kampung's toponymy and its historical functions were discussed in detail, with contextualization linking past roles to contemporary developments, including the revival of the Jogja Royal Orchestra. JGG also highlighted the modernization of *abdi dalem*, particularly the emergence of media divisions operating drones and professional cameras.

The second stop was *Masjid Selo* (*Selo Mosque*) (Figure 2-c). Narration at this site focused on architecture as a medium of meaning-making. Despite its name (*selo*, meaning stone), the mosque was constructed from brick, with a structure designed to resemble stone. The low entrance gate was explained as a philosophical feature that requires visitors to bow their heads as a sign of respect. The guide also noted architectural similarities with Taman Sari, as both were built in a similar period by the same architect. Participants were invited to experience the spatial quality of the site by walking through the narrow alleys leading to and from the mosque (Figure 2-d). Before moving to the third stop, the guide introduced humor through a discussion of *Kandang Burung Merpati*, referencing Javanese masculine ideals associated with bird keeping and pigeon racing, which became an interactive moment between the guide and participants.

The third stop was *Bangsas Kemagangan* (Figure 2-e). At this location, the guide discussed not only the function of the building but also the historical significance, social role, and life-cycle symbolism underlying the philosophy of *Magangan*. Historically, *Magangan* served as a selection site for prospective soldiers, and within the framework of the philosophical axis, it represents the final stage of human maturity. Participants were also shown the timekeeping bell, which remains functional and is manually rung by *abdi dalem* (Figure 2-f). However, as this tour was conducted at night, the bell was not rung.

The fourth stop was *Pendopo Ndalem Pakuningratan* (Figure 2-g). Here, the guide briefly introduced the building before shifting the focus to a culinary experience at a nearby *angkringan*—a traditional informal street food stall that also functions as a social space (Figure 2-h). A key highlight was the tea service, which offered various blends that participants can mix themselves and operates on a pay-as-you-wish basis. The guide also explained the history of tea in Indonesia, introduced during the Dutch colonial period, and contrasts tea culture in Yogyakarta with other regions due to the historical presence of sugar factories.

Before reaching the fifth stop, the tour passed through an alley west of the Sultan's residence. The guide explained the spatial layout of the area, emphasizing the less visible pathways and access routes within the *Keraton* complex (Figure 2-i), as well as long-established batik traders such as *Batik Aranty*. The fifth stop was *Tugu Jam* (*Oud Djocdja* or *Oud Sokkelklok*) (Figure 2-j), followed closely by the sixth stop at *Keben, Monumen Prakarsa Serangan Umum 1 Maret 1949* (Figure 2-k).

Although these two landmarks are spatially adjacent, they are not directly related historically. *Tugu Jam* served as the backdrop for narratives about Tan Jin Sing and the relationship between the Chinese community and the Yogyakarta Sultanate. The tour concluded at the monument commemorating the 1 March 1949 General Offensive, where the guide emphasized the role of Sri Sultan Hamengku Buwono IX in initiating the offence to support Indonesia's independence.

JGG used physical elements—such as buildings, pathways, squares, and monuments—as stages for articulating intangible values relevant to contemporary life. The narratives spanned multiple temporal and thematic layers, including the early history of the *Keraton*, philosophical and spatial concepts, shifts in function and demographics within *Jeron Beteng*, everyday cultural practices, relations with the Chinese community, and the role of the Yogyakarta Sultanate in Indonesia's independence. Food-related encounters further functioned as interpretive tools, engaging taste and smell as integral components of spatial experience.

1.2. Alon Mlampah

Background and Narrative Approach

Founded on July 1, 2023, *Alon Mlampah* (AM) originated from the personal interests of its founders in Yogyakarta's history and urban life, with a focus on the *Jeron Beteng* area. Started informally, the initiative grew organically through walking practice around the city and engaging with historical stories firsthand. Through collaboration with other walking tour communities, AM evolved into a platform for sharing the city's narratives, using walking as a primary medium to explore history, urban space, and social dynamics. Its mission is to present Yogyakarta as a living city, where the history of the *Keraton*, surrounding *kampung*, and everyday life are intimately connected.

The founders' combined expertise in architecture and history enables AM to integrate archival research, spatial understanding, and local lived experience. Tour narratives are developed collaboratively, drawing on historical archives and resident stories, enriched by one founder's personal roots in *Jeron Beteng* area. Routes are thematically organized to trace the evolving roles of each *kampung*, including toponymy, historical functions within the *Keraton*, and current socio-cultural dynamics. Stops are selected for their historical significance, narrative coherence, and spatial quality. Historical buildings provide the setting for storytelling, while narratives emphasize social dynamics within an overarching thematic thread. Through a slow, reflective walking approach, participants are encouraged to engage attentively with their surroundings, experiencing the city as a living, dynamic urban space.

Structure and Narrative of the *Jeron Beten* Walking Tour

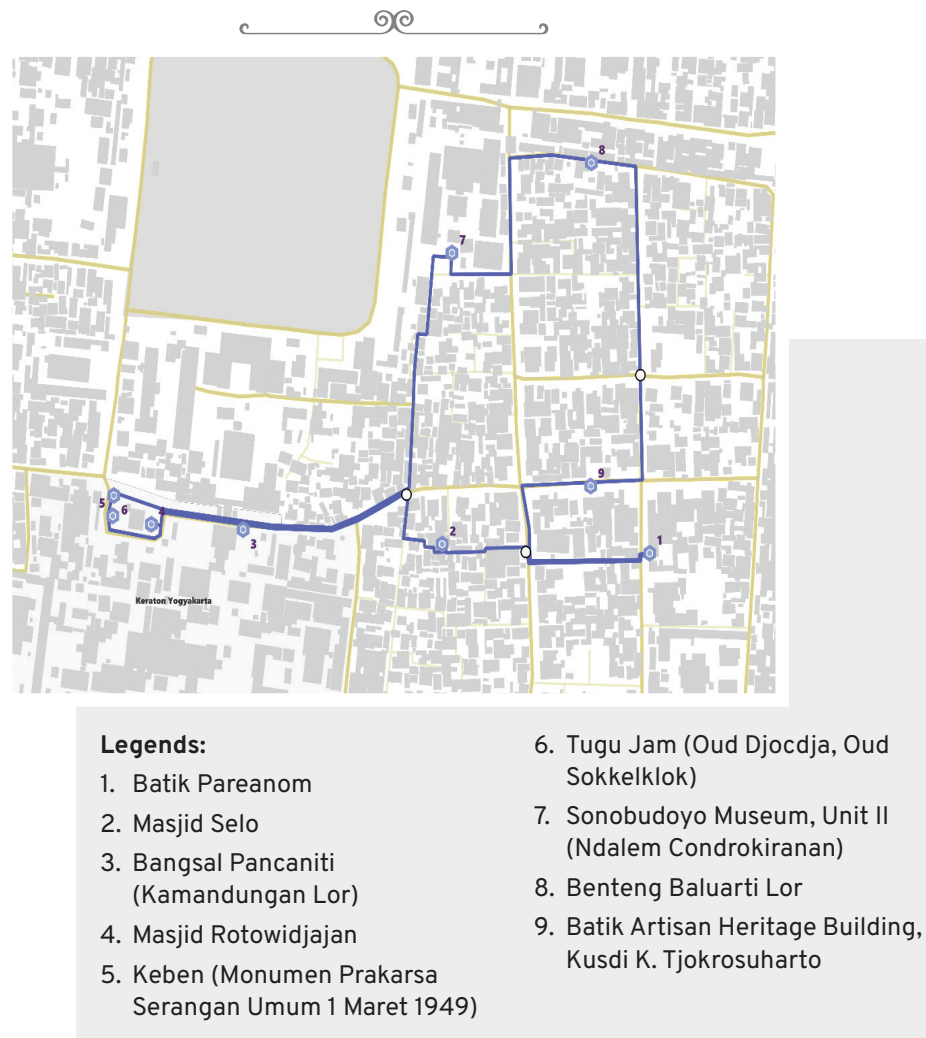


Figure 3. *Jeron Beteng* Walking Tour Route by Alon Mlampah

Source: Ni'mah, 2026

The walking tour in the *Jeron Beteng* area organized by AM foregrounded the act of walking as an interpretive medium for historical understanding, while simultaneously enabling reflection on traditions, cultural practices, and everyday life embedded in space. Through a carefully curated narrative structure, AM invited participants to engage with the spatial landscape of *Jeron Beteng* as articulated through the *Susur 8 Kampung* route, which passes through eight traditional neighbourhoods. This two to three-hours walking tour was structured around nine main stops (Figure 3) and positions the guide not as the sole source of historical knowledge, but as a walking companion who facilitates interpretive engagement. Through this approach, participants were encouraged to read the historical layer of *Jeron Beteng* and to understand the socio-spatial processes that formed *kampung* in *Jeron Beteng*, which form the foundation of the tour's narrative framework.

The tour began with an introduction to *Jeron Beteng*, presented not only as a political symbol of the *Keraton* but also as an evolving urban space shaped by everyday practices. The initial segment of the tour took participants to first and second stops—*Batik Pareanom* (Figure 4-a) and *Masjid Sela* (Figure 4-b) in *Kampung Panembahan*. *Batik Pareanom* served to introduce the

abdi dalem craftsmanship and entrepreneurship skills; this narration later looped back at the final stop, as illustrated in Figure 3, where the route circled back to the initial location.

After the first stop, the narrative shifted to the religious space of *Masjid Sela* (*Sela Mosque*). The guide explained that, in the past, *Masjid Sela* was part of the *Istana Sawojajar* or *Sawojajar Palace* that located in *Kampung Wijilan* area before the area was opened for public. When the palace area was destroyed during the attack of the British army, known as *Geger Sepehi* incident (1812), *Masjid Sela* became the only remaining relic of the palace. Participants were allowed to enter the mosque, enabling the narrative to move beyond verbal explanation into embodied and sensory experience. Engagement with spatial scale and construction materials further situated historical knowledge within personal experience.

The walking tour continued to the third stop, *Bangsai Pancaniti* (Figure 4-c), located at *Halaman Keben* (*Kamandungan Lor*). In *Halaman Keben*, the narrative shifted to the relation between vegetation, symbolism, and power. The guide discussed how *keben* tree, which often finds at the north coast of Java Island, become part of *Keraton* vegetation. Interestingly, in the *babat*, Javanese chronicle, it was told that Pangeran Mangkubumi (Mangkubumi Prince) took shelter under the *keben* tree during war and survived. The tree was then planted in the palace area as a form of gratitude. This background story and directly observe its physical characteristics, flower, and fruit, transforming historical narration into a tangible, sensory experience.

After that, the narration shifted to *Bangsai Ponconiti*. The guide explained that *Bangsai Ponconiti* was once used to hold special courts for the Sultan's relatives, where the Sultan himself presided as judge. Consequently, a raised, elaborately ornamented platform was placed at the centre of the building, reserved for the Sultan's presence. This historical background provides a deeper understanding of the architectural details of the heritage building for participants.

The fifth stop is *Masjid Rotowidjajan* (*Rotowidjajan Mosque*) (Figure 4-d) located in *Kampung Rotowidjajan*. *Masjid Rotowidjajan* was built to commemorate the ascension of Gusti Raden Mas Sundoro (Hamengkubuwono II) to the throne. This mosque also witnessed significant event in the histories of *Keraton* during *Geger Sepehi* incident: Colonel Gillespie, a British soldier, was killed by palace guards when he attempted to enter the palace grounds. Behind the mosque lies the tomb of Kiai Raden Tumenggung Irawijonyo, who served as *abdi dalem penongsong* (umbrella bearer). The name *Kampung Rotowidjajan* derived from the *abdi dalem* profession responsible for royal carriages and ancient riding traditions, a toponymy that illustrates the connection between social roles and spatial identity in *Jeron Beteng*.

The tour continued at the sixth, *Taman Keben* (*Monumen Prakarsa Serangan Umum 1 Maret 1949*) (Figure 4-e). This monument was built to highlight Hamengkubuwono IX's role in the history of the *Serangan Umum 1 Maret 1949* (1 March General Offensive 1949) during Indonesia's struggle for independence, recognizing him as main initiator. The guide also mentioned the philosophy of planting tamarind and *gayam* (Tahitian chestnut) trees in Javanese culture, described as '*tansah ngesemake, lan kudu tansah gawe pengayom*' —meaning that the Javanese way of life should always be pleasant and provide guidance. The tour then briefly moved to the seventh stop, *Tugu Jam* (*Oud Djocdja, Oud Sokkelklok*) (Figure 4-f) where the guide highlighted its value as a symbol of intercultural relations, as the clock was gifted to the Sultan by the Chinese community.



Figure 4. Tangible and Intangible Elements of *Jeron Beteng* Walking Tour Route by Alon Mlampah

The eighth stop was *Ndalem Condokiranan* in *Kampung Bludiran* and *Kampung Wijilan*. Within this area is *Masjid Condokiranan* (Figure 4-g), which is part of the *Ndalem Condokiranan* complex. The guide positioned the mosque as a focal point for discussing relations among the *kampung*, as well as the role of mosques as social and spatial nodes in *Jeron Beteng*. The guide then explained the *bludiran*, referring to the *abdi dalem* responsible for guarding royal velvet textiles, known as *beludru* in Java, which were historically regarded as symbols of royal status. Clothing within the *Keraton* indicated a person's hierarchical position, from the motifs of brooches to the number of flowers in hairpins. The guide also highlighted how clothing and accessories play a significant role in the coming-of-age process within the palace environment.

The ninth stop was *Benteng Baluarti Lor* (Figure 4-h) in *Kampung Keneken*. *Benteng*, Javanese term for fort, was the *Keraton*'s defensive system, usually built in layers to protect both Sultan residence and the noble residences. The guide explained the function of *ndalem*, Javanese noble traditional housing and complex, within the palace hierarchy and how the building location, architectural, ornament, and size materializes the social status of its owner. Participants were also informed about sacred spatial boundaries that remain inaccessible in some part of *Jeron Beteng* area. The emphasis on customary rules and spatial restrictions becomes an integral component of the walking tour experience, fostering ethical awareness and respectful engagement with culturally significant spaces.

Finally, the walking tour circled back to the initial narrative about batik. The last stop was the Batik Artisan Heritage Building (Figure 4-i), established by Mas Bekel Mangku Taruno. Historically, he was an *abdi dalem* who assisted *Keraton* officials in selling valuable items in the past, which allowed him to accumulate enough capital to establish his own batik business. He created a new batik motif known as *batik sodagaran* which still exist today and being sell at *Batik Tjokrosuharto* store, one of his successors. Later, *Batik Pareanom* established and continued his craft tradition, serving as a living heritage of his batik lineage in modern time. However, the business could not be sustained and closed in 2018 due to factors such as a lack of successors and specialized labor.

Aligned with its theme, the *Susur 8 Kampung* route, the walking tour by AM traversed eight traditional neighbourhoods in the *Jeron Beteng* area. Intangible and tangible elements—such as craftsmen's houses, mosques, vegetation, forts, and landmarks—served as supporting elements for the narrative structure and functioned as sensory storytelling media. The historical layers of each *kampung* were also explored through the lived experiences of *abdi dalem*, socio-cultural dynamics, and the relationships between *Jeron Beteng* residents and the Yogyakarta *Sultanate*. The guide's eloquence in presenting historical knowledge enabled participants to engage in a slow, reflective tour, fostering a personal and nuanced understanding of *Jeron Beteng*.

2. Discussion

2.1. Narration and Storytelling

To evaluate the interpretive strategies of the selected providers, narration and storytelling are treated as an analytical dimension grounded in recent heritage and placemaking scholarship that conceptualizes heritage as a dynamic, narrative-driven process. In the context of walking tours, narration links stories to spaces and mediates the transformation of ordinary urban settings into meaningful heritage landscapes (Singleton, 2024:187; Wang & Kao, 2017:1014). The emphasis on participant engagement, interactive media, and storytelling practices reflects literature that views placemaking as a participatory process of meaning-making and memory-making (Costa et al., 2025:166; Markwell et al., 2004:460), in which guides act as cultural interpreters and mediators, while participants actively construct personal and emotional connections to place (Tahir et al., 2025:306).

The analysis demonstrates that narration functions as the primary tools through which placemaking is enacted during the walking tours. Data from interviews and tour observations indicate that both JGG & AM actively link archival materials, lived experiences, and spatial cues

to construct layered narratives that unfold along the route. However, each provider adopts a distinct narrative approach in transforming urban spaces into meaningful heritage landscapes.

JGG prioritizes emotional engagement over dense historical exposition. Its narrative strategy focuses on stimulating participants' emotional responses by framing historical events through dramatic storytelling—such as the narration of the *Rampokan Macan* (tiger fighting) tradition—to evoke empathy and raise awareness of heritage-related issues. JGG functions storytelling as an instrument for generating strong personal resonance, enabling non-resident visitors to develop a sense of ownership, attachment, and care for the area's future. JGG further ensures that participants engage with the area through multisensory experiences by incorporating local food into the tour, thereby reinforcing emotional perception and place attachment. Like AM, bell ringing also plays an important role in JGG's walking tour along the *Jeron Beteng* route; however, its use is time-dependent, as the bell is not rung during nighttime tour.

AM articulates narration as a documentary activism rooted in historical accuracy. Using cartographic sources, such as 1925 maps (Figure 5), AM enhances participants' spatial awareness by encouraging them to imaginatively reconstruct lost heritage features, such as the former *Sawojajar* Palace. This method emphasizes archival verification and presents storytelling as a purposeful and systematic way to communicate the historical development of *Jeron Beteng*. Moreover, AM reinforces its narrative and storytelling through multisensory engagement: participants observe the *keben* fruit once considered sacred in *Halaman Keben* and listen to the long-standing time-marking bell as part of living heritage in *Kampung Widjajan*. These approaches to conveying narratives through interactive media play a crucial role in supporting individual memory-making and processes of meaning formation.



Figure 5. The use of cartographic map, book, and photo in AM tour
Source: documentation by Ni'mah, 2026

2.2. Tangible Heritage Elements

By mapping the physical routes within *Jeron Beteng* area, the focus on *tangible heritage elements* responds to the recognition that urban heritage territories are layered landscapes. This supports the understanding that walking tours offer a spatial method for reading and interpreting urban landscape by assembling buildings, streets, narrow path, and public spaces within specific narrative and experiential frameworks. Indicators such as urban structure and architectural elements are therefore essential for examining how routes, spatial sequences, and iconic spaces function as perceptual triggers and interpretive objects that anchor memory and hold historical and cultural values (Markwell et al., 2004:460, 470). By comparing walking tour routes and the elements; attached to these tangible elements, this section evaluates how physical heritage is mobilized within placemaking processes.

Findings indicate that tangible heritage elements in *Jeron Beteng* serve as memory anchors, activating historical values within the placemaking process. Analysis of the routes reveals that the walking tours organize *kampung*, streets, buildings, monuments, open spaces, vegetation, and fortifications into sequential spatial narratives, highlighting the multilayered complexity of the historic urban landscape.

JGG engages with tangible heritage through a focus on visual aesthetics and functional accessibility. Their strategy includes selecting at least three photogenic spots to attract domestic tourists via social media, effectively keeping the building's story relevant to contemporary visual preferences. Despite this emphasis, JGG also provides functional interpretations—for example, explaining *Pekapalan* as a horse parking area for regents—to offer participants an easily understandable sense of historical spatial use. In this way, considerations of visual appeal, architectural form, historical meaning, and social context are all carefully balanced in JGG's approach.

AM views physical structures as gateways for documenting traditional knowledge. Their technical explanations—such as identifying limestone and palm sap (*air nira*) as the adhesive used in *Masjid Selo*—reveal embodied knowledge and traditional expertise often threatened by standardized modern conservation practices. Architectural elements are primarily employed to contextualize history and serve as entry points for broader discussions of community life and spatial transformation, effectively turning physical elements into instruments of social documentation. The guide noted that following the fort's revitalization, sections that had been destroyed were replaced with newly constructed structures designed to resemble the original fort, a process that obscured the fort's historical layers.

Across both cases, tangible elements serve as visual cues that situate narratives in space, reinforce historical memory, and shape participants' understanding of continuity and change. The routes of JGG and AM intersect at certain landmarks (Figure 6); the fact that these landmarks are narrated differently indicates that a single physical element may hold multiple values depending on the narration, storytelling approach, historical period, and perspective. This demonstrates that *Jeron Beteng* is structured through complex, multilayered socio-spatial relation that cannot be reduce to a single narrative perspective. The tours also highlight tensions between preservation efforts and contemporary urban interventions, illustrating how physical heritage becomes a contested site within broader placemaking processes.

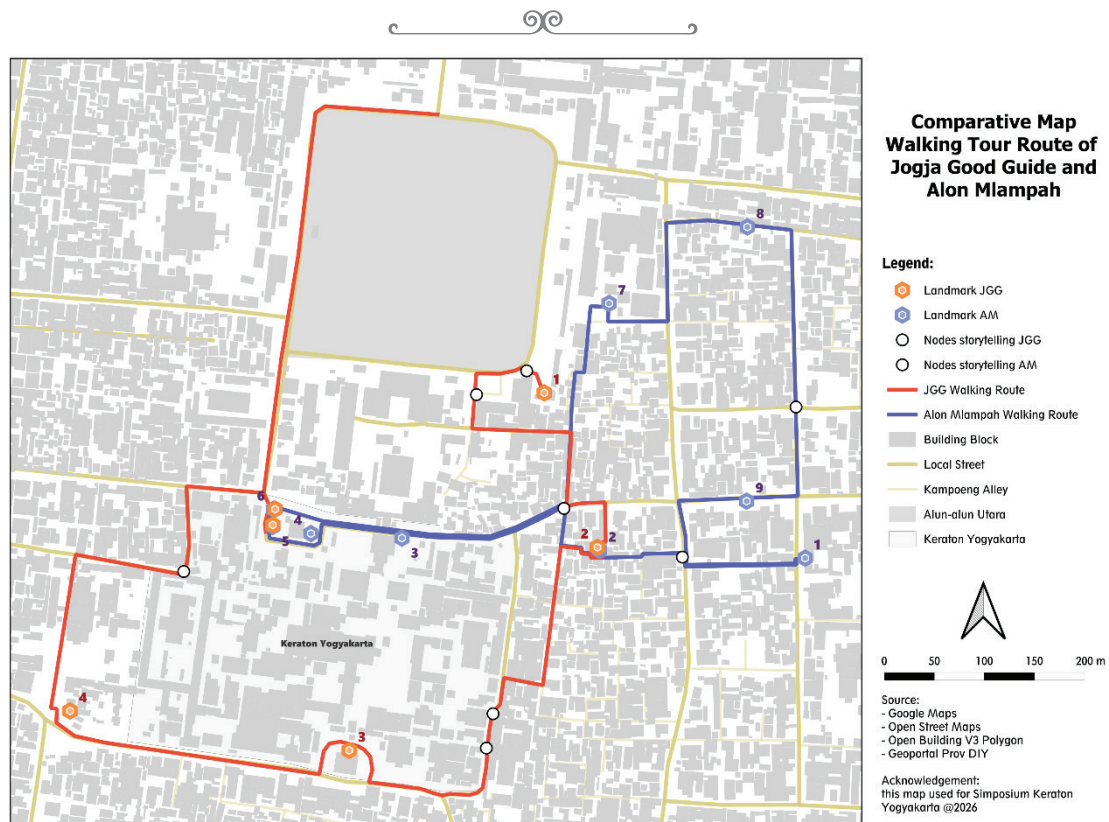


Figure 6. Comparative Route Map of Jogja Good Guide and Alon Mlampah.

Both routes have intersection in 3 landmarks: *Masjid Selo*, *Tugu Jam (Oud Djocdja, Oud Sokkelklok)*, and *Keben (Monumen Prakarsa Serangan Umum 1 Maret 1949)*

Source: Ni'mah, 2026

2.3.Social and Cultural Practices

The final stage of the analysis assesses the participatory impact of these tours through the inclusion of *social and cultural practices*, fostering an understanding of heritage as a living cultural system. This system is sustained by everyday practices, social norms, and collective interpretations (García-Esparza et al., 2023:17; Erek et al., 2025:154). Indicators focusing on participants' cultural experiences and socio-spatial relations to examine how walking tours foster awareness of everyday social dynamic, power dilemma, and contested forms of memory-making (Costa et al., 2025; Erek et al., 2025:139). Ultimately, this section explores how walking tours function as participatory placemaking practices that connect heritage interpretation with community values, collective memory, and the ongoing remaking of urban cultural landscapes.

The analysis underscores the crucial role of social and cultural practices in extending heritage interpretation beyond material forms into everyday socio-spatial interactions. Walking tours in *Jeron Beteng* area function as participatory placemaking practices, negotiating socio-spatial relationships and reshaping cultural identity amid rapid urban transformation.

JGG, frames culture as a dynamic and continually evolving system. Through narratives that highlight the contemporary roles of *abdi dalem* (palace servants), including those working in modern media divisions, JGG connects visitors to the present-day realities of *Jeron Beteng* area. These narratives underscore the adaptive nature of local culture, portraying the area as a

living environment rather than a static heritage enclave. Moreover, JGG acts as a bridge between visitors and local economic actors, such as MSMEs and *angkringan* vendors, fostering community ownership and supporting the sustainability of cultural heritage through participatory engagement.

AM, by contrast, uses the tour as a tool of narrative resistance against the re-sacralization of the area, which can foster exclusivity. By highlighting the disappearance of informal community practices—such as children’s *jemparingan* (traditional archery)—resulting from the fortress’s revitalization, AM illustrates how material-focused placemaking can undermine vital social bonds. The emphasis on profession-based toponyms (e.g., *Bludiran*) further brings everyday social dynamics to the forefront, highlighting aspects often overlooked by the dominant narratives of the *Jeron Beteng* as a Sultanate complex.

Social and cultural practices make walking tours in *Jeron Beteng* area serve as participatory platforms for heritage engagement. Involving participants in local norms, community interactions, and sensory experiences during the tour foster awareness of everyday social dynamics and collective memory. AM emphasizes informal community and local histories, while JGG highlights the adaptive, living nature of culture, showing how heritage is actively negotiated and experienced through participatory engagement.

CONCLUSION

This study concludes that walking tours in *Jeron Beteng* area function as a vital placemaking strategy through the construction of living spatial narratives. By means of curated routes, storytelling, and multisensory engagement, walking becomes an embodied practice that enables visitors to engage with the site both cognitively and emotionally. Within this process, tour guides play a crucial role as mediators and interpreters, translating physical elements—such as landmarks, buildings, open spaces, ornaments, and streets—into meaningful and closer narratives. This form of engagement fosters shared values and collective memories, effectively bridging the gap between the heritage landscape and its participants, including tourists and non-residents.

Furthermore, walking tours function as a powerful medium for reconciling contested narratives within *Jeron Beteng* area. While physical restoration often struggles to cultivate meaningful connections between heritage sites and their communities—and in some cases risks erasing significant historical layers—narrative-driven placemaking fosters emotional and interpretive engagement. Rather than operating merely as tourism products that contribute to cultural commodification and the erosion of authenticity, walking tours actively reconstruct the *place biography* of *Jeron Beteng*. This reconstruction is achieved through spatial sequencing and bodily-spatial engagement that reconnect tangible heritage with intangible values, social practices, and collective memories in everyday life.

The comparative analysis shows that, although providers adopt varied approaches—from emotionally driven, lived experience narrative to thematically structured, archival-based narratives—both approaches effectively foster a sense of place. This process is crucial for sustaining heritage values, as it transforms them into lived experiences. Moreover, through inclusive narratives, community perspectives become integral to the democratization of contested urban heritage landscapes.

The effectiveness of walking tours as a placemaking strategy lies in their ability to activate space as a lived experience through narrative mediation, multisensory engagement, and meaning-memory-making. Narrative mediation bridges philosophical and historical values embedded in physical and spatial elements with everyday life, transforming heritage from abstract knowledge into human-scale, lived nuances in a dialogical manner. Through multisensory engagement, visitors are transformed from passive observers into active participants. This placemaking is further enhanced by intentional spatial sequencing, where curated routes create an emotional flow—such as the transition from narrow alleys to expansive *pendopo*—ensuring that meaning emerges from direct, embodied experience. Through meaning-memory-making, walking tours reactivate historical layers that are no longer physically visible. By employing a form of counter-mapping, these tours reintroduce marginalized or forgotten histories—such as those of residents and *abdi dalem*—into public awareness. Finally, tour guides play a crucial role not only in representing the past but also in dynamically reconstructing it and reinforcing its relevance in contemporary social and cultural contexts.

REFLECTION

This research highlights the limits of physical restoration when it overlooks the multilayered heritage landscape. In the *Jeron Beteng* area, reconstruction efforts aimed at restoring the original form have potential risks of erasing the multiple historical layers. While tour narrations and storytelling uncover and bridge hidden or underrepresented histories, walking tours still rely on physical and spatial cues, requiring policymakers, planners, and academics to safeguard and contextualize them. Moreover, the democratization of urban heritage sites requires recognizing culture and society as dynamic. Emotional and sensory engagement through walking tours enables participants to perceive heritage as a living, functional, and evolving system rather than static artifacts.

RECOMMENDATION

As a placemaking strategy, walking tours highlight the value of embodied experience, narrative mediation, and participatory interpretation in sustaining urban heritage landscapes. This study recommends integrating walking-based narrative approaches into heritage management and urban planning as low-impact, complementary interventions. By fostering democratized narratives and embodied engagement, walking tours provide urban heritage with a replicable model to balance tourism, local identity, and long-term cultural sustainability beyond material preservation.

REFERENCES

- Botezat, O., Varga, Z., Čebren Lipovec, N., Čebren, J., Kırdar, G., & Mihăilă, R. 2025. *Discovering the literary heritage of a place through guided tours and self-guided literary apps walks*. In *Placemaking in practice* (Vol. 3, *The future of placemaking and digitization: Emerging challenges and research agenda*, pp. 184–212). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004691926_010
- Costa, S. C., García-Esparza, J. A., Artopoulos, G., Wehmeier, C., & Rafat-Saleh, M. 2025. *Heritage-based storytelling and narratives: The added value of engagement in placemaking*

- and heritage communication. In *Placemaking in practice* (Vol. 3, *The future of placemaking and digitization: Emerging challenges and research agenda*, pp. 158–183). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004691926_009
- Djukic, A., Stober, D., Tiano, P., Negru, M., Maric, J., Sepe, M., & Economou, A. 2023. *Placemaking and networking of heritage for sustainable tourism*. In *Placemaking in practice* (Vol. 1, *Placemaking in practice – Experiences and approaches from a pan-European perspective*, pp. 11–36). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004542389_004
- Ellery, P. J., Ellery, J., & Borkowsky, M. 2021. *Toward a theoretical understanding of placemaking*. *International Journal of Community Well-Being*, 4, 55–76. <https://doi.org/10.1007/s42413-020-00078-3>
- Ellery, J. P. & Ellery, J. 2019. *Strengthening community sense of place through placemaking*. *Urban Planning*, 4(2), 237–248. <https://doi.org/10.17645/up.v4i2.2004>
- Erek, A., Sepe, M., & Székely, J. 2025. *Intangible heritage – Bridging tangible and intangible heritage through placemaking: Senses of belonging and identification with place*. In *Placemaking in practice* (Vol. 3, *The future of placemaking and digitization: Emerging challenges and research agenda*, pp. 137–157). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004691926_008
- García-Esparza, J. A., Hein, C., Rogac Mijatovic, L., & Negru, M. 2023. *Cultural heritage as an inspiration for placemaking in the historic city: A transversal approach*. In *Placemaking in practice* (Vol. 1, *Placemaking in practice – Experiences and approaches from a pan-European perspective*, pp. 37–59). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004542389_005
- ICOMOS. 2011. *The Valletta principles for the safeguarding and management of historic cities, towns and urban areas*. Paris: International Council on Monuments and Sites
- Khadijah, U. L. S., Winoto, Y., Shuhidan, S. M., Anwar, R. K., & Lusiana, E. 2024. *Community participation in preserving the history of heritage tourism sites*. *Journal of Law and Social Development*, 12(1). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2504>
- Markwell, K., Stevenson, D., & Rowe, D. 2004. *Footsteps and memories: interpreting an Australian urban landscape through thematic walking tours*. *International Journal of Heritage Studies*, 10:5, 457–473. <https://doi.org/10.1080/1352725042000299063>
- Nursanty, E., Rusmiasmoko, D., & Widiyantara, I. W. A. 2024. *Bridging traditions: Placemaking and authenticity in architecture for city branding*. *ALFA: Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design*, 29(3). <https://doi.org/10.2478/alfa-2024-0014>
- Plate, L. 2006. *Walking in Virginia Woolf's footsteps: Performing cultural memory*. *European Journal of Cultural Studies*, 9(1), 101–120. <https://doi.org/10.1177/1367549406060810>
- Rindrasih, E. & Witte, P. 2021. *Reinventing the post-disaster cultural landscape of heritage tourism in Kotagede, Yogyakarta, Indonesia*. *Journal of Heritage Tourism*. 16(2), 136–150. <https://doi.org/10.1080/1743873X.2020.1781870>
- Singleton, A. 2024. *Urban research in film using walking tours and phytogeographic approaches*. *Visual Studies*, (39(1-2), 184–195. <https://doi.org/10.1080/1472586X.2023.2289966>

- Sirko, W., Kashubin, S., Ritter, M., Annkah, A., Bouchareb, Y. S. E., Dauphin, Y., Keyzers, D., Neumann, M., Cisse, M., & Quinn, J. 2021. *Continental-Scale Building Detection from High Resolution Satellite Imagery*. 1–15. <http://arxiv.org/abs/2107.12283>
- Tahir, S.Z.M., Omar, H., & Razak, N.A. 2025. *Navigating heritage: The dynamic roles of tour guides in Kuala Lumpur's heritage walking tours*. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 58(1), 306–314. <https://doi.org/10.30892/gtg.58127-1412>
- Wang, C.-H., & Kao, Y.-T. 2017. *Re-assembling the memorial landscape: The politics of walking tours in Taipei*. *International Journal of Heritage Studies*, 23(10), 1002–1016. <https://doi.org/10.1080/13527258.2017.1362575>
- Wang, Y., & Stock, M. 2024. *World Heritage and/as placemaking: Learning from the Honghe Hani Rice Terraces in China*. *Mondes du Tourisme*, (Online). <https://doi.org/10.4000/tourisme.6729>
- Zejniliović, E., Husukić, E., Đuho, N., Astrouskaya, T., & Manahasa, E. 2023. *Memory and placemaking: Competing memory, forgetting and distorted rediscovery in Eastern European cities*. In *Placemaking in practice* (Vol. 1, *Placemaking in practice – Experiences and approaches from a pan-European perspective*, pp. 79–98). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004542389_007

Yogyakarta Axis Continuity: Temporal – Spatial Comparison With Beijing and Paris

Irina Safitri Zen

Urban and Regional Planning Department,
Kuliyyah of Architecture & Environmental Design,
International Islamic University Malaysia.
Email: irinazen@iium.edu.my

ABSTRACT

Cosmological axes serve as historic urban pivots linking cosmos, rulers, and communities, yet face preservation-adaptation tensions amid megacity sprawl. This study examines Yogyakarta's 6 km imaginary spine (Merapi-Kraton-Indian Ocean) as exemplary "living heritage," surpassing Beijing's rigid 7.8 km Central Axis (feng shui gates-grids) and Paris's static Haussmann radial Axe Historique in adaptive resilience. Employing Wheatley's Pivot framework and Lefebvre's spatial triad—perceived (GIS<3° deviation), conceived (kejawen mandala vs. feng shui), lived (Grebeg rituals vs. imperial sacrifices)—qualitative analysis of archives, UNESCO dossiers, and planning instruments reveals morphological parallels: SVF 0.4-0.8, FAR gradients, H/W ratios ≤ 3.0 across sacred-linear (Yogyakarta), symmetrical-imperial (Beijing), and secular-radial (Paris) spines. Despite territorial contraction from 300,000 to 32,000 hectares via the 1755 Giyanti partitions, Dutch-Japanese colonial losses, wars, and 2006 quakes, Yogyakarta sustains Catur Gatra Tunggal legibility (Kraton-Alun-alun-Mosque-Market). Syncretic **Paugeran** decrees, **Tata Rakit** zoning (BCR 70%, FAR 0.7, H/W ≤ 1.0), and hybrid heritage impact assessment (HIA) embed Grebeg rituals, Abdi Dalem duties, and kampung agency—outperforming top-down peers Yogyakarta's compact buffer zones (251 ha core/1,200 ha buffer) better protect UNESCO Outstanding Universal Value (OUV Criteria ii, iii, vi) and Sustainable Development Goal 11 (resilient cities) compared to Beijing's vast enclosures (589/4,542 ha) or Paris's expansive skylines (365/2,500 ha). These zones guide uneven urban growth (anisotropic rings) while preserving heritage. Yogyakarta proves Asian hybrid governance works for global Historic Urban Landscape (HUL) approaches.

Keywords: Cosmological Axis, Historical Continuity, Heritage Sustainability, Heritage Resilience

INTRODUCTION

Axes serve as urban morphology's foundational principle, defined as “lines established by two points in space, about which forms and spaces arrange symmetrically.” These linear elements form the backbone of city structure, growth, and identity. They control essential functions ranging from traffic flow to profound cosmological symbolism. Historical continuity evaluates the persistence of this symbolism across disruptions. Urban axes manifest in three primary types. Real axes, such as Paris's boulevards, comprise tangible physical paths lined with continuous built fabric (Figure 1).



Figure 1. Paris's Haussmann Radial Axis Source: Cityxee (n.d)

Imaginary axes, exemplified by Yogyakarta's sightlines, rely on conceptual alignments of landmarks and voids rather than streets (Figure 2). Multi-directional axes create diverse, broken fabrics that unify direction across complex urban elements. Yogyakarta's imaginary axis spans 6km along Sangkan Paraning Dumadi (life's origin-to-destination journey) (Figure 2). This alignment connects Mount Merapi through Kraton to the Indian Ocean. It links landmarks and rituals via visual corridors and processional voids, embodying pure *kejawen* spiritual essence. Beijing's real axis stretches 7.8km, following **Kaogongji** principles from Bell/Drum Towers through Forbidden City and Tiananmen to Temple of Heaven (Figure 3). Continuous gates, palaces, and orthogonal grids enforce imperial hierarchy. This manifests Wheatley's "physical pivot of the four quarters." Paris's radial axis, shaped by Haussmann, prioritises Enlightenment ideals of legibility and mobility. Expansive boulevards radiate from the Louvre to the Arc de Triomphe. The Paris Historical Axis symbolises power, prestige, and grand vision, extending toward the Grande Arche de la Défense.

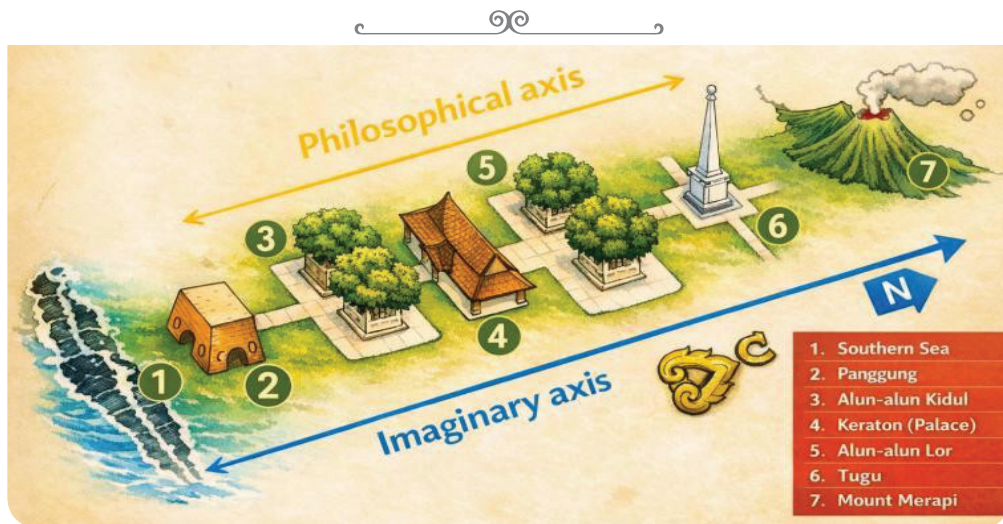


Figure 2. Yogyakarta Cosmological Axis Source: Modified from Syahbudin et al. (2018)

Historic urban axes—Yogyakarta (**Javanese mandala**), Beijing (**Feng Shui Cosmology**), and Paris (**Enlightenment rational vistas**)—represent distinct morphological paradigms. All share UNESCO World Heritage status under different criteria. Each constitutes an **imago mundus** (Wheatley 1971), mediating sacred-secular realms. Accelerating urbanisation erodes these cosmological pivots, creating governance tensions between static preservation and adaptive resilience.



Figure 3. Beijing Central Axis Source: UNESCO

Yogyakarta's *Catur Gatra Tunggal* exemplifies Javanese *kejawen* syncretism into Javanese urban planning (Figure 6). It unites four sacred elements along the philosophical north-south axis (Krapyak-Tugu). These include Kraton (political/symbolic power), Alun-alun (communal

ceremonies), Masjid Gedhe (religious core), and *Pasar Beringharjo* (economic vitality). In Javanese urban planning, Mandala cosmology provides the spiritual and spatial logic for *Catur Gatra Tunggal*, a layout that mirrors the cosmic order by uniting four essential functional elements around a central point. This 1755 *paugeran* layout originates from Islamic Mataram. It structures human life's journey (*sangkan paraning dumadi*) from cosmic origins (Merapi) through the Kraton *axis mundi* to the worldly terminus (Indian Ocean).

Urban axes have long structured cities as material expressions of cosmology, power, and social order. Paul Wheatley conceptualises the urban axis as a ritual *Axis Mundi* (Figure 4). His interpretation of the urban axis as a ritual axis mundus—a symbolic line that connects cosmic order (heaven) with the human and political realm (earth) in early civilisations. *Axis Mundi* is the connection between the Cosmos and the City. The vertical alignment in the image represents the cosmic link between heaven, earth, and the underworld. This symbolic alignment links celestial and terrestrial realms in early civilisations. The orientation of the axis is often aligned with cosmic or geomantic principles, such as: Cardinal directions (north–south/east–west), Sacred mountains or water bodies & astronomical events (solstices or star alignments).

Among the examples are Chinese imperial capitals, Angkor Wat in Cambodia and Yogyakarta's cosmological axis, which includes Mount Merapi and Parangtritis beach (Figure 2). This axis symbolises the spiritual centre of the city, often marked by temples, palaces, or ceremonial monuments. These alignments demonstrate how urban planning embodied cosmological beliefs.

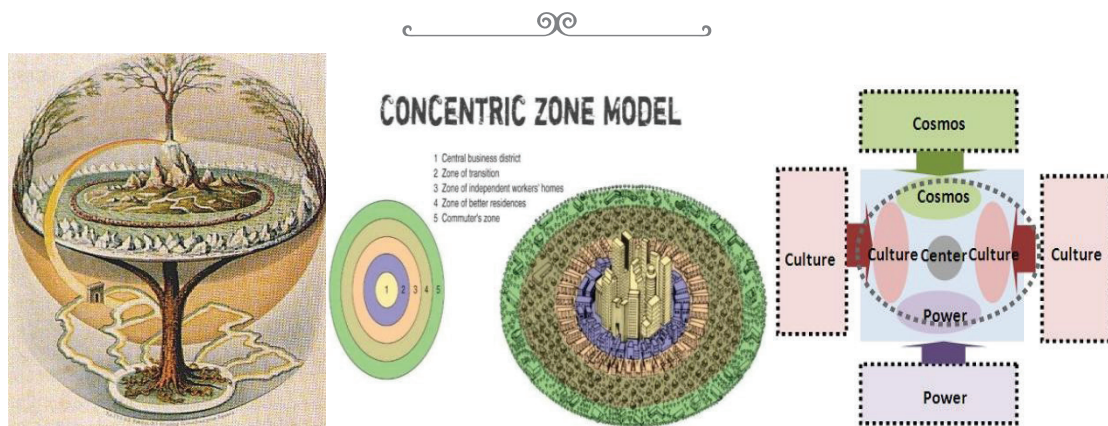


Figure 4. Axis Mundi Figure 5. Mandala Concept Zoning Figure 6. Catur Gatra Tunggal

Source: Susanti & Augustin (2018)

Henri Lefebvre critiques axial forms within modern capitalist urbanisation (Figure 5). His spatial triad frames axes as conceived space (planners/state), perceived space (everyday movement), and lived space (symbolic experience) (Lefebvre, 1991; 2003). Modern capitalist cities prioritise Conceived Space (the planners' logic) over everything else. When a state builds a massive "axial" road, it is trying to force people's Perceived and Lived lives to follow a rigid, top-down script (Figure 7). Lefebvre's critique is a call to reclaim the "Lived Space"—to ensure that the city belongs to the people who inhabit it, not just the people who design it for profit or control. Axes thus become dialectical spaces in which cosmological inheritance intersects with socio-political transformation. His spatial triad frames axes as conceived space (planners/state), perceived space (everyday movement), and lived space (symbolic experience) (Wheatley, 1969; 1971; Lefebvre, 1991; 2003).

However, when applied to modern contexts, Wheatley's theory suggests a tension between:

i. Legibility (Visual Continuity): The desire to maintain the visual and physical continuity of these historic, symbolically potent axes, preserving their original sacral and cosmological meaning. **ii. Relevance (Lived Cosmology):** The pressures of modern urban life, economic needs, and changing social structures may render the original cosmological underpinnings less immediately relevant to the daily lives and practical needs of contemporary inhabitants. This dynamic poses a challenge for urban planners and preservationists in balancing historical symbolic significance with functional, modern urban development.

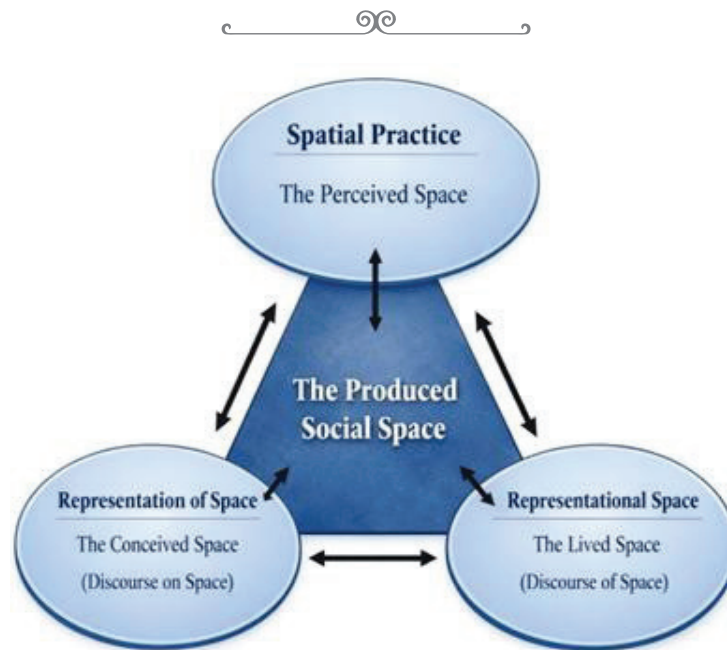


Figure 7. Lefebvre's Conceptual Model of The Production of Space

Scholars bridge Wheatley and Lefebvre by viewing axes as cosmological conduits operationalised through the triad. Stanek (2011) applies Lefebvre to modernist planning, echoing Wheatley's axes as conceived impositions disrupting lived cosmologies. Merrifield (2006) notes axes homogenise perceived space, yet enable counter-hegemonic representational spaces, as in Beijing's hutong appropriations. Wheatley views axes as organising concentric sacred cores through geomantic orientation and ceremonial movement. Paul Wheatley's urban cosmology and Henri Lefebvre's spatial triad differ fundamentally in focus, ontology, and methodology, yet their integration enriches analyses of urban axes. Lefebvre, conversely, sees space as dialectically produced through social practices under capitalism. His triad dissects this: perceived space (everyday routes/movements), conceived space (elite plans/codes), and lived space (symbolic resistances). It's Marxist and dynamic, critiquing how power abstracts space, unlike Wheatley's static sacrality. Hence, when applied together, Wheatley's axes provide the cosmological form (e.g., Beijing's feng shui grid as imperial pivot), while Lefebvre reveals processes shaping it (conceived: Mandate of Heaven codes; perceived: ritual processions; lived: hutong appropriations). Hence, to what extent the urban axes that symbolise line and connect cosmic order (heaven) with the political realm (earth) in the current civilisation, opposed to dynamic urbanism and population growth, has become the major concern for this study. Axes thus become dialectical spaces in which cosmological inheritance intersects with socio-political transformation.

Despite the longstanding centrality of Yogyakarta's cosmological axis in structuring royal authority, spiritual practice, and urban form, its contemporary role under conditions of rapid urbanisation remains under-theorised. **To what extent does contemporary heritage regulation sustain, reinterpret, or dilute the original mandala-based logic linking cosmic order, social hierarchy, and urban form?**

As a result, there is a knowledge gap regarding:

- (1) The historical continuity and shifts in cosmological meaning from the 1755 mandala to the 2024–2025 UNESCO framework. What is the link between the issue of historic continuity and authenticity? How are the layers of history explained?
- (2) What about the contestation between '*tata rakit/paugeran*' and the King's order/*sabdo pandito ratu*?
- (3) How Yogyakarta's experience compares with global cosmological axes in terms of symbolic articulation, spatial-political design, urban morphology and adaptive governance mechanisms. In what ways does Yogyakarta's cosmological axis resemble or differ from other global cosmological axes in its symbolic articulation of cosmic and political order?

Addressing this problem is crucial for developing more nuanced, cosmology-informed approaches to heritage-led urban governance that can preserve cultural identity while responding to rapid change.

Research Imperative

Research fills critical gaps through maps comparison, ethnographic ritual tracking (*Grebeg* frequency/stratification), and comparative policy analysis, hypothesising hybrid governance (kejawen resilience + zoning buffers) as an optimal SDG 11 strategy. Kadipaten Pakualaman's *Catur Gatra Tunggal* variant demonstrates scalable Javanese morphology, suggesting pan-Asian lessons for cosmological urbanism under climate-urban pressures. Studying the **historical continuity of Yogyakarta's cosmological axis** is essential for several interconnected reasons, blending cultural, theoretical, and practical imperatives. Cultural preservation, spanning the axis that existed since 1755, Giyanti's founding through colonial contractions to 2023's UNESCO inscription, embodies unbroken kejawen syncretism (Merapi-Kraton-sea), with *paugeran/tata rakit* overriding disruptions. **Continuity analysis** validates the authenticity of "living tradition" (Nara/Hoi An), countering static Eurocentric norms.

Cosmological Axes: Yogyakarta, Beijing, Paris

Yogyakarta, Beijing, and Paris axes embody divergent paradigms — Southeast Asian syncretism (kejawen *mandala*), imperial centrality (*feng shui* grid), European rationalism (Enlightenment legibility)—shaping cosmology, morphology, and governance across UNESCO frameworks.

Central Research Question:

How do cosmological axes of Yogyakarta, Beijing, and Paris differ in philosophical foundations,

urban spatial morphology, and UNESCO status implications for sustainable urban planning under megacity pressures?

Research Gaps:

Despite descriptive comparisons, systematic analysis remains limited regarding how axes mobilise symbolism (*sangkan paraning dumadi* vs. *yin-yang*), layout-power relations (imaginary vs. real spines), and governance arrangements (*paugeran*-HIA hybrids vs. top-down buffers) to negotiate contemporary pressures (sprawl density >200/km², tourism >5M visitors/yr).

Critical knowledge gaps:

1. **Historical Continuity-Authenticity Link:** How does 1755 *mandala* cosmology persist through **Giyanti** partition, colonial encroachments (Fort Vredeborg 1760), 2006 earthquakes to 2023 UNESCO inscription, validating “living tradition” (Nara Document)?
2. **Internal Contestation:** Tension between *tata rakit/paugeran* zoning (BCR 70%, FAR 0.7) and *sabdo pandito ratu* (King’s cosmological decree)—customary vs. regulatory authority?
3. **Global Comparisons:** How Yogyakarta’s imaginary axis (6km Merapi-Kraton-Sea) differs from Beijing’s tangible 7.8km spine (Bell Tower-Temple) and Paris’s 8km radials (Louvre-Arc) in symbolic articulation, spatial-political design, OUV zonation (251/1,200 ha vs. 589/4,542 ha vs. 365/2,500 ha), and adaptive governance.

Research Objectives

General Objective: To critically investigate how Yogyakarta’s cosmological axis is historically produced, sustained over time and comparatively positioned among global urban heritage cosmological axes.

In more specific objectives;

1. To examine the historical continuity and transformation of Yogyakarta’s cosmological axis from the 1755 *mandala* conception to its 2024–2025 UNESCO World Heritage framing, with particular attention to shifts in symbolic meaning, authenticity and regulatory instruments (Trace **Historical Palimpsest**)
2. To compare Yogyakarta’s cosmological axis with selected global cosmological axes in terms of symbolic meaning, spatial layout, OUV/ zonation and power projection, identifying transferable lessons and context-specific particularities (**Comparative Morphology**)

Significance: Informs cosmology-sensitive HUL frameworks, balancing cultural identity with urbanisation, championing hybrid Asian praxis globally.

Theoretical / Conceptual Framework

At first, the study adopts the historical continuity theory to evaluate the continuity of the Yogyakarta axis from its first establishment, followed by a series of historical events that

test the resilience of the city in thriving through several colonial tests. Historical Continuity Theory anchors analysis of Yogyakarta's axis resilience, positing gradual evolution through linked developments rather than ruptures. **Core thesis:** *kejawen* cosmology endures territorial contractions (Mataram 3,000 km² → 32,000 ha) via *paugeran* layering, connecting 1755 Giyanti *mandala* to 2023 UNESCO buffers despite colonial, Japanese, and seismic disruptions.

Pivot Theory (Cosmological Foundations): Wheatley (1971) posits historic axes as Axis Mundi sacralizing vertical (cosmos-ruler-people) and horizontal (cardinal directions) links. The application of axes embodies symbolic capital; modern pressures test legibility (visual continuity) versus relevance (lived cosmology) (Wheatley, 1971). Further, this study integrates Wheatley's Pivot Theory (1971) and Spatial Regulation Theory (Logan, 2002) for analysing cosmological axes.

RESEARCH METHODS & ANALYSIS

This study adopts a mixed-methods comparative case study design to investigate the historical continuity and contemporary resilience of Yogyakarta's cosmological axis, benchmarked against Beijing's Central Axis (UNESCO 2024) and Paris's Axe Historique. The approach integrates historical institutionalism (path dependency of *paugeran* decrees), morphological analysis (Wheatley 1971), and Lefebvre's spatial triad (perceived/conceived/lived space), operationalised through qualitative archival reconstruction and quantitative GIS metrics.

Analysis Part I – Historical Continuity and Transformation: The analysis for historical continuity will cover the map of 1755 *Mandala* to 2023 UNESCO transformations, analysing symbolic shifts, authenticity validation (*Pathok Negara* markers), and regulatory layering (*paugeran*→HIA (Heritage Impact Assessment) buffers). Reconstruct 1755 *mandala* logic: cosmic order, social hierarchy, spatial practice. Trace key historical moments (colonial, post-independence, late-modern) that reworked the axis. Examine UNESCO inscription and current regulations as new “layers” on the cosmological axis.

Analysis Part II: Comparative cases of cosmological axes will be performed via Yogyakarta axis against Beijing/Paris across symbolic meaning (*kejawen* vs. *feng shui* vs. surveillance), spatial layout (SVF 0.4-0.8, H/W≤1.0), OUV governance (ritual-embedded vs. material integrity), and extracting transferable SDG 11 resilience lessons.

Yogyakarta (hybrid anchor); Beijing (centralised); Paris (market). The data was provided based on UNESCO dossiers, zoning plans of several global UNESCO sites, and articles (Google Scholar). The analysis applies the Excel thematic comparative analysis of cosmological axes: i. Justify selection of comparator axes and criteria (symbolic meaning, layout–power reflection, governance); ii. Compare symbolic articulations of cosmic order and authority; iii. Compare spatial-political designs: axiality, visibility, monumental sequencing; iv. Compare OUV of Cosmological Axes, contemporary pressures (urbanisation, tourism, risk)

RESULTS AND DISCUSSION

The historical continuity of Yogyakarta's cosmological axis raises authenticity debates under UNESCO Nara Document/HoiAn Protocols, as layered interventions (Dutch colonial, Japanese occupation, post-independence sprawl, 1867/2006 earthquakes) blend original 18th-century forms with adaptations, yet sustain *Kejawen* essence via *Paugeran*.

Yogyakarta's north-south cosmological axis—from Mount Merapi through the Kraton palace to the Indian Ocean—exemplifies enduring sacred geography rooted in 18th-century Mataram Javanese cosmology, yet its authenticity sparks debate under UNESCO's Nara Document on Authenticity (1994) and Hoi An Protocols (2005), which prioritize cultural significance over material purity.

Historical Layering: The axis originated in 1755-1756 under Sultan Hamengkubuwono I as a *kejawen* mandala aligning cosmic forces (*gunung-ageng*, *laut kidul*) for harmony. Dutch colonial grids (e.g., 19th-century forts) imposed conceived rationalism; Japanese occupation (1942-1945) added militarized nodes; post-independence sprawl and urbanization fragmented buffers; 1867 and 2006 earthquakes necessitated reconstructions blending timber with concrete. These interventions create a palimpsest: original forms (proportions, orientations) persist amid adaptive materiality.

Authenticity Debates: Nara emphasizes “authenticity” via attributes like form, spirit, and tradition, not unaltered fabric—validating Yogyakarta's layered continuity as testimony to resilience. Hoi An Protocols extend this to Asia's dynamic heritage, endorsing “creative adaptation” if cultural meaning endures. Critics argue post-disaster rebuilds (e.g., 2006) dilute tangible authenticity, yet Pugeran (customary land-use bylaws enforced by palace and adat councils) sustains lived *kejawen* essence: annual rituals (*labuhan*), invisible boundaries, and community stewardship resist commodification.

UNESCO Implications: As a 2023 World Heritage candidate, the axis embodies “historic urban landscape” (HUL) values, where authenticity lies in intangible continuity over static monuments. Pugeran mediates Lefebvre's triad—perceived flows, conceived plans, lived spirituality—ensuring ESG-aligned governance amid tourism pressures. This tension highlights Wheatley's cosmological pivot evolving through social production, prioritising process over pristine origins.

Continuity vs. Authenticity Tension

Post-Giyanti Treaty (1755), Sultan Hamengkubuwono I (Mangkubumi) established Yogyakarta's 6 km north-south cosmological axis as a tangible mandala—Merapi (guardian spirits/heaven)-Tugu-Kraton-Alun-Alun-Parangtritis (Indian Ocean/Ratu Kidul underworld)—mirroring **Jagad Gede** (cosmic order) in **Jagad Cilik** (urban form). Maps confirm unbroken alignment, with 2025 UNESCO core/buffer zones (251 ha + 1,200 ha) overlaying original *pathok* boundary stones and mosques, affirming OUV Criteria ii/iii/vi: Javanese syncretism (animism-Hindu-Buddhist-Islam-Western influences).

This layered palimpsest sustains authenticity per Nara Document — ritual continuity (*Grebeg* processions) outweighs material purity amid post-quake reconstructions and colonial hybrids—distinguishing living Southeast Asian heritage from static Eurocentric models.

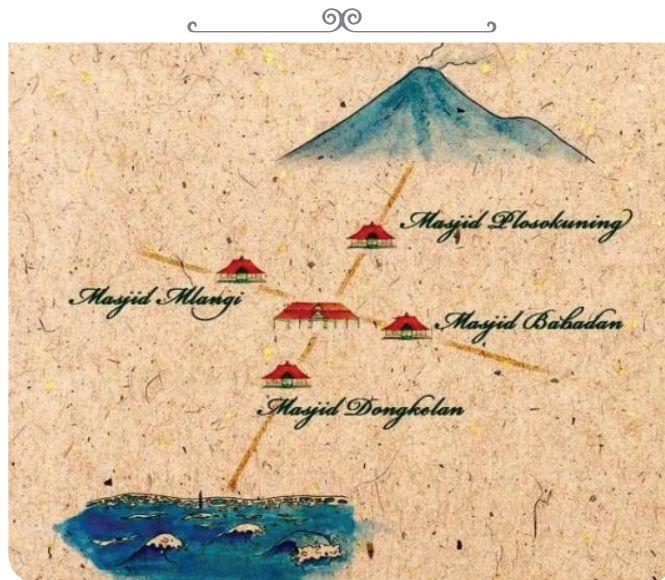


Figure 8. Pathok Mosque Jurisdiction Source: Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. (2016)

Yogyakarta's axis is distinguished by a tightly interwoven set of architectural markers that fuse nature, palace urbanism, and Islamic-Javanese symbolism. The axis territorial map exhibits high continuity from the 1755 mandala to 2025 UNESCO buffers, adapting through contractions (*Mancanegara* losses) while preserving the cosmological core via *paugeran* overriding colonial/modern titles. **Pathok mosques** remain fixed jurisdiction markers, scoring resilient sustainability amid 251 ha sprawl (2014-2018) (Figure 4) (Table 1). Continuity affirmed by spatial/ritual persistence (Tugu-Krapyak alignment, Grebeg processions), but authenticity questioned by reconstructions (Beringharjo Market's 1920s Art Deco, Kraton post-quake timber replicas).



Figure 9. Yogyakarta Axis Based on Javanese Conceptions of Urban Planning

Key issues in the Yogyakarta axis authenticity centre on balancing material fidelity with living continuity amid pressures. Material changes post-quake repairs often substitute concrete for timber originals, sparking debates; Hoi An Protocols endorse Asia-specific vernacular

adaptations (e.g., ijuk thatch replicas) prioritising technique continuity over exact replication. Intangible resilience for rituals like *Grebeg gunung* and toponyms (*Kuthagara* palace hall) sustains **kejawen spirit** (rasa), outweighing form per OUV Criterion vi—UNESCO affirms “spirit of place.

Table 1. Historical Continuity of Yogyakarta Axis (1755–Present)

Period	Territorial Status	Key Sustainability Factors
1755 (Giyanti)	Sultanate awarded southern Mataram lands; paugeran fixed Kraton-axis (Merapi-Krapyak) with Pathok mosques at cardinal points (Mlangi W, Plosokuning N, Babadan E, Dongkelan S) as jurisdiction markers	Tata Rakiting Wewangunan codified sacred boundaries; Abdi Dalem Pathok was appointed as overseer.
Colonial (1811–1945)	Dutch/British occupations respected the axis per treaties; TDNI maps (1925) documented concentric zoning.	Customary law (Kagungan Dalem) preserved land rights despite encroachments.
Independence (1945–)	Yogyakarta Special Region (1950 decree); Sultan as hereditary Governor; 1946–1949, capital role reinforced status.	Hybrid governance blending paugeran with Law No. 11/2010 (Cultural Property).
UNESCO Era (2024–)	Inscribed site with 2023 Management Plan mapping buffers (GSB setbacks, height limits).	HIAs mandatory; Joint Secretariat enforces integrity.

Urban pressures due to high-rises/hotels/informal kampung expansions erode the buffer zone. However, the 2023 Management Plan deploys *Tata Rakit* exemptions/HIAs for layered safeguards, embedding *paugeran* in zoning. **Procession Corridors:** The 6km north-south axis channels major events like **Grebeg Maulud**, where *gunungan* offerings move from Kraton through Malioboro to *Kepatihan*, with zoning ensuring clear sightlines and temporary road closures for thousands of participants. Alun-alun plazas at axis points serve as gathering hubs for these, blending daily public use with sacred functions under *Tata Rakiting Wewangunan* management.

Influence of European Neoclassical elements observed during Sultan Hamengkubuwono VIII (HB VIII). Significant renovations of Keraton Yogyakarta between **1921 and 1939** capture the elements that are often referred to as the **Indische Empire Style** (Figure 10). This architectural shift was a deliberate move to modernise the palace while maintaining its core Javanese spiritual and philosophical identity. Several **key features of HB VIII’s renovations applied in the** European Neoclassical style, which introduced several distinct architectural characteristics to the palace complex:



Figure 10. Influence of European Neoclassical Elements in Keraton Yogyakarta

Source: Authentic Indonesia (n.d.)

- **Classical Greek Columns:** Use of Doric, Ionic, and Corinthian columns replaced or supplemented traditional wooden supports.
- **Structural Elements:** High ceilings, thick walls, and symmetrical layouts characteristic of European “Empire” architecture.
- **Materials:** Incorporation of modern, durable materials such as cast iron, stained glass, and marble to ensure the longevity of the structures.
- **Acculturation:** A “layering” strategy where European textures and shapes were overlapped with Javanese ornaments, creating a unique hybrid aesthetic.

Moreover, the renovation focused primarily on non-sacred, public, or ceremonial areas of the palace, which were also recognised as notable buildings influenced by:

- **Tratag Pagelaran & Tratag Sitihiinggil:** The front pavilions used for grand ceremonies were heavily overhauled with Neoclassical features.
- **Regol Danapratapa:** The main gate leading to the central palace courtyard.
- **Bangsai Manis:** A banquet hall used for entertaining state guests, which adopted European-style dining nuances like the *rijsttafel*.
- **Gedong Jene:** Transformed into an Indische-style building from its previous traditional form.

While HB VIII introduced this foreign aesthetics, the most sacred central areas remained largely preserved in the traditional Javanese style to maintain the palace’s role as the spiritual axis of the kingdom.

Modern Adaptations: UNESCO protections mandate heritage buffers around landmarks (Tugu, Kraton, Krapyak), prioritising ritual access over traffic, fostering tourism while home industries on adjacent streets support economic vitality during ceremonies. This sustains Javanese life-cycle symbolism, with sultanate oversight coordinating crowds for events like *Labuhan* offerings to Mt. Merapi and the Southern Sea. The Yogyakarta’s cosmological axis

territorial evolution, highlighting continuity from its 1755 founding to modern UNESCO protections, sustained by adaptive customary governance despite historical contractions and urban sprawl. This resilience exemplifies living heritage amid dynamic pressures.

Adaptive Contractions: *Mancanegara* (outer realms) losses—to the Dutch (1810s), the Japanese (1942), post-independence decentralisation—shrank administrative holdings from ~3,000 km² to Special Region (32,000 ha today), yet **paugeran** (Sultanate Decrees) overrode colonial/modern land titles along the axis core. Ritual jurisdiction persisted via **Pathok Negara** mosques (fixed 1755 markers), preventing fragmentation.

2014-2018 urban sprawl encroached on Yogyakarta’s 251 ha axis core, causing 2% green space loss and Malioboro hyper-commercialisation. High-rise hotels threatened Tugu-Kraton sightlines. *Tata Rakit Wewangunan* counters via BCR≤70% (Building Coverage Ratio mandates ≥30% open space per plot), height caps (≤15m), and mandatory HIAs. This preserves joglo-style low-rise legibility, sunlight/ventilation, ritual corridors, and *kejawen* micro-macro harmony (*jagad cilik/gede*). *Pathok Negara* mosques (1755 markers) anchor customary jurisdiction. *Paugeran* primacy overrides land titles, mobilising *kampung gotong royong* enforcement against sprawl pressures.

UNESCO 2023 validation: Yogyakarta’s hybrid model—*paugeran* wisdom + participatory zoning—outperforms Beijing/Paris rigid buffers. Dynamic Asian praxis prioritizes cosmological essence over material purity, embedding ***Hamemayu Hayuning Bawana*** (universal harmony) for megacity SDG 11 resilience.

Yogyakarta’s Axis, Authenticity & the Contestation of ‘Tata Rakit/Paugeran’ with King’s Order/*Sabdo Pandito Ratu*

The historical continuity analysis of Yogyakarta’s cosmological axis robustly bolsters its UNESCO authenticity as a “**living tradition**,” diverging from the Venice Charter’s rigid emphasis on unaltered original fabric. Layered evolutions—from pre-1755 Mataram cosmology through colonial hybrids to post-quake reconstructions—sustain *kejawen* essence via unbroken rituals (*Grebeg*), *paugeran* decrees, and *tata rakit* adaptations. Amid rapid urbanisation and sprawl, this dynamic model exemplifies Southeast Asian **heritage resilience**, prioritising intangible spirit and community agency over static monuments for adaptive integrated governance.

Table 2. Layers of History – Temporal Historical Continuity & Authenticity Yogyakarta Axis

Layer (Era)	Interventions/Impacts	Authenticity Effect
Pre-1755 (Mataram)	Imaginary axis precedents (Merapi-sea)	Foundational cosmology (intangible continuity)
1755-1810s	Mandala/ <i>pathok mosques</i>	Tangible core (high
(Ngayogyakarta)	Established	authenticity)
Dutch Colonial	Mancanegara losses, Art	Hybrid forms (stylistic
(1810s-1942)	Deco infill	tension)

Japanese/Independence	Wars damage,	Jurisdictional shifts
(1942-)	Decentralization	(<i>paugeran</i> overrides)
Modern (2006-2023)	Earthquakes, sprawl/hotels; UNESCO inscription	Reconstructions/HIAs (Nara-justified)

These practices reveal the theoretical insights that reveal Lefebvre triad dynamics: perceived rituals (Grebeg), conceived mandala (sabdo), lived kampung adaptations—modelling resilient spatial production amid quakes/sprawl.

Practical relevance amid 2% green loss and tourism surges, documents hybrid governance efficacy (HIAs/gotong royong), informing sustainable development goals, SDG 11 for Sustainable Cities & Communities for Southeast Asian royal cities facing similar pressures. Comparative value benchmarks against Beijing/Paris, highlighting Southeast dynamism in global HUL discourse, filling gaps in non-Western urban morphology. Ultimately, studying the historical continuity of the Yogyakarta axis safeguards intangible OUV while advancing adaptive heritage praxis for megacities.

The historical layers of Yogyakarta's cosmological axis reveal ongoing contestations between *tata rakit/paugeran* (customary spatial/building management systems) and *sabdo pandito ratu* (king's wise decrees/orders), reflecting tensions between decentralised community practices and centralised royal authority. This dynamic interplay ensures resilience while sparking authentic debates.

Pre-1755 (Mataram) : *Tata Rakit* Foundations vs. Early Sabdo

Tata rakit (assembly/cosmological ordering) emerged from Mataram's pre-urban imaginary axis (Merapi-sea), embedding community-led rituals/toponyms. *Sabdo pandito ratu* (king's enlightened words) initiated mandala precedents via sultans' cosmic alignments, but *tata rakit's* intangible cosmology dominated—no contest, as royal orders codified folk practices.

Imaginary Axis Precedents (Merapi-Sea), Foundational Cosmology (Intangible Continuity)

The pre-1755 Mataram Sultanate era (16th-18th centuries) laid the conceptual groundwork for Yogyakarta's axis through inherited Javanese cosmology from Majapahit (13th-16th centuries) and earlier Hindu-Buddhist kingdoms. Yogyakarta's "imaginary axis"—north-south spine—links Mt. Merapi (north: heaven realm, guardian spirits, lingga phallic masculine) to the Southern Sea/Indian Ocean (south: underworld, Ratu Kidul's fertility realm, yoni feminine). Kraton mediates centrally as cosmic pivot. This sacred geography embodies *Sangkan Paraning Dumadi* (origin-to-dissolution life-death cycle) and *Hamemayu Hayuning Bawana* (nurturing world's universal harmony). ***Kampung tata rakit*** zoning enforces ritual buffers along the axis, ensuring ***kejawen*** balance. Colonial grids and modern sprawl overlay without disrupting this palimpsest, where philosophical dualities manifest spatially in Javanese royal town morphology and sultanate governance. No physical city yet, but Karta Pura (sacred centres) and **pathok**

(boundary) concepts prefigured it—intangible continuity via myths, toponyms, and rituals preserved orally, affirmed in UNESCO OUV as pre-1st century CE syncretism roots.

1755-1810s (Ngayogyakarta Hadiningrat) Mandala/Pathok Mosques Established, Tangible Core (High Authenticity)

Sultan Hamengkubuwono I (Mangkubumi) founded Ngayogyakarta post-Giyanti Treaty (1755), materialising the axis as a 6km mandala: Tugu Monument (north marker), Kraton palace (centre), Alun-Alun Kidul (public square), Krapyak pavilion (south gate). Pathok mosques (e.g., Masjid Gedhe Kauman) fixed jurisdictional boundaries, enforcing concentric zoning (inner royal, outer *Mancanegara*). High material/spatial authenticity: original joglo architecture, lava stone markers align precisely with cosmology, minimally altered—core of 2023 UNESCO inscription.

Sabdo Establishes Core, Tata Rakit Implements

Sultan Hamengkubuwono I's *sabdo* post-Giyanti Treaty (1755) decreed the tangible mandala with pathok mosques, asserting *sabdo pandito ratu* through royal land grants. *Tata rakit* operationalised it via kampung lurah assemblies for joglo construction. Minimal contest yielded high synergy: *paugeran* extended *sabdo*, enforcing standards seamlessly. The period that started with the beginning of construction of the royal palace complex, as the process of early urbanism, until the completion of all royal urban symbols.

Dutch Colonial (1810s-1942): Mancanegara Losses, Art Deco Infill, Hybrid Forms (Stylistic Tension), Tata Rakit Resists Sabdo Erosion

British-Dutch interventions (1811 Java War, 1816 return) stripped the outer Mancanegara territories, confining the sultanate to the urban core; Dutch zoning introduced grid infill and Art Deco shophouses (Beringharjo Market 1930s) (Figure 11). Stylistic tension found in European facades clashes **with joglo pendopo**, yet *paugeran* overrode titles, preserving ritual paths—hybrid authenticity per Nara (form evolves, spirit endures) (Figure 12).



Figure 11. Influence of the Dutch in Beringharjo Market Source: Widiastuti (2018)



Figure 12. Joglo Pendopo, Javanese Architecture Authenticity

Source: Gateway of Java. (n.d.).

Tata Rakit Resists Sabdo Erosion

Mancanegara loses diluted **sabdo** territorial control; Dutch grids/Art Deco challenged *tata rakit*. Contest peaked: community *tata rakit* (gotong royong infill) overrode colonial titles via **paugeran** (**sultan's sabdo** reaffirmations), hybrid forms emerged—*tata rakit* won stylistic ground, preserving ritual paths.

The 2nd Period (1812 - 1855) was a period marked by chaotic conditions due to changes in the governance of the Dutch Indies, followed by the British invasion, then the Java War between 1825-1830, until the end of the reign of Sultan Hamengku Buwono V, which all events led to the stagnation of development in Yogyakarta.

The 3rd Period (1855 - 1908) was a period of governance consolidation and reformation carried out by both the Dutch East Indies Government and the Sultanate of Yogyakarta, which brought the early phase of urban modernization.

The 4th Period (1908 - 1945) was a period marked by the peak phase of modern colonial urban development and implementation of ethical politics by the Dutch Indies government, interrupted by the takeover by Japan and ended by the declaration of Indonesian independence (Figure 13).

Japanese/Independence (1942-)

War Damage, Decentralisation, Jurisdictional Shifts (Paugeran Overrides)

The World War II (WWII) of Japanese occupation in Indonesia from 1942 to 1945, the Independence Revolution (1945-49) wars damaged the Kraton/markets.

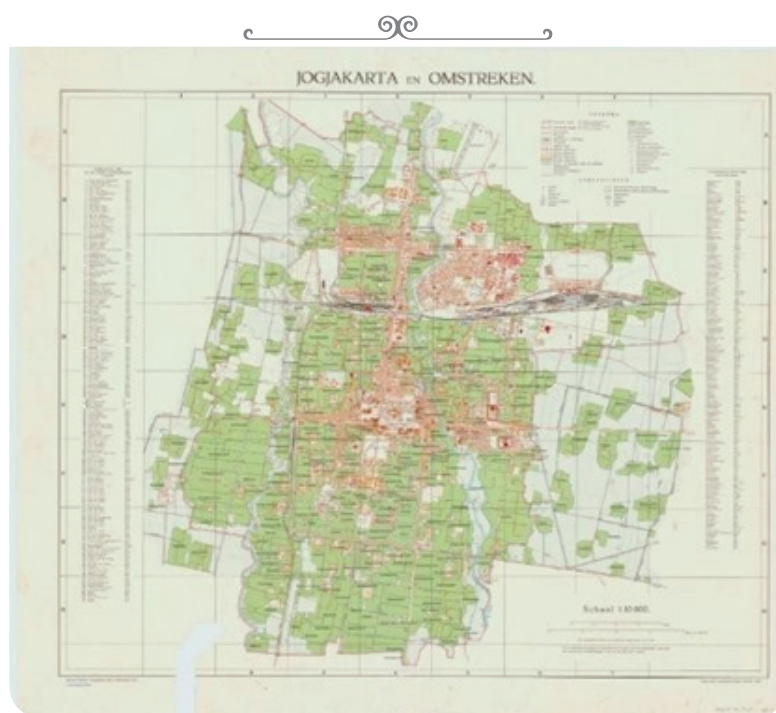


Figure 13. Map of Yogyakarta in 1925 Source: Wihardyanto et al. 2023

This is followed by the post-1950 decentralisation, fragmented administration, where Yogyakarta received Special Region status in 1950. The **Paugeran** decrees legally superseded modern titles/land reforms, maintaining ritual jurisdiction via **pathok**—shifts tested continuity but reinforced intangible resilience (e.g., **Grebeg** festivals unbroken).

Jurisdictional Contest, Paugeran Triumphs

Post-1950 decentralisation and national land reforms contested **Tata Rakit Kampung** tenure, threatening ritual boundaries. Sultans invoked **Paugeran** decrees—culminating in 1950 Special Region status—overriding reforms with royal veto power over axis matters. Tata rakit kampung guardians enforced **pathok** mosque jurisdictions via gotong royong, resolving tensions through hybrid governance: national laws apply generally, but paugeran prevails along the cosmological spine, preserving **kejawen** continuity against modern statutory pressure.

The 5th Period (1945-2012) was a development period in the independence era, beginning with the kingdom unification to the Republic until the special authority stipulation of Keistimewaan in 2012.

Modern (2006-2023): Earthquakes, Sprawl/Hotels; UNESCO Inscription, Reconstructions/ HIAs (Nara-Justified).

The 2006 Yogyakarta earthquake (6,000 deaths, M6.3) and 2023 tremors devastated Kraton **Pendopo** pavilions and axis monuments, necessitating timber replicas using vernacular joglo techniques (ijuk thatch, sappan wood). Sprawl/hotels progressively erode 1,200 ha buffers, threatening legibility. HIAs (mandatory 2012-) assess impacts, while the 2023 UNESCO Management Plan invokes Nara Document authenticity—prioritising Asia-specific methods and community gotong royong input. This justifies inscription as a “living landscape” to sustain the outstanding universal value of the Yogyakarta UNESCO world heritage site for criteria ii, iii and vi. This is where reconstructions sustain ritual use and **kejawen** spirit amid 251 ha core pressures, exemplifying dynamic heritage resilience.

Heritage Impact Assessment (HIAs) Mediate, Tata Rakit Evolves

2006/2023 earthquakes and sprawl pitted development against **Tata Rakit** zoning. UNESCO inscription and mandatory HIAs formalised **Sultan's sabdo** through the 2023 Management Plan. High-rise hotels vs. ritual buffers contest resolved: *paugeran* exemptions—Nara Document-justified for vernacular repairs—prevailed over strict zoning. *Tata rakit* adapted via provincial Perda 5/2019, institutionalising kampung gotong royong enforcement. This balances royal **Sabdo Pandito Ratu** wisdom with community agency, ensuring cosmological continuity amid 251 ha pressures while meeting global heritage standard.

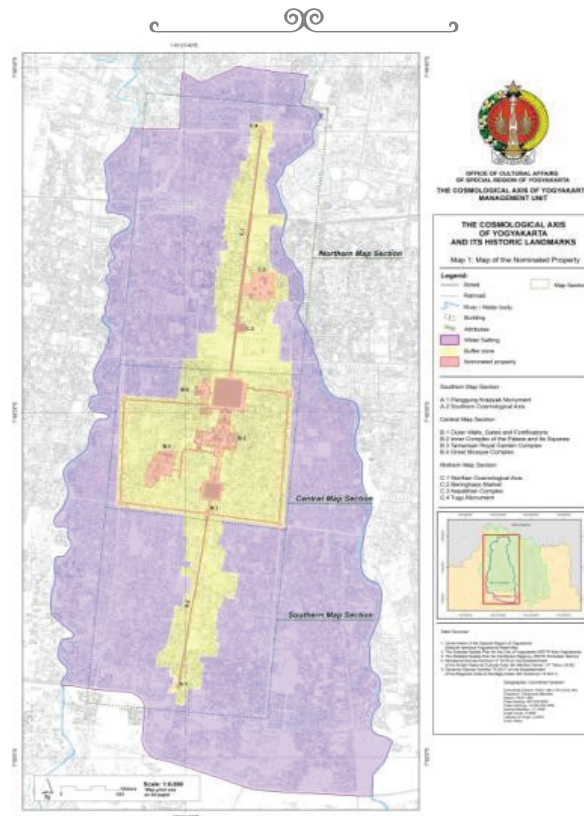


Figure 14. Yogyakarta Axis Source: UNESCO (2023)

The 6th Period (2012-now) began with the special authority granted by the Government of the Republic of Indonesia, marked by the mainstreaming of cultural values of the Yogyakarta Sultanate and the Grand Duchy of Pakualaman as the right of origin of the Yogyakarta Special Province. The analysis of morphology and typology was amplified by the grounded theory method to obtain data inductively, and according to the strategy developed by Strauss and Corbin (1990), it was addressed to get a more systematic approach to the qualitative data. These governance layers form a palimpsest where **paugeran and tata rakit** prioritise cosmological essence over material purity, exemplifying a dynamic Asian heritage that evolves through adaptation rather than static preservation.

Analysis Zonation of Yogyakarta Axes

Yogyakarta's philosophical axis directly enforces modern zoning rules by designating low-density heritage corridors that priorities cultural continuity over high-rise development.

Zoning Restrictions: The axis divides into the Keraton Strategic Area and Philosophical Axis Strategic Area, with core zones limited to $BCR \leq 70\%$, $FAR \leq 0.7$, and $GAR \geq 10\%$ to preserve ritual sightlines and landmarks like Tugu and Kraton. Buffer zones restrict building heights and commercial intensities, harmonising new architecture with traditional Javanese styles while allowing tourism-aligned home industries. **Economic and Preservation Impacts:** Rules channel economic vitality to axis-adjacent streets like Malioboro, boosting tourism without altering heritage forms, under Special Provincial Regulation No. 5/2019 for 2019-2039 land-use plans. Heritage impact assessments since 2012, strengthened in 2022, ensure developments maintain *Catur Gatra Tunggal* synergy, resisting sprawl and centralising green spaces.

Adaptive Enforcement: UNESCO status amplifies protections, coordinating sultanate traditions (*Tata Rakiting Wewangunan*) with provincial oversight to balance modernity, such as flexible road uses for ceremonies, fostering sustainable urban identity. Overall, the analysis concludes that *Tata rakit/paugeran* (decentralised, adaptive) consistently overrides *sabdo pandito ratu* (centralised, symbolic) in practice, ensuring continuity/authenticity as a living palimpsest. The first analysis demonstrates the strength and resilience of the Yogyakarta axis as a UNESCO World Heritage Site exemplar. On the contrary, the weakness reveals the enforcement gaps amid urban sprawl issues. Informs hybrid governance for Southeast Asian heritage. Yogyakarta's philosophical axis continues to define public ceremonial spaces by reserving flexible, low-density corridors for traditional processions and communal rituals.

Comparative Axes Core Concepts, Morphological Impacts, OUV and Governance Paradigms

Yogyakarta, Beijing, and Paris—inscribed 2023 (ii, iii, vi), 2024 (i,ii, iii,iv,vi), and 1991 (i,ii,iv)—exemplify Wheatley's *imago mundi* (1971), mediating cosmos-ruler-community through divergent morphologies amid megacity pressures.

Paul Wheatley's urban cosmology theory and Henri Lefebvre's spatial triad to analyze cosmological axes

The distinct yet complementary applications of Paul Wheatley's urban cosmology theory and Henri Lefebvre's spatial triad to analyse cosmological axes in Yogyakarta, Beijing, and Paris. Wheatley's standalone lens treats each axis as a static sacred pivot: Yogyakarta's as a *kejawen* mandala harmonizing cosmic forces, Beijing's as cardinal centrality enforcing imperial *feng shui* hierarchy, and Paris's as a rational overlay supplanting medieval sacrality (Table 3). Lefebvre's triad alone uncovers dynamic social tensions—juxtaposing lived adat rituals against conceived tourism plans in Yogyakarta, perceived hierarchies homogenized by routines in Beijing, and Haussmann's conceived legibility for surveillance in Paris. Their integration yields holistic insights, such as triad-based metrics measuring syncretic resilience in Yogyakarta, ancient cosmology resisting neoliberal sprawl in Beijing, and lived appropriations reimaging Enlightenment spines in Paris.

Table 3. Paul Wheatley's Urban Cosmology Theory & Henri Lefebvre's Spatial Triad To Analyze Cosmological Axes

Aspect	Wheatley Alone	Lefebvre Alone	Integrated
Yogyakarta Axis	Kejawen mandala pivot	Lived adat vs. conceived tourism	Triad metrics on syncretic resilience
Beijing Axis	Cardinal centrality	Perceived hierarchies homogenized	Cosmology resisting neoliberal grid
Paris Axis	Rational overlay on cosmology	Conceived Haussmann legibility	Lived appropriations of Enlightenment spines

Axes Core Concepts & Morphological Impacts

Yogyakarta, Beijing, and Paris axes differ fundamentally in cosmology, form, and governance, reflecting Southeast Asian syncretism, imperial centrality, and European rationalism (Table 3). **Philosophical Foundations:** Yogyakarta's 6-km north-south axis embodies Javanese *kejawen* harmony (*Sangkan Paraning Dumadi* life cycle, *Hamemayu Hayuning Bawana* balance), linking Mt. Merapi (heaven/lingga) through Kraton palace to Southern Sea (afterlife/yoni). **Beijing's 7.8-km north-south Central Axis** follows Kaogongji geomancy for imperial centrality (Palace of Heavenly Peace to Temple of Heaven), symbolising the Mandate of Heaven. **Paris Axe historique** (8-km east-west) represents Enlightenment rational order and absolutist progression, from Louvre through Champs-Élysées to Arc de Triomphe/La Défense (Table 4).

Axis Profiles and Cosmologies

Yogyakarta (6km Imaginary Axis): *Sangkan paraning dumadi* links Merapi (heaven/lingga) through Kraton-Catur Gatra Tunggal to Southern Sea (underworld/yoni). *Tata Rakit* zoning ($BCR \leq 70\%$, $FAR \leq 0.7$) sustains ritual voids via Provincial Reg. #5/2019, blending *paugeran* with HIA buffers (251/1,200 ha). This ritual confirmed the Lefebvre Triad for representative space. A study by Irawan and Adishakti (2023) examine micro-scale transformations in Saujana Jeron Beteng kampungs flanking Yogyakarta's axis. Their study documents **joglo** modifications adapting to post-2006 quake realities while preserving south-facing *kejawen* cosmology. This lived morphology validates **tata rakit** efficacy ($BCR \leq 70\%$). Such transformations strengthen the axis's Criteria (vi) intangible authenticity, contrasting Beijing's hutong gentrification and Paris's facade uniformity. **Beijing** (7.8km Real Axis): *Kaogongji* geomancy centres Forbidden City between Drum/Bell Towers and Temple of Heaven, enforcing imperial symmetry.

Table 4. Axes Features Comparison & Morphological Implication

Feature	Yogyakarta Axis	Beijing Central Axis	Paris Axe Historique
Philosophy	Javanese spiritual life cycle	Imperial centrality (Kaogongji)	Rationalist order/control
Orientation	North-south (natural: volcano-ocean)	North-south (cosmic: Forbidden City-altars)	East-west (engineered: Louvre-Arc/Grande Arche)
Length/Anchors	6 km; Kraton center, ritual markets/mosques	7.8 km; bilateral symmetry, hutong enclosures	8 km; sequential monuments, radial boulevards (30-70m wide)
Central Element	Kraton (sultan mediator)	Forbidden City (emperor pivot)	Louvre/Étoile (state monuments)
Anchors	Natural (Merapi, ocean)	Symbolic (Drum/Bell Towers)	Engineered (arches, obelisks)
Urban Morphology Impact	Linear ritual corridors, low-rise zones	Bilateral symmetry, gated enclosures	Radial boulevards, uniform facades

Planning Legacy	Heritage zoning restricts high-rises	Living heritage with underground transit	Mobility/commerce model for megacities
Morphology	Low-rise zoning (BCR≤70%), ritual corridors	Gated enclosures, protections legibility/mobility	Uniform facades, vista Haussmann grids for
UNESCO Status	Inscribed 2023-24 as living landscape	Inscribed 2024 as a cultural axis	Partial (Seine Banks 1991); no standalone

The 2021 Regulations preserve hutong buffers despite subways, prioritising visual legibility (589/4,542 ha). **Paris** (8km Radial Axes): Haussmann’s Enlightenment radials (Louvre→Champs-Élysées→Arc) transform medieval mazes into legible boulevards (30-70m wide, uniform 22m facades) for surveillance/commerce post-1848 (Table 4). **Governance and Planning Implications:** Yogyakarta hybridises *Sultanate Pugeran/Tata Rakiting* with provincial regs/HIAs for resilient, community-embedded preservation amid sprawl. Beijing enforces centralised vista controls against commercialisation; Paris uses PLU zoning for economic adaptation but risks skyline erosion from La Défense. Yogyakarta offers a superior heritage model via Lefebvre’s lived space, contrasting others’ monumental stasis (Table 4).



Figure 15. Yogyakarta Axis



Figure 16. Beijing Central Axis

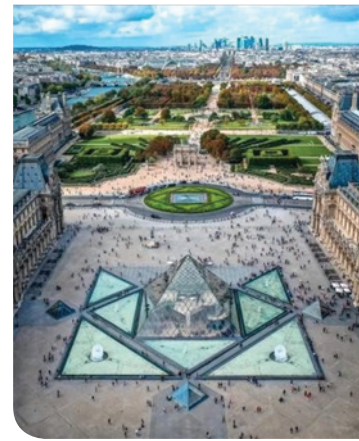


Figure 17. ParisAxis

Source: UNESCO World Heritage Centre. (n.d.)

Similar examples of philosophical axes exist globally, where urban planning is deeply integrated with cultural, spiritual, and symbolic meanings, both historically and in contemporary contexts. The Beijing Central Axis in China is a historic spiritual and urban spine running through the heart of the city, including the Forbidden City and Tiananmen Square. It embodies Confucian principles of neutrality, harmony, and order, reflecting ideals from ancient Chinese classics such as the ‘Rites of Zhou’ (Shao et al., 2025). As a designated World Heritage Site, it remains central to cultural identity and guides urban renewal and conservation efforts (Figure 16).

In France, the Paris Axe Historique (Historical Axis) is a linear urban arrangement stretching from the Louvre to La Défense. Though less cosmological, it expresses Enlightenment and Napoleonic ideals of power, progress, and modernity through monumental design emphasising symmetry and visual perspective (Wakemaan, 2004) (Figure 17). It shaped Paris’s expansion by connecting historic royal sites with modern business districts, serving as a tool for tourism, urban branding, and architectural preservation while accommodating growth.

Yogyakarta: *Kejawen* life-cycle (sangkan paraning dumadi) generates linear ritual corridors (Tugu-Kraton-Merapi) with *tata rakit* low-rise zones ($H/W \leq 1.0$). *Paugeran* zoning resists high-rise encroachment, preserving *Catur Gatra Tunggal*'s authenticity. **Beijing:** Kaogongji imperial centrality enforces bilateral symmetry, gated enclosures (Forbidden City-Temple). Post-1949 underground transit sustains living heritage amid 22M sprawl. **Paris:** Haussmann's Enlightenment rationalism radiates boulevards from the Louvre-Arc, uniform 22m facades enabling surveillance/mobility. ZUP/PLU codes model commerce-optimized megacity legibility. ZUP/PLU codes model commerce-optimized megacity legibility in Paris by enforcing uniform spatial rules that prioritise economic circulation over cosmological symbolism.

ZUP (Zones à Urbaniser par Priorité) is a 1960s French planning tool that created entire new districts from scratch—roads, housing, commerce—with state-backed land expropriation for rapid urbanisation. PLU (*Plan Local d'Urbanisme*): Modern municipal zoning replacing POS, dividing communes into:

- i. **Zone U:** Urban areas with strict height caps (22m Haussmann blocks), density limits, setbacks; View corridors: Protect axial sightlines (Louvre Arc de Triomphe);
- ii. **Uniform facades:** 6-story rhythm enables surveillance/mobility and Commerce;
- iii. **Optimisation:** Wide boulevards (30-70m), standardised blocks maximise retail frontage, parking ratios, and transit access while preventing medieval “maze” congestion



Figure 14. Paris Historiq Axis Source: Guernier (n.d.)

Post-1848 Haussmann redesign transformed Paris into a legible economic machine—crowd control through visibility, commerce through accessibility. Unlike Yogyakarta's ritual *paugeran* or Beijing's imperial *feng shui*, Paris zoning serves capital accumulation: legibility facilitates tax collection, policing, and consumer flows. PLU skylines preserve Haussmann's profit geometry, modelling global megacity legibility where commerce trumps cosmology. The three axes shared challenges in terms of OUV preservation versus density pressures reveal *kejawen* hybridity outperforming imperial rigidity. These axes embed ideology into form—Yogyakarta/Beijing via sacred linearity for harmony, Paris via engineered radials for modernity—guiding zoning, visibility, and resilience today.

Governance Divergences Yogyakarta champions living intangible OUV through a hybrid *abdi dalem*/kampung agency and *Grebeg* processions, negotiating customary-statutory tensions. Beijing/Paris emphasise visual/material integrity via top-down buffers, risking “museumification”

(Logan, 2002). Key Contrast: Javanese dynamism (*paugeran* adaptation) outperforms imperial rigidity, balancing sprawl (>200/km² density), tourism (>5M visitors), and seismic risk via participatory resilience—offering SDG 11 lessons for global HUL implementation.

Challenges for Historical Axes

Due to urbanisation pressures, Yogyakarta faces 2% annual green space loss and sprawl eroding axis legibility (UNESCO 2023 warnings); Beijing contends with hutong demolition/commercialisation; Paris skyline disruptions from La Défense expansions challenge sightlines—comparison reveals adaptive thresholds. Recent UNESCO momentum highlights the Yogyakarta axis (2023) and Beijing axis (2024) inscriptions contrast with Paris’s partial 1991 status, creating a “natural experiment” for post-listing governance amid Heritage Urban Landscape (HUL) shifts. Hence, it is urgent to benchmark living vs. monumental authenticity before commodification sets in (Table 4). Common urgency for urban axis demonstrates megacity sprawl threatens UNESCO OUV of living heritage axes (Criteria ii/iii/vi). However, Yogyakarta’s *paugeran*—blending *kejawen* cosmology with zoning buffers—models hybrid resilience, reconciling ritual vitality with urban dynamism unlike rigid imperial paradigms (Table 4).

Table 5. Zonation Axis Comparison: Yogyakarta, Beijing and Paris

Zone Type	Yogyakarta Axis	Beijing Central Axis	Paris Axis Historique (Seine Banks)
Core Zone	251 ha: Kraton complex, Tugu/Krapyak monuments, Beringharjo Market (BCR≤70%, FAR≤0.7)	~300 ha: Forbidden City, Temple of Heaven, hutong enclosures (height buffers)	~365 ha riverside: Louvre-Tuileries-Concorde-Eiffel (monuments, quays)
Buffer Zone	1,200 ha: Ritual corridors, markets (HIAs, paugeran controls)	2,000+ ha: Vista corridors, symmetrical gates (no high-rises)	2,500 ha: Skyline/sightline protections (PLU facades)
Transition	Provincial strategic units (Malioboro commerce, low-density sprawl integration)	Peripheral hutong/underground transit zones	La Défense extensions (modern adaptive reuse)

Yogyakarta Axis Challenges: Zonation faces rapid urbanisation (4.1% annual growth), informal settlements along Kraton walls, high-rise hotels encroaching the northern axis, and tourism pressures (>50% urban population), eroding legibility despite Tata Rakiting/HIAs; earthquake damage requires customary repairs amid sprawl (Table 5).

Beijing Central Axis Challenges: Urban growth demands balance development/tourism with 2021 Regulations/vista buffers; hutong demolitions, underground transit, and commercial intrusions threaten hutong enclosures/skyline, necessitating central-local coordination post-2024 inscription.

Paris Axe Historique Challenges: La Défense towers (e.g., Coeur Défense) disrupt horizontal skyline/sightlines from Seine core, critiqued by UNESCO; post-COVID office vacancies, monofunctionalism, flooding/climate risks, and 30M tourists strain PLU/ABF facade protections in living landscape.

Authenticity Axes Comparison: Yogyakarta with Beijing and Paris

Yogyakarta employs customary *paugeran* law, Heritage Impact Assessments, and Management Plans to authenticate living rituals (*Grebeg* processions), *joglo* materials, and *kampung* agency, achieving hybrid resilience against earthquakes, sprawl, and tourism through *tata rakit* zoning ($BCR \leq 70\%$). Beijing prioritises vista/height zoning and imperial restorations to preserve Ming-Qing techniques and dynastic rituals, ensuring monumental permanence despite hutong commercialisation threats. Paris implements PLU zoning and buffer sightlines for Haussmann facade uniformity, optimising economic legibility amid high-rise and traffic pressures. Yogyakarta's lived intangible OUV via participatory zoning outperforms Beijing/Paris visual-material integrity, embedding *kejawen* cosmology for superior megacity resilience (Table 5 & 6).

Table 6. Comparative Challenges of Urban Axes: Yogyakarta, Beijing & Paris

Challenge Type	Yogyakarta	Beijing	Paris
Development	High-rises/sprawl/informal	Hutong loss/commercialisation	La Défense verticality/vacancies
Environmental	Earthquakes (2006/2023)	Urban density/transit	Flooding/pollution
Tourism	Unplanned infrastructure	Mass flows post Inscription	30M visitors/locks damage
Governance	Hybrid customary-modern tensions	Central-local coordination	Economic vs. heritage balance

How does Authenticity Sustain?

Traditional management systems support World Heritage authenticity by embedding customary practices, rituals, and community stewardship into formal frameworks, ensuring continuity of spiritual, material, and use values (Table 7). **Material Authenticity:** Yogyakarta and Beijing preserve local materials—Javanese timber/volcanic stone and hutong brick—tied to rituals like *abdi dalem* duties, contrasting Paris's neoclassical stone uniformity imposed by Haussmann for stylistic coherence. **Spiritual/Use Continuity:** Yogyakarta sustains cosmology via *Grebeg* processions and palace rituals along the imaginary axis; Beijing links imperial altars to state events. Paris secularises axes for parades, prioritising circulation over sacrality. **Community Role:** Yogyakarta's *kampung* guardians co-enforce *Tata Rakiting* zoning; Beijing/Paris rely on top-down state/municipal controls without grassroots ritual custodianship. **Yogyakarta's Paugeran and Tata Rakiting.**

Table 7. Authenticity Comparison of Cosmological Axes

Aspect	Yogyakarta	Beijing	Paris
Primary Tools	Customary law + HIAs + MP	Vista/height zoning + restorations	PLU zoning + buffer sightlines
Authenticity Focus	Rituals/materials/com munity	Imperial techniques/ rituals	Facade uniformity/ adaptive reuse
Integrity Threats	Earthquakes/sprawl/ tourism	Commercialisation/ transit	High-rises/traffic
Strengths	Living hybrid resilience	Monumental permanence	Economic legibility

CONCLUSION

This study demonstrates Yogyakarta’s cosmological axis as exemplary “living heritage,” surpassing Beijing’s Central Axis and Paris’s Axe Historique in adaptive resilience. While Beijing enforces rigid imperial symmetry through continuous 7.8km gates and grids, and Paris maintains static. Enlightenment legibility via radial boulevards, Yogyakarta’s 6km imaginary spine—from Merapi through Kraton to the Indian Ocean—endures via *paugeran* zoning and *tata rakit* height controls ($H/W \leq 1.0$). This syncretic Javanese model weathers the 1755 Giyanti partitions, colonial encroachments (Fort Vredeburg), wars, and 2006 quakes, preserving *Catur Gatra Tunggal* (Kraton-Alun-alun-Masjid-Pasar) authenticity better than peers. GIS metrics reveal morphological parallels (SVF 0.4-0.8, FAR gradients) alongside divergences: sacred-linear (Yogyakarta) vs. conceived-symmetrical (Beijing) vs. secular-radial (Paris). Lefebvre’s triad—perceived (GIS $< 3^\circ$ deviation), conceived (*mandala* vs. *feng shui*), lived (Grebeg rituals vs. sacrifices)—bridges theoretical gaps, validating hybrid customary-state governance for SDG 11 resilience. OUV comparisons underscore efficacy: Yogyakarta’s compact 251/1,200 ha buffers outperform Beijing’s expansive 589/4,542 ha enclosures and Paris’s 365/2,500 ha skylines. Policymakers gain scalable HIA/zoning hybrids; scholars, refined triad metrics for megacity HUL. Yogyakarta champions dynamic Asian praxis, affirming heritage as evolving negotiation amid urbanisation, not a frozen relic.

ACKNOWLEDGEMENTS

I extend my deepest gratitude to Prof. Ir. Bakti Bobi Setiawan, MA, PhD, Professor of Urban Planning at Universitas Gadjah Mada, for his invaluable guidance, constructive critique, and unwavering support throughout the development of this article. His expertise in cosmological urbanism and Javanese spatial morphology profoundly shaped the theoretical framework and methodological rigor of this comparative analysis of Yogyakarta, Beijing, and Paris axes.

REFERENCES

- Authentic Indonesia. (n.d.). The Kraton of Yogyakarta. <https://authentic-indonesia.com/activities/the-kraton-of-yogyakarta/> (Retrieved on 8 January 2025)
- Atlantis Press. (2020). Urban axial planning and heritage continuity: Case studies. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.
- Cityxee. (n.d.). Arc de Triomphe in Paris: An iconic symbol of French pride. *Paris Cityxee*. <https://paris.cityxee.com/en/arc-de-triomphe-in-paris-an-iconic-symbol-of-french-pride/> (Retrieved on 6 January 2025)
- Erdi-Lelandais, G. (Ed.). (2014). *Understanding the city: Henri Lefebvre and urban studies*. Cambridge Scholars Publishing.
- Gateway of Java. (n.d.). Understanding Joglo: Traditional Javanese architecture rooted in philosophy. <https://gatewayofjava.com/understanding-joglo-traditional-javanese-architecture-rooted-in-philosophy/>
- Guernier, P. (n.d.). The historical axis of Paris seen from the Louvre. *French Moments*. <https://frenchmoments.eu/the-historical-axis-of-paris-seen-from-the-louvre/> (Retrieved on 6 January 2025)
- Irawan, D. S., & Adishakti, L. T. (2023). Transformation of heritage architecture in Saujana Jeron Beteng, Yogyakarta [Conference presentation]. Javanese Symposium, Yogyakarta, Indonesia.
- Kostof, S. (1991). *The city shaped: Urban patterns and meanings through history*. Thames & Hudson.
- Kusuma, A. (2025). Cultural diplomacy and governance: The Papatih Dalem's role in promoting Javanese values within Indonesia's national policies. International Symposium on Javanese Culture, Kraton Yogyakarta. <https://symposium.kratonjogja.id/doc/Selected%20Paper%20Round%201.pdf>
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell.
- Lefebvre, H. (2003). *The urban revolution* (R. Bononno, Trans.). University of Minnesota Press.
- Madanipour, A. (1996). *Design of urban space: An inquiry into a socio-spatial process*. Wiley.
- Merrifield, A. (2006). *Henri Lefebvre: A critical introduction*. Routledge.
- RSI International. (2023). Repairing actions in urban visual axes for preservation and continuity of regional identity. *International Journal of Research and Scientific Innovation*, 10(1), 156–171.
- Susanti, W. D., & Agustin, D. (2018). Identification of Catur Gatra Tunggal Concept at Alun-Alun Malang Today's. *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 316-321.
- Society and Space. (2020). Lefebvre and planetary urbanization. *Environment and Planning D: Society and Space*.
- Stanek, Ł. (2014). Henri Lefebvre and the theory of the production of space. In *Understanding the city*. Cambridge Scholars Publishing.
- Stanek, Ł. (2011). *Henri Lefebvre on space: Architecture, urbanism, and the production of theory*. University of Minnesota Press

- Wakeman, R. (2004). Nostalgic modernism and the invention of Paris in the twentieth century. *French Historical Studies*, 27(1), 115-144.
- Shao, G., Zhang, J., Bu, L., & Wang, J. (2025). Cross-Cultural Perceptual Differences in the Symbolic Meanings of Chinese Architectural Heritage. *Buildings*, 15(19), 3506. <https://doi.org/10.3390/buildings15193506>
- Syahbudin, A., Meinata, A., Hanindita, A. S. H., & Mulyana, B. (2018, December). City of Philosophy: Evaluation of Tree Philosophy and its architecture in Yogyakarta's philosophical axis towards UNESCO World Heritage. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Tropical Agriculture* (pp. 249-274). Cham: Springer International Publishing.
- UNESCO World Heritage Centre. (n.d.). The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks: Gallery. <https://whc.unesco.org/en/list/1671/gallery/>
- UNESCO. 2023. The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks - Maps of the inscribed property. <https://whc.unesco.org/en/documents/203744>
- Wheatley, P. (1969). The concept of urbanism. In R. P. Ucko et al. (Eds.), *Man, settlement and urbanism* (pp. 601–637). *Duckworth*.
- Wheatley, P. (1971). The pivot of the four quarters. *Aldine*.
- Widiastuti, N. (2018, April 14). Beringharjo Market extends opening hours. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/travel/2018/04/14/beringharjo-market-extends-opening-hours.html>
- Wihardyanto, D., Sarwadi, A., & Djunaedi, A. (2023). The development of the Dutch colonial settlement in the City of Yogyakarta after the implementation of the Decentralisatie Wet policy (1903–1942). *Jurnal Arsitektur*, 9(2), 128–142. <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ja/article/view/2833>

